PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

"PASER JUNTAS"

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangungan jangka menengah nasional.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
    a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
    b. penyusunan RKPD; dan
    c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
    c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
    e. BAB V : Penutup.
(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan kooordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
    a. bencana alam;
    b. goncangan politik;
    c. krisis ekonomi;
    d. konflik sosial budaya;
    e. gangguan keamanan;
    f. pemekaran Daerah; atau
    g. perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (640.01/31/5/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mencerminkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam kerangka hukum Indonesia. Penyerahan urusan pemerintahan ke daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan kondisi, karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pentingnya sinergi antara pembangunan nasional dan daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Proses pembangunan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal, sumber daya alam, serta budaya yang ada di daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun. RPJM Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta arah pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, termasuk RKP Daerah. Proses penyusunan RPJM Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial.

RPJM daerah yang ditetapkan melalui Peraturan daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Paser Tuntas: Tangguh Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah terdiri dari 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, kerangka RPJM Daerah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJM Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar kabupaten/kota dan provinsi dan antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 100.

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	**1**
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	4
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	9
	1.5 Sistematika Penulisan	I	10
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II**	1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	38
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	69
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	90
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II	114
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	115
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	148
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	153
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	181
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	181
	2.3.2 Isu Strategis	II	198
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi	III	1
	3.1.2 Misi	III	3
	3.1.3 Tujuan dan Sararan	III	5
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	III	37
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	37
	3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	65
	3.2.3 Dukungan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 Terhadap Program Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Nasional tahun 2025-2029	III	150
	3.2.4 Arah Kebijakan Kewilayahan	III	156
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	IV	1
	4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV	50
	4.2.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan	IV	50
	4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	51
	4.2.3 Indikator Kinerja Daerah	IV	53
BAB V	**PENUTUP**	**V**	**1**
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser	II	2
Tabel II.2	Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Paser	II	3
Tabel II.3	Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan di Kabupaten Paser	II	4
Tabel II.4	Jumlah Pegunungan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser	II	5
Tabel II.5	Jumlah Sungai Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser	II	6
Tabel II.6	Kondisi Klimatologi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	7
Tabel II.7	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser Tahun 2024	II	8
Tabel II.8	Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2020-2024	II	8
Tabel II.9	Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	9
Tabel II.10	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi	II	10
Tabel II.11	Luas dan Sebaran Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Paser	II	11
Tabel II.12	Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	12
Tabel II.13	Perhitungan Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser Tahun 2019	II	15
Tabel II.14	Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Paser	II	18
Tabel II.15	Data Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kab. Paser Tahun 2021 - 2024	II	19
Tabel II.16	Pembangunan Ketahanan Air di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	24
Tabel II.17	Populasi Ternak Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	26
Tabel II.18	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	27
Tabel II.19	Persentase Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	28
Tabel II.20	Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Paser 2020-2024	II	29
Tabel II.21	Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser	II	30
Tabel II.22	Penurunuan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	32
Tabel II.23	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	33
Tabel II.24	Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatandi Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	33
Tabel II.25	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	35
Tabel II.26	Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	35
Tabel II.27	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	36
Tabel II.28	Proyeksi Kependudukan di Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	II	37
Tabel II.29	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)	II	39

Tabel II.30	Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	43
Tabel II.31	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Keluarga dan Individu (Status Kesejahteraan) Per Kecamatan Di Kabupaten Paser, Tahun 2024	II	43
Tabel II.32	Tingkat Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	46
Tabel II.33	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	49
Tabel II.34	Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	50
Tabel II.35	Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	55
Tabel II.36	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	56
Tabel II.37	Pembangunan Literasi dan Numerasi Masyarakat Kabupaten Paser Tahun 2021-2024	II	56
Tabel II.38	Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser 2024	II	61
Tabel II.39	Indikator Pembangunan Gender di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	62
Tabel II.40	Pembangunan Masyarakat Sejahtera dan Inklusif di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024	II	67
Tabel II.41	Perkembangan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	69
Tabel II.42	Rasio Ketergantungan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	70
Tabel II.43	Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Paser Tahun 2021-2024	II	71
Tabel II.44	Perkembangan Bidang Olahraga Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	71
Tabel II.45	Pembangunan Produktivitas Perekonomian Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	72
Tabel II.46	Pembangunan Produktivitas Perekonomian Kepariwisataan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	73
Tabel II.47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	75
Tabel II.48	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	76
Tabel II.49	Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser	II	77
Tabel II.50	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	78
Tabel II.51	Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	79
Tabel II.52	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	80
Tabel II.53	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	81
Tabel II.54	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Paser Tahun 2021-2024	II	83
Tabel II.55	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	83
Tabel II.56	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Kabupaten Tahun 2020-2024	II	85

Tabel II.57	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	86
Tabel II.58	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Paser	II	87
Tabel II.59	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	88
Tabel II.60	Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2022	II	91
Tabel II.61	Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser Tahun 2023-2024	II	91
Tabel II.62	Perolehan Opini BPK, LPPD dan AKIP Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	95
Tabel II.63	Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 - 2024	II	96
Tabel II.64	Pembangunan Keamanan Ketertiban Umum di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	96
Tabel II.65	Kondisi Demokrasi di Kabupaten Paser Tahun 2024	II	97
Tabel II.66	Jumlah dan Macam Retribusi Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	98
Tabel II.67	Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Paser	II	98
Tabel II.68	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2024	II	99
Tabel II.69	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	100
Tabel II.70	Skala Interval Otonomi Fiskal	II	115
Tabel II.71	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	116
Tabel II.72	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	124
Tabel II.73	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	130
Tabel II.74	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	132
Tabel II.75	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	140
Tabel II.76	Rasio Lancar Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	144
Tabel II.77	Rasio Utang Kabupaten Paser Tahun 2020–2024	II	145
Tabel II.78	Rasio Utang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Paser Tahun 2020–2024	II	146
Tabel II.79	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Paser Tahun 2020 – 2024	II	146
Tabel II.80	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Paser Tahun 2020 – 2024	II	148
Tabel II.81	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	149
Tabel II.82	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	151
Tabel II.83	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	152

Tabel II.84	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	152
Tabel II.85	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)	II	160
Tabel II.86	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	167
Tabel II.87	Proyeksi APBD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	170
Tabel II.88	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	177
Tabel II.89	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	179
Tabel II.90	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	179
Tabel II.91	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	180
Tabel II.92	Permasalahan Perurusan Kabupaten Paser	II	195
Tabel II.93	Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kewilayahan Terhadap Provinsi Kalimantan Timur	II	206
Tabel II.94	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2025-2045	II	213
Tabel II.95	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2025-2045	II	216
Tabel II.96	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Paser	II	220
Tabel II.97	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Paser	II	221
Tabel II.98	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Paser	II	222
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029	III	5
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	III	9
Tabel III.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser	III	22
Tabel III.4	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Strategi Utama Kabupaten Paser	III	38
Tabel III.5	Penahapan Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030	III	50
Tabel III.6	Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2026-2030	III	57
Tabel III.7	Keterkaitan Misi dan Arah Kebijakan KabupatenPaser	III	60
Tabel III.8	Program Bupati Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	III	65
Tabel III.9	11 (SEBELAS) PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2025-2030	III	67
Tabel III.10	Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	III	115
Tabel III.11	Penyelarasan Program Strategis Nasional RPJMNTahun 2025-2029 dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	III	150
Tabel III.12	Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	III	152
Tabel III.13	Penyelarasan Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Makro RPJMD Kabupaten Paser	III	156

	Tahun 2025-2029		
Tabel III.14	Capaian Indikator Makro Kabupaten Paser	III	161
Tabel III.15	Pengembangan Kawasan Terpadu Pada Lanskap Perhutanan Sosial di Kabupaten Paser	III	178
Tabel III.16	Strategi dan Aksi Utama RAD-PG Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	III	181
Tabel IV.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2030	IV	2
Tabel IV.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	IV	50
Tabel IV.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	IV	51
Tabel IV.4	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029	IV	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I	5
Gambar II.1	Diagram Penentuan Daya Dukung Air	II	14
Gambar II.2	Peta Ketersediaan Air Kabupaten Paser	II	16
Gambar II.3	Peta Kebutuhan Air Kabupaten Paser	II	17
Gambar II.4	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser	II	17
Gambar II.5	Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Paser	II	20
Gambar II.6	Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Paser	II	20
Gambar II.7	Peta DDTLHS Status Pangan Kabupaten Paser	II	21
Gambar II.8	Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029	II	168
Gambar II.9	Isu Global	II	199
Gambar II.10	Isu Strategis Nasional	II	201
Gambar II.11	Rencana Spasial Arah Perkembangan Daerah	II	218
Gambar III.1	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Paser dengan Misi RPJMN	III	4
Gambar III.2	Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Paser	III	44
Gambar III.3	Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Kalimantan Timur Pada RPJMN 2025-2029	III	160
Gambar III.4	Peta Prioritas Wilayah	III	163
Gambar III.5	Kampung Buah di Kecamatan Tanah Grogot	III	164
Gambar III.6	Wisata Mangrove Lati Tuo Klempang Sari	III	165
Gambar III.7	Komoditi Kelapa Sawit	III	167
Gambar III.8	Proses Pembuatan Sagu di Kecamatan Pasir Belengkong	III	168
Gambar III.9	Panen Rumput Laut Gracilaria di Desa Maruat Kecamatan Long Kali	III	169
Gambar III.10	Pengembangan Sentra Buah di Kecamatan Batu Sopang	III	171
Gambar III.11	Kopi Paser Khas Desa Uko	III	172
Gambar III.12	Gunung Boga di Kecamatan Muara Samu	III	173
Gambar III.13	Panen Jagung Perdana di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau	III	174
Gambar III.14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kecamatan Tanjung Harapan	III	176

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024	II	23
Grafik II.2	Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	25
Grafik II.3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/ PoU) di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024		25
Grafik II.4	Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	31
Grafik II.5	PDRB per Kapita ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)	II	41
Grafik II.6	Angka Kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Persen)	II	42
Grafik II.7	Indeks Gini di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	45
Grafik II.8	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	46
Grafik II.9	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	48
Grafik II.10	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)	II	50
Grafik II.11	Prevalensi Stunting di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024	II	51
Grafik II.12	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	51
Grafik II.13	Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	52
Grafik II.14	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	53
Grafik II.15	Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Paser Tahun 2020-2023	II	53
Grafik II.16	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)	II	54
Grafik II.17	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)	II	55
Grafik II.18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)	II	59
Grafik II.19	Cakupan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Paser Tahun 2022-2024	II	64
Grafik II.20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) di Kabupaten Paser Tahun 2021-2023	II	66
Grafik II.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	74
Grafik II.22	Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	75
Grafik II.23	Kondisi Jaringan Internet Kabupaten Paser	II	76
Grafik II.24	Jumlah Investor di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	79
Grafik II.25	Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	82
Grafik II.26	Perkembangan Disparitas Harga di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	89
Grafik II.27	Rasio Pajak Terhadap PDRB di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	90
Grafik II.28	Hasil Evaluasi Nilai AKIP Kabupaten Paser Tahun 2020-	II	92

	2024		
Grafik II.29	Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Paser Tahun 2022-2024	II	93
Grafik II.30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	93
Grafik II.31	Nilai APIP Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	94
Grafik II.32	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	117
Grafik II.33	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	118
Grafik II.34	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)	II	119
Grafik II.35	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)	II	120
Grafik II.36	Komponen Komponen Pendapatan Tranfer Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)	II	120
Grafik II.37	Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	121
Grafik II.38	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)	II	122
Grafik II.39	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	122
Grafik II.40	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	123
Grafik II.41	Perkembangan Belanja Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	125
Grafik II.42	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	126
Grafik II.43	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	127
Grafik II.44	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Paser Tahun 2020-2024	II	127
Grafik II.45	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Paser Tahun 2020-2024	II	128
Grafik II.46	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	129
Grafik II.47	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024	II	131
Grafik II.48	Target Komposisi PAD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030	II	158
Grafik II.49	Target Dana Perimbangan Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (juta rupiah)	II	158
Grafik II.50	Target Belanja Operasi Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	163
Grafik II.51	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Paser Tahun 2026-2030	II	164
Grafik II.52	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	165
Grafik II.53	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	II	183
Grafik II.54	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	II	185
Grafik II.55	Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Paser dengan	II	186

	Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024		
Grafik II.56	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023	II	187
Grafik II.57	Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar terhadap Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	II	188
Grafik II.58	Indeks Gini Kabupaten Paser se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	II	190
Grafik II.59	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Paser	II	221
Grafik II.60	Luas Kawasan Budidaya	II	222

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

BAB I
PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Paser yang terletak di bagian selatan Kalimantan Timur memiliki posisi strategis yang mendukung aktivitas perdagangan dan aksesibilitas ke berbagai daerah di Kalimantan. Daerah ini kaya akan sumber daya alam, seperti tambang batu bara serta hutan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk flora dan fauna endemik khas Kalimantan. Dengan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan, potensi tersebut dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Selain kekayaan alamnya, Kabupaten Paser juga dikenal sebagai "Bumi Daya Taka," yang berarti tanah persatuan dan kebersamaan, mencerminkan identitas masyarakatnya yang harmonis.

Kabupaten Paser menawarkan lanskap alam yang beragam, mulai dari pegunungan hingga dataran rendah dan pesisir pantai yang memanjang. Sungai-sungai besar seperti Sungai Kandilo memberikan kesuburan tanah serta menopang kehidupan masyarakat. Selain itu, kekayaan budaya seperti tradisi Suku Paser, upacara adat, tarian tradisional, serta kerajinan tangan seperti tenun ikat menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap warisan leluhur yang terus dijaga dan dilestarikan.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang valid, pembangunan diarahkan untuk menjawab isu strategis lokal, provinsi, hingga nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang hingga jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2025-2029 menjadi dokumen strategis yang mengarahkan Perangkat Daerah dalam merumuskan program dan target yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

Kepemimpinan Bapak Dr. Fahmi Fadli sebagai Bupati dan Bapak H. Ikhwan Antasari, S.Sos sebagai Wakil Bupati periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 akan menjadi tonggak penting dalam implementasi RPJMD. Sebagai tahap awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, RPJMD ini dirancang untuk mengoptimalkan sinergi antarsektor serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan arah transformasi yang diusung. Dengan dilantiknya kepala daerah baru, pemerintah Kabupaten Paser memiliki waktu enam bulan untuk menetapkan RPJMD tersebut menjadi peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Paser yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dengan adanya Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

1) *Teknokratik,* dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3) *Politis,* dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD; dan
4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*.
5) *Holistik-tematik*, Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Paser mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor.
6) *Integratif,* Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan.
7) *Spasial,* Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Paser, pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penyusunan RPJMD memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser. RPJMD menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Paser menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan

pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan yang berlaku yaitu:

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang¬Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9); dan

22 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 11).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

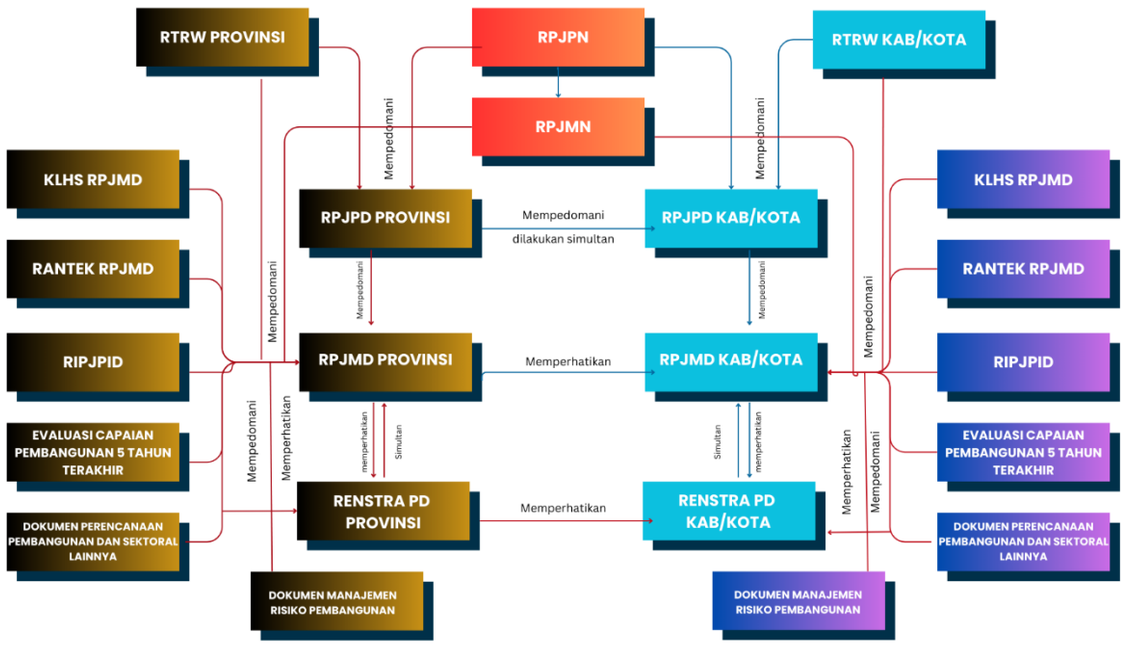

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat berikut ini:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mencerminkan keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD Kabupaten Paser harus disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN untuk memastikan sinergi program, efisiensi sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Paser berfungsi sebagai turunan dari RPJMN yang diadaptasi sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan spesifik daerah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Paser tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target nasional, tetapi juga menjadi sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menunjukkan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan tingkat provinsi. Sebagai bagian dari wilayah administratif Kalimantan Timur, RPJMD Kabupaten Paser harus merujuk dan menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi agar program dan kegiatan yang direncanakan di tingkat kabupaten dapat mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi. Sinergi ini mencakup berbagai sektor, seperti peningkatan konektivitas antarwilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan. Dengan adanya hubungan yang harmonis ini, RPJMD Kabupaten Paser tidak hanya menjadi dokumen perencanaan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan regional Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan berdaya saing.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2025-2045

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2045 mencerminkan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Paser 2025-2045 merupakan dokumen strategis yang menggambarkan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan sektor ekonomi dan sosial. RPJMD, yang memiliki cakupan lima tahun, berfungsi sebagai turunan dan implementasi dari RPJPD, dengan penyesuaian terhadap dinamika dan kebutuhan aktual yang berkembang di tingkat daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Paser harus mencerminkan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJPD, dengan memfokuskan pada pencapaian target-target tahunan yang lebih terukur, sementara tetap menjaga konsistensi dengan visi jangka panjang yang terkandung dalam RPJPD.

Sinergi antara kedua dokumen ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pada periode RPJMD memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih besar. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Paser tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi alat untuk merencanakan pembangunan lima tahunan, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sejalan dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Paser tahun 2025-2045.

d. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Paser

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser sangat penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pengelolaan ruang wilayah yang optimal. RPJMD berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur, dalam periode lima tahun. Sementara itu, RTRW Kabupaten Paser berfungsi sebagai pedoman dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi aspek alokasi ruang untuk pemukiman, kawasan industri, kawasan konservasi, hingga jalur transportasi.

Untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, RPJMD Kabupaten Paser harus mengacu pada kebijakan dan arahan dalam RTRW, agar semua kegiatan pembangunan tidak hanya terfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan tata ruang yang ada dan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Dengan adanya hubungan yang erat antara RPJMD dan RTRW, setiap langkah pembangunan yang diambil di Kabupaten Paser dapat berlangsung dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi penggunaan lahan, dan peningkatan kualitas ruang hidup masyarakat, sehingga pembangunan yang tercapai tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberi dampak positif bagi masa depan daerah.

e. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Paser berperan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra setiap perangkat daerah disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hubungan ini memastikan adanya sinergi antara prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan dengan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Melalui Renstra, perangkat daerah menerjemahkan kebijakan strategis dalam RPJMD menjadi langkah-langkah operasional yang terukur, sehingga target pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara efektif dan terintegrasi.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KLHS berperan sebagai alat analisis strategis yang mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan, program, dan kegiatan dalam RPJMD. Melalui KLHS, RPJMD Kabupaten Paser dapat mengakomodasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Integrasi KLHS dalam RPJMD juga memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser memiliki hubungan erat dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). Sebagai dokumen strategis lima tahunan, RPJMD menjadi landasan dalam mengarahkan pembangunan di berbagai sektor, termasuk IPTEK, untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

RIPJPID berfungsi sebagai panduan teknis dan operasional dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang spesifik terkait pengembangan IPTEK. Sinergi antara RPJMD dan RIPJPID memastikan bahwa pembangunan IPTEK tidak hanya selaras dengan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian target yang lebih luas, seperti daya saing regional, inovasi berbasis lokal, dan keberlanjutan pembangunan berbasis teknologi.

Dengan integrasi ini, Kabupaten Paser dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya dan potensi daerah secara optimal melalui penerapan teknologi yang terencana dan terarah. Selain itu, keberadaan RIPJPID memungkinkan identifikasi kebutuhan teknologi yang relevan dengan karakteristik lokal Kabupaten Paser. Melalui pemetaan kebutuhan ini, pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan IPTEK yang lebih spesifik dan terukur. RPJMD berperan dalam memberikan arahan makro terhadap pencapaian target IPTEK, sementara RIPJPID menjabarkannya ke dalam langkah-langkah praktis yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser memiliki hubungan integral dengan dokumen perencanaan sektoral, yang mencakup rencana strategis di berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sebagai dokumen induk pembangunan daerah, RPJMD menjadi kerangka acuan bagi seluruh sektor dalam menyelaraskan program dan kegiatan mereka dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, dokumen perencanaan sektoral memberikan kontribusi teknis yang spesifik dan mendetail untuk mendukung pencapaian target RPJMD. Sinergi antara RPJMD dan dokumen sektoral memastikan bahwa pembangunan berjalan secara terpadu, efisien, dan sesuai prioritas, sehingga mampu mengoptimalkan alokasi

sumber daya daerah, mengatasi permasalahan lintas sektor, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Paser secara berkelanjutan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 adalah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih. Dengan demikian, seluruh kebijakan pembangunan yang disusun dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan amanat pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki acuan dalam merumuskan rencana strategis, sehingga tercipta konsistensi antara arah kebijakan kepala daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan. Sehingga RPJMD dapat menjadi instrumen strategis yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 adalah:

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Paser Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Paser Tahun 2025-2029;
4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun;
9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembagunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur; dan
10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan,

pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 disusun menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Paser.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kabupaten Paser sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta, menyajikan permasalahan serta isu pembangunan jangka menengah di Kabupaten Paser.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu, diberikan panduan pelaksanaan RPJMD 2025-2029 agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
2025-2029

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pembangunan suatu kabupaten melibatkan sejumlah sektor strategis, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aspek lingkungan. Untuk mempercepat progres pembangunan, suatu proses perencanaan yang komprehensif diperlukan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah strategis yang kompleks, yang bertujuan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam berbagai dimensi, dengan fokus pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen perencanaan tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, dengan penekanan pada perencanaan jangka menengah yang meliputi periode lima tahun. Dengan demikian, pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di wilayah Kabupaten Paser.

Melalui analisis yang mendalam, dokumen perencanaan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Perencanaan yang cermat dan terintegrasi memainkan peran penting dalam menjamin pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lokal, serta identifikasi yang teliti terhadap tantangan dan peluang yang ada, strategi pembangunan yang terfokus dan berorientasi pada solusi dapat diformulasikan. Dokumen ini bukan hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, tetapi juga merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Paser.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Subbab ini menguraikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan penjabaran sebagai berikut.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi adalah dua komponen penting dalam menggambarkan kondisi umum suatu daerah. Aspek geografi membantu memahami karakteristik fisik wilayah yang berpengaruh pada pola ruang, tata guna lahan, serta potensi dan kendala pembanguna. Sedangkan aspek Demografi memberikan gambaran tentang kapasitas sumber daya manusia serta kebutuhan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Paser secara geografis terletak pada 0°48’29,44’--2°37’24,21” Lintang Selatan dan 115°37’0,77”-118°1’19,82” Bujur Timur. Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang

terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603,94 km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
- Sebelah Timur Laut : Berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
- Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Barat Daya : Berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Barat Laut : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Keberadaan Selat Makassar di bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibu kota Kabupaten (Kota Tana Paser).

Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Daratan	Perairan	Jumlah	Persentase terhadap luas kabupaten
		(km^2)	(km^2)	(km^2)	(%)
1	Paser Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
2	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
3	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
4	Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
5	Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
6	Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
7	Batu Sopang	1.111,38	0,00	1.111,38	9,58
8	Muara Komam	1.753,40	0,00	1.753,40	15,11
9	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
Jumlah		**10.851,18**	**752,76**	**11.603,94**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Dari tabel di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 km^2 atau 20,56 persen dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 km^2 atau 2,89 persen dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5 persen dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makassar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara posisi astronomis Kabupaten Paser adalah 0048'29,44"--2037'24,21" Lintang Selatan (LS) dan 115037'0,77"-11801'19,82" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara *geostrategic* Kabupaten Paser dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat atau lima jam.

Tabel II.2
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot - Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot - Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot - Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot - Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	123	Laut/Darat
5	Tanah Grogot - Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot - Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot - Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot - Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot - Long Kali	77	Darat

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser), sedangkan Kota Tana Paser berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

C. Topografi

Kabupaten Paser dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi wilayah dibagi dalam dua yaitu:

a. Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayo sebagian batas topografi;
b. Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim, Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3
Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan di Kabupaten Paser

No.	Kemiringan Lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makassar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng < 40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Untuk wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Paser Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kabupaten Paser memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Paser Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau perbukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang. Berikut disajikan jumlah pegunungan yang ada di Kabupaten Paser.

Tabel II.4
Jumlah Pegunungan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Penggunaan
1	Batu Sopang	19
2	Muara Samu	48
3	Batu Engau	6
4	Tanjung Harapan	-
5	Paser Belengkong	3
6	Tanah Grogot	-
7	Kuaro	3
8	Long Ikis	2
9	Muara Komam	8
10	Long Kali	5
Jumlah		**94**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

D. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Paser secara eksploratif terdiri dari beberapa jenis tanah:

a. Tanah Aluvial/Gambut, Jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 Ha;
b. Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke Selatan di bagian Barat Kecamatan Pasir Belengkong dan Selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 ha;
c. Tanah Campuran/Kompleks, yaitu Jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol ± 32.750ha, Podzolik/Litosol ± 74.000ha dan Organosol/Gambut ± 56.000 ha, Podzolik ± 422.000 ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

E. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Paser Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan Panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman. Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.5
Jumlah Sungai Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	8
2	Muara Samu	8
3	Batu Engau	35
4	Tanjung Harapan	15
5	Paser Belengkong	14
6	Tanah Grogot	12
7	Kuaro	41
8	Long Ikis	19
9	Muara Komam	17
10	Long Kali	17
Jumlah		**186**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

b. Sungai, Danau dan Rawa

Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai yang cukup besar dan panjang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km). Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

c. Debit Air

Data debit air sungai berguna untuk mengetahui potensi sekaligus kemungkinan adanya ancaman dari sungai. Potensi itu antara lain, penggunaan debit air sungai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Sekaligus di sisi lain, kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

F. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Paser banyak dipengaruhi oleh lintang dan topografi wilayahnya. Kabupaten Paser beriklim tropis basah. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2024, rata-rata curah hujan adalah 284,31 mm lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 204,29 mm. Adapun pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung berfluktuasi. Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya air daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian.

Tabel II.6
Kondisi Klimatologi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembapan Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mbar)	Rata-rata Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-rata Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Penyinaran Matahari (Jam)
2024	27,81	81,03	1009,39	284,31	25,16	4,71
2023	27,95	80,35	1009,24	204,29	19,92	5,05
2022	27,45	83,19	1008,21	276,14	26,92	4,29
2021	N/A	N/A	N/A	168,95	N/A	N/A
2020	N/A	N/A	N/A	206,82	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Dalam Angka, 2025 (diolah)

G. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

1. Kawasan Lindung, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat;
2. Kawasan Sempadan Pantai, kawasan ini sepanjang ± 191,93 km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
3. Kawasan Sempadan Sungai, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaat secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, Kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Adapun Penggunaan lahan untuk budidaya sesuai potensi daerah adalah sebagai
berikut:

1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan Pertanian dan Tanaman Pangan adalah kawasan yang utamanya ditanami dengan padi sawah, padi ladang dan palawija. Padi sawah tersebar dan banyak dibudidayakan di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong, Kuaro dan Tanah Grogot. Sedangkan padi ladang banyak

dibudidayakan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long Kali dan Batu Sopang. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Tabel II.7
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser Tahun 2024

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi Sawah	7.557	30.207,3	6,33
2	Padi Ladang	-	-	-
3	Jagung	620,0	3.286,03	5,30
4	Ubi Kayu	88,3	8.320,5	94,23
5	Ubi Jalar	88,3	2.218,1	47,7
6	Kacang Tanah	46,5	261,4	3,96
7	Kacang Kedele	66,0	-	-
8	Kacang Hijau	-	-	-

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, 2025

2) Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi pengembangan kawasan perikanan:

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) meliputi 7 Kecamatan diantaranya Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Engau, Tanah Grogot, Paser Belengkong dan Tanjung Harapan seluas kurang lebih 123.067 hektar.

- Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 5.346 hektar tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan Kabupaten Paser. Adapun data luas budidaya dan produksi tambak serta kolam sebagai berikut :

Tabel II.8
Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2020-2024

Tahun	Tambak		Kolam	
	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)
2024	13.060	14.595,22	120,34	249,30
2023	13.060	14,047,72	120,34	245,90
2022	13.060	12.473,84	120,34	246,80
2021	13.060	13.802,87	120,34	204,04
2020	15.940	12.073,24	120,00	203,14

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Paser, 2025

Berdasarkan data diatas terdapat fluktuasi luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 luas budidaya tambak sebesar 13.060 Ha, angka ini sama dengan luas budidaya tambak tahun 2023 namun dari segi produksi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 14.047,72 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 14.595,20 ton atau ada peningkatan sebesar 3,89% hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya beberapa pokdakan yang telah menerima bantuan sarana dan parasana budidaya baik dari Dana APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun APBD Kabupaten Paser sehingga meningkatkan produksi, dan untuk budidaya rumput laut di tambak (*gracillaria sp*) nilai produksinya mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya pelaku usaha budidaya rumput laut di tambak. Sedangkan luas kolam, tahun 2024 sebesar 120,34 sama dengan tahun 2023 luas kolam 120,34 Ha. Produksi Tahun 2024 sebesar 249,30 ton mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 245,90 ton atau ada kenaikan sebesar 1,38%.

3) Kawasan Perkebunan

Pada tahun 2024 Luas Areal Perkebunan untuk semua jenis tanaman di Kabupaten Paser adalah Seluas ± 199.287,77 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Batu Engau dan Kuaro.

Tabel II.9
Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kelapa sawit	175.002,72	175.577,42	181.819,42	182.306,72	182.978,97
Karet	14716,75	11.666,25	10.184,00	14.074	13.791
Kelapa dalam	2678	2.301	2.322,75	2.270,75	2.169,25
Kopi	654,75	408,50	276,05	236.05	235,75
Lada	87	85,50	76,10	73,60	71,75
Kakao	76,5	48,50	6,00	5,75	5,75
Lainnya	260,25	52,50	154,35	25,56	35,30

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2025

Perkebunan Kelapa Sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91,82 persen dari total areal perkebunan. Peningkatan luas areal kelapa sawit dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan tren positif dalam pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Paser. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa sektor ini masih memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Produksi Sawit mengalami peningkatan seiring dengan gencarnya program intensifikasi sawit dan pengadaan bibit sawit melalui APBD/ APBN. Sedangkan untuk komoditas non sawit, karet mengalami

penurunan, karena pada tahun 2023 Kabupaten Paser mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Begitu pula dengan komoditas yang lain menurun atau hanya stagnan karena tidak banyak petani pekebun yang menanam. Sulitnya penjualan dan tidak stabilnya harga pasar salah satu penyebab kurangnya minat pekebun.

4) Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan

Sebagai paru-paru lingkungan hutan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Paser tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

- Kawasan Hutan Produksi Tetap, yakni kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan. Kawasan hutan ini tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 224.842 ha; terjadinya penurunan luas kawasan hutan produksi dari tahun sebelumnnya (240.256 Ha pada Tahun 2023) dikarenakan adanya proses revisi RTRW untuk memberikan ruang bagi penggunaan lahan lain seperti pertanian, permukiman dan infrastruktur
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, Kawasan hutan ini tersebar di Kecamatan Muara Komam, Long Ikis, Long Kali, Kuaro dan Batu Sopang dengan luas kawasan 146.389 ha;
- Kawasan Areal Penggunaan Lain, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di Kecamatan Muara Komam, Desa Muara Langon, Desa Lusan, Desa Muara Payang dan Desa Long Sayo yang terletak di bagian selatan KPHP Telake. Selain itu kawasan juga terdapat di Desa Muara Lambakan, Desa Perkuwen dan Desa Muara Pias yang terletak di bagian timur dengan luas 493.267 ha.

Tabel II.10
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi

Fungsi Hutan		Luas Kawasan (Ha)
		2024
Hutan Konservasi		
i.	Cagar Alam	102.990
ii.	Taman Hutan Raya	3.346
Kawasan Budidaya Kehutanan		
i.	Hutan Lindung	111.617
ii.	Hutan Produksi Tetap	224.842
iii.	Hutan Produksi Terbatas	146.389
iv.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	12.460
Kawasan Budidaya Non Kehutanan		
i.	Areal Penggunaan Lain	493.267

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2025

Kawasan hutan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti hasil hutan kayu dan non-kayu, air, dan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan secara lestari. Sementara itu, manfaat tidak langsung seperti fungsi hidrologi, penyerapan karbon, perlindungan lahan dari erosi, serta potensi wisata alam, turut menyumbang pada stabilitas lingkungan hidup. Bagi masyarakat adat dan lokal, hutan juga berfungsi sebagai ruang sosial dan spiritual yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menyadari pentingnya sinergi antara pengelolaan hutan dan pembangunan desa, pemerintah Indonesia mendorong penerapan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023, serta Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Kebijakan ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, serta konservasi lingkungan.

Telah terbentuk 12 kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Paser yang mencakup Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Adat, dengan total luasan lebih dari 15.000 hektare.

Tabel II.11
Luas dan Sebaran Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Paser

No	Skema PS	Kecamatan	Desa	Lembaga Pengelola PS	Luas (Ha)
1	Hutan Desa	Muara Komam	Desa Selerong	LPHD Benawa Sejahtera	3119
2	Hutan Kemasyarakatan	Muara Komam	Desa Selerong	KTH Bawo Baras	85
3	Hutan Kemasyarakatan	Muara Samu	Desa Luan	KTH Gunung Sampi Jaya	5.4
4	Hutan Desa	Batu Engau	Desa Saing Prupuk	LPHD Saing Pembuka Surat	1619
5	Hutan Kemasyarakatan	Muara Komam	Desa Muara Langon	KTH Aji Makmur	271
6	Hutan Desa	Muara Komam	Desa Muara Langon	LD Kawit Langon	2394
7	Hutan Kemasyarakatan	Batu Sopang	Desa Busui	KTH Sei Pelian	568
8	Hutan Desa	Long Ikis	Desa Semuntai	LPHD Semuntai	939
9	Hutan Desa	Kuaro	Desa Modang	LPHD Modang	611
10	Hutan Desa	Long Ikis	Desa Lombok	LPHD Doyam Tangko Lapan	112
11	Hutan Kemasyarakata	Batu Engau	Desa Kerang Dayo	KTH Amanah	22,46
12	Hutan Adat	Muara Komam	Desa Swan Selutung	MHA Mului	7722

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Skema ini menunjukkan bahwa masyarakat dan kelompok adat telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Pengelolaan dilakukan melalui lembaga-lembaga lokal seperti LPHD (Lembaga

Pengelola Hutan Desa), KTH (Kelompok Tani Hutan), LD (Lembaga Desa), dan MHA (Masyarakat Hukum Adat).

Dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu KPH Kendilo dan KPH Telake merupakan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran penting dalam fasilitasi teknis, pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

5) Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2024 mencakup total luas pertambangan batu bara sebesar 71.000,00 Ha, yang tersebar di kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Paser Belengkong, Kuaro, Long Ikis, dan Batu Engau. Selain itu, terdapat wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas seluas 4.958,57 Ha di Kecamatan Muara Komam dan Batu Sopang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk rehabilitasi lahan bekas tambang dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan penekanan pada penerapan praktik pertambangan yang ramah lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat dan regulasi yang ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial

6) Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Paser cukup layak untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian daerah, baik objek wisata alam maupun wisata sejarahnya. Dari tabel di bawah terlihat bahwa jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Paser pada 2024 adalah sebanyak 49.129 orang pengunjung dimana hal ini didukung dengan adanya beberapa objek wisata unggulan. Pertumbuhan pariwisata juga tergantung pada gelaran acara besar dan pengembangan daya tarik, fasilitas, aksesibilitas dan kelembagaan destinasi wisata tersebut.

Tabel II.12
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Nama Tempat Rekreasi	Jumlah Pengunjung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Sadurengas	190	1.125	2.637	4.373	3.857
Tahura Lati Petangis	-	385	1.309	1.425	4.111
Doyam Turu/Liang Batulis	-	236	188	7.720	6.341
Kemilau Laut Pondong	381	975	841	3.445	12.251
Danum Layong	34	285	29	147	258
Goa Layong/Goa Tengkorak	234	428	46	145	2.052
Goa Losan	50	215	71	110	181
Liang Mangku Langit	-	104	79	19	225
Doyam Seriam	-	120	46	115	333
Kampung Warna Warni		1.789	2.033	0	590

Nama Tempat Rekreasi	Jumlah Pengunjung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gunung Boga		3.203	5.229	863	18.930
Jumlah Pengunjung	**907**	**8.865**	**12.508**	**18.362**	**49.129**

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2025

Pada tahun 2024, Kabupaten Paser menunjukkan potensi besar dalam sektor pariwisata dengan jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 49.129 orang, dan diharapkan meningkat seiring dengan upaya promosi yang lebih intensif. Terdapat sekitar 50 hotel dan penginapan yang mendukung infrastruktur pariwisata yang ada. Pendapatan dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 30 Miliar pada tahun 2023 dan diharapkan meningkat menjadi Rp 40 Miliar pada tahun 2024. Selain itu pemerintah daerah meluncurkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata, dengan target melatih sekitar 500 orang pada tahun 2024. Data ini mencerminkan komitmen Kabupaten Paser dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barang material, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mengubah konstelasi arah pembangunan Kalimantan Timur dan juga Kabupaten Paser sebagai Kabupaten pendukung IKN. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru, Kabupaten Paser berpotensi dalam pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agroindustri, hortikultura, perikanan dan peternakan.

Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah Kabupaten Paser untuk dapat berinovasi dan bergerak lebih cepat untuk dapat mempersiapkan segala infrastruktur pendukung dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta penyaluran barang dan jasa. Ketimpangan antar wilayah masih menjadi isu penting dalam pembangunan di Kabupaten Paser. Luas wilayah dan tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan pedesaan yang mengakibatkan konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbahan ekonomi masih lemah, sehingga diperlukan percepatan dalam perbaikan dan pembangunan

infrastruktur-infrastrutkur tersebut.

Selain itu, pada rentang tahun 2020 sampai tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Puncak peningkatan jumlah penduduk usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun, yaitu di tahun 2045. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif mengalami peningkatan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Paser, sehingga lonjakan pertumbuhan penduduk tersebut perlu diantisipasi dengan menyediakan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

Selain dari sektor pertanian dan peternakan, Kabupaten Paser juga berpotensi dalam pengembangan perikanan budidaya di perairan pesisir (Teluk Adang), pengembangan simpul jaringan infrastruktur sebagai pintu masuk (golden gate IKN) dari wilayah selatan menuju IKN, pengembangan bandara pengumpan serta moda transportasi kereta antar kabupaten/kota, pengembangan pelabuhan pengumpul dalam rangka pemanfaatan ALKI II sebagai alur rantai pasok produk domestik dan internasional.

2.1.1.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser

Proses perhitungan daya dukung air Kabupaten Paser dilakukan dengan metode yang mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah Kabupaten Paser. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di Kabupaten Paser dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Paser tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa Kabupaten Paser tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Gambar II.1
Diagram Penentuan Daya Dukung Air

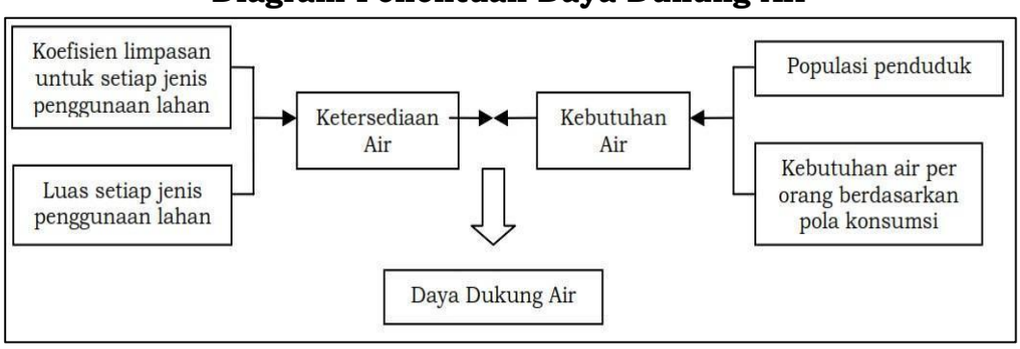

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan pada gambar di atas. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Selanjutnya penentuan status daya dukung air diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Bila SA > DA, daya dukung air dinyatakan surplus. Bila SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Secara lebih detail, data perhitungan dari daya dukung air Kabupaten Paser tahun 2019 dapat dicermati pada Tabel 3.13. yang merupakan kondisi mutakhir di tahun 2019.

Tabel II.13
Perhitungan Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser Tahun 2019

No	Jenis Penutup/Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan (Ci)	Kabupaten Paser	
			Luas (Ai) (Ha)	Ai.Ci
1	Danau	0,00	288,75	0,00
2	Hutan Lahan Kering Primer	0,18	332.350,72	1.846.392,89
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,18	187.615,22	1.042.306,77
4	Hutan Mangrove Primer	0,00	849,37	0,00
5	Hutan Mangrove Sekunder	0,00	40.321,61	0,00
6	Hutan Rawa Sekunder	0,00	6.636,33	0,00
7	Hutan Tanaman	0,30	16.094,50	53.648,32
8	Kebun Campuran	0,30	76.982,49	256.608,32
9	Landas Pacu	0,70	19,58	27,97
10	Perkebunan	0,16	54.391,79	339.948,66
11	Permukiman	0,70	3.125,46	4.464,94
12	Persawahan	0,30	6.247,52	20.825,07
13	Pertambangan	0,40	9.439,85	23.599,62
14	Rawa	0,18	28.247,09	156.928,30
15	Semak Belukar	0,35	198.816,32	568.046,62
16	Semak Belukar Rawa	0,35	83.424,85	238.356,70
17	Sungai	0,00	10.238,85	0,00
18	Tambak/Empang	0,00	13.791,03	0,00
19	Tanah Terbuka	0,05	3.122,42	62448,47
20	Tegalan/Ladang	0,30	60.753,48	202511,61
	Luas Wilayah(A)		1.132.757,23	4.816.114,27
	Tertimbang			4,25
	Curah Hujan Rerata Tahunan(R)			157,44
	Ketersediaan air(m^3/tahun)(SA)			7.582.490.311,49
	Jumlah Penduduk(2018)(N)			279.975
	Kebutuhan air untuk kehidupan layak (KHLA)			1.600
	Total Kebutuhan Air (m3.tahun) (DA)			447.960.000
	Daya Dukung Air			16,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2019

Berdasarkan hasil olah data, dapat diketahui bahwa rerata curah hujan bulanan Kabupaten Paser tahun 2018 adalah 157,44 mm3/tahun dengan ketersediaan air sebanyak 7.582.490.311.49 mm3/tahun. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Paser berdasarkan data BPS pada rilis Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2019 adalah 279.975 jiwa; mengacu pada kebutuhan air untuk hidup layak yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah sebesar 1600 m3 air/kapita/tahun, maka kebutuhan air Kabuapaten Paser adalah 447.960.000 m3/ tahun. Dengan membandingkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa status daya dukung air Kabupaten Paser

adalah belum terlampaui atau surplus dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 16,93.

Gambar II.2
Peta Ketersediaan Air Kabupaten Paser

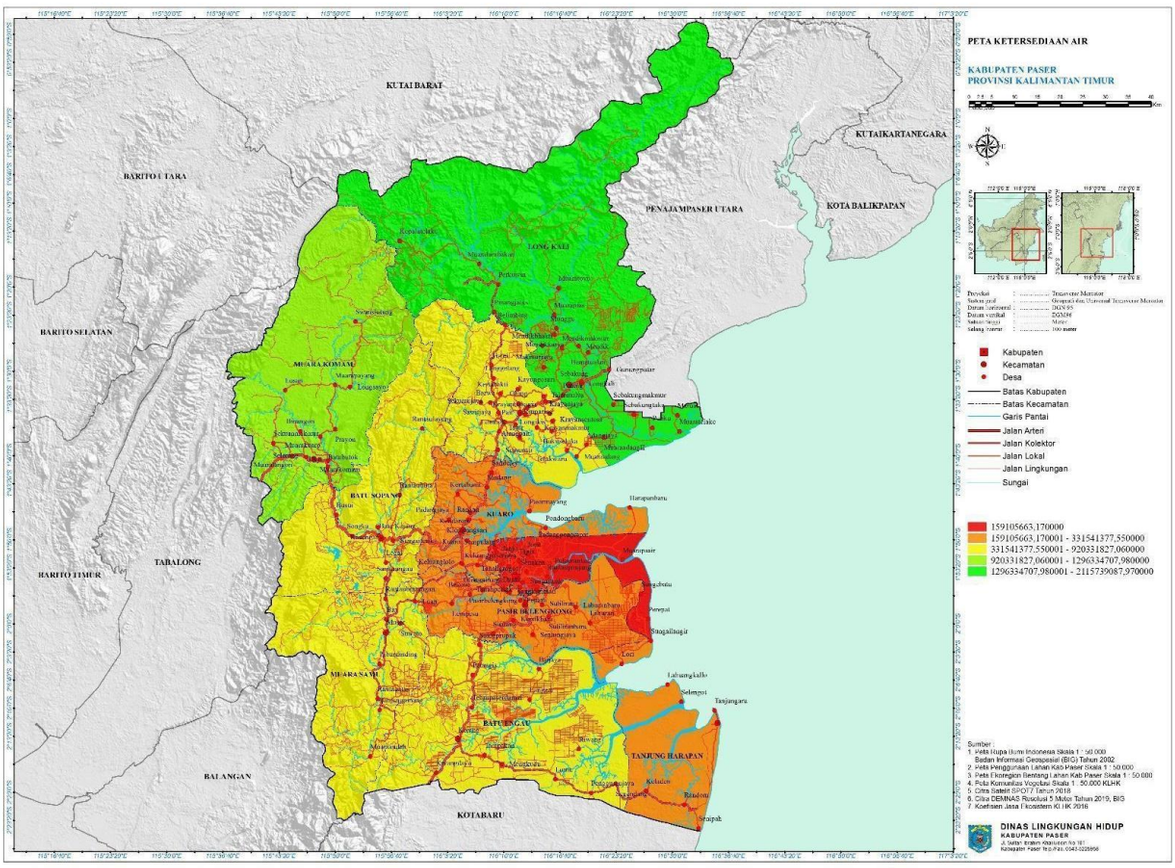

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2024

Pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem nonperpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non- PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program Pamsimas). Sementara sistem air minum nonperpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih dilakukan oleh hampir semua masyarakat Kabupaten Paser khususnya yang belum teraliri dari jaringan SPAM perpipaan, termasuk masyarakat yang tinggal didaerah dekat dengan sungai, kondisi air sungai yang keruh pada musim hujan menjadikan warga masih menangkap air hujan**.**

Kebutuhan pelayanan air bersih di wilayah perkotaan dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser, dimana PDAM ini mempunyai pelayanan perkotaan dan beberapa unit pelayanan. Kebutuhan pelayanan air bersih di wilayah pedesaan sebagian besar belum dilayani oleh PDAM, untuk pemenuhan air bersih telah dibangun sarana dan prasarana air bersih perdesaan di beberapa desa yang dikelola oleh desa dan warga baik berupa sumur bor, bangunan penangkap mata air dan hidran umum

Gambar II.3
Peta Kebutuhan Air Kabupaten Paser

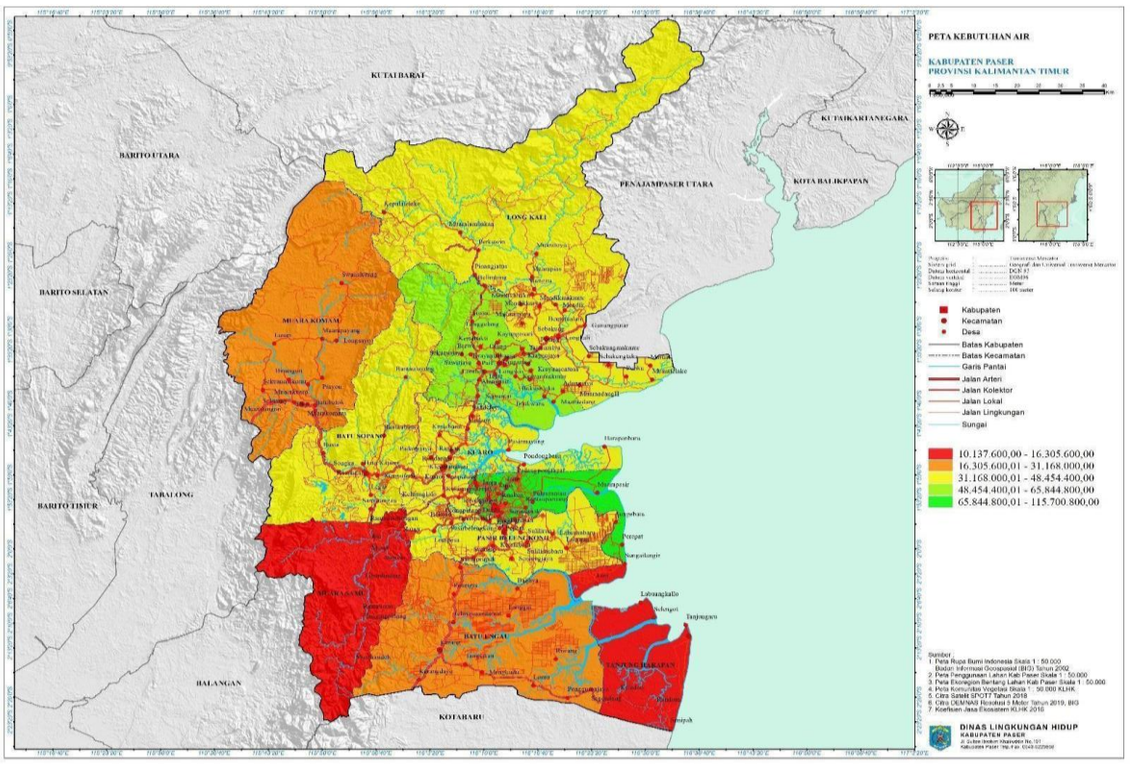

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2024

Gambar II.4
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Paser

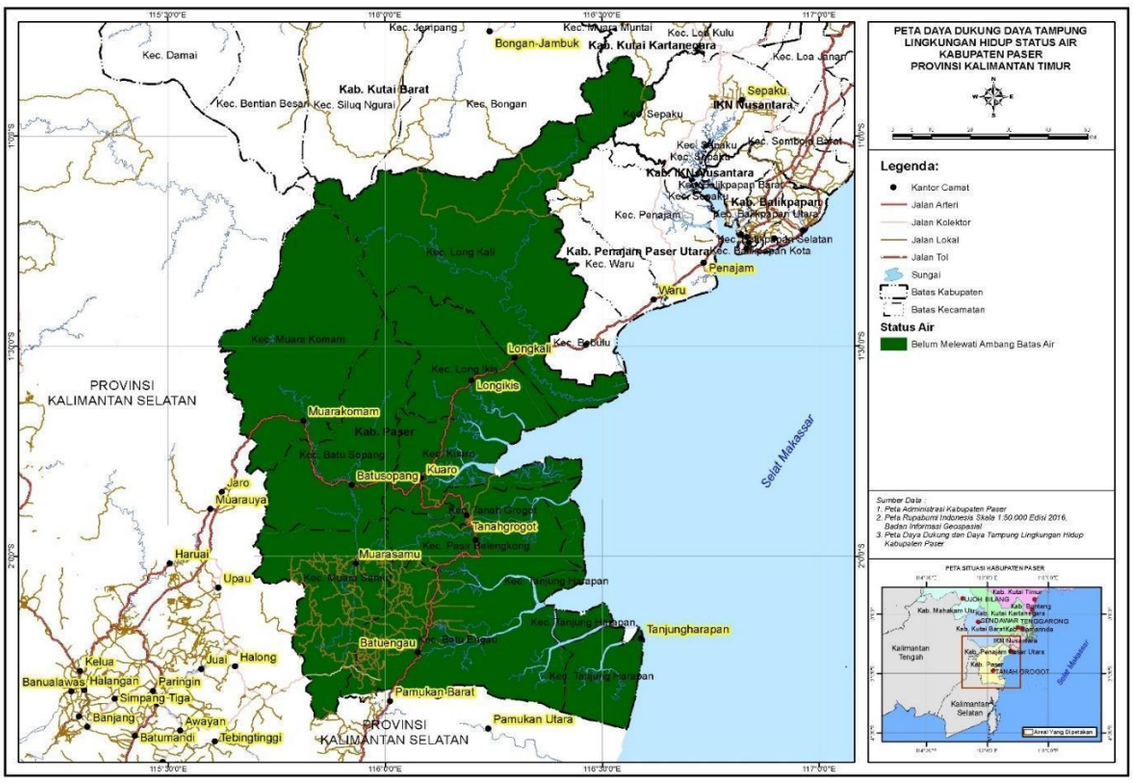

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2024

B. Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Paser

Status daya dukung pangan (DDPb) Kabupaten Paser dianalisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan jasa ekosistem pangan dan konsep

ambang batas lingkungan, yang menunjukkan batas kritis ketika tekanan akibat pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas sumber daya. Analisis dilakukan melalui sistem grid spasial, dengan tahapan distribusi penduduk, perhitungan selisih ketersediaan dan konsumsi pangan, serta klasifikasi status daya dukung berdasarkan ambang batas. Sistem grid skala ragam memungkinkan pemetaan multiskala tanpa menyeragamkan data, sehingga menghasilkan visualisasi spasial status DDPb dalam bentuk peta. Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan cenderung mengalami penurunan daya dukung, sehingga memerlukan pengelolaan dan intervensi kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Tabel II.14
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Paser

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018	Kebutuhan Bahan Pangan Kg/Th	Ketersediaan Bahan Pangan Kg/Th	Status Daya Dukung Pangan	Keterangan
Batu Engau	19.480	8.269.603	1.771.000	0,21	Defisit
Batu Sopang	27.407	12.709.647	1.276.000	0,10	Defisit
Kuaro	29.438	11.709.647	1.221.000	0,10	Defisit
Long Ikis	41.153	15.076.911	391.000	0,03	Defisit
Long Kali	30.284	6.145.774	1.155.000	0,19	Defisit
Muara Komam	14.908	569.139	2.148.000	3,77	Surplus
Muara Samu	6.336	37.443	1.523.000	40,67	Surplus
Pasir Belengkong	28.465	8.354.193	203.000	0,02	Defisit
Tanah Grogot	72.313	3.690.860	114.000	0,03	Defisit
Tanjung Harapan	10.191	329.502	60.000	0,18	Defisit
Kab.Paser	279.975	55.183.073	9.862.000	0,18	Defisit

Sumber:: Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum nilai daya dukung lingkungan hidup bahan pangan Kabupaten Paser adalah 0,18. nilai ini menandakan Kabupaten Paser berada dibawah ambang batas sehingga dapat dikatakan defisit bahan pangan (beras). Jumlah penduduk Kabupaten Paser pada Tahun 2018 adalah 279.975 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Paser mencapai lebih dari 55 juta kg/tahun, dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang terbatas, Kabupaten Paser memiliki ketersediaan pangan beras hanya sekitar 9 juta Kg/tahun. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai daya dukung pangan di Kabupaten Paser adalah 0,18.

Sementara itu, jika diamati lebih detail lagi. Meskipun status daya dukung pangan Kabupaten Paser adalah defisit, namun tidak setiap kecamatan di Kabupaten Paser memiliki status yang sama. Kecamatan yang memiliki status surplus berturut turut adalah Kecamatan Muara Komam (3,77) dan

Kecamatan Muara Samu (40,67). Kecamatan tersebut adalah kecamatan yang masih memiliki banyak lahan sawah dengan produksi padi cukup banyak. Selain itu, jumlah penduduk yang juga tidak terlalu banyak menyebabkan kecamatan ini memiliki nilai daya dukung pangan yang tinggi (>1) sehingga di kategorikan sebagai surplus bahan pangan. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Muara Samu, demand terhadap beras sangatlah kecil karena jumlah penduduknya yang tidak kurang dari 37,443 jiwa. Sementara itu, kecamatan yang memiliki status defisit daya dukung pangannya menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di kecamatan tersebut tidak mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan. Artinya, lokasi yang direpresentasikan oleh grid tersebut mendapatkan bahan pangan dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Tabel II.15
Data Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Kab. Paser Tahun 2021 - 2024

NO.	Tahun	Jumlah Penduduk Kab. Paser	Kebutuhan Bahan Pangan Kg/Kap/Th	Ketersediaan Bahan Pangan (Ton)
1	2021	277.602	24.956.420	30.230,50
2	2022	280.065	25.177.844	28.037,95
3	2023	303.424	27.277.818	16.640,91
4	2024	307.290	27.625.371	30.762,49

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Informasi dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Paser terkait kebutuhan dan ketersediaan pangan utama (beras) pada periode 2021–2024 memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan. Kebutuhan beras menunjukkan tren peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dari 24.956 ton pada tahun 2021 menjadi 27.625 ton pada tahun 2024. Namun demikian, ketersediaan beras mengalami fluktuasi tajam. Pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Paser mencatat kondisi surplus, tetapi situasi berubah drastis pada tahun 2023 ketika ketersediaan turun menjadi hanya 16.640 ton, sehingga terjadi defisit sebesar 10.636 ton. Kondisi ini berangsur pulih pada tahun 2024 dengan ketersediaan yang meningkat signifikan hingga 30.762 ton, kembali menciptakan surplus. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara umum Paser mampu memenuhi kebutuhan beras, terdapat kerentanan yang cukup tinggi terhadap faktor eksternal, seperti perubahan iklim, produktivitas lahan, maupun distribusi pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang komprehensif untuk menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan, baik melalui peningkatan kapasitas produksi lokal, diversifikasi sumber pangan, penguatan cadangan pangan daerah, maupun sistem distribusi yang lebih efisien, guna mengantisipasi risiko defisit serupa di masa mendatang.

Gambar II.5
Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Paser

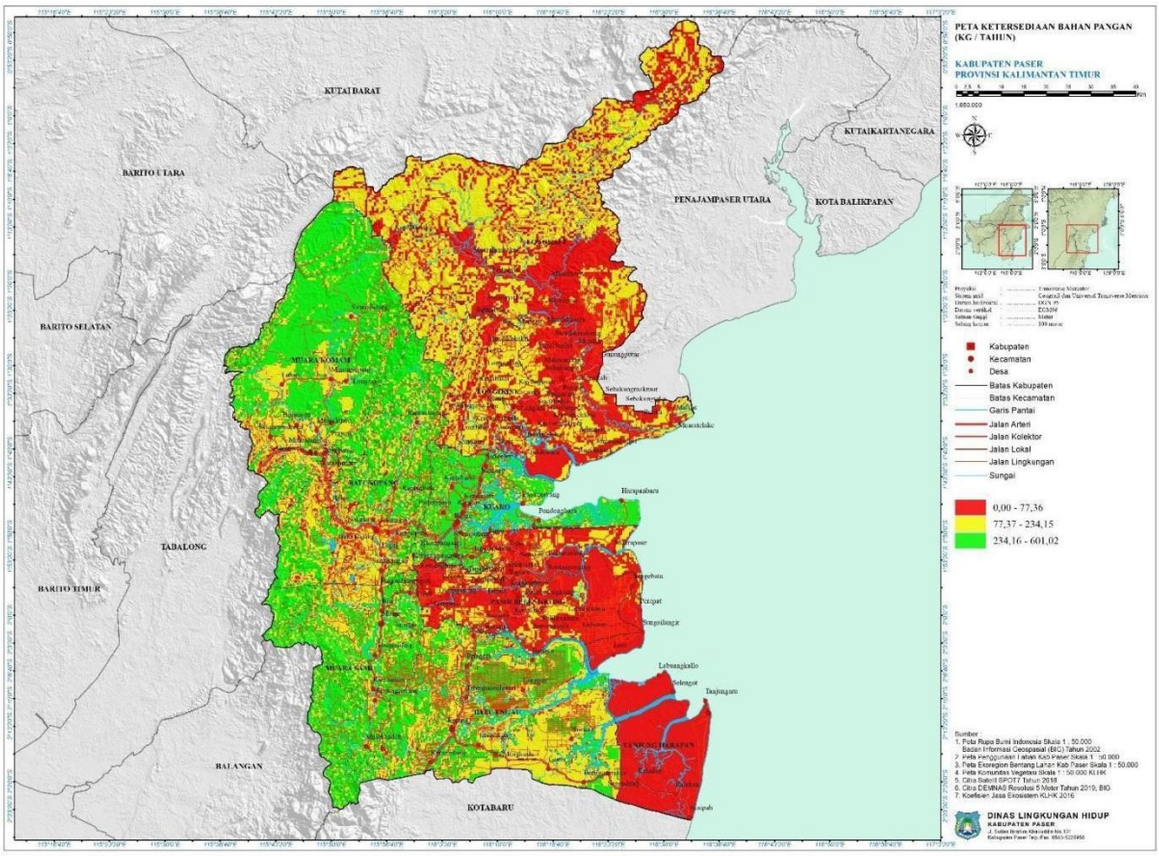

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2024

Gambar II.6
Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Paser

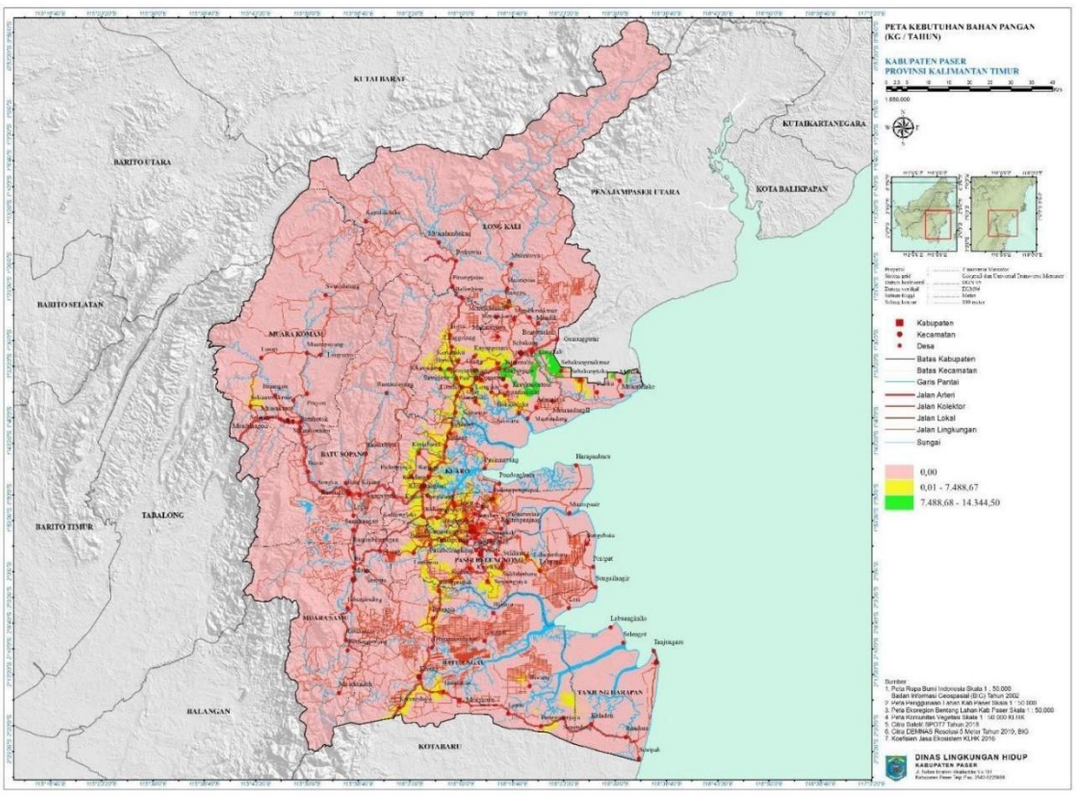

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2024

Gambar II.7
Peta DDTLHS Status Pangan Kabupaten Paser

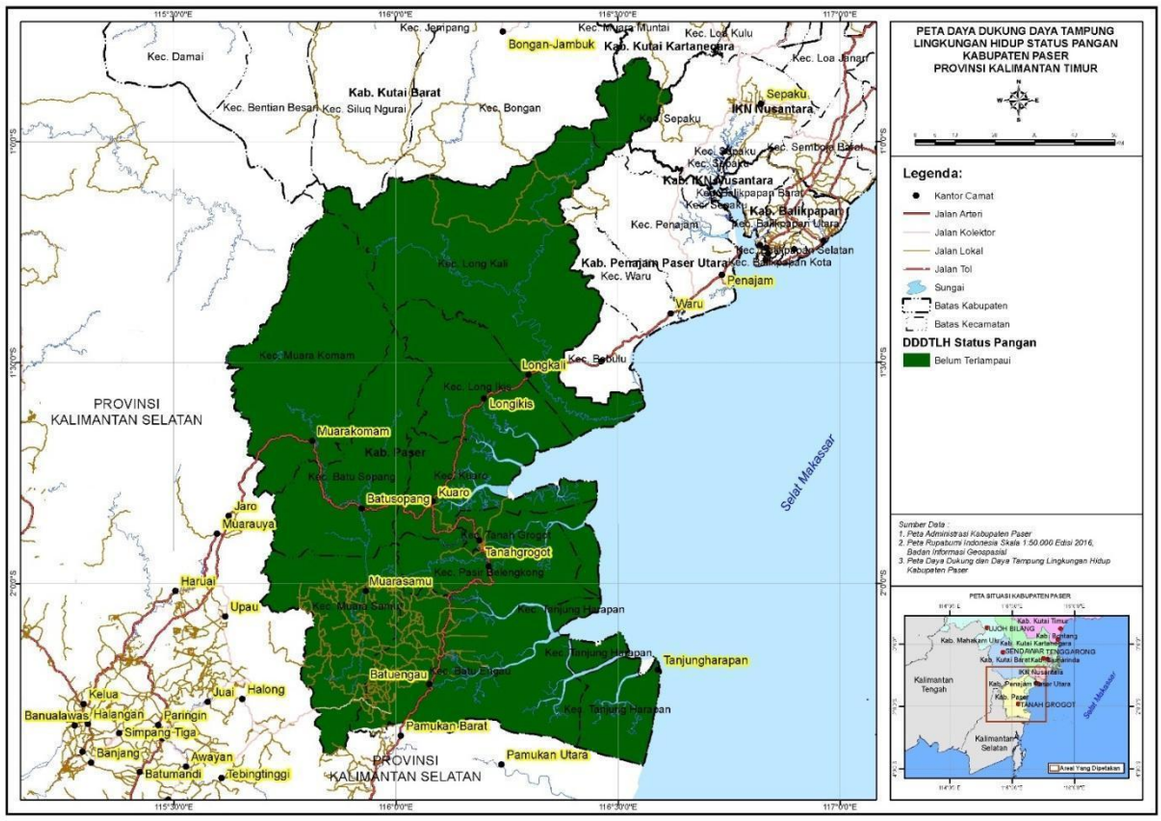

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2024

Penjelasan diatas bersumber dari Dokumen Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kabupaten Paser. Dokumen ini telah tersedia dan menjadi rujukan utama untuk menguraikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Paser. Penggunaan data dari D3TLH ini sejalan dengan pendekatan yang telah diterapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Paser Tahun 2025–2029, yang di dalamnya secara khusus memuat sub bab mengenai Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan mengacu pada sumber data dari D3TLH. Dengan demikian, integrasi data dari D3TLH dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 memberikan dasar informasi yang kuat dan terverifikasi untuk menggambarkan kondisi geografis dan demografis daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pangan dan gizi merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif. Di Kabupaten Paser, isu ketahanan pangan dan gizi telah menjadi perhatian penting karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, dan produktivitas ekonomi daerah. Sebelum tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Paser 2025–2029, kondisi pangan dan gizi daerah menunjukkan berbagai tantangan yang bersifat multidimensi—mencakup aspek ketersediaan, akses, hingga pemanfaatan pangan.

Pada periode sebelum 2025, meskipun Kabupaten Paser memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, ketahanan pangan belum sepenuhnya stabil. Data menunjukkan bahwa produksi pertanian, khususnya padi, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, luas panen padi sawah mencapai 4.538 hektar, namun mengalami penurunan menjadi 3.636,8 hektar di tahun 2023.

Sementara padi ladang justru menunjukkan peningkatan, dari 924 hektar (2022) menjadi 990 hektar (2023).

Komoditas pangan utama lainnya seperti telur ayam dan daging juga mengalami ketidakstabilan produksi. Produksi telur ayam petelur, misalnya, menurun drastis dari 2.625.000 butir (2022) menjadi 717.500 butir pada 2023, sebelum kembali naik menjadi 3.185.000 butir di tahun 2024.

Masalah akses transportasi juga memperburuk kondisi tersebut. Hingga 2023, sejumlah desa di wilayah pesisir seperti Tanjung Aru dan Selengot masih mengandalkan transportasi air dan belum memiliki akses darat yang layak. Hal ini berdampak langsung terhadap distribusi pangan dan biaya logistik yang tinggi.

Sebelum tahun 2025, indikator pemanfaatan pangan juga menunjukkan keterbatasan. Akses terhadap air bersih, yang menjadi prasyarat penting dalam pengolahan pangan sehat, masih belum merata. Pada 2019, terdapat 72 desa yang termasuk dalam prioritas tinggi (prioritas 1–3) dalam hal akses rumah tangga terhadap air bersih. Namun, angka ini berhasil ditekan menjadi 16 desa di tahun 2023.

Distribusi tenaga kesehatan pun masih belum merata. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di desa-desa terpencil menunjukkan peningkatan desa yang masuk kategori prioritas tinggi (prioritas 1) dari 22 desa (2019) menjadi 30 desa (2023), mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan belum mendukung layanan gizi secara optimal di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Paser telah menunjukkan komitmen awal melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan dan mengantisipasi risiko kerawanan pangan, serta sebagai upaya menjamin distribusi pangan yang adil dan terjangkau.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pembangunan yang berkelanjutan menuntut daerah untuk memiliki ketahanan terhadap sumber daya strategis seperti energi, air, dan pangan. Ketahanan energi mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan dan mendistribusikan energi secara berkelanjutan, terjangkau, dan ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan tiga aspek penting yang saling terkait dalam pembangunan berkelanjutan. Ketahanan energi dan air merupakan kunci untuk mencapai kemandirian pangan. Kemandirian pangan merujuk pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada impor. Ketahanan pangan dan energi juga saling mempengaruhi, dimana energi dibutuhkan untuk produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Keduanya, bersama dengan ketersediaan air, menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan pembangunan.

A. Konsumsi Listrik per Kapita

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Paser menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun

2021, tercatat sebanyak 82.737 pelanggan, kemudian meningkat menjadi 88.051 pada tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah pelanggan mencapai 93.713, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 99.721 pada tahun 2024. Pertumbuhan jumlah pelanggan listrik ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kelistrikan, yang juga menjadi indikator penting dalam mendukung kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan pengembangan infrastruktur wilayah

Seluruh akses listrik rumah tangga tersebut bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur kelistrikan. Elektrifikasi yang telah menjangkau seluruh wilayah menjadi indikator penting terhadap meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial dasar secara lebih optimal.

Grafik II.1
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024

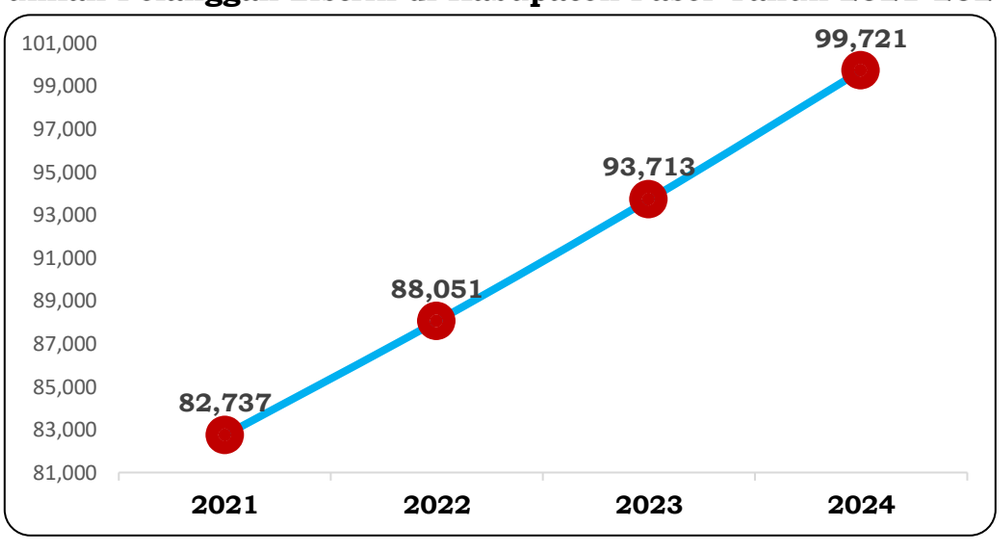

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

B. Akses Air Minum Layak

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program PAMSIMAS). Sementara sistem air minum non perpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Akses air minum Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Tahun 2021 mencapai 70,14 persen, tahun 2022 meningkat hingga 84,26 persen, dan pada tahun 2023 meningkat hingga 85,10 persen. Adapun pada tahun terakhir, terjadi kenaikan kembali akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum menjadi sebesar 87,17 persen yang mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat menuju air minum bersih dan layak sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Perkembangan persentase akses air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.16
Pembangunan Ketahanan Air di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Air Minum Perkotaan	80,78	70,14	84	85,10	87,17
2	Akses Air Minum Pedesaan	58,70				
3	Akses Air Bersih Kabupaten paser	62,91	70,14	84	85,10	87,17
4	Akses Sanitasi Layak	67,13	71,05	92,74	91,59	93,61
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	66,88	70,14	84,26	85,10	87,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser, 2025

Peningkatan infrastruktur air bersih perlu dilakukan secara serius mengingat besarnya jumlah pemakaian air bersih dan terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan layanan air bersih baik jenis perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Ketersediaan air bersih merupakan aspek sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Paser, untuk mencapai sasaran meningkatnya akses Air Bersih di Kabupaten Paser strategi yang dilakukan adalah Peningkatan jumlah dan kualitas sarana penampungan air bersih dan Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas perpipaan. Sementara arah kebijakannya adalah Desa - desa yang belum memiliki jaringan air bersih yaitu mulai dari penampungan sampai instalasi air bersih Rumah Tangga.

C. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Paser tahun 2020–2024, terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan hingga tahun 2023 tetapi kontraksi terjadi pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 dan 2021, indeks tercatat stagnan di angka 80,48. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 81,76, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai tertinggi sebesar 83,70. Namun, tren positif ini tidak berlanjut karena pada tahun 2024 indeks menurun tajam menjadi 80,04, lebih rendah dibandingkan awal periode.

Penurunan drastis pada tahun terakhir ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, mengingat tantangan serius dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di daerah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gangguan distribusi, perubahan iklim, penurunan produksi, perubahan lahan pertanian maupun masalah akses pangan di tingkat rumah tangga. Evaluasi kebijakan dan penguatan program intervensi lintas sektor menjadi penting untuk mengembalikan dan menjaga tren peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Paser di masa mendatang.

Grafik II.2
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

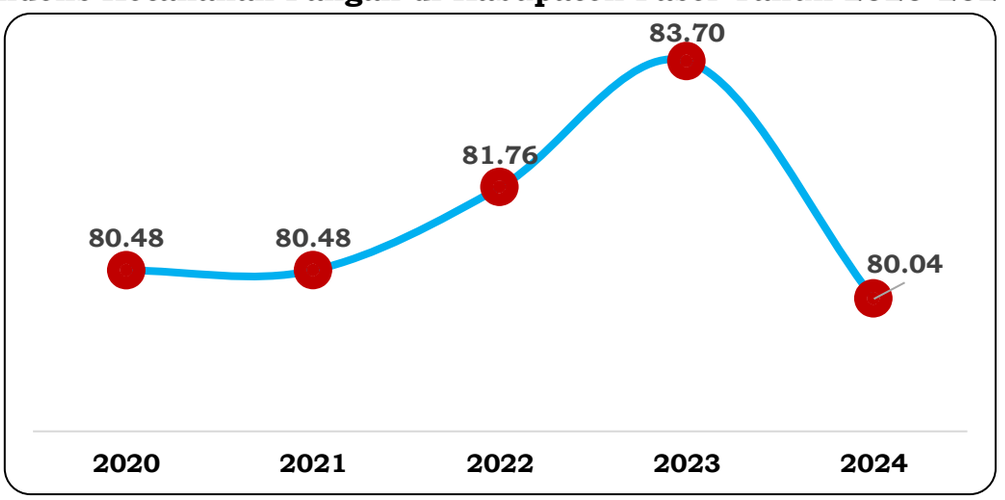

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser, 2025

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment/ PoU)* merupakan indikator yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengindikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Grafik II.3
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment/ PoU)* di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

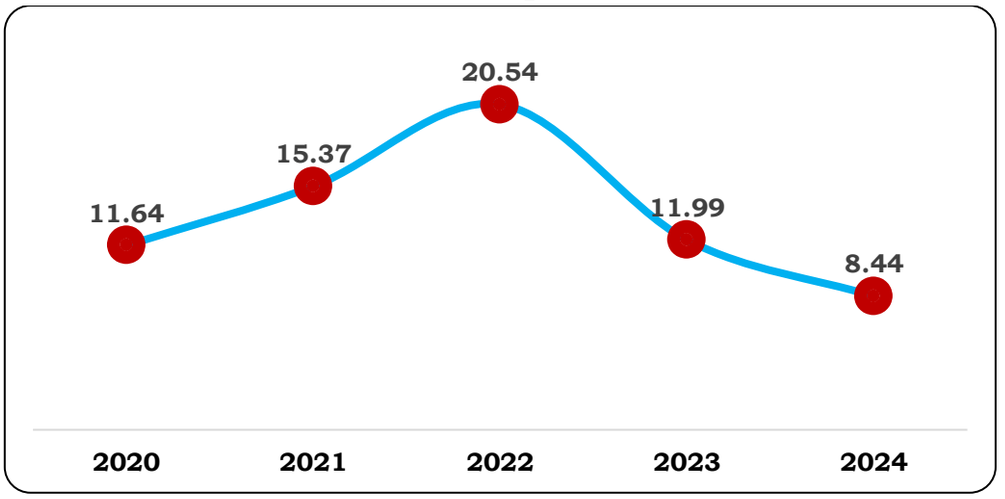

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser, 2025

PoU Kabupaten Paser cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2020 sebesar dari 11,64 persen dan sempat meningkat tajam menjadi 20,54 persen pada tahun 2022. Dengan optimalisasi kinerja dalam meningkatkan ketahanan pangan dan antisipasi kerawanan pangan serta penanganannya, maka pada tahun berikutnya menurun menjadi 11,99 persen pada tahun 2023 dan 8,44 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan walaupun terus menurun, masih terdapat 8,44 persen dari total penduduk di Kabupaten Paser yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

E. Populasi Ternak

Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Paser, sektor peternakan memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan daerah. Potensi geografis Kabupaten Paser yang memiliki lahan cukup luas dan kondisi agroklimat yang mendukung, memungkinkan pengembangan berbagai jenis ternak secara berkelanjutan.

Tabel II.17
Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	18.977	19.154	16.054	17.183	15.368
Kerbau	673	562	375	403	371
Kambing	7.983	7.322	6.192	6.853	5.611
Domba	90	83	155	261	348
Ayam Kampung	139.648	157.631	163.987	149.815	113.996
Ayam Pedaging	593.000	535.052	679.902	673.659	663.247
Itik	10.842	5.402	11.844	14.054	13.577
Ayam Petelur	23.756	2.246	1.615	4.100	6.200

*Keterangan : **) Data sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Peternakan di Kabupaten Paser masih tradisional, meskipun ada penyuluhan dari instansi terkait untuk meningkatkan produksi dan imunisasi ternak. Pada tahun 2024, kandang *closehouse* mulai diterapkan di beberapa kecamatan, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, peningkatan produksi daging ayam dan telur ayam, dan kesehatan ternak. Populasi ternak berpengaruh pada ketersediaan produk hewan, dengan faktor peningkatan seperti program Inseminasi buatan, penanggulangan penyakit, dan bantuan pengadaan ternak. Namun, pada tahun 2024, populasi ternak sapi, kambing, dan kerbau mengalami penurunan, sedangkan populasi domba meningkat. Ayam pedaging menjadi jenis ternak kecil dengan populasi terbanyak, mencapai 663.247 ekor. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pembibitan, pengelolaan yang tidak profesional, dan minimnya sarana penunjang.

Sebaran populasi ternak yang merata di beberapa kecamatan menjadi indikasi bahwa sektor peternakan tidak hanya berkontribusi pada ketersediaan pangan asal hewani, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui usaha peternakan rakyat. Penguatan sektor ini diarahkan pada peningkatan produktivitas, pengembangan pakan lokal, serta pengelolaan sistem budidaya yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pelaksanaan pembangunan Daerah harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait lingkungan hidup juga penting untuk diperhatikan guna memastikan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Paser menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya air untuk kehidupan dan pembangunan. Pada tahun 2020, IKA mencapai 48,75 dan meningkat hingga mencapai 57,50 pada tahun 2021, menandakan kualitas air dalam kategori baik. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, nilai IKA menurun hingga menjadi 50,43 pada tahun 2024, yang menunjukkan kualitas air berada dalam kriteria sedang. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan air, termasuk pencemaran dari aktivitas pertambangan dan penggalian, industri, pertanian, maupun permukiman. Sumber air di Kabupaten Paser, seperti sungai dan mata air, tertekan oleh pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dalam pengelolaan kualitas air, termasuk peningkatan infrastruktur, penegakan regulasi, dan edukasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air demi kesejahteraan masyarakat.

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Paser menunjukkan stabilitas yang positif, dengan capaian 71,20 pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 71,24 pada tahun 2024. Nilai ini menandakan bahwa kualitas udara berada dalam kategori baik, yang umumnya berkisar antara 61 hingga 80. Kriteria ini menunjukkan bahwa kualitas udara cukup bersih dan tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat

Tabel II.18
Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,75	57,50	54,09	54,09	50,43
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,47	90,59	89,53	90,46	93,38
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	72,56	71,51	71,71	71,20	71,24
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	73,97	72,30	72,57	72,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2025

Perubahan lahan sebagai konsekuensi dari peningkatan kebutuhan akan ruang, memiliki berbagai bentuk. Namun umumnya yang menjadi sorotan adalah perubahan dari bentukan alami menjadi buatan. Hal ini dikarenakan terdapat dampak lingkungan yang menyertainya. Contohnya adalah deforestasi,

yang mengubah bentukan hutan menjadi area pertanian atau perkotaan. Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Paser tahun 2024 diperoleh nilai 71,24 yang berarti kualitas tutupan lahan masuk pada kriteria baik. Berdasarkan perhitungan indeks kualitas tersebut di atas indeks kualitas air masih masuk kategori sedang, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya aktivitas domestik dan kegiatan industri sepanjang perairan terutama Sungai Kandilo sebagai sumber baku air minum. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan indeks kualitas air adalah melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas air sungai setiap tahunnya, dimana terdapat beberapa titik pantau pada 4 daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Paser. Pemerintah Kabupaten Paser juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha tentang pengolahan limbah termasuk pengetatan ijin-ijin lingkungan yang kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dari kualitas lingkungan suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan seperti yang dijabarkan di atas. Untuk mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal diperlukan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah. Akibat dari penurunan kualitas lingkungan juga menjadi salah satu penyebab dari bencana alam yang terjadi. Secara umum, IKLH Kabupaten Paser mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2020 sebesar 71,17 menjadi 72,38 pada tahun 2024. Namun capaian ini menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 72,57.

Akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Paser masih tergolong sedang. Pada tahun 2022, cakupannya mencapai 86,62% dan meningkat menjadi 90,92% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya sanitasi layak bagi kesehatan. Namun, di daerah pedesaan yang masih bergantung pada sungai, banyak warga belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang memadai. Akibatnya, praktik BAB langsung di sungai, danau, kolam, sawah, atau kebun masih umum terjadi. Hal ini berpotensi mencemari tanah dan sumber air minum masyarakat.

Tabel II.19
Persentase Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	67,13%	71,05%	86,62%	90,92%	93,61%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2025

Sementara itu, akses sanitasi dalam kategori aman masih sangat rendah, yaitu 0,41%, dengan distribusi 0,21% di perkotaan dan 0,20% di perdesaan. Capaian ini didukung oleh beroperasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Janju di Kecamatan Tanah Grogot, yang beroperasi sejak 2021. Hingga kini, IPLT Janju telah melayani lebih dari 300 unit tangki septik rumah tangga dengan menyedot dan mengolah lumpur tinja. Namun, operasional IPLT Janju dinilai belum optimal. Dengan kapasitas pengolahan 10 m^3/hari, rata-rata lumpur tinja yang diolah hanya 2–3 m^3/hari. Truk tinja masuk ke IPLT sekitar

2 hari sekali dan bersifat on-call, menunjukkan pemanfaatan fasilitas yang masih rendah.

Peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak adalah suatu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak mencakup penyediaan akses yang aman, nyaman, dan higienis terhadap fasilitas seperti toilet, air bersih, dan pengelolaan limbah. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar, Pada Tahun 2024 akses sanitasi layak Kabupaten Paser sebesar 93,61%.

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) merupakan bagian dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM sesungguhnya tidak hanya terfokus di masyarakat perdesaan. Di Kota besar juga banyak hal yang harus turut dibenahi, terutama dalam hal perubahan perilaku masyarakatnya. Masyarakat perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dari perdesaan. Jumlah penduduk yang tinggi, terbatasnya lahan, kesibukan warga mencari uang, pemerintah kota yang belum memprioritaskan penempatan STBM, rendahnya dukungan pihak swasta dan publik menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan pendekatan STBM perkotaan.

Tabel II.20
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Paser 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (ton/hari)	80,56	79,67	81,93	84,52	87,38
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)	61,66	60,48	60,46	61,72	61,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2025

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cakupan terbatas, hanya melayani ibukota kabupaten dan enam kecamatan: Batu Sopang, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, dan Long Kali. Pelayanan ini difokuskan pada kawasan komersil dan fasilitas umum, namun terhambat oleh

kurangnya sarana dan prasarana, seperti wadah sampah, TPS, armada angkutan, dan TPA. Sampah rumah tangga dikumpulkan menggunakan wadah tertentu dan dibuang ke TPS, dengan pengangkutan dilakukan oleh masyarakat atau petugas. Di Tanah Grogot, pengangkutan dilakukan setiap hari, sementara kecamatan yang lebih jauh mengandalkan kontainer dengan pengangkutan setiap dua minggu. Namun, di beberapa kecamatan, praktik pengelolaan yang tidak sesuai, seperti penimbunan dan pembuangan ke sungai, masih terjadi akibat minimnya layanan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Perlindungan terhadap risiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topafn, kebakaran, gempa dan kekeringan.

Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai besar yaitu Sungai Telake, Sungai Kandilo, Sungai Apar Besar dan Sungai Kerang yang semuanya bermuara ke Selat Makassar. Air Sungai sangat berperan penting untuk kehidupan masyarakat, baik untuk transportasi, mencuci, mandi dan masak.

Sebagian besar desa di Kabupaten Paser masuk sebagai daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser menyebut hampir di setiap kecamatan ada desa yang masuk rawan bencana, terlebih lagi pada tahun 2023 rata-rata curah hujan meningkat menjadi 1.923,22 milimeter, dimana tahun sebelumnya sebesar 214,26 milimeter.

Tabel II.21
Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Long Ikis dan long Kali
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis dan Long Kali
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau
5	Angin Puting Beliung	Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Muara Samu dan Tanjung Harapan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, 2025

Kabupaten Paser memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang menyebabkan panjangnya musim kemarau atau musim penghujan. Untuk bencana alam banjir seringkali terjadi pada wilayah-wilayah dataran rendah dan sekitar sungai, hal ini juga dipicu karena adanya pendangkalan

sungai sehingga kemampuan menampung air hujan semakin berkurang. Secara keseluruhan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2020 hingga 2024 indeks risiko bencana mengalami penurunan dimana capaiannya berada pada angka 196,40 pada tahun 2020 menjadi 187,98 pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, Kabupaten Paser masih berada di kelas risiko Tinggi.

Grafik II.4
Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

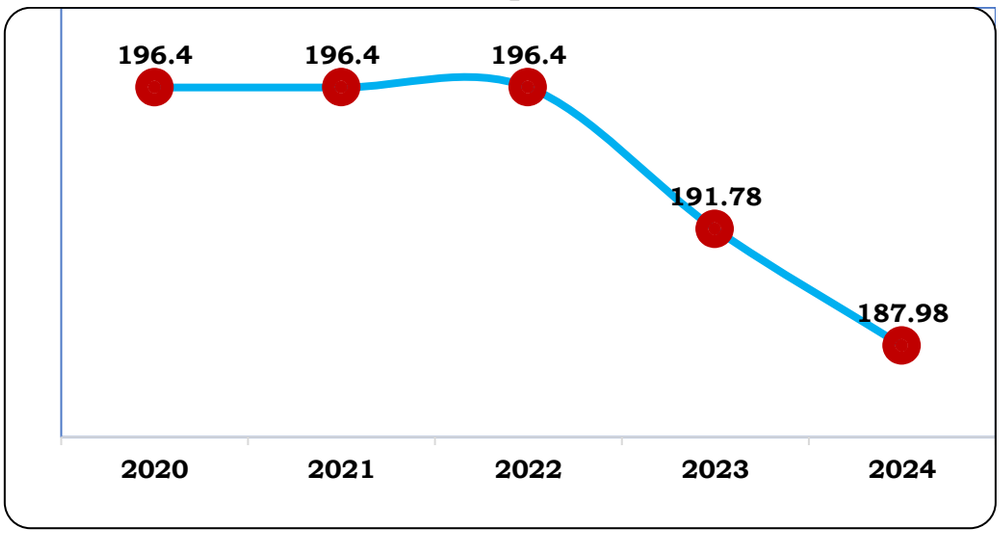

Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/irbi , 2025

Pada tahun 2024, Kabupaten Paser mencatat emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan dari berbagai sektor, dengan sektor energi sebagai penyumbang terbesar mencapai 44.856 ton CO2e, mencerminkan ketergantungan pada sumber energi fosil. Sektor lahan menyumbang 777,75 ton CO2e, menunjukkan perlunya pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi, sementara sektor limbah mencatat emisi sebesar 671,42 ton CO2e, yang dapat diminimalkan melalui peningkatan sistem pengelolaan limbah. Sektor kawasan pesisir dan kelautan tidak berkontribusi terhadap emisi GRK di Kabupaten Paser.

Secara umum, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030, berdasarkan *Business-as-Usual* (BaU) *baseline*. Untuk Kalimantan Timur, sektor-sektor yang disebutkan berkontribusi signifikan terhadap total emisi, dan upaya mitigasi di masing- masing sektor sangat penting. Sebagai gambaran, pada tahun 2016, total emisi GRK Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 1.515 juta ton CO2e, dengan sektor energi, limbah, dan kehutanan menjadi penyumbang utama. Data ini menekankan pentingnya strategi mitigasi yang terintegrasi untuk mengurangi emisi GRK di Kabupaten Paser, termasuk transisi ke energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Paser selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren progresif yang sangat positif. Pada tahun 2020, tingkat penurunan intensitas emisi GRK tercatat sebesar 10,59 persen, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 16,09 persen di tahun 2021, 21,59 persen di tahun 2022, 27,09 persen di tahun 2023,

dan mencapai 32,59 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menekan laju emisi karbon melalui berbagai strategi pembangunan rendah karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta upaya konservasi lingkungan.

Tabel II.22
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi	Ton CO2e	48.212	48.212	44.856	44.856	44.856
2	Kawasan Pesisi dan Kelautan	Ton CO2e	0	0	0	0	0
3	Lahan	Ton CO2e	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75
4	Pengeololaan Limbah	Ton CO2e	671,42	671,42	671,42	671,42	671,42
	TOTAL	Ton CO2e	**49.661**	**49.661**	**46.305**	**46.305**	**46.305**
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	**10,59**	**16,09**	**21,59**	**27,09**	**32,59**

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara, 2025

2.1.1.7 Demografi

Cakupan demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Individu yang tinggal dalam suatu daerah merupakan sumber daya manusia yang vital, yang diperlukan untuk menggerakkan proses pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya wilayah dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran individu dalam pembangunan terbagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan dan sebagai objek yang mendapat manfaat dari kegiatan pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat dianggap sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan serta sebagai beban yang perlu ditangani dalam upaya pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada kualitas individu dalam populasi, di mana jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi bagi pembangunan jika disertai dengan kualitas yang tinggi, namun dapat menjadi beban jika kualitasnya rendah.

Pertumbuhan laju penduduk yang terjadi di Kabupaten Paser memberi dasar dan gambaran yang nyata tentang meningkatnya kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Sepanjang

kurun waktu lima tahun terakhir, dapat terlihat penurunan signifikan jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun pada tahun selanjutnya, jumlah penduduk terus meningkat hingga mencapai 309.667 penduduk pada tahun 2024.

Tabel II.23
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Batu Sopang	26.867	27.059	25.742	28.805	29.874
2.	Muara Samu	6.855	7.114	6.796	7.770	8.036
3.	Batu Engau	16.969	17.423	17.257	20.874	21.401
4.	Tanjung Harapan	8.856	8.886	9.552	10.410	10.641
5.	Pasir Belengkong	28.595	28.852	29.692	31.328	31.845
6.	Tanah Grogot	76.344	76.976	78.339	85.087	87.219
7.	Kuaro	29.188	29.462	27.960	31.906	32.298
8.	Long Ikis	41.147	41.196	42.493	44.140	44.519
9.	Muara Komam	13.056	12.986	13.260	14.314	14.573
10.	Long Kali	27.575	27.648	28.974	28.790	29.261
Paser		**275.452**	**277.602**	**280.065**	**303.424**	**309.667**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Seperti halnya pola pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara otomatis berpengaruh pada naiknya kepadatan penduduk di Kabupaten Paser secara umum. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kabupaten Paser mencapai 26,69 jiwa/km^2 dengan persebaran penduduk yang tidak merata dimana pada Kecamatan Tanah Grogot kepadatan penduduknya mencapai 259,91 jiwa/km^2 sedangkan pada Kecamatan Muara Komam merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 8,31 jiwa/km^2.

Tabel II.24
Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
Batu Sopang	1.111,38	29.874	26,88
Muara Samu	855,25	8.036	9,40
Batu Engau	714,05	21.401	14,20
Tanjung Harapan	1.507,26	10.641	14,90
Pasir Belengkong	990,11	31.845	32,16
Tanah Grogot	335,58	87.219	259,91
Kuaro	747,30	32.298	43,22
Long Ikis	1.204,22	44.519	36,97

Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
Muara Komam	1.753,39	14.573	8,31
Long Kali	2.385,39	29.261	12,27
2024	**11.603,94**	**309.667**	**26,69**
2023	**11.603,94**	**303.424**	**26,15**
2022	**11.603,94**	**280.065**	**24,14**
2021	**11.603,94**	**277.602**	**23,92**
2020	**11.603,94**	**275.452**	**23,74**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran utama pembangunan. Oleh karena itu, kualitas dan struktur penduduk, termasuk keseimbangan gender, menjadi faktor penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Di Kabupaten Paser, komposisi penduduk menunjukkan kecenderungan yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata persentase jumlah penduduk perempuan per tahun mencapai **48%**, sedangkan laki-laki sekitar **52%** dari total jumlah penduduk.

Komposisi ini mencerminkan bahwa perempuan memiliki potensi yang setara untuk didayagunakan dalam seluruh sektor pembangunan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial maupun politik. Namun, dalam praktiknya, partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, lapangan kerja yang setara, serta representasi dalam pengambilan keputusan di ranah publik. Oleh karena itu, ke depan, pembangunan di Kabupaten Paser perlu lebih berorientasi pada **pengarusutamaan gender (PUG)** sebagai strategi untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pemanfaatan sumber daya manusia. PUG juga diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Pemberdayaan perempuan perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, termasuk melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, pelatihan keterampilan kerja, perlindungan sosial, serta partisipasi aktif dalam pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan memaksimalkan potensi perempuan yang hampir separuh dari jumlah penduduk, Kabupaten Paser dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-5 (Kesetaraan

Gender) dan memperkuat basis sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing di masa depan.

Tabel II.25
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase jumlah penduduk perempuan
2020	143.647	131.805	275.452	0.48
2021	144.555	133.047	277.602	0.48
2022	145.616	134.449	280.065	0.48
2023	156.903	146.521	303.424	0.48
2024	160.276	149.391	309.667	0.48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Terdapat dua metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk, yaitu menggunakan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data hasil proyeksi Sensus Penduduk oleh BPS. Pada pertumbuhan penduduk di bawah, menggunakan data hasil Proyeksi Sensus Penduduk interim 2020-2024 yang dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan data SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paser dimana capaian pertumbuhan penduduk mencapai 11,63 persen pada tahun 2024.

Tabel II.26
Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per				
	Tahun 2010 - 2020 (%)	Tahun 2020 - 2021 (%)	Tahun 2020 - 2022 (%)	Tahun 2022 - 2023 (%)	Tahun 2020-2024 (%)
Batu Sopang	1,71	0,71	-4,19	17,65	22,01
Muara Samu	4,80	3,78	-0,86	13,13	17,01
Batu Engau	3,70	2,68	1,70	17,05	20,01
Tanjung Harapan	1,34	0,34	7,86	16,64	19,23
Pasir Belengkong	1,90	0,90	3,84	6,98	8,75
Tanah Grogot	1,83	0,83	2,61	9,06	11,79
Kuaro	1,94	0,94	-4,21	6,56	7,86

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per				
	Tahun 2010 - 2020 (%)	Tahun 2020 - 2021 (%)	Tahun 2020 - 2022 (%)	Tahun 2022 - 2023 (%)	Tahun 2020-2024 (%)
Long Ikis	1,11	0,12	3,27	6,02	6,93
Muara Komam	0,45	-0,54	1,56	6,65	8,58
Long Kali	1,26	0,26	5,07	6,67	8,41
Paser	**1,75**	**0,78**	**1,67**	**9,38**	**11,63**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Dalam Angka, 2025

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel II.27
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	*Sex Ratio*
2024	160.276	149.391	309.667	107,00
2023	156.903	146.521	303.424	107,00
2022	145.616	134.449	280.065	108,31
2021	144.555	133.047	277.602	108,65
2020	143.647	131.805	275.452	108,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Paser berada di angka 303.424 jiwa dan bertambah menjadi 309.667 jiwa pada tahun 2024. Dalam periode tahun 2020 hingga 2024 apabila dirinci jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terlihat dominasi jumlah penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2024 adalah 107, yang artinya bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

Ketika jumlah laki-laki mendominasi penduduk suatu daerah, terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang dapat muncul. Keuntungan potensialnya termasuk peningkatan tenaga kerja yang kuat dan beragam, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kehadiran laki-laki yang lebih banyak juga bisa menjadi pendorong inovasi dan kemajuan teknologi dalam beberapa sektor. Namun, kerugian mungkin timbul dalam aspek-aspek sosial, seperti potensi peningkatan tingkat kekerasan atau konflik, terutama jika ada ketidakseimbangan gender yang signifikan.

Selain itu, dalam situasi di mana laki-laki mendominasi jumlah penduduk, aspek keseimbangan gender dalam berbagai bidang kehidupan juga dapat terpengaruh. Terdapat risiko kemungkinan ketidakseimbangan dalam keterwakilan politik, keputusan ekonomi, atau bahkan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang kemudian bisa berdampak pada pembangunan yang merata dan inklusif bagi seluruh komunitas.

Pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan serta pembangunan sosial-ekonomi menjadi semakin terlihat dalam konteks ini. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah setempat harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang merangsang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan mempromosikan inklusivitas serta kesadaran akan pentingnya keseimbangan yang sehat antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Proyeksi kependudukan adalah perkiraan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu berdasarkan tren demografis, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Fungsi proyeksi kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena memberikan pandangan tentang bagaimana jumlah dan struktur penduduk akan berubah di masa depan.

Tabel II.28
Proyeksi Kependudukan
di Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	289,75	292,39	294,93	297,34	299,64
Laki-laki	150,11	151,29	152,39	153,44	154,52
Perempuan	139,63	141,11	142,53	143,90	145,22
Rasio Jenis Kelamin	107,51	107,21	106,92	106,63	106,4
Kepadatan Penduduk	24,97	25,20	25,42	25,62	25,82
Rasio Ketergantungan	42,85	43,11	43,39	43,79	44,13
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	70,84	70,91	70,89	71,01	70,96
15–64	202,84	204,31	205,62	206,80	207,90
65+	16,08	17,17	18,33	19,54	20,79

Sumber: Proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Proyeksi penduduk di Kabupaten Paser mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana proyeksi pada tahun terakhir pembangunan jangka menengah mencapai jumlah penduduk sebanyak 299,64 ribu jiwa. Kenaikan ini tentu saja menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk hingga mencapai 25,82 jiwa/km2. Dari sisi jenis kelamin, terlihat adanya penurunan rasio jenis kelamin mendekati 100 yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk perempuan.

Pada indikator rasio ketergantungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2029 mencapai 44,13. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, seluruh kelompok umur mengalami kenaikan dimana penduduk usia muda pada tahun 2029 menjadi sebanyak 70,96 ribu jiwa, penduduk usia produktif sebanyak 207,90 ribu jiwa dan penduduk usia tua sebanyak 20,79 ribu jiwa.

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya adalah masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi kelompok adat, serta mendorong keadilan, harmoni, dan kesejahteraan bagi kelompok adat serta masyarakat pada umumnya. Melalui pengakuan yang tepat, kelompok adat dapat terus melestarikan warisan budaya mereka sambil tetap berintegrasi dalam kehidupan modern.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Terdapat 2 Masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan legalitas pengakuan dan perlindungan hukum yakni:

1. Wilayah Masyarakat Hukum Adat Mului di Desa Swan Salutung Kecamatan Muara Komam yang pengakuan dan perlindungannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului di Kabupaten Paser dengan luas wilayah 7.803 Hektar.
2. Wilayah Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit di Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu yang pengakuan dan perlindungannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 413.3/KEP-924/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit Desa Muara Andeh di Kabupaten Paser dengan luas wilayah 14.832,71 Hektar.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencerminkan tingkat kualitas hidup penduduk yang diukur melalui indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kondisi sosial. Aspek kesehateraan masyarakat dalam dokumen RPJMD terdiri dari Kesjahteraan Ekonomi, Kesehatan Untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, Perlindungan Sosial yang Adaptif, Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih layak, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga daerah

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Paser utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian Kabupaten Paser. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting untuk melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Paser antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel II.29
Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,04	-3,91	4,73	3,52	3,85
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,72	7,96	-0,30	-0,45	3,19
C	Industri Pengolahan	-2,77	-3,94	4,95	4,32	2,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,85	3,36	5,44	15,21	14,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,31	6,46	7,76	9,30	9,80
F	Konstruksi	-5,02	-3,86	6,45	16,94	7,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,17	3,11	6,82	8,33	6,15
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,09	3,00	2,69	4,72	6,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,28	3,11	5,35	14,77	15,76
J	Informasi dan Komunikasi	9,08	6,86	5,19	6,33	7,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	2,68	10,01	9,53	7,01

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	1,12	-0,96	1,13	2,62	4,11
M, N	Jasa Perusahaan	-3,67	8,28	4,88	7,16	7,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,47	2,07	3,07	8,75	13,02
P	Jasa Pendidikan	3,91	2,99	3,49	5,15	4,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,84	13,10	4,70	9,49	6,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,12	1,16	6,09	9,39	13,13
PDRB		**-2,86**	**5,39**	**1,09**	**1,38**	**3,77**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Pergerakan perekonomian di Kabupaten Paser dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan fluktuatif, dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga mencapai negatif akibat terjadinya pandemi COVID-19, kemudian pada tahun 2021 angka yang tercatat menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencapai nilai pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, namun satu tahun kemudian capaian tersebut kembali melambat menjadi 1,09 persen. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi meskipun belum signifikan dengan capaian sebesar 1,38 persen hingga pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 3,77 persen. Peningkatan ini salah satunya dikarenakan tumbuhnya salah satu sektor utama pembangunan ekonomi Kabupaten Paser yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh hingga sebesar 3,19 persen.

Fluktuasi tajam dan pertumbuhan yang cenderung rendah pasca-2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Paser perlu mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan memperkuat fondasi ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal dan tenaga kerja. Penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi hijau dapat menjadi kunci untuk pertumbuhan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM, iklim investasi, serta infrastruktur dasar juga mutlak diperlukan agar momentum pertumbuhan tahun 2024 dapat terus ditingkatkan dalam jangka menengah.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan besaran nilai PDRB per jiwa atau per satu orang di suatu wilayah. Namun demikian, nilai PDRB tersebut tidak serta merta mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena nilai PDRB tersebut hanyalah merupakan nilai bagi bruto antara total perhitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun suatu wilayah dengan tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang ada dalam proses pembentuknya. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. PDRB per kapita Kabupaten Paser sebesar 157,18 juta rupiah pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 193,82 juta rupiah dan 271,26 juta rupiah masing-masing pada tahun 2021 dan 2022.Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Paser turun menjadi 193,14 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 208,43 juta rupiah.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, fluktuasi yang tajam ini menunjukkan pentingnya langkah diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor produktif berbasis masyarakat lokal agar PDRB per kapita tidak terlalu bergantung pada dinamika eksternal atau sektor yang volatil. Pemerintah daerah perlu mendorong stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi agar capaian pendapatan per kapita dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Grafik II.5
PDRB per Kapita ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

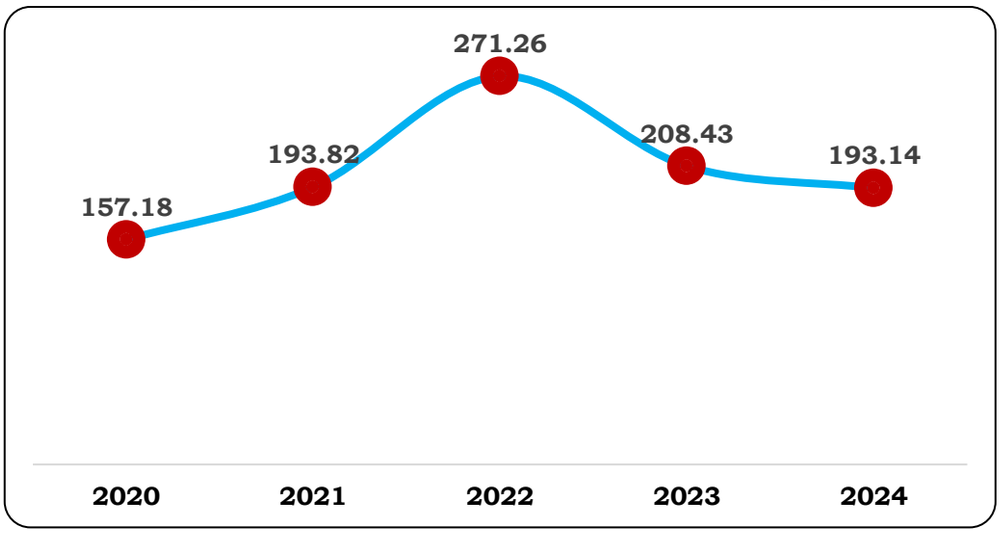

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

C. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Pergerakan angka kemiskinan di Kabupaten Paser berjalan fluktuatif, menyebabkan kebijakan pemerintah daerah menjadi cukup dinamis dalam menentukan program dan kegiatan. Angka kemiskinan tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 9,73 persen dan menurun hingga menjadi 8,63 persen pada tahun 2024. Tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2021 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mulai awal tahun 2020 yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, melemahnya pendapatan

rumah tangga, serta meningkatnya pengangguran di berbagai sektor. Mulai tahun 2022, angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan bertahap. Pada tahun tersebut, tercatat sebesar 9,43 persen, kemudian menurun lagi menjadi 9,11 persen pada 2023, dan mencapai angka terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 8,63 persen pada tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan mulai pulihnya kondisi ekonomi masyarakat, serta membaiknya efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Grafik II.6
Angka Kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Persen)

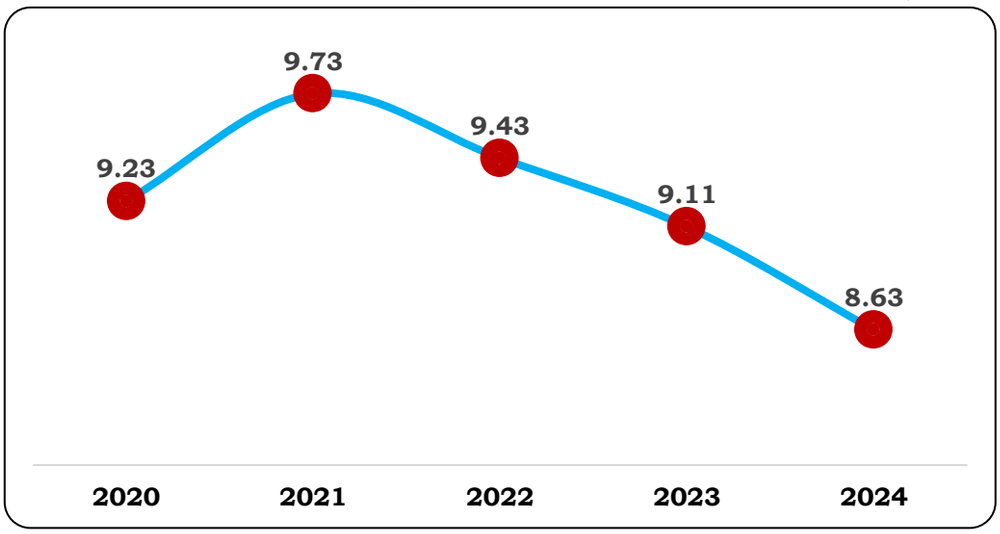

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Selain persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Paser juga memiliki pola yang sama dengan persentase penduduk miskin. Sedangkan garis kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 634.259/kapita/bulan, hal tersebut meningkat dan merupakan data capaian tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1). Indeks P1 Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebesar 0,86 dan tingkat keparahan kemiskinan (P2), sebesar 0,17. Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel II.30
Perkembangan Indikator Kemiskinan
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	515.414	527.659	556.371	600.332	634.259
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	26,77	27,56	27,02	26,39	25,28
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,04	1,37	1,35	1,04	0,86
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,32	0,29	0,19	0,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Desil 1 sampai 4 dalam konteks penduduk miskin menggambarkan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita. Secara sederhana, desil digunakan untuk membagi populasi menjadi 10 kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat pengeluaran, sehingga desil 1–4 mewakili 40 persen lapisan terbawah masyarakat.

Tabel II.31
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Keluarga dan Individu (Status Kesejahteraan) Per Kecamatan Di Kabupaten Paser, Tahun 2024

No	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1.	Batu Sopang	225	251	225	280	**981**	1.087	1.061	911	1.068	**4.127**
2.	Tanjung Harapan	283	301	287	221	**1.092**	1.330	1.160	1.073	799	**4.362**
3.	Paser Belengkong	737	834	756	740	**3.067**	3.609	3.324	2.778	2.681	**12.392**
4.	Tanah Grogot	1.395	1.350	1.401	1.378	**5.524**	6.875	5.467	5.431	5.325	**23.098**
5.	Kuaro	575	697	700	749	**2.721**	2.834	2.856	2.721	2.837	**11.248**
6.	Long Ikis	931	1.095	1.154	1.088	**4.268**	4.626	4.444	4.252	4.061	**17.383**
7.	Muara Komam	586	412	389	345	**1.732**	2.794	1.667	1.443	1.161	**7.065**
8.	Long Kali	920	734	709	647	**3.010**	4.497	2.989	2.733	2.509	**12.728**
9.	Batu Engau	405	404	361	398	**1.568**	1.873	1.657	1.370	1.428	**6.328**
10.	Muara Samu	150	129	119	137	**535**	713	495	466	527	**2.201**
Total		**6.207**	**6.207**	**6.101**	**5.983**	**24.498**	**30.238**	**25.120**	**23.178**	**22.396**	**100.932**

catatan: berdasarkan Data P3KE 2024

sumber: data P3KE Kemenko PMK. https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran (diakses: 5 September 2024).

Jumlah penduduk miskin berdasarkan keluarga dan individu di Kabupaten Paser pada beberapa kecamatan, terlihat variasi yang signifikan baik dalam jumlah keluarga maupun jumlah individu pada setiap desil. Di Kecamatan Tanah Grogot menunjukkan jumlah individu miskin sebesar 23.098 individu, diikuti oleh Kecamatan Long Ikis dengan 17.383 individu. Pada tingkat keluarga, Tanah Grogot memiliki jumlah keluarga miskin terbesar, yaitu 1.395 keluarga miskin pada desil 1 dan 1.350 keluarga miskin pada desil 2. Sebaliknya, Kecamatan Muara Samu memiliki angka keluarga dan individu miskin yang paling rendah, yaitu 150 keluarga di desil 1 dan 2.201 individu

secara keseluruhan, mencerminkan skala kemiskinan yang lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan lain. Dalam hal individu, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Tanjung Harapan, dan Kecamatan Muara Komam menunjukkan jumlah yang relatif lebih rendah, dengan total masing-masing 4.127 individu miskin, 4.362 individu miskin, dan 7.065 individu miskin. Secara keseluruhan, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Paser memiliki jumlah penduduk miskin dari tingkat individu maupun keluarga yang berbeda-beda, termasuk dari tingkatan desil. Pada tabel berikut, disajikan jumlah penduduk miskin menurut keluarga dan individu (status kesejahteraan) per kecamatan di Kabupaten Paser, pada tahun 2024.

D. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horizontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “indeks gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Sebaliknya, indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 0,00 < G < 0,35 : pemerataan tinggi / ketimpangan rendah;
- 0,35 < G < 0,50 : pemerataan / ketimpangan sedang;
- G > 0,50 : pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Indeks Gini di Kabupaten Paser selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi moderat namun cenderung membaik dari sisi ketimpangan distribusi pendapatan. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,290, menurun tipis menjadi 0,288 di tahun 2021, dan mencapai titik terendah sementara pada 2022 sebesar 0,282, yang mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan antarpenduduk. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali menjadi 0,292, yang menunjukkan adanya sedikit pelebaran jurang ketimpangan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmerataan pemulihan ekonomi pasca-pandemi atau perbedaan akses terhadap peluang ekonomi di wilayah pedesaan dan perkotaan. Meskipun demikian, pada tahun 2024, Indeks Gini kembali menurun tajam ke angka 0,271, yang merupakan capaian terbaik dalam lima tahun terakhir dan menandakan semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Grafik II.7
Indeks Gini di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

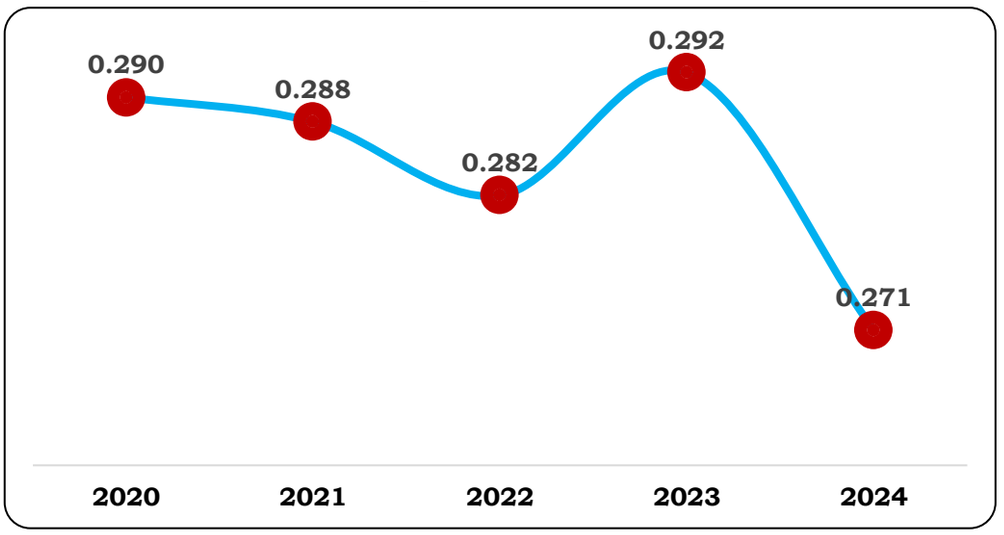

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Secara keseluruhan, meskipun terdapat dinamika dari tahun ke tahun, tren penurunan Indeks Gini pada 2024 mencerminkan hasil dari kebijakan inklusif yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kelompok bawah. Keberhasilan ini perlu terus dijaga melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor informal agar ketimpangan tidak kembali melebar di masa mendatang.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pergerakan TPT di Kabupaten Paser mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya pemutusan kerja secara masal efek pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2023 capaian tingkat pengangguran berangsur membaik ditandai dengan adanya penurunan pengangguran menjadi 4,88 persen di tahun 2022 dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 4,72 persen. TPT menurun menjadi 4,53 persen pada tahun 2024.

Grafik II.8
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

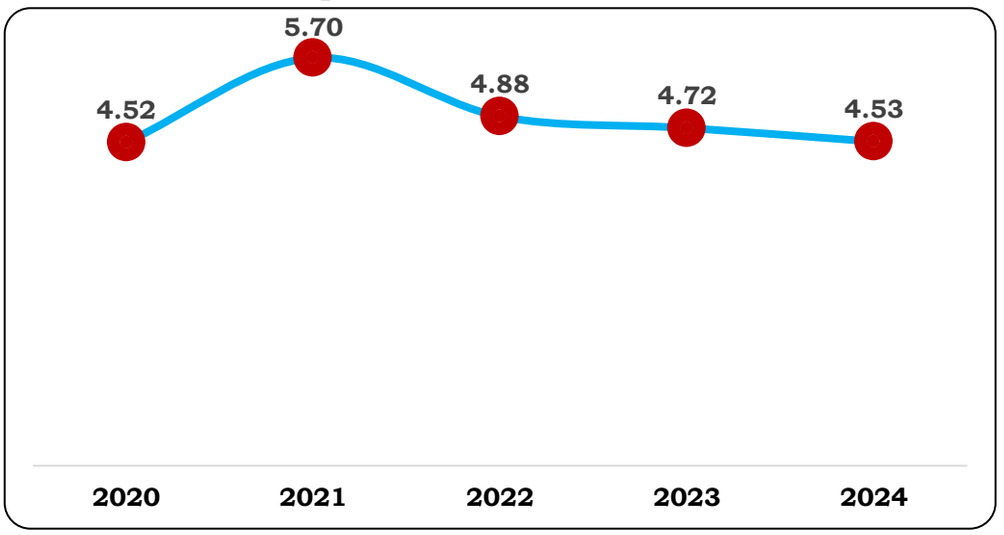

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Data mengenai pengangguran terbuka dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dipilah berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.32
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Kategori Pengangguran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin (Orang)	6.437	5.156	6.528	6.369	6.770
Laki - laki	4.328	3.091	3.690	3.034	3.271
Perempuan	2.109	2.065	2.838	3.335	3.499
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Orang)	6.437	5.156	6.528	6.369	6.770
≤ Sekolah Dasar (SD)	774	272	2.432	464	1.318
Sekolah Menengah Pertama	1.022	894	765	997	488
Sekolah Menengah Atas	3.033	3.140	2.981	4.511	3.570
Perguruan Tinggi	1.608	850	350	397	1.394

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

1. Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin
   Pengangguran terbuka periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan.

Lonjakan ini utamanya disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, tren membaik ditandai dengan penurunan angka pengangguran pada tahun 2024. Jumlah pengangguran laki-laki menurun dari 4.328 orang (2020) menjadi 3.271 orang (2024). Pada 2020, penganggur laki-laki mendominasi (67,3% dari total penganggur), namun proporsi ini menurun signifikan menjadi 48,3% pada 2024. Sementara itu, penganggur perempuan meningkat dari 32,7% (2020) menjadi 51,7% (2024), dengan lonjakan tertinggi pada 2023 (3.335 orang). Dengan keadaan ini menunjukkan bahwa peluang kerja pada jenis kelamin perempuan masih terbatas di Kabupaten Paser. Keadaan ini mengindikasikan kesenjangan gender dalam akses pekerjaan, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja ramah perempuan, budaya patriarki, atau dominasi pekerjaan informal yang tidak tercatat secara resmi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pelatihan keterampilan agar dapat berusaha sendiri dengan usaha UMKM, memperkuat pelatihan kewirausahaan berbasis digitalisasi untuk UMKM perempuan dan program pelatihan keterampilan khusus perempuan.

2. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

   Perkembangan angka pengangguran menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Paser menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada kelompok lulusan Sekolah Dasar (SD), jumlah pengangguran mengalami penurunan drastis dari 774 orang pada tahun 2020 menjadi 272 orang pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah ini kembali meningkat tajam menjadi 1.318 orang. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil, dari 1.022 orang pada tahun 2020 menjadi 488 orang pada tahun 2024. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 4.511 orang, sebelum akhirnya menurun menjadi 3.570 orang pada tahun 2024. Adapun pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, terjadi lonjakan pengangguran dari 397 orang pada tahun 2023 menjadi 1.394 orang pada tahun 2024. Peningkatan pengangguran pada tingkat pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja (skill mismatch), serta masih rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat ditempuh antara lain dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja, terutama bagi lulusan pendidikan maksimal SD dan SMP, melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, penambahan Sarana prasarana pendidikan yang mudah dan memadai untuk dapat dijangkau semua golongan, orientasi kurikulum pendidikan yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja, peningkatan peran pemerintah dalam menjembatani lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja seperti penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kerja, program pemagangan, dan kerja praktik sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap

pakai. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Paser secara berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing angkatan kerja lokal di berbagai sektor pembangunan.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan isu sentral dengan dimensi luas, sehingga berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk mengukur pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah instrumen penting untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah, karena IPM mencerminkan tujuan pembangunan manusia dalam batas tertentu. IPM terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mampu menggambarkan kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai IPM, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di berbagai bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dicapai ketika setiap individu memiliki peluang untuk hidup sehat, berpendidikan, berketerampilan, dan mampu mencukupi kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Keberhasilan pembangunan manusia diukur menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat dibandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Grafik II.9
Indeks Pembangunan Manusia
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

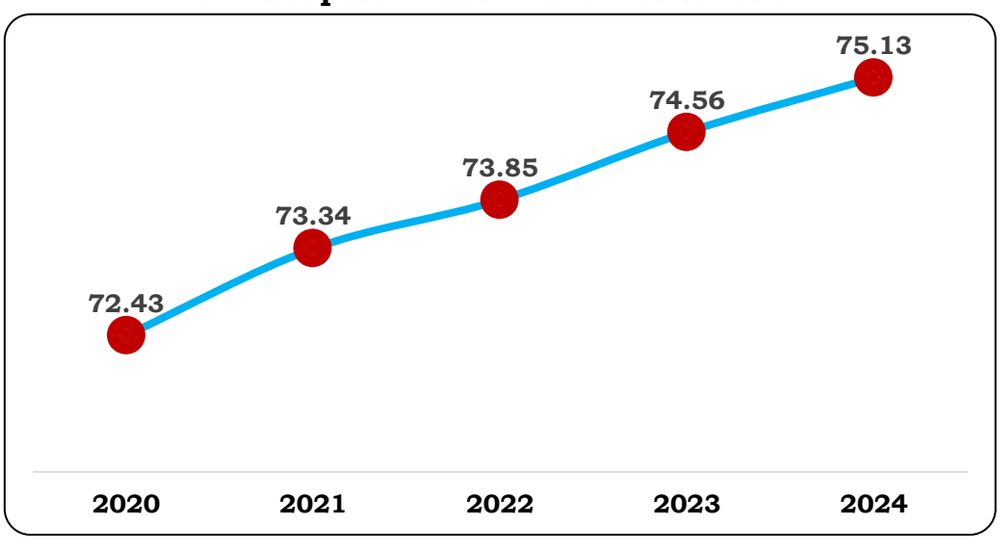

*)Menurut UHH Hasil Long Form SP2020
Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan ini juga tercermin pada komponen-komponen penyusunnya. Namun, pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada daya beli masyarakat selama masa

tersebut. Nilai IPM terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 nilai IPM berada pada 72,43 yang kemudian meningkat sebesar 2,70 poin menjadi 75,13 pada tahun 2024.

Kenaikan IPM yang stabil ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, layanan kesehatan yang membaik, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Capaian ini juga menandakan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya, jika dilihat dari komponen pembentuk IPM selama periode 2023 hingga 2024, pertumbuhan komponen angka harapan hidup meningkat dari 73,89 pada tahun 2023 menjadi 74,10 pada tahun 2024. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,91 pada tahun 2023 menjadi 8,92 pada tahun 2024, sedangkan angka harapan lama sekolah meningkat dari 13,37 pada tahun 2023 menjadi 13,38 pada tahun 2024. Selain itu, pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan dari 11.651 pada tahun 2023 menjadi 12.181 pada tahu 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, seluruh komponen pembentuk IPM mengalami pertumbuhan, di mana angka harapan hidup meningkat secara bertahap, rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan, serta pengeluaran per kapita terus bertambah. Di antara empat indikator pembentukan IPM, indikator yang paling berpengaruh adalah pengeluaran per kapita riil, sementara yang pengaruhnya paling rendah adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

Tabel II.33
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
IPM	**-**	**72,43**	**73,34**	**73,85**	**74,56**	**75,13**
Indeks Pendidikan	-	64,89	66,11	66,19	66,84	66,90
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,55	8,79	8,80	8,91	8,92
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,10	13,25	13,27	13,37	13,38
Indeks Kesehatan	-	82,28	82,72	82,74	82,91	83,20
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,48	73,77	73,78	73,89	74,10
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Kapita/Tahun	10.344	10.673	11.181	11.651	12.181

**Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di sektor kesehatan. Angka harapan hidup (AHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. AHH bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Perkembangan angka harapan hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan seperti yang terlihat pada grafik di bawah. Pada tahun 2020 sebesar 73,48 yang kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,10 dikarenakan perbedaan data proyeksi yang digunakan. Program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan angka harapan hidup perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Paser ke depan.

Grafik II.10
Angka Harapan Hidup (AHH)
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)

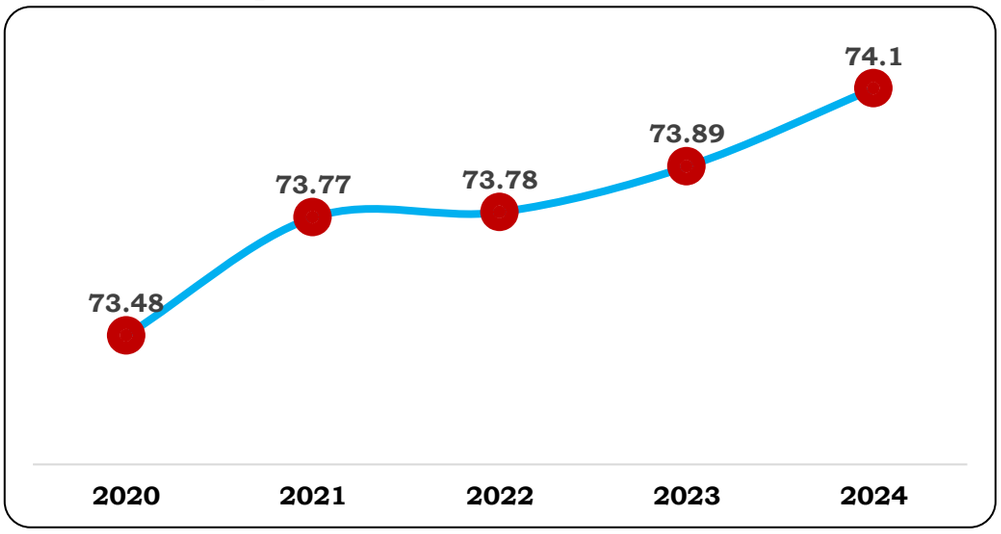

**)Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Tabel II.34
Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Angka Harapan Hidup	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	71,32	71,51	71,51	71,58	71,72
Perempuan	75,75	75,16	76,16	76,31	76,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Dalam mengukur kesehatan sumber daya manusia dapat dilihat juga melalui prevalensi stunting yang mengalami penurunan. Prevalensi stunting merupakan persentase atau jumlah kasus stunting (gangguan pertumbuhan pada anak karena kurang gizi kronis) yang terjadi pada suatu populasi di wilayah. Di Kabupaten Paser prevalensi stunting dalam empat tahun terakhir berada dalam rentang angka 22,40 persen hingga 24,90 persen. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting sebesar 23,60 persen dengan meningkat mencapai 24,90 persen pada tahun 2022. Prevalensi stunting membaik pada tahun 2023 menjadi 22,40 persen namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 23,40 persen. berdasarkan hasil survei, prevalensi stunting di Kabupaten Paser masih menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Ketidakkonsistenan capaian ini menandakan bahwa meskipun berbagai program intervensi telah dijalankan, upaya penanganan stunting belum berjalan secara konvergen dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Faktor yang

mempengaruhi tren yang fluktuatif yaitu penguatan posyandu, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan faktor yang menyebabkan meningkat seperti ketidakteraturan pemantauan pertumbuhan, rendahnya kesadaran gizi keluarga, dan terbatasnya cakupan air bersih dan sanitasi layak di beberapa desa.

Grafik II.11
Prevalensi Stunting di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024

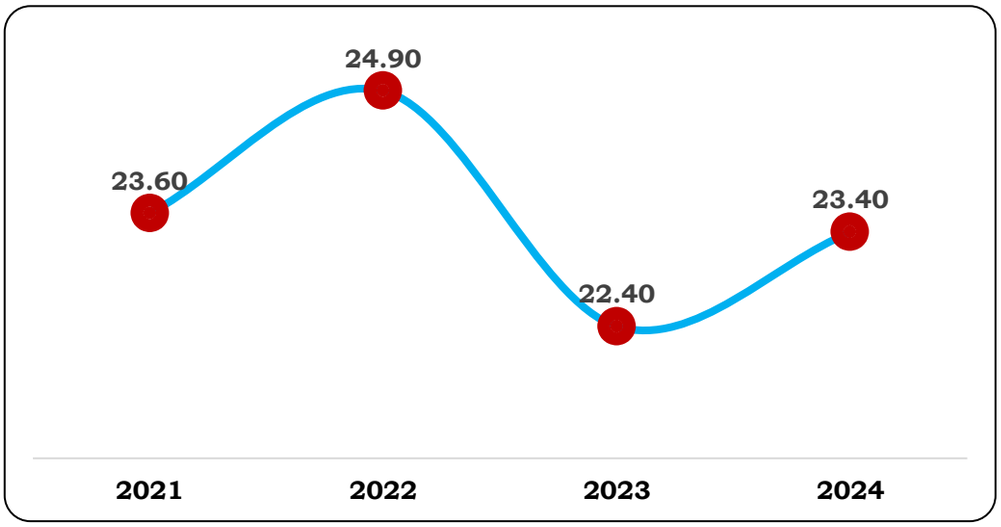

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah Kabupaten Paser akan fokus pada penguatan intervensi di hulu, seperti pendampingan keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peningkatan cakupan ASI eksklusif, serta edukasi gizi berbasis keluarga dan komunitas, disertai perbaikan infrastruktur dasar dan sistem pemantauan yang lebih akurat. Harapannya, penurunan prevalensi stunting dapat lebih konsisten dan berkelanjutan hingga mencapai target nasional.

Grafik II.12
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

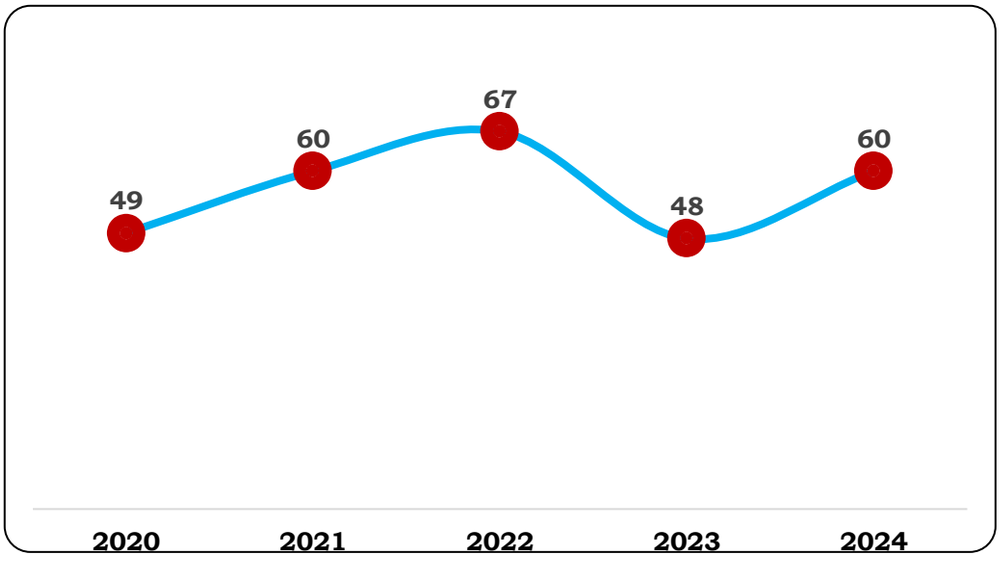

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2020-2024), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif.

Angka kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 49 bayi, pada tahun 2021 angka kematian bayi kembali meningkat menjadi 60 bayi dan pada tahun 2022 angka kematian bayi mengalami peningkatan menjadi 67 bayi dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 48 bayi dan pada tahun 2024 angka kematian bayi meningkat menjadi 60 bayi. Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi pada tahun 2024 di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh berat badan lahir rendah, asfiksia, tetanus neonatorum, infeksi, kelainan kongenital dan lain-lain. Sedangkan pada periode post-neonatal penyebab kematian adalah pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung, dan lain-lain.

Dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024), capaian jumlah Kematian Balita (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian balita pada tahun 2020 sebanyak 55 balita, pada tahun 2021 angka kematian balita Kembali meningkat menjadi 64 balita dan pada tahun 2022 jumlah kematian balita meningkat yaitu sebanyak 71 balita dan pada tahun 2023 menurun menjadi 60 balita, begitu juga pada tahun 2024 menurun menjadi 58 balita. Adapun penyebab utama kematian balita yang terjadi di Kabupaten Paser adalah Penyakit kongenital, infeksi TB pada balita, ISPA, diare dan asupan.

Grafik II.13
Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

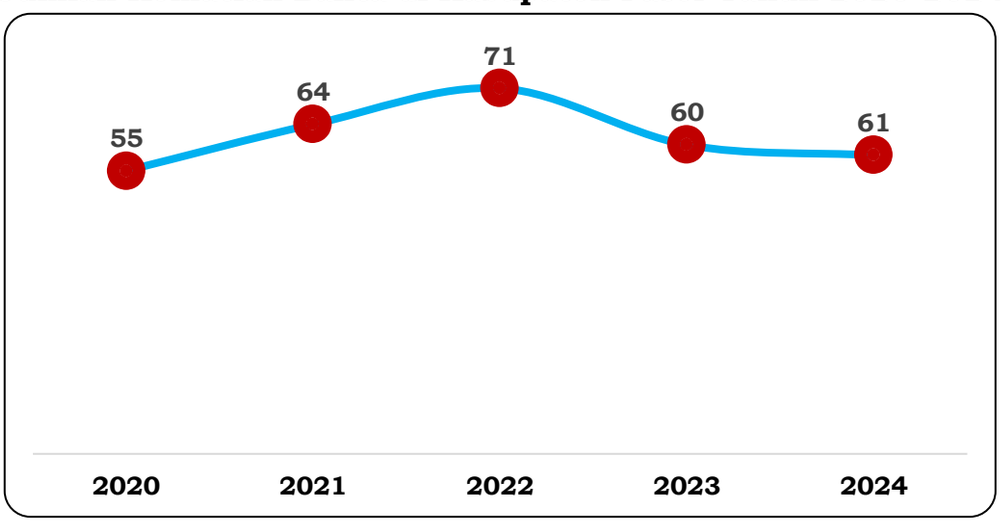

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Jumlah Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Paser dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi sebagaimana tertera dalam Tabel 2.28. Namun demikian angka ini dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebanyak 150 orang per 100.000 kelahiran hidup. sehingga dapat dikatakan bahwa program Pemerintah Kabupaten Paser dalam menurunkan angka kematian Ibu sudah cukup berhasil. Persoalan kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Paser pada tahun 2023 disebabkan karena eklamsi, kelainan jantung, gangguan hati dan hipertensi. Selama kurun waktu 2020-2024 umumnya disebabkan oleh karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai masalah kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan semasa kehamilan, pendarahan, ekslapsi, lambat dirujuk, dan persalinan belum sepenuhnya ditangani oleh bidan atau tenaga

kesehatan. Selain itu kondisi geografis yang sangat luas dan sulit serta topografi pegunungan menyebabkan kurang atau sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Grafik II.14
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

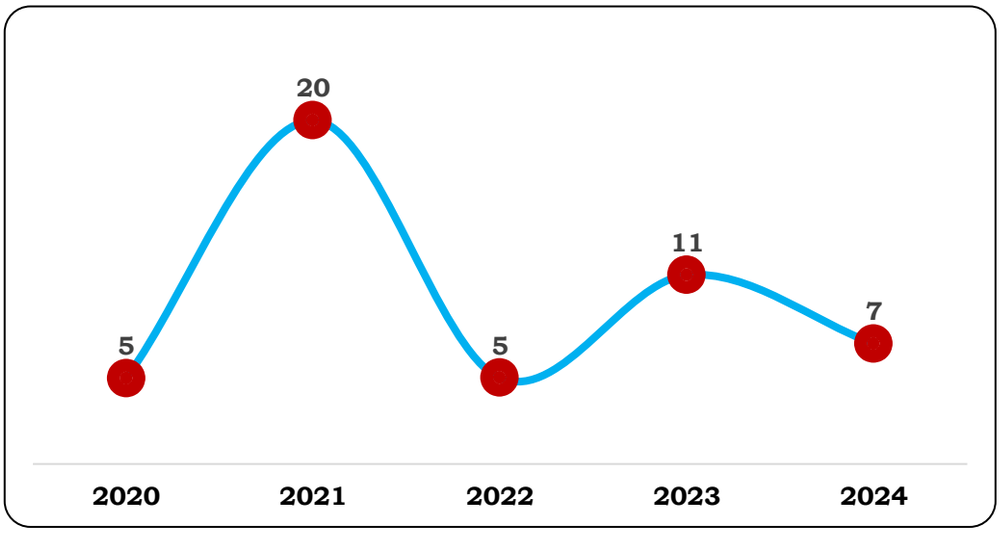

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Paser cenderung meningkat namun terjadi perlambatan. Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Paser mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan keluarga dan efektivitas layanan kesehatan berbasis keluarga. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,194, kemudian meningkat menjadi 0,204 pada tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut dengan kenaikan ke angka 0,220 di tahun 2022, dan mengalami lompatan signifikan menjadi 0,259 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi di tahun 2024, ketika indeks mencapai 0,266.

Grafik II.15
Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

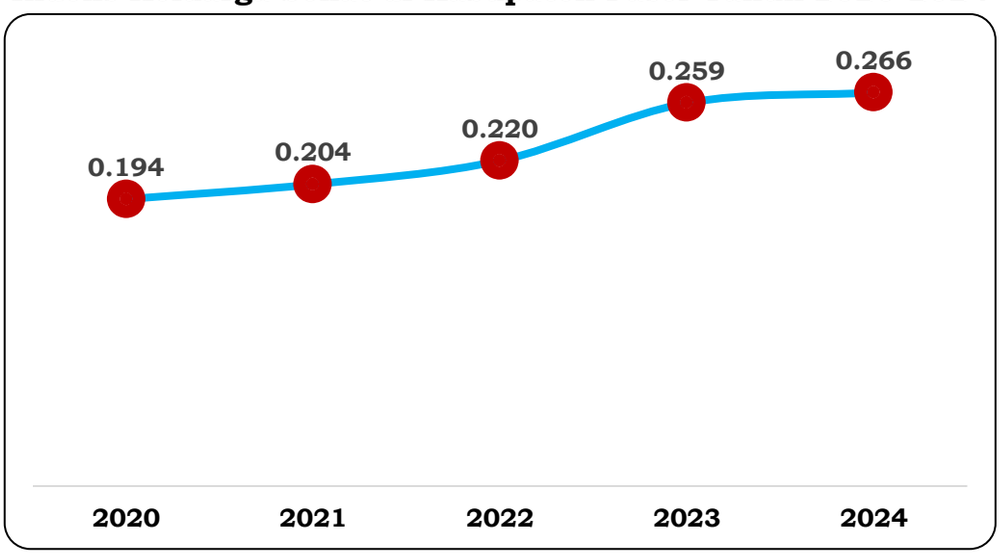

Sumber: Dashboard PIS PK Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Peningkatan ini menggambarkan semakin banyaknya keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, kepesertaan dalam program jaminan kesehatan, imunisasi anak, serta pemantauan kesehatan ibu dan balita. Peningkatan tersebut juga mencerminkan keberhasilan program intervensi kesehatan masyarakat dan pendekatan promotif-preventif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Grafik II.16
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)

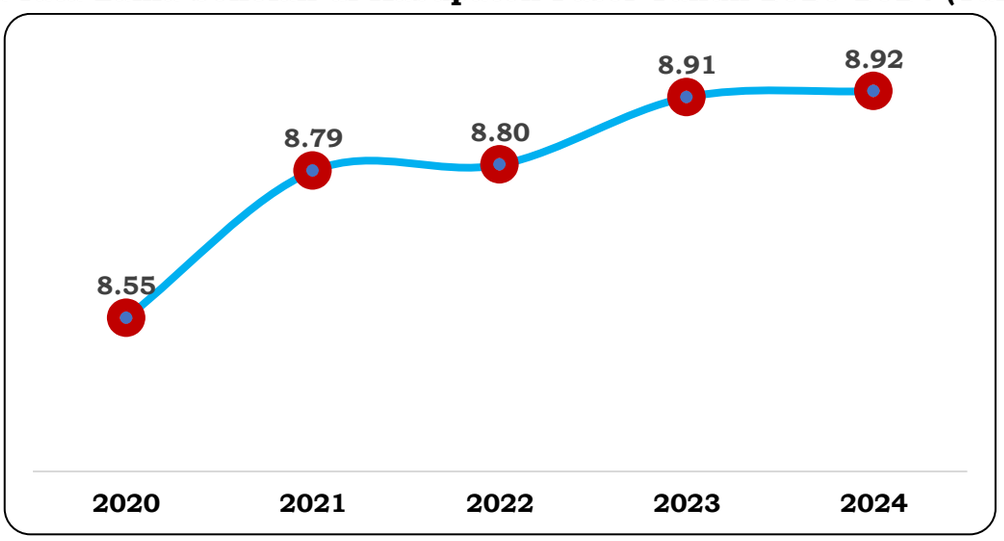

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Paser mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,04 persen per tahun hingga mencapai 8,92 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan selama 8,92 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas 2. Dengan begitu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Paser perlu perhatian khusus karena belum dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan jenis kelamin menunjukan tingkat akses dan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di

suatu wilayah. Pada tahun 2024, Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 9,18 tahun sedangkan dari perempuan sebesar 8,76. Meskipun gap nya masih kecil, namun perbedaan tersebut menunjukkan perempuan relatif lebih banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau putus sekolah lebih awal.

Tabel II.35
Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Rata-rata Lama Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	8,90	9,15	9,16	9,17	9,18
Perempuan	8,13	8,36	8,57	8,75	8,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Grafik II.17
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)

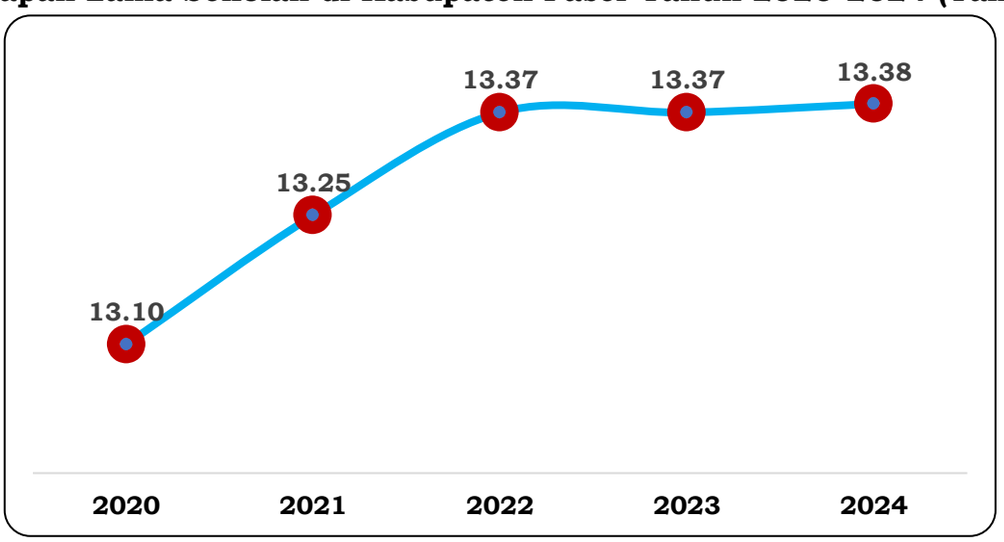

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Pada capaian harapan lama sekolah Kabupaten Paser mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024, capaian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Paser berada pada 13,38 tahun dengan masing-masing untuk jenis kelamin sebesar 13,21 tahun untuk laki-laki serta 13,62 tahun untuk perempuan. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2024 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan

selama 13 tahun atau pendidikan yang setara dengan jenjang Perguruan Tinggi semester II.

Tabel II.36
Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Harapan Lama Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	13,01	13,18	13,19	13,2	13,21
Perempuan	13,46	13,47	13,49	13,61	13,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Peningkatan Indeks Minat Baca dan kunjungan masyarakat pada perpustakaan, menunjukkan bahwa membaca sudah menjadi budaya masyarakat dan menjadi sarana dalam mendapatkan ilmu pengetahuan diluar pendidikan formal. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran literasi masyarakat di Kabupaten Paser baru dilakukan dalam 2 tahun terakhir melalui indikator Tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta angka literasi/numerasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.37
Pembangunan Literasi dan Numerasi Masyarakat Kabupaten Paser
Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Skor literasi SD	NA	68,87	74,4	61,71
Skor Numerasi SD	NA	54,07	65,06	52,83
Skor literasi SMP	NA	73,51	75,93	71,23
Skor Numerasi SMP	NA	49,04	75,93	61,70
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	55,67	46,27	52,18	59.74
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	17,75	22,96	79,42	76,67
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat				

Indikator	2021	2022	2023	2024
Nasional				
-Numerasi	3,42	15,99	38,69	45,77
-Literasi Membaca	16,81	42,28	55,59	55,03
Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk,				
-Numerasi	33,09	50,66	66,82	45,77
-Literasi Membaca	55,41	68,24	74,90	76,59

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, Rapor Pendidikan Disdasmen, 2025

Literasi membaca merupakan kompetensi fundamental yang menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pembelajaran. Pemerintah Kabupaten/Kota [nama daerah] terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai upaya, termasuk pelatihan guru, penguatan budaya baca, serta peningkatan akses terhadap sumber belajar. Namun demikian, berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN), capaian skor literasi dan numerasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.

Fluktuasi skor literasi ini mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya konsisten. Di beberapa tahun, terjadi peningkatan skor akibat intervensi program peningkatan kapasitas guru dan penguatan literasi sekolah. Namun di tahun-tahun lain, skor kembali menurun, yang diduga kurangnya penguatan literasi berbasis keluarga dan komunitas, serta tingginya disparitas antar satuan pendidikan.

Sedangkan hasil Asesmen Nasional menunjukkan bahwa capaian numerasi siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran numerasi belum stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal satuan pendidikan maupun lingkungan belajar peserta didik.

Fluktuasi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan numerasi tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada pendekatan pembelajaran yang digunakan guru, partisipasi aktif siswa, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan dalam mendukung kemampuan logika dan berpikir kritis anak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis untuk menguatkan literasi dan numerasi secara berkelanjutan, termasuk dengan memperkuat pelatihan guru berbasis numerasi kontekstual, penyediaan media pembelajaran yang variatif, serta pengembangan budaya numerasi sejak dini melalui kegiatan di sekolah dan masyarakat, serta perlu mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam penguatan

literasi, termasuk melalui integrasi program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), penguatan peran perpustakaan sekolah dan desa, serta pelibatan aktif masyarakat dan media lokal dalam mendukung tumbuhnya budaya literasi di semua lapisan.

Pemerintah Kabupaten Paser terus menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan melalui penguatan literasi sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Paser menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan membaiknya akses terhadap bahan bacaan dan meningkatnya peran perpustakaan desa, sekolah, serta komunitas literasi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Program pembentukan pojok baca di ruang publik, serta penyelenggaraan lomba literasi dan pelatihan menulis turut mendorong minat baca masyarakat lintas usia.

Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Paser juga mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam empat pilar utama pembangunan literasi, yaitu: ketersediaan bahan bacaan, akses terhadap layanan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat melalui literasi, dan dukungan kebijakan daerah. Peningkatan IPLM ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program literasi mulai berdampak pada penguatan budaya baca dan pembelajaran sepanjang hayat.

Meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan koleksi dan sumber daya perpustakaan di beberapa kecamatan, serta rendahnya partisipasi kelompok usia dewasa dalam kegiatan literasi, capaian ini menjadi modal sosial yang penting untuk terus dikembangkan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Paser akan terus mendorong kolaborasi antar sektor dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menargetkan peningkatan literasi digital, literasi keluarga, serta penguatan peran komunitas sebagai motor penggerak literasi di tingkat akar rumput.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial di Kabupaten Paser memegang peran penting sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Melalui program bantuan sosial, jaminan kesehatan, subsidi pendidikan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin, pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses terhadap layanan dasar. Upaya ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi guncangan, baik yang bersifat ekonomi maupun bencana alam, yang kerap melanda wilayah tersebut.

Perlindungan sosial yang inklusif membuka peluang bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi, masyarakat di Kabupaten Paser diberi kesempatan yang lebih adil untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang layak, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan

dapat meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Perlindungan sosial yang adaptif dapat dilihat melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Di Kabupaten Paser angka terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 berada di angka 93,40 persen yang artinya tenaga kerja di Kabupaten Paser sebagian besar sudah terdaftar serta terjamin dalam kepesertaan jaminan sosial.

Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini menjadi indikasi positif bahwa Kabupaten Paser semakin mampu menjamin perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, dan ketidakpastian ekonomi. Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial.

Grafik II.18
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Tahun)

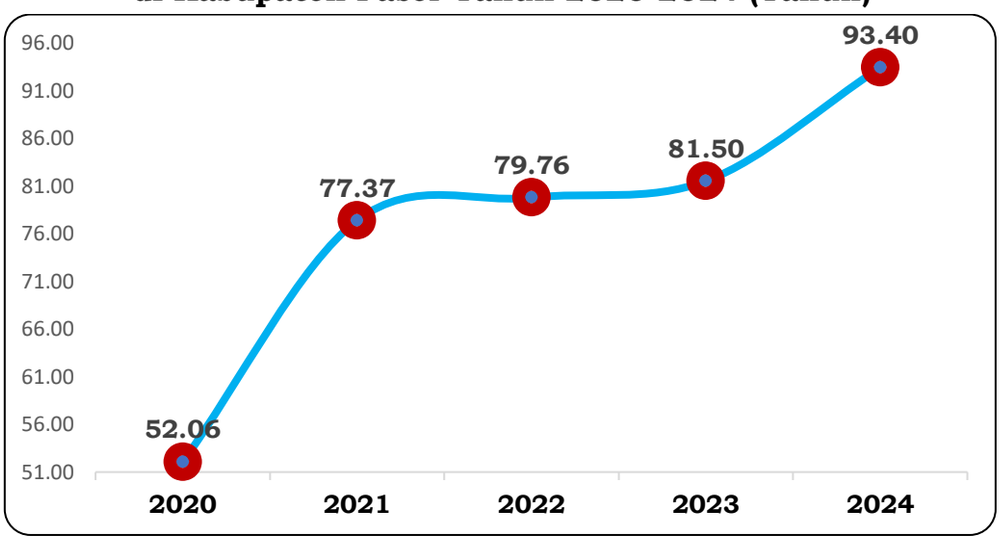

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot, 2025

Pemerintah Kabupaten Paser terus berkomitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Salah satu indikator penting dalam mengukur akses tersebut adalah cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta mandiri. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu kondisi ketika seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif tanpa menghadapi kesulitan finansial.

Dalam beberapa tahun terakhir, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Paser mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, pada tahun 2022 cakupan kepesertaan telah mencapai 100 % dari total penduduk, yang berarti Kabupaten Paser telah memenuhi ambang batas UHC sebesar ≥95%. Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, dan lintas sektor, termasuk optimalisasi alokasi anggaran untuk PBI daerah serta upaya jemput bola dalam pendataan peserta nonaktif atau belum terdaftar. Meskipun

cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Paser telah mencapai angka yang tinggi secara administratif, melampaui ambang batas Universal Health Coverage (UHC), terdapat kendala signifikan dalam tingkat keaktifan peserta yang fluktuatif.

Pencapaian status UHC ini memberikan dampak positif dalam hal peningkatan akses masyarakat terhadap layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, terutama bagi kelompok rentan seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Selain itu, beban biaya pengobatan yang sebelumnya menjadi kendala kini dapat ditanggulangi melalui skema pembiayaan yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan pasca-UHC yang harus diantisipasi, seperti peningkatan utilisasi layanan kesehatan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan mutu layanan, klaim yang tertunda, serta masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui status kepesertaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat verifikasi dan validasi data kepesertaan secara berkala, mendorong kolaborasi lintas sektor memperkuat edukasi masyarakat, memastikan keberlanjutan iuran PBI, dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan agar manfaat dari UHC dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Serta menunjukkan bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang disabilitas di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun awal tercatat sebanyak 2.390 PMKS pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 2.574 pada tahun 2023, sedangkan jumlah penyandang disabilitas bertambah dari 804 orang pada tahun 2022 menjadi 982 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kebutuhan yang semakin besar terhadap layanan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial yang adaptif sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan, serta perlindungan yang memadai dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan ekonomi di daerah

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kehidupan beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, beradab, dan bermartabat. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama yang maslahat, yaitu kehidupan yang menjamin kebebasan beragama, toleransi antar umat, serta mendukung peran agama dalam pembangunan moral dan sosial masyarakat.

Kabupaten Paser memiliki keragaman agama yang terdiri dari mayoritas umat Islam (92,76%), diikuti oleh Kristen Protestan (3,41%), Katolik (3,46%), Hindu (0,17%), Budha(0,20%) dan 0,001% beragama lainnya. Terdapat lebih dari 500 rumah ibadah yang tersebar di seluruh kecamatan diantaranya 301 masjid, 415 mushola, 70 gereja protestan, 18 gereja katolik, 2 pura, dan 2 wihara. Pemerintah daerah bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah menjalankan berbagai inisiatif untuk menjaga harmoni antarumat beragama hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada konflik yang berkaitan dengan keagamaan.

Meskipun kondisi kerukunan umat beragama relatif baik, namun masih ditemukan tantangan seperti ketimpangan dukungan terhadap rumah ibadah agama minoritas, serta rendahnya literasi keagamaan moderat di kalangan generasi muda. Hal ini memerlukan perhatian serius melalui program pembinaan dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama dan toleransi. Ketersediaan tokoh agama yang berwibawa dan aktif, keberadaan FKUB yang solid, serta tradisi lokal seperti musyawarah adat dan gotong royong menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung kehidupan beragama yang maslahat dan berkeadilan.

Pemajuan kebudayaan diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Pembangunan kebudayaan terus ditingkatkan dan diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. Kearifan lokal dan nilai budaya dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Kabupaten Paser adalah salah satu daerah dii wilayah Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, kebudayaan masyarakat Paser di wariskan secara turun temurun. Berbagai peninggalan budaya tersebut tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Kabupaten Paser hingga saaat ini telah memiliki peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar untuk pemajuan kebudayaan yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser. Perda tersebut dapat menjadi dasar untuk memelihara dan mengembangkan nilai nilai budaya yang dalam pengembangan nya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan kebijakan pembangunan budaya sangat diperlukan agar kebudayaan daerah terus tumbuh dan diperkaya dengan nilai nilai adat budaya yang ada di Kabupaten Paser. Data terkait kesenian dan budaya yang terdapat di Kabupaten Paser seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.38
Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Manuskrip	24
2.	Tradisi Lisan	17
3.	Adat Istiadat	49
4.	Ritus	22
5.	Pengetahuan Tradisional	19
6.	Teknologi Tradisional	83
7.	Kesenian Tradisional	43
8.	Bahasa	10
9.	Permainan Rakyat	26
10.	Olahraga Tradisional	9
11.	Jumlah Objek yang diduga Cagar Budaya	90
12.	Jumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan	10
13.	Jumlah Lembaga Kebudayaan	30
14.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Kementerian	7

No	Uraian	Jumlah
15.	Jumlah sekolah yang mengajarkan muatan local Bahasa paser	190
16.	Jumlah tempat promosi budaya	30
17.	Jumlah pementasan seni Budaya dalam setahun	8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, 2025

Dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Paser terdapat beberapa permasalahan diantaranya Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal kabupaten paser yakni 10 objek, Minimnya SDM Kebudayaan Kebudayaan dan lembaga Kebudayaan (minimnya tenaga kebudayaan dengan kualifikasi Arkeologi, sejarah, dan SDM Kebudayaan yang bersertifikasi), Kurangnya sarana prasarana kebudayaan yang diperlukan dalam pengembangan kebudayaan, Minimnya ruang ekspresi budaya dan program pengembangan budaya terutama yang melibatkan masyarakat dan praktisi seni, Penurunan kemampuan berbahasa paser pada generasi muda akibat derasnya arus globalisasi, Minimnya kualitas dan kuantitas pengelolaan Museum Daerah Sadurengas sebagai salah satu cagar budaya, serta belum adanya buku sejarah dan kebudayaan paser yang dapat dijadikan rujukan utama olehmasyarakat/publik.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan.

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Tabel II.39
Indikator Pembangunan Gender di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG	71,35	71,49	72,27	73,15	74,03
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,66	65,67	64,94	68,35	65,98
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,549	0,511	0,528	0,489	0,527
Umur Harapan Hidup Perempuan (tahun)	74,66	74,84	74,87	75,08	76,60
Harapan Lama Sekolah Perempuan (tahun)	13,46	13,47	13,49	13,61	13,62
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (tahun)	8,13	8,36	8,57	8,75	8,76
Pengeluaran per Kapita Perempuan	2.902	2.965	3.091	3.213	3.386

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(ribu rupiah/tahun)					

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting dalam mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di Kabupaten Paser, capaian IPG selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan secara fluktuatif. Hal ini mencerminkan adanya upaya dalam memperkecil kesenjangan gender, meskipun capaian tersebut masih belum optimal dan memerlukan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Peningkatan IPG di Kabupaten Paser didorong oleh berbagai perbaikan dalam dimensi kesehatan dan pendidikan, terutama bagi perempuan. Salah satu indikator utamanya, yakni Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan, menunjukkan tren yang meningkat, menandakan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan.

Selain itu, capaian di sektor pendidikan juga menunjukkan perbaikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan meningkat, yang mencerminkan semakin banyak anak perempuan yang berkesempatan untuk menikmati pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa perempuan cenderung menyelesaikan pendidikan formal dengan durasi lebih lama dibandingkan sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, pendapatan per kapita perempuan juga menunjukkan peningkatan, mencerminkan adanya perbaikan akses perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi serta meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi produktif.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merepresentasikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi juga menunjukkan perkembangan meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 IDG berada di angka 65,66, relatif stagnan pada 2021 (65,67) dan menurun menjadi 64,94 pada 2022. Namun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada 2023 dengan capaian 68,35. Adapun pada tahun terakhir, terjadi penurunan kembali IDG menjadi sebesar 65,98 pada tahun 2024. Fluktuasi IDG ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya penguatan terhadap peran dan posisi perempuan dalam struktur formal pemerintahan dan dunia kerja profesional.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.IKG Kabupaten Paser menunjukkan perbaikan yang nyata dari 0,549 pada 2020 menjadi 0,489 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, terjadi kenaikan IKG kembali menjadi 0,527. Penurunan nilai IKG secara umum dalam lima tahun terakhir ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan gender, baik dalam akses terhadap kesehatan reproduksi, keterwakilan dalam parlemen, maupun partisipasi angkatan kerja. Namun perlu diwaspadai adanya ketimpangan kembali di tahun 2024 sehingga perlunya upaya lebih lanjut

untuk memperkuat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan, melalui kebijakan afirmatif, edukasi publik, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh lini pembangunan daerah.

Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pendekatan yang menempatkan penduduk sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Penduduk dipandang tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk mendorong kemajuan daerah. Pendekatan ini mempertimbangkan jumlah, struktur, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk dalam setiap kebijakan, sehingga pembangunan dapat berlangsung selaras dengan dinamika kependudukan.

Isu kependudukan menjadi faktor strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk, peningkatan proporsi usia produktif, ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah, serta tantangan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian penting. Pembangunan berwawasan kependudukan diarahkan untuk mengoptimalkan bonus demografi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan. Perkembangan indeks pembangunan berwawasan kependudukan Kabupaten Paser terlihat dalam tabel dibawah ini:

Grafik II.19
Cakupan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Paser Tahun 2022-2024

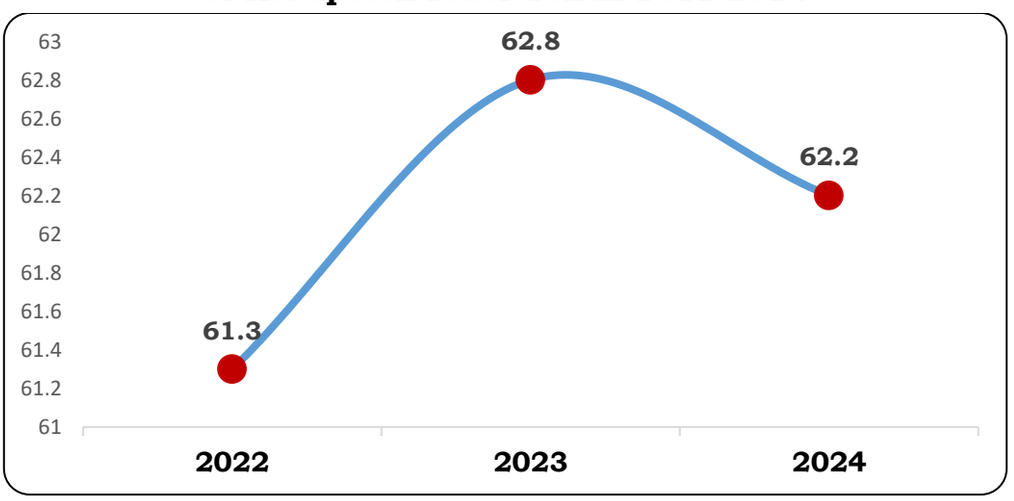

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Paser dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2022 nilai IPBK tercatat sebesar 61,3, meningkat menjadi 62,8 pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 62,2 pada tahun 2024. Tren ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kualitas pada beberapa dimensi kependudukan, terdapat tantangan dalam mempertahankan konsistensi capaian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi isu kependudukan dalam kebijakan lintas sektor, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif, serta pemutakhiran data kependudukan secara berkala.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Paser diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Tingkat kesejahteraan menurut indikator keluarga sejahtera BKKBN adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tahapan sesuai dengan indikator yang ada. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat lima tahapan kesejahteraan keluarga, yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera: Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari lima indikator kesejahteraan.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I): Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dua kali sehari, memiliki pakaian yang memadai, tinggal di rumah dengan atap, lantai, dan dinding yang baik, serta akses kesehatan dan pendidikan untuk anggota keluarga.
3. Keluarga Sejahtera II (KS II): Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga, seperti melaksanakan ibadah, memiliki hubungan yang harmonis, dan memiliki akses informasi.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III): Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis, serta aktif dalam kegiatan sosial dan memberikan sumbangan untuk kepentingan masyarakat.
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+): Keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, psikologis, pengembangan diri, dan akuntabilitas diri.

Adapun di Kabupaten Paser, pada tahun 2020 terdapat 4.382 keluarga dengan status kesejahteraan keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera, sedangkan pada tahun yang sama, terdapat 15.379 keluarga yang memiliki status kesejahteraan keluarga sejahtera 1.

Indeks pembangunan keluarga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang diukur melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70

iBANGGA Kabupaten Paser mengalami peningkatan serta berada dalam indeks pembangunan keluarga yang cukup baik (berkembang) dan meningkat setiap tahunnya, namun apabila dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser berada pada peringkat ke sepuluh atau terendah pembangunan keluarga nya. Adapun perkembangan indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Paser dalam empat tahun terakhir dapat terlihat seperti Grafik dibawah ini:

Grafik II.20
Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)
di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024

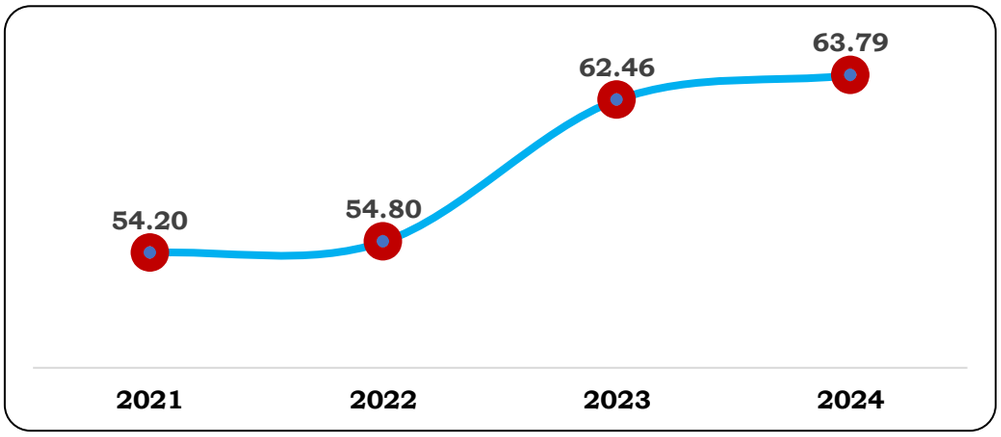

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

. Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) Kabupaten Paser menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IBANGGA Kabupaten Paser berada di angka 54,20, dan meningkat tipis menjadi 54,80 pada tahun 2022. Meskipun kenaikan pada periode awal masih terbatas, hal ini menandakan mulai meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana indeks naik menjadi 62,46, disusul dengan peningkatan lebih lanjut menjadi 63,79 pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan hasil dari intervensi kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan peran penyuluh keluarga, peningkatan layanan konseling, kampanye keluarga berencana yang lebih inklusif, serta sinergi program lintas sektor yang memperkuat fondasi keluarga dari sisi sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Namun demikian, meskipun terdapat kenaikan nilai indeks, **status iBangga daerah ini masih berada pada kategori "berkembang"**, belum mencapai kategori "mandiri" atau "tangguh" sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN maupun kebijakan nasional BKKBN. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan emosional yang kuat.

Kategori "berkembang" ini menggambarkan bahwa sebagian besar keluarga masih menghadapi tantangan dalam aspek kemandirian ekonomi, pengasuhan anak, pendidikan keluarga, serta akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan reproduksi dan pendidikan. Masih tingginya jumlah keluarga dalam klasifikasi pra-sejahtera dan sejahtera I, serta lemahnya fungsi pengasuhan dan perlindungan dalam keluarga menjadi tantangan utama.

Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti kondisi ini dengan memperkuat program-program pembangunan keluarga melalui pendekatan holistik, lintas sektor, dan berbasis data. Intervensi strategis seperti penguatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL), konseling keluarga berisiko stunting, serta penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan status iBangga dari *berkembang* menuju *mandiri* dan *tangguh*

Indeks Perlindungan Anak menunjukkan tren yang positif dan stabil.

Dimulai dari 59,83 pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 61,30 di tahun 2022, hingga mencapai 64,06 pada tahun 2023 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran sudah menunjukkan hasil yang baik. Konsistensi pada tahun 2023–2024 juga mengindikasikan bahwa sistem perlindungan anak di Kabupaten Paser telah mulai menguat, meskipun masih perlu akselerasi untuk mencapai nilai ideal nasional.

Berbeda dengan Indeks Perlindungan Anak, indikator Indeks Perlindungan Hak Anak menunjukkan fluktuasi dan cenderung stagnan. Nilainya meningkat dari 56,39 pada tahun 2021 menjadi 59,16 pada 2022, namun mengalami penurunan menjadi 58,55 di tahun 2023 dan stagnan pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas identitas, partisipasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum belum merata atau belum sepenuhnya efektif. Penurunan ini menjadi sinyal perlunya penguatan sistem lintas sektor, baik dari aspek regulasi, layanan publik ramah anak, maupun peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat. Adapun pada Indeks Pembangunan Pemuda, capaian pada tahun 2024 sebesar 46,23 menunjukkan belum optimalnya pembangunan pemuda di Kabupaten Paser. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan strategi khusus yang merujuk pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan daerah.

Upaya perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten/Kota [nama daerah] berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak melalui kebijakan, program, dan layanan yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian ini adalah **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**.

Tabel II.40
Pembangunan Masyarakat Sejahtera dan Inklusif
di Kabupaten Paser Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	59,83	61,30	64,06	64,06
Indeks Pemenuhan Hak Anak	56,39	59,16	58,55	58,55
Indeks Pembangunan Pemuda				46,23

Sumber: Data SIGA KEMENPPA, Disporapar, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai IPA Kabupaten Paser menunjukkan **tren peningkatan yang positif**. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam aspek regulasi ramah anak, penyediaan layanan ramah anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih cepat dan terintegrasi.

Kenaikan nilai IPA juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah layak anak (KLA), peningkatan jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), terbentuknya Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah, lembaga pendidikan, aparat

penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, antara lain pada aspek kualitas layanan psikososial korban, keterbatasan petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan belum meratanya implementasi sekolah/madrasah ramah anak di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat agar perlindungan anak tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi budaya di seluruh lapisan sosial.

Sedangkan capaian **Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)** selama beberapa tahun terakhir menunjukkan **tren yang fluktuatif**. Pada satu sisi, terdapat peningkatan pada aspek tertentu seperti pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak, namun di sisi lain terjadi penurunan pada dimensi perlindungan khusus, misalnya dalam penanganan kekerasan atau eksploitasi anak. Kondisi ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak serta belum meratanya kapasitas layanan di seluruh wilayah.

Faktor yang menyebabkan fluktuasi ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya (tenaga, anggaran, dan sarana), lemahnya sistem pelaporan dan pendataan kasus kekerasan terhadap anak, serta belum optimalnya sinergi antar sektor. Di beberapa kecamatan, layanan konseling anak dan keluarga masih bersifat sporadis, sementara kasus kekerasan berbasis rumah tangga dan lingkungan sekolah masih belum tertangani secara menyeluruh.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh, mulai dari pengembangan regulasi daerah, peningkatan kapasitas SDM, pembentukan unit layanan terpadu hingga pengarusutamaan perlindungan anak dalam seluruh perangkat daerah. Pemerintah daerah perlu menjadikan fluktuasi IPHA ini sebagai sinyal untuk melakukan perbaikan struktural dalam sistem layanan dan pemantauan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Paser pada tahun 2024 tercatat sebesar 46,23 persen, yang mencerminkan masih perlunya perhatian serius terhadap pembangunan kepemudaan secara menyeluruh. Capaian tertinggi terdapat pada domain pendidikan sebesar 70 persen, yang menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pemuda dalam pendidikan relatif baik. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan juga menunjukkan capaian yang cukup positif sebesar 65 persen. Namun demikian, sejumlah domain strategis lainnya menunjukkan capaian yang masih rendah, seperti domain gender dan diskriminasi dengan angka 53,33 persen, serta lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen disertai pula dengan domain partisipasi dan kepemimpinan yang hanya mencapai 43,33 persen, menggambarkan masih terbatasnya keterlibatan pemuda dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dan pembangunan sosial-politik di daerah.

Capaian ini menandakan bahwa pembangunan pemuda di Kabupaten Paser ditindaklanjuti dengan strategi khusus yang terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus utama ke depan adalah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan, baik melalui akses pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan kerja, perluasan partisipasi sosial-politik, maupun penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Dengan

demikian, pemuda Kabupaten Paser dapat berkontribusi secara lebih aktif dan produktif dalam mendorong kemajuan dan kemandirian daerah.

Sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus masa depan daerah, pemuda memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2024, sebanyak 22 organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan dan 535 pemuda yang terlibat dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Berikut perkembangan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Paser tahun 2020-2024:

Tabel II.41
Perkembangan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Tk. Kabupaten (Orang)	30	30	30	30	30
Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Orang)	25	217	175	237	150
Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	25	21	150	486	345
Jumlah Peserta Jambore Pemuda Daerah Tingkat Propinsi (Orang)	6	-	7	9	10
Jumlah Peserta Paskibraka Seleksi Tingkat Nasional (Orang)	4	17	5	4	-
Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional (Orang)	1	-	-	-	-
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	10	8	8	21	22
Jumlah kelompok wirausaha pemuda pemula yang dibina	3	1	2	2	3

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing adalah gambaran mengenai kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, maupun kelembagaan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi kompetitif di tingkat regional, nasional, maupun global. Aspek daya saing daerah meliputi daya saing sumber daya manusia; Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi; Penerapan ekonomi hijau dan biru; Tranformasi Digital; Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuahn Ekonomi; Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Karakteristik kelompok umur di Kabupaten Paser di dominasi oleh kelompok penduduk usia muda sehingga akan membentuk sebuah piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, disisi lain menanggung rasio ketergantungan (*dependency ratio*) usia tidak produktif yang tinggi pula.

Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Oleh karenanya, kebijakan terkait penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja di semua sektor merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Paser. Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan untuk menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan.

Dari sisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2024, kelompok umur produktif (15-64 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 95.655 jiwa penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+ Tahun). Sedangkan pada tahun 2024 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk mengalami penurunan menjadi 44,70 persen. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut tetap wajib diperhatikan untuk memproyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

Meskipun angka ketergantungan mengalami peningkatan, namun masih di bawah 50 yang mengindikasikan Kabupaten Paser berada pada jendela bonus demografi. Kabupaten Paser yang saat ini berada dalam fase jendela bonus demografi memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif dari kondisi ini dapat terlihat dalam berbagai sektor. Di bidang ekonomi, tingginya jumlah angkatan kerja dapat menjadi motor penggerak kegiatan produksi, perluasan usaha, dan inovasi jika disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas. Di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, ini menjadi momentum untuk menggenjot investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan vokasi, peningkatan akses pendidikan tinggi, dan pelibatan generasi muda dalam kewirausahaan.

Tabel II.42
Rasio Ketergantungan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Tahun	Umur (Tahun)			Jumlah	*Dependency Ratio*
	0 - 14	15 - 64	65+		
2024	83.886	214.012	11.769	309.667	44,70
2023	83.562	208.102	11.760	303.424	45,81
2022	69.013	197.706	13.346	280.065	41,66
2021	69.599	195.447	12.556	277.602	42,03
2020	70.304	193.314	11.834	275.452	42,49

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka, 2025

Kondisi demografi yang didominasi oleh penduduk usia muda dan produktif juga memberikan peluang besar dalam pengembangan sektor olahraga di Kabupaten Paser. Bonus demografi yang sedang berlangsung dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem olahraga yang kuat, baik dalam pembinaan atlet maupun peningkatan partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi menjadi modal utama dalam mencetak atlet-atlet potensial yang dapat berprestasi di tingkat daerah, provinsi, bahkan nasional.

Tabel II.43
Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Paser Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Jumlah Medali	21	136	7	3

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2025

Perkembangan cabang olahraga di Kabupaten Paser pada tahun 2022 menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama sejak menjadi tuan rumah POPDA XVI Kalimantan Timur tahun 2022 dan berhasil meraih peringkat ke-4 dengan perolehan 29 medali emas. Beberapa cabang olahraga, seperti gulat, mulai diperkenalkan melalui pertandingan ekshibisi, sementara cabang-cabang lain seperti renang, bulutangkis, dan senam terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan dan kompetisi lokal. Pemerintah daerah secara aktif mendorong pembinaan olahraga dengan mengadakan pelatihan Long Term Athlete Development (LTAD) bagi pelatih dan guru olahraga, serta membentuk pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Paser untuk periode 2024–2028 guna memperkuat tata kelola olahraga prestasi. Selain itu, pada tahun 2024 juga dibentuk pengurus Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) untuk mengembangkan olahraga kedirgantaraan seperti aeromodelling dan drone. Upaya-upaya ini menegaskan komitmen Kabupaten Paser dalam memajukan olahraga sejak usia dini dan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Porprov Kaltim VIII tahun 2026.

Dukungan terhadap organisasi olahraga juga ditingkatkan tiap tahunnya. Sampai tahun 2024, terdapat 235 klub olahraga dan 4 gelanggang/balai remaja, selain itu untuk mendukung kegiatan olahraga terdapat 56 Sarana Olahraga yang terbesar di Kabupaten Paser.

Tabel II.44
Perkembangan Bidang Olahraga Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Klub Olahraga	231	235	235	235	316
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	2	2	2	2	4
Jumlah Sarana Olahraga	54	56	56	56	202

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2025

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi memegang peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemanfaatan ketiganya tidak hanya menjaga stabilitas produktivitas di berbagai sektor, tetapi juga mempercepat transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Dalam jangka panjang, integrasi teknologi dan inovasi akan meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga membuka peluang baru bagi pembangunan daerah. Untuk itu, penguatan ekosistem riset, inovasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis guna memperkokoh fondasi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dukungan Kabupaten Paser terhadap penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru terus diupayakan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya melalui penguatan sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pariwisata bahari.

Tabel II.45
Pembangunan Produktivitas Perekonomian Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,04	-3,91	4,73	3,52	3,85
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,68	11,87	10,05	13,56	16,41
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,86	5,29	4,21	5,67	6,80
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,28	0,22	0,34	0,44
Indeks Daya Saing Daerah	-	-	2,87	2,86	3,31
Rasio Kewirausahaan	4,94	6,59	4,16	6,02	6,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor ini mengalami perkembangan yang beragam selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020. Terlihat Indikator yang ada pada pembangunan produktivitas Perekonomian Kabupaten Paser antara lain : Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Indeks Daya Saing Daerah, dan Rasio Kewirausahaan mengalami penurunan pada 2020 sampai

tahun 2022. Hal ini terjadi merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kontraksi pada berbagai bidang perekonomian salah satunya sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2022 sebagai pemulihan pasca Covid-19 mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Peningkatan kontribusi ini mencerminkan bahwa sektor primer tetap menjadi tumpuan utama dalam perekonomian lokal. Meskipun pertumbuhan tahunan tidak selalu tinggi, ketahanan dan keberlanjutan sektor ini menjadi modal penting dalam mendukung arah pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal di Kabupaten Paser.

Selain itu, sektor pariwisata juga menunjukkan perkembangan yang pesat setelah pandemi. Rasio PDRB Industri Pengolahan yang sempat turun dari 5,86 persen pada tahun 2020 menjadi 4,21 persen di 2022 kembali meningkat menjadi 6,80 persen di 2024. Begitu pula dengan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang naik dari 0,22 persen pada 2022 menjadi 0,44 persen pada 2024. Jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara juga melonjak tajam, dari hanya 907 orang pada 2020 menjadi 49.129 orang pada 2024, seiring dengan bertambahnya destinasi wisata dari 41 destinasi menjadi 254 destinasi. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata meningkat signifikan dari Rp41,4 juta pada tahun 2020 menjadi Rp254,4 miliar pada 2024. Fakta ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata berperan besar dalam memperkuat basis ekonomi daerah, sekaligus mendukung diversifikasi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada sektor primer tetapi juga sektor jasa.

Tabel II.46
Pembangunan Produktivitas Perekonomian Kepariwisataan
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,86	5,29	4,21	5,67	6,80
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,33	0,28	0,22	0,34	0,44
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (Orang)	5	17	22	24	30
Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Destinasi Wisata (Orang)	907	8865	12508	18362	49129
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Rupiah)	41.442.718	90.342.732	137.309.500	16.160.466.264	254.437.549.058

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Aktivitas ekonomi berkaitan erat dengan sumber daya manusia yaitu pada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja digambarkan pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Grafik II.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

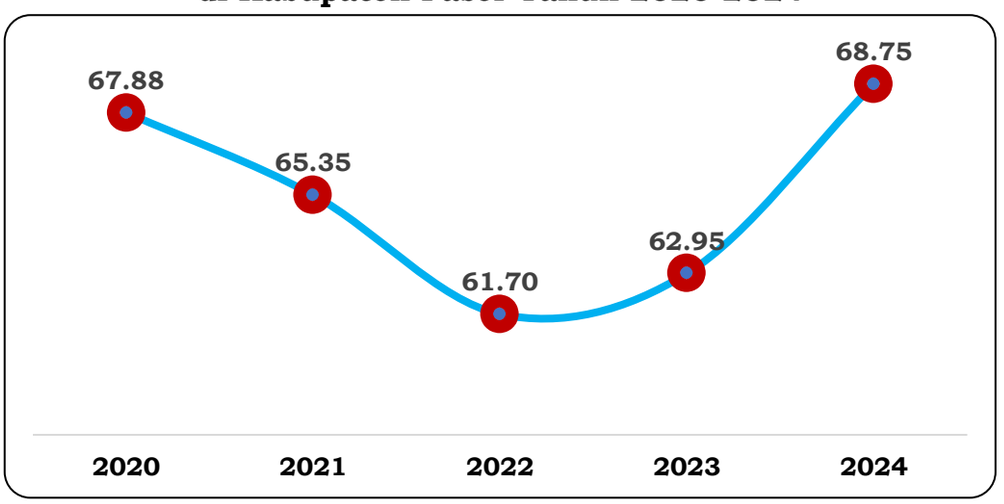

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Paser selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan dampak berbagai kondisi sosial-ekonomi terhadap ketersediaan dan kesiapan penduduk usia kerja dalam memasuki pasar kerja. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 67,88 persen, yang mencerminkan tingginya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, TPAK mengalami penurunan berturut-turut menjadi 65,35 persen dan 61,70 persen. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan efek lanjutan dari pandemi COVID-19, di mana banyak sektor usaha mengalami kontraksi, yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi.

Kondisi mulai membaik pada tahun 2023, dengan TPAK mengalami kenaikan menjadi 62,95 persen, menandai pemulihan bertahap di sektor ketenagakerjaan. Pemulihan ini kemudian berlanjut secara signifikan pada tahun 2024, di mana TPAK melonjak menjadi 68,75 persen, melebihi capaian tahun 2020 dengan masing-masing berdasarkan jenis kelamin sebesar 89,43 persen untuk laki-laki serta 46,22 persen untuk perempuan. Kenaikan tajam ini mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi secara umum, meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta membaiknya kepercayaan masyarakat usia

produktif untuk kembali aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal.

Tabel II.47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	83,94	82,14	82,09	86,02	89,43
Perempuan	49,69	44,89	38,82	37,72	46,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Selanjutnya berkaitan dengan Iptek dapat terlihat dari data Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Paser menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021, IID berada pada angka 42,43 dan meningkat menjadi 52,16 pada tahun 2022. Terjadi penurunan mencapai 41,32 di tahun 2023 dan terus menurun ke angka 35,78 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan kapasitas kelembagaan daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai inovasi kebijakan dan pelayanan publik, yang berpotensi besar dalam mendukung efektivitas pemerintahan dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan perlunya pemerintah melakukan evaluasi agar menciptakan Kabupaten Paser yang lebih berinovasi.

Grafik II.22
Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

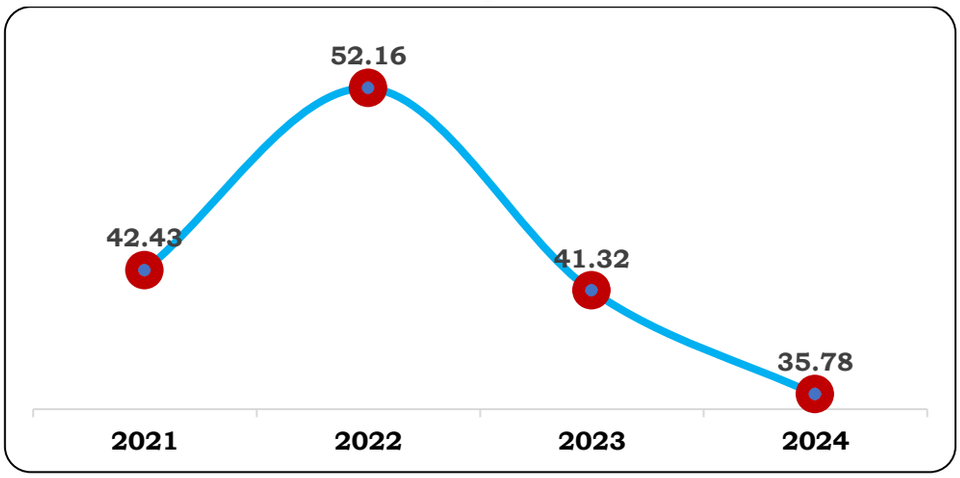

Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2025

2.1.3.3 Transformasi Digital

Transformasi digital memegang peran strategis dalam mendorong pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, dan memperkuat daya saing di era global. Melalui penerapan teknologi digital, tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga kualitas pelayanan publik pun meningkat. Di sisi lain, digitalisasi di sektor ekonomi membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang melalui pemanfaatan platform

e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), serta inovasi teknologi lainnya. Penguatan infrastruktur digital juga penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi informasi, barang, dan jasa, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daring maupun layanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.

Di Kabupaten Paser, percepatan pembangunan digital memerlukan pemenuhan infrastruktur berupa akses masyarakat terhadap teknologi informasi, khususnya komunikasi dan informatika. Pemerintah berperan dalam membentuk masyarakat informatif dengan menyediakan, menyebarkan, dan memantau informasi yang bermanfaat melalui berbagai program penyebaran informasi publik serta peningkatan implementasi e-government. Upaya ini bertujuan menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan cepat. Meski kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap perekonomian daerah masih terbatas, pencapaian digitalisasi di Kabupaten Paser mulai terlihat dari pertumbuhan signifikan pada produk domestik regional bruto (PDRB), terutama pada tahun 2024 yang mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 7,15 persen.

Tabel II.48
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	9,08	6,86	5,19	6,33	7,15
Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	0,79	0,68	0,51	0,72	0,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Paser sudah dirasa cukup besar. Pemerintah Kabupaten Paser menangkap kebutuhan ini dengan menginisiasi dimulainya pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Paser. Namun fasilitas infrastruktur jaringan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser masih perlu perbaikan. Berikut kondisi jaringan internet di Kabupaten Paser.

Grafik II.23
Kondisi Jaringan Internet Kabupaten Paser

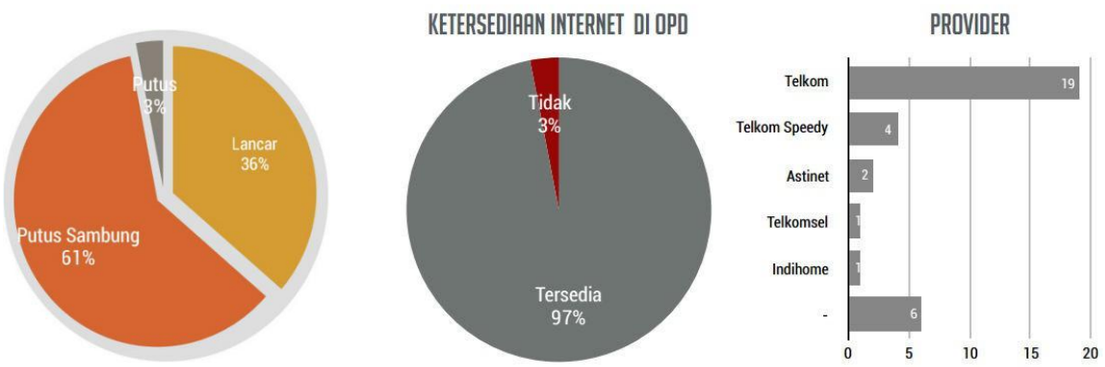

Sumber : Perbup Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan E-Gov

Hampir seluruh unit kerja telah memiliki koneksi internet dan sebagian besar unit kerja menggunakan provider internet yang berasal dari PT. TELKOM. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (61%) performa internet masih tidak stabil. Padahal, ketersediaan jaringan internet yang handal merupakan salah satu komponen yang pasti digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik untuk kolaborasi internal antar unit kerja maupun pelayanan masyarakat termasuk jaringan lokal atau LAN (*Local Area Network*). Ketersediaan LAN ini akan memberikan efisiensi dalam proses kerja di internal unit kerja. mempercepat proses pertukaran file (*file sharing*), mempermudah proses penggunaan perangkat pendukung secara bersama-sama dan terintegrasi serta akan mempermudah proses pengadaan dan pengelolaan koneksi internet pada masing masing perangkat yang dituju.

Tabel II.49
Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser

No.	KECAMATAN	2023				JUMLAH DESA	2024				JUMLAH DESA
		2G	3G	4G	BLANK SPOT		2G	3G	4G	BLANK SPOT	
1	Tanah Grogot	1	1	14	0	16	0	0	16	0	16
2	Paser Belengkong	1	10	5	0	16	0	1	15	0	16
3	Kuaro	0	0	13	0	13	0	0	13	0	13
4	Long Ikis	8	11	7	0	26	0	1	25	0	26
5	Long Kali	3	11	9	0	23	0	0	23	0	23
6	Muara Komam	2	9	2	0	13	0	1	12	0	13
7	Tanjung Harapan	2	4	1	0	7	2	0	5	0	7
8	Muara Samu	4	1	4	0	9	0	1	8	0	9
9	Batu Engau	7	2	4	0	13	1	0	12	0	13
10	Batu Sopang	1	4	4	0	9	0	2	7	0	9
TOTAL		**29**	**53**	**63**	**0**	**145**	**3**	**6**	**136**	**0**	**145**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser, 2025

Berdasarkan data tabel diatas bahwa Kecamatan yang di desa nya sudah memiliki jaringan 4G terbanyak yaitu Tanah Grogot sebanyak 16 desa dan Kuaro sebanyak 13 desa, sedangkan desa-desa di 8 Kecamatan lainnya masih berada di jaringan 2G, 3G, dan sebagian 4G. namun tidak ada lagi desa-desa di Kabupaten Paser yang terdapat titik blank spot. oleh karena itu desa-desa di kabupaten paser tahun kedepannya lebih meningkatkan program desa digital untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan di Kabupaten Paser.

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang berdaya saing serta memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok global. Di Kabupaten Paser, arah pembangunan ini tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB menurut pengeluaran.

Kontribusi PMTB dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser tetap menjadi salah satu penopang utama pembangunan dengan mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi PMTB tercatat sebesar 19,53 persen, meningkat menjadi 22,58 persen di tahun

2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB sempat mengalami kontraksi signifikan sebesar -14,35 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, namun berhasil pulih dengan pertumbuhan positif, bahkan mencapai angka 4,01 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya pemulihan investasi dan pembangunan fisik di daerah pasca pandemi.

Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Paser menunjukkan fluktuasi namun cenderung membaik. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 61,68 persen, meningkat tajam menjadi 74,39 persen di tahun 2022, lalu secara bertahap menurun hingga mencapai 56,93 persen pada tahun 2024. Meskipun data pertumbuhan ekonomi untuk indikator ini belum tersedia, tren kontribusi menunjukkan adanya potensi peningkatan daya saing produk daerah di pasar luar wilayah.

Secara keseluruhan, meskipun kontribusi PMTB terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan, namun perbaikan laju pertumbuhan dan peningkatan kontribusi net ekspor menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Paser mulai kembali ke jalur pemulihan dan bertransformasi menuju sistem ekonomi yang lebih terbuka, resilien, dan terintegrasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Tabel II.50
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-14,35	10,47	2,55	7,40	4,01
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,53	17,81	13,51	19,71	22,58
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	61,68	66,56	74,39	62,46	56,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batu bara) tetapi juga perkebunan sawit. Kedua sektor usaha tersebut padat modal dan menarik banyak investor baik yang berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolak ukur dalam pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta jumlah investasi di Kabupaten Paser.

Jumlah investor yang fluktuatif ini tidak mengurangi realisasi investasi pada tahun 2024. Adapun jumlah investor tahun 2024 sebanyak 65 Hal ini berarti membaiknya Iklim investasi di Kabupaten Paser. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, terlebih dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser.

Grafik II.24
Jumlah Investor di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

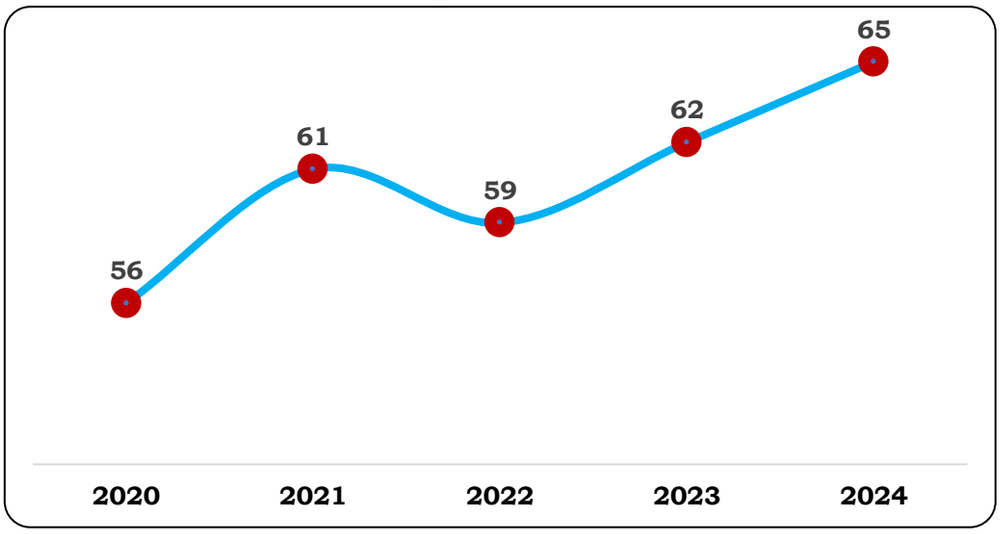

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Paser, 2025

Target realisasi investasi Kabupaten Paser pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000.000,-, sedangkan total realisasi investasi dari Januari 2024 sampai dengan September 2024 sebesar Rp.1.997.708.900.000, dengan capaian sebesar 80 persen yang terdiri dari PMA sebesar Rp.769.131.000.000 dan PMDN sebesar Rp.1.228.577.900.000,- . Pencapaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp.1.997.708.900.000,- turun 44,68 persen dibandingkan realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp.3.611.108.640.000,-

Tabel II.51
Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Tahun	PMA (Rupiah)	PMDN (Rupiah)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Asing (PMDN/PMA)
2020	224.978.600.000	432.992.300.000	657.970.900.000
2021	455.379.840.000	567.121.500.000	1.022.501.340.000
2022	1.565.134.180.400	1.616.947.700.000	3.182.081.880.400
2023	1.152.976.240.000	2.458.132.400.000	3.611.108.640.000
2024	1.126.229.425.447	1.995.529.723.281	3.121.759.148.728

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Paser, 2025

Target realisasi investasi Kabupaten Paser pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000.000,-, sedangkan total realisasi investasi dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp.3.121.759.148.728,- dengan capaian sebesar 124,8% yang terdiri dari PMA sebesar Rp.1.126.229.425.447,- dan PMDN sebesar Rp.1.995.529.723.281,-. Pencapaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp.3.121.759.148.728,- turun 1,16% dibandingkan realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp.3.611.108.640.000,-.

Menurunnya realisasi investasi pada tahun 2024 di Kabupaten Paser antara lain disebabkan masih belum tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya. Pelaku usaha di sektor

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mempunyai potensi besar untuk mencapai nilai investasi. Pelaku usaha ini juga punya kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per 6 bulan berdasarkan aturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 tahun 2021. Namun sejauh ini masih minim kesadaran pelaku usaha baik UMK maupun Non UMK melaporkan LKPM, sehingga perlu untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah perlu fokus pada perbaikan infrastruktur, pemberian insentif bagi investor, dan promosi yang lebih agresif. Monitoring dan evaluasi kebijakan investasi secara berkala sangat penting untuk memastikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Adapun data mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan sektor Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.52
Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Sektor Usaha	Realisasi investasi (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1.018.307.800.000	216.786.700.000	411.614.200.000	401.624.200.000	262.874.799.579
Industri Kayu	0	0	0	260.641.000.000	75.203.300.000
Kehutanan	832.000.000	0	81.308.600.000	173.839.300.000	553.426.016.983
Pertambangan	44.934.458.100.000	213.693.800.000	907.087.300.000	1.520.522.900.000	1.015.705.475.334
Industri Makanan	125.403.100.000	73.251.100.000	68.916.700.000	28.464.300,000	55.738.567.166
Hotel dan Restoran	180.200.000	0	0	238.700.000	219.300.000
Jasa Lainnya	1.683.700.000	320.800.000	21.162.600.000	36.626.300.000	14.057.262.248
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	224.000.000	60.660.600.000	30.692.500.000	4.978.000.000	0
Perdagangan dan Reparasi	850.000.000	2.556.900.000	4.885.300.000	20.746.500,000	12.099.641.072
Konstruksi	344.400.000	226.200.000	2.305.400.000	9.017.000,000	3.633.912.339
Transportasi, Gudang dan Telekomonikasi	164.747.700.000	199.300.000	1.926.800.00	1.385.200.000	2.009.948.560
Industri Kimia dan Farmasi	0	0	87.028.700.000	49.000.000	0
Sektor Lain-Lain	0	0	19.600.000	0	531.500.000
Total	46.247.031.000.000	567.695.400.000	1.615.020.900.000	2.458.132.400,000	1.995.499.723.281

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser 2025 (diolah)

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Paser selama periode 2020-2024 sangat dipengaruhi oleh siklus proyek besar, terutama di sektor pertambangan dan konstruksi yang mengalami penurunan signifikan. Sektor-sektor baru dan potensial seperti kehutanan, perdagangan dan reparasi, serta sektor lain-lain menunjukkan pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi investasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Adapun data mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan sektor Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.53
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Sektor Usaha	Realisasi investasi (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambangan	14.105.803.600.000	427.943.520.000	1.526.234.214.750	709.304.800.000	992.536.575.000
Industri Makanan	707.193.200.000	788.400.000	23.767.905.000	29.650.320.000	33.770.955.000
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	709.805.600.000	26.236.200.000	4.750.365.000	411.693.080.000	112.650.150.000
Kehutanan	592.200.000	357.700.000	232.470.000	0	**0**
Perdagangan dan Reparasi	16.800.000	54.020.000	149.240.000	2.138.600.000	253.500.000
Jasa Lainnya	**0**	**0**	**0**	189.440.000	12.000.000
Total	**15.523.411.400.000**	**455.379.840.000**	**1.555.134.194.750**	**1.552.976.240.000**	**1.139.223.180.000**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser 2025 (diolah)

Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Paser selama 2020-2024 didominasi oleh sektor pertambangan yang mengalami fluktuasi besar namun tetap menjadi kontributor utama. Sektor industri makanan menunjukkan pertumbuhan positif dan stabil, sementara sektor kehutanan dan beberapa sektor lain mengalami penurunan atau stagnasi. Perdagangan dan reparasi sempat mengalami lonjakan investasi, namun tidak berkelanjutan. Secara keseluruhan, total investasi PMA menurun drastis dari awal hingga akhir periode, menandakan perlunya perhatian khusus untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik investasi asing di daerah ini.

2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana sebuah desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengelola potensi dan sumber daya secara berkelanjutan, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis melalui pendekatan Indeks Desa Mandiri (IDM). Indeks Desa Mandiri (IDM) adalah sebuah instrumen pengukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan.

Di Kabupaten Paser, capaian IDM menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020 mencapai angka 0,6664 dan terus meningkat hingga 0,7835 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan signifikan dalam aspek pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, maupun ketahanan ekologi yang menjadi pilar pembangunan desa. Dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Maju, desa-desa di Kabupaten Paser tidak hanya semakin berdaya dalam mengelola pembangunan secara mandiri, tetapi juga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menuju kategori Mandiri, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian desa melalui program pembangunan yang terintegrasi

dan berkelanjutan.

Grafik II.25
Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

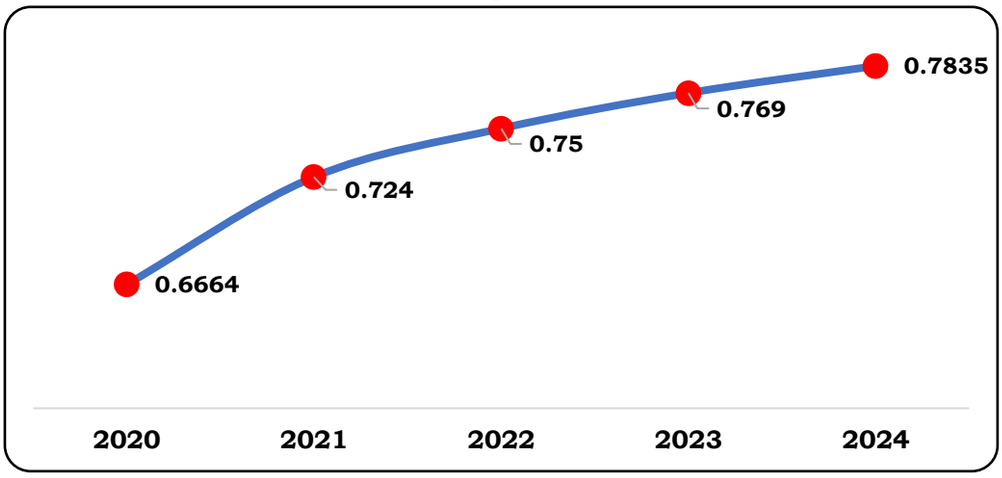

Sumber : Kementerian Desa, PDTT, 2025

Masih terdapat GAP nilai Indeks Desa Membangun yaitu 0,2165, hal ini dikarenakan sampai dengan tahun 2024 baru terdapat 46 status desa Mandiri, 72 status desa Maju, dan 21 status desa berkembang. Faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemandirian desa diantaranya mencakup dimensi aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Berdasarkan capaian ini terlihat ketimpangan antar daerah, karena masih terdapat desa-desa yang belum terakses pelayanan dasar dengan baik.

Ketimpangan dapat dikurangi melalui pemerataan Pembangunan infrastruktur, dengan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan dapat meningkatkan tingkat perkembangan desa dan meningkatkan nilai Indeks Desa. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur dan indikator utama untuk menilai kemajuan pembangunan desa, termasuk kemajuan infrastruktur, selain itu digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing, karena upaya pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.

Indeks Kepuasan Layanan infrastruktur (IKLI) merupakan indikator pembangunan yang sangat penting. Nilai IKLI di suatu daerah menggambarkan tingkat capaian pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai IKLI yang tinggi menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur baik dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan didukung oleh infrastruktur yang baik di berbagai bidang seperti infrastruktur pekerjaaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, dan transportasi.

Berdasarkan luas wilayah dan kondisi geografi, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser menghadapi banyak kendala, sehingga capaian IKLI relatif masih belum optimal. Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser berkaitan dengan dua hal, yaitu: 1) belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan

2) belum optimalnya aksebilitas dan konektivitas wilayah.

Berdasarkan hasil survey dan analisa, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Paser Tahun 2021-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan meningkatnya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Nilai IKLI Kabupaten Paser Tahun 2024 sebesar 65,46 termasuk nilai Indeks 7 dan mutu Pelayanan B, kinerja Unit Pelayanan tergolong kategori Baik (Memuaskan). Rekapitulasi Nilai IKLI Kabupaten Paser Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.54
Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Paser
Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	54,78	68,76	64,83	65,46

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Paser harus segera diselesaikan, karena infrastruktur yang baik memiliki peran penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu keberadaan infrastruktur juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan nilai investasi daerah dan membuka keterisolasian wilayah.

Pada tahun 2024, ada penambahan panjang ruas jalan di Kabupaten Paser dengan dimasukkannya sebagian jalan non-status ke dalam sistem jalan kabupaten. Akibatnya, total panjang jaringan jalan meningkat dari 1.005,19 km menjadi 1183,449 km, Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Paser mengalami perubahan setiap tahun sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada tahun 2022, proporsi jalan dalam kondisi mantap sebesar 25%, kemudian meningkat menjadi 39,27% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 41,72% pada tahun 2024. Kenaikan ini terjadi karena dilakukannya berbagai upaya perbaikan jalan. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata kondisi jalan mantap Provinsi Kalimantan Timur, yang mencapai 82,21% pada tahun 2024.

Tabel II.55
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

DATA PANJANG JALAN BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2021 - 2024						
NO	DAFTAR DATA	SATUAN	TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Nasional + Provinsi	km	2.601,33	2.602,95	2.745,60	2.745,61
	1. Jalan Baik	km	562,86	727,36	512,81	798,61
	2. Jalan Sedang	km	1.513,88	1.397,11	1.821,30	1.593,59
	3. Jalan Rusak Ringan	km	328,73	283,92	212,13	202,94

DATA PANJANG JALAN BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2021 - 2024						
NO	DAFTAR DATA	SATUAN	TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
	4. Jalan Rusak Berat	km	195,86	194,56	199,36	150,47
	Panjang Jalan Kondisi Mantap	km	2.076,74	2.124,47	2.334,11	2.392,20
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	**%**	**79,83**	**81,62**	**85,01**	**87,13**
	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap	km	524,59	478,48	411,49	353,41
	Persentase Jalan Kondisi Tidak Mantap	**%**	**20,17**	**18,38**	**14,99**	**12,87**
2	Panjang Jalan Nasional	km	1.706,23	1.707,86	1.806,75	1.806,76
	1. Jalan Baik	km	305,83	442,50	285,30	477,23
	2. Jalan Sedang	km	1.097,78	988,11	1.284,46	1.143,13
	3. Jalan Rusak Ringan	km	224,43	179,11	136,41	147,39
	4. Jalan Rusak Berat	km	78,19	98,14	100,58	39,01
	Panjang Jalan Kondisi Mantap	km	1.403,61	1.430,61	1.569,76	1.620,36
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	**%**	**82,26**	**83,77**	**86,88**	**89,68**
	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap	km	302,62	277,25	236,99	186,40
	Persentase Jalan Kondisi Tidak Mantap	**%**	**17,74**	**16,23**	**13,12**	**10,32**
3	Panjang Jalan Provinsi	km	895,10	895,09	938,85	938,85
	1. Jalan Baik	km	257,03	284,86	227,51	321,38
	2. Jalan Sedang	km	416,10	409,00	536,84	450,46
	3. Jalan Rusak Ringan	km	104,30	104,81	75,72	55,55
	4. Jalan Rusak Berat	km	117,67	96,42	98,78	111,46
	Panjang Jalan Kondisi Mantap	km	673,13	693,86	764,35	771,84
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	**%**	**75,20**	**77,52**	**81,41**	**82,21**
	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap	km	221,97	201,23	174,50	167,01
	Persentase Jalan Kondisi Tidak Mantap	**%**	**24,80**	**22,48**	**18,59**	**17,79**

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang & Perum Rakyat Provinsi Kaltim

Infrastruktur konektivitas bukan hanya terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, tetapi juga mencakup penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan lainnya, seperti transportasi

darat, laut, dan udara, terminal, pelabuhan, bandara, hingga fasilitas pendukung logistik. Konektivitas yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan infrastruktur transportasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan aksesibilitas antarwilayah lebih merata, meningkatkan keterhubungan desa-kota, serta membuka peluang investasi dan pariwisata yang berkelanjutan.

Tabel II.56
Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Kabupaten Tahun 2020-2024

No.	Sarana dan _Prasarana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terminal	3	3	3	3	3
2	Pelabuhan Pengumpul	1	1	1	1	1
3	Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	2	2	2	2
4	Pelabuhan Sungai dan Danau	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan tabel di atas telah dijabarkan jumlah sarana prasarana transportasi di Kabupaten Paser dari tahun 2020 hingga 2024, data mencakup jumlah sarana prasarana transportasi seperti terminal, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Paser. Saat ini pelayanan transportasi darat untuk mendukung konektivitas wilayah masih belum optimal, belum seluruh kecamatan dilayani dengan angkutan umum. Hingga saat ini terdapat 3 terminal yang melayani masyarakat Kabupaten Paser yaitu terminal Km. 7 Tepian Batang dengan tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, terminal kota Tana Paser dan terminal Kuaro dengan tipe C yang merupakan kewenangan Kabupaten Paser.

Transportasi laut atau sungai memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional ditetapkan 5 (lima) pelabuhan di wilayah administrasi Kabupaten Paser, yaitu:

1. Pelabuhan Pengumpul : Pelabuhan Tana Paser / Pondong
2. Pelabuhan Pengumpan Lokal : Pelabuhan Teluk Apar dan Pelabuhan Teluk Adang
3. Pelabuhan (Sungai dan Danau) : Pelabuhan Long Kali dan Pelabuhan Tanah Grogot

Pelabuhan Pondong berada dibawah kewenangan pemerintah pusat, sedang pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau menjadi kewenangan kabupaten, untuk saat ini dua pelabuhan sungai dan danau telah beroperasi, pelabuhan Tanah Grogot dikelola oleh UPTD Pelabuhan Tana Paser, sedangkan Pelabuhan Longkali dikelola oleh pemerintah desa Muara Telake. Untuk pelabuhan pengumpan lokal Teluk Apar masih berupa penunjukan lokasi, adapun Pelabuhan Teluk Adang telah dioperasikan Dinas Perhubungan pada pertengahan tahun 2021 namun belum didukung sarana dan prasarana

penunjang pelayanan kepelabuhan

Permukiman yang layak huni merupakan kondisi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban menjamin akses bagi semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta layanan dasar dan meningkatkan permukiman kumuh. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan menjadi indikator kunci dalam menilai kemajuan kota dalam mewujudkan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space) 2) memiliki akses terhadap air minum layak 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak 4) ketahanan bangunan (durable housing). Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan setiapa tahunnya, hingga tahun 2024 sebesar 61,5%.

Peningkatan capaian akses terhadap hunian yang layak tidak terlepas dari upaya dan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui peningkatan kualitas perumahan agar masyarakat dapat mengakses hunian yang layak, penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan infrastruktur dasar.

Tabel II.57
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau	44,74	49,11	54,61	60,22	61,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan perluasan kebutuhan perumahan dan permukiman, sehingga penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik sangat penting untuk menghindari terbentuknya kawasan tidak layak huni atau kawasan permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh adalah permukiman yang memiliki kualitas hunian dan prasarana yang tidak layak, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepadatan tinggi, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar, dan kondisi lingkungan yang buruk.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaaan di Kabupaten Paser terdapat permukiman kumuh seluas 224,52 Ha yang

tersebar pada 10 (sepuluh) wilayah perkotaan. Lokasi permukiman kumuh perkotaan tersebut telah ditetapkan dengan SK Bupati Paser nomor 653/KEP-116/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Kabupaten Paser. Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan upaya penanganan pada beberapa lokasi, pada tahun 2021 luasan kawasan kumuh telah berkurang seluas 18,44 Ha, tahun 2022 seluas 22,92 Ha, tahun 2023 seluas 34,01 Ha dan tahun 2024 dilakukan penanganan seluas 38,89 Ha. Sehingga total penanganan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 114,26 Ha atau 50,89% dan sisa luasan kumuh adalah sebesar 110,26 Ha. Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2024 telah ditetapkan dengan SK Bupati Paser nomor 100.3.3.2/KEP-445/2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Kabupaten Paser dengan luas 110,26 Ha.

Tabel II.58
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Paser

No	Kelurahan/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2024 (Ha)
1	Batu Kajang	20,46	0
2	Muara Komam	11,91	11,91
3	Kuaro	7,72	4,21
4	Long Ikis	12,50	6,19
5	Long Kali	21,60	18,09
6	Tanah Grogot	92,15	14,68
7	Pasir Belengkong	1,00	1,00
8	Batu Engau	24,48	24,48
9	Muara Samu	10,65	10,65
10	Tanjung Aru	19,05	19,05
Total Luas		**224,52**	**110,26**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk tempat tinggal disebabkan oleh kondisi rumahnya yang tidak sehat atau berada di kawasan permukiman kumuh maupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan penghuninya karena tidak memenuhi standar konstruksi. Konsep rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, kualitas air yang memadai, pencahayaan atau penerangan yang cukup, dapur bersih dan pembuangan asap lancar, konstruksi bangunan yang memenuhi standar, dan mempunyai sanitasi yang baik. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jumlah backlog dan rumah tidak layak huni Kabupaten Paser masih cukup tinggi. Permasalahan backlog perumahan dan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Paser mencerminkan tantangan serius dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Dengan backlog kepemilikan rumah mencapai 10.991 unit dan RTLH sebanyak 4.794 unit pada tahun 2024, terlihat bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi

kesulitan dalam mengakses rumah yang sesuai standar. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan

Tabel II.59
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Backlog Kepemilikan	13.057	13.057	13.242	10.921	10.991
2	Backlog Penghunian	4.691	4.691	6.418	26.756	28.212
3	Rumah Tidak Layak Huni	8.470	7.397	6.296	5.413	4.794

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun telah ada penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan cukup konsisiten, hal ini terlihat dari jumlah rumah tidak layak huni hingga tahun 2024 berkurang menjadi 4.794 unit. Total penanganan yang telah dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2024 sebanyak 3.676 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya bersumber dari Pemerintah daerah tetapi juga dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari CSR. Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan bentuk fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (pra sejahtera). Tujuan bantuan stimulan ini adalah supaya rumah warga yang tidak layak huni bisa dibangun menjadi rumah yang layak huni dengan lingkungan yang sehat serta aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun. Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Mengingat Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka disparitas harga antar wilayah digunakan sebagai proksi untuk mengukur inflasi secara spasial, terutama pada komoditas kebutuhan pokok dan penting. Penggunaan proksi disparitas harga dilakukan melalui pemantauan perbedaan harga barang strategis antar kecamatan, terutama antara wilayah perkotaan (pusat distribusi) dengan wilayah pesisir dan pedalaman yang memiliki akses distribusi terbatas. Semakin

kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Kondisi ini menjadi indikator awal bagi pemerintah daerah dalam menetapkan langkah-langkah intervensi, baik melalui operasi pasar, perbaikan infrastruktur distribusi, maupun penguatan sistem logistik pangan daerah. Selain itu, disparitas harga juga menjadi dasar penentuan sasaran kebijakan stabilisasi harga dan pemerataan daya beli masyarakat.

Berikut disajikan data perkembangan Disparitas Harga Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2024 :

Grafik II.26
Perkembangan Disparitas Harga di Kabupaten Paser

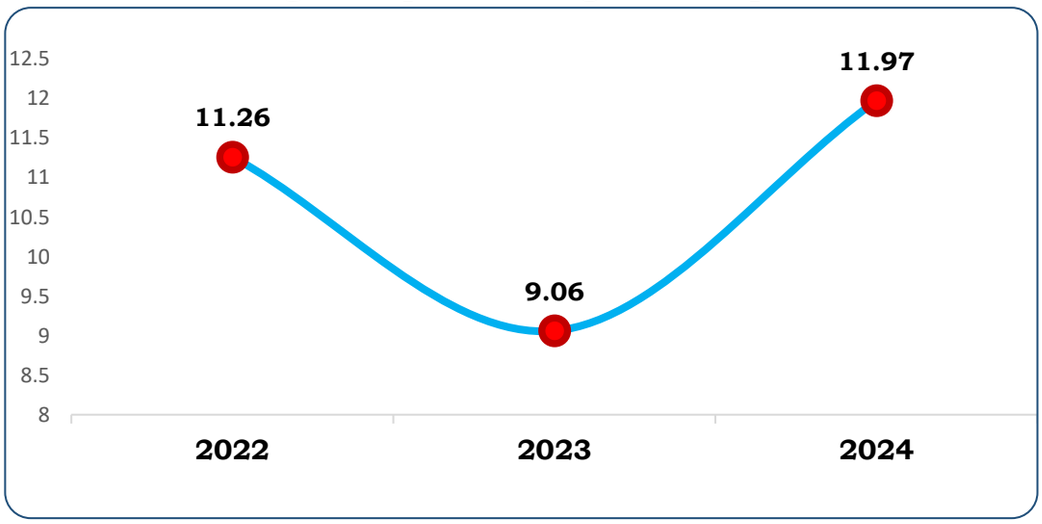

Sumber: Disperindagkop Provinsi Kaltim, 2025

Data disparitas harga di Kabupaten Paser menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, disparitas harga tercatat sebesar 11,26 yang kemudian menurun menjadi 9,06 pada tahun 2023, sebelum kembali naik ke angka 11,97 pada tahun 2024. Kenaikan disparitas harga pada 2024 menandakan adanya perbedaan yang lebih besar antara harga tertinggi dan terendah di pasar, disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan dalam distribusi pasokan, variasi kualitas produk, dan perubahan permintaan yang tajam. Fluktuasi ini penting untuk dipantau secara berkelanjutan karena disparitas harga yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi serta gangguan pada daya beli masyarakat dan stabilitas usaha. Oleh karena itu, penguatan sistem pemantauan harga, pengoptimalan rantai pasok, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan keseimbangan harga yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Paser terlihat cukup fluktuatif. Adapun rasio pajak terhadap PDRB tertinggi berada di tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,11 persen dan terendah di tahun 2022 dengan nilai rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,05 persen. Adapun pada tahun 2024, capaian rasio pajak terhadap PDRB menurun menjadi sebesar 0,10 persen.

Belum optimalnya rasio pajak ini mengindikasikan masih rendahnya pendapatan daerah dari pajak daerah jika dibandingkan nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh aktivitas pembangunan di Kabupaten Paser.

Grafik II.27
Rasio Pajak Terhadap PDRB di Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

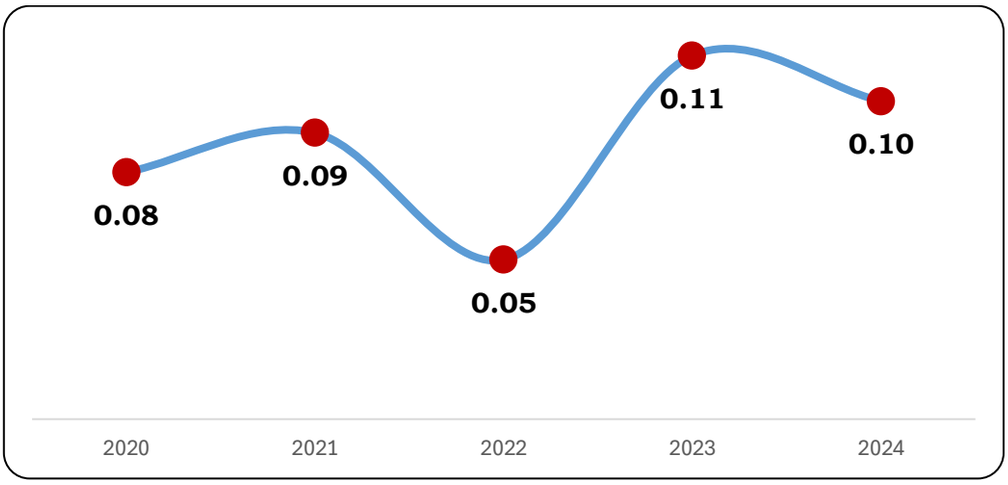

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum adalah gambaran mengenai kualitas, cakupan, dan pemerataan layanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Aspek Pelayanan Umum meliputi Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial; Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan; Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam administrasi pemerintahan. Ini adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, seringkali melibatkan perubahan dalam kebijakan, prosedur, dan budaya kerja di lembaga pemerintahan. Salah satu fokus utama dari reformasi birokrasi adalah mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Ini dapat dicapai melalui penyederhanaan prosedur administratif, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, serta pengembangan standar pelayanan publik yang jelas.

Transparansi juga menjadi prinsip penting dalam reformasi birokrasi. Ini melibatkan memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi tentang kebijakan dan keputusan pemerintah, sehingga mendorong akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Selain itu, reformasi birokrasi juga seringkali mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam administrasi pemerintahan. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan pegawai negeri, serta

pembentukan sistem penghargaan dan sanksi yang adil untuk mendorong kinerja yang baik.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses ini membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan serta dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser memang masih lambat jika dilihat dari capaian indeks reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Paser.

Tabel II.60
Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2022

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Komponen Pengungkit	26.52	27,25	26,93
2	Komponen Hasil	29.27	28,80	31,02
Indeks Reformasi Birokrasi		**55.81**	**56,05**	**57,95**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, 2023

Tabel II.61
Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser
Tahun 2023-2024

No	Komponen	Nilai 2023	Nilai 2024
1	RB General	54,48	69,12
2	RB Tematik	8,09	10,57
	Indeks Reformasi Birokrasi	**62,56**	**79,69**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, 2025

Pada tahun 2024 komponen penilaian reformasi birokrasi terdiri dari RB General dan RB Tematik. Dari evaluasi yang dilaksanakan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2024 adalah 79,69 dengan kategori “B”. Reformasi birokrasi di Kabupaten Paser dapat dikatakan berjalan belum optimal, namun demikian Pemerintah Kabupaten Paser telah berupaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan.

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2020 tercatat sebesar 58,41 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 61,38 dengan kategori “B”. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, capaian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja di Kabupaten Paser masih belum optimal, terutama dalam hal keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya penguatan manajemen kinerja secara lebih menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil (result-based planning), konsistensi

pelaksanaan program sesuai target, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja yang lebih terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian AKIP Kabupaten Paser ke depan dapat terus ditingkatkan menuju kategori yang lebih tinggi sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Grafik II.28
Hasil Evaluasi Nilai AKIP Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

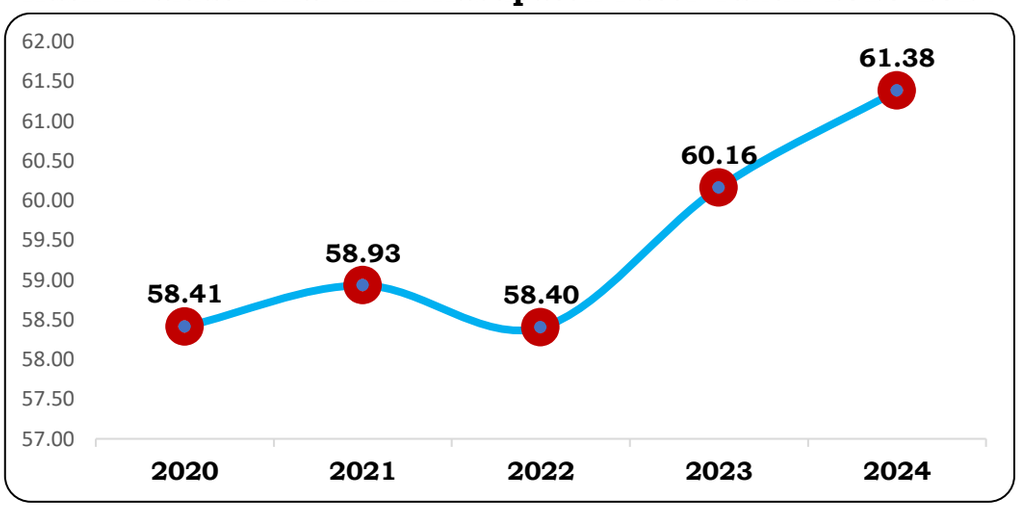

Sumber: Bagian Organisasi, 2025

Beberapa penjelasan yang direkomendasikan terkait nilai capaian SAKIP Kabupaten Paser telah dapat meraih predikat "Baik". Namun, belum signifikan disebabkan pertama: masih ditemukan ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, RENSTRA dan dokumen perjanjian kinerja hingga level terendah. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi pada hasil/outcome, dengan kata lain keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Kedua: monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada perangkat daerah hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal. Ketiga: program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak relevan dengan kinerja yang ingin dicapai oleh daerah.

Indeks Integritas Pemerintah (IIP) menggambarkan sejauh mana sistem, budaya, serta praktik birokrasi pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih yang melalui survei sehingga menghasilkan Suvei Penilaian Integritas (SPI). Melalui SPI, pemerintah dapat memperoleh data kuantitatif dan kualitatif terkait persepsi maupun pengalaman langsung dari para responden, baik internal (ASN/pegawai pemerintah) maupun eksternal (masyarakat penerima layanan, pelaku usaha, dan mitra kerja). Hasil survei inilah yang kemudian menjadi dasar perhitungan skor indeks.

Grafik II.29
Survei Penilaian Integritas (SPI)
Kabupaten Paser Tahun 2022-2024

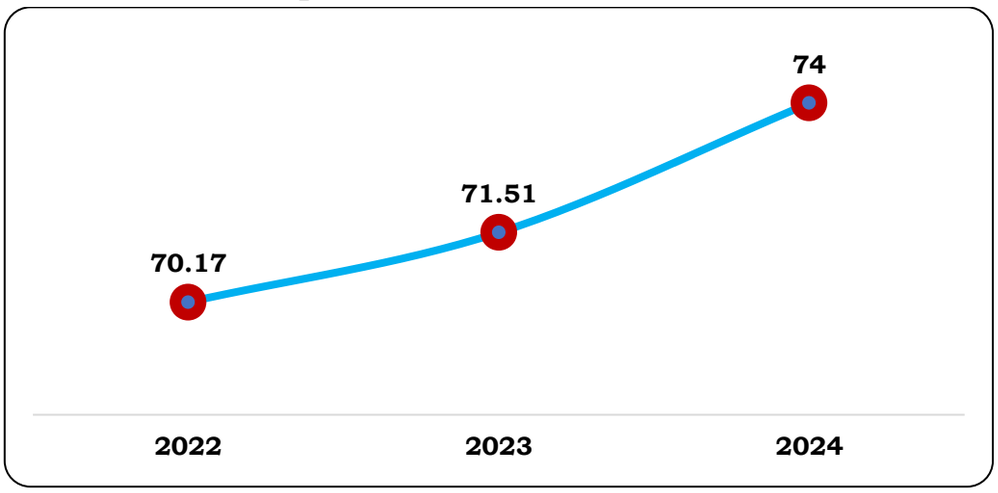

Sumber: KPK RI, 2025

Capaian Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024, berdasarkan hasil survei penegakan integritas oleh KPK.Tahun 2022 mencapai 70,17 Tahun 2023 naik menjadi 71,51. dan Tahun 2024 mencapai 74 persen. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan tren positif yang kuat, menandakan bahwa inisiatif anti-korupsi dan penegakan integritas mulai membuahkan hasil yang lebih nyata. Capaian ini menunjukkan komitmen yang semakin kuat dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas korupsi. Secara keseluruhan, capaian ini merefleksikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Paser dalam mendorong integritas telah memberikan dampak positif. Peningkatan berkelanjutan ini adalah indikator yang baik bahwa kesadaran dan praktik integritas di lingkungan pemerintahan semakin membaik.

Grafik II.30
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

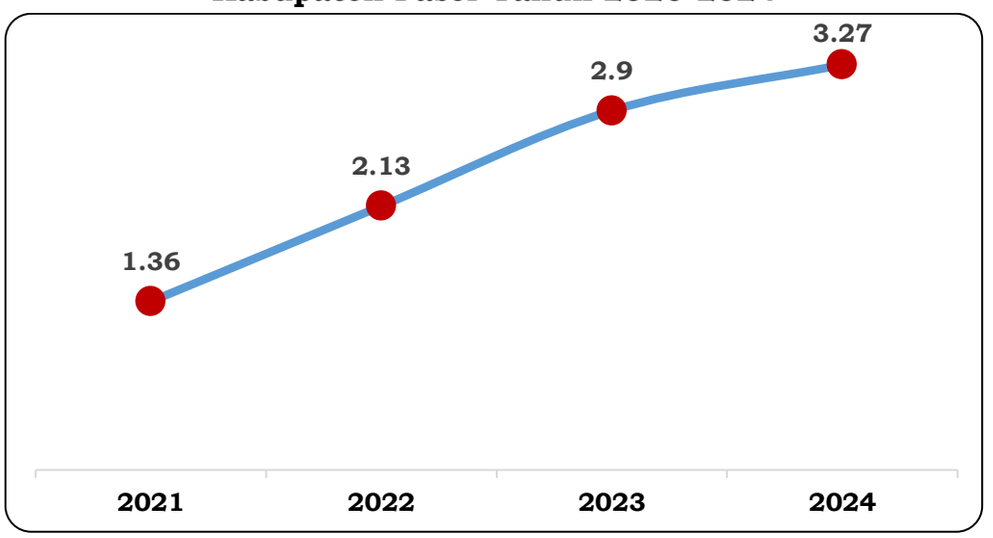

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Paser menunjukkan pertumbuhan signifikan, pada tahun 2021 Kabupaten Paser meraih nilai indeks 1,36 berpredikat “kurang”, di fase inisiasi sistem elektronik, Kabupaten Paser berada jauh di bawah ambang evaluasi minimum (1,8), dan menempati peringkat ke-8 dari semua kabupaten/kota di Kaltim. Pada tahun 2022 nilai indeks 2,13, berpredikat “Cukup” namun masih di bawah target RPJMN sebesar 2,60, menandakan fase awal transformasi digital daerah. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan ke 2,90 predikat “Baik”, seiring peluncuran layanan publik berbasis elektronik dan peningkatan integrasi antar Perangkat Daerah. Tahun 2024 semakin membanggakan dengan skor 3,27 masih “Baik” tetapi mendekati ambang “Sangat Baik”, menempatkan Kabupaten Paser sebagai kabupaten dengan indeks SPBE tertinggi se-Kalimantan Timur.

Dalam tiga tahun, Pemerintah Kabupaten Paser secara konsisten memperkuat tata kelola digital dan layanan publik elektronik, dari fase cukup ke level maju “Baik”, sekaligus menjadi benchmark SPBE untuk daerah kabupaten di provinsi.

Grafik II.31
Nilai APIP Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

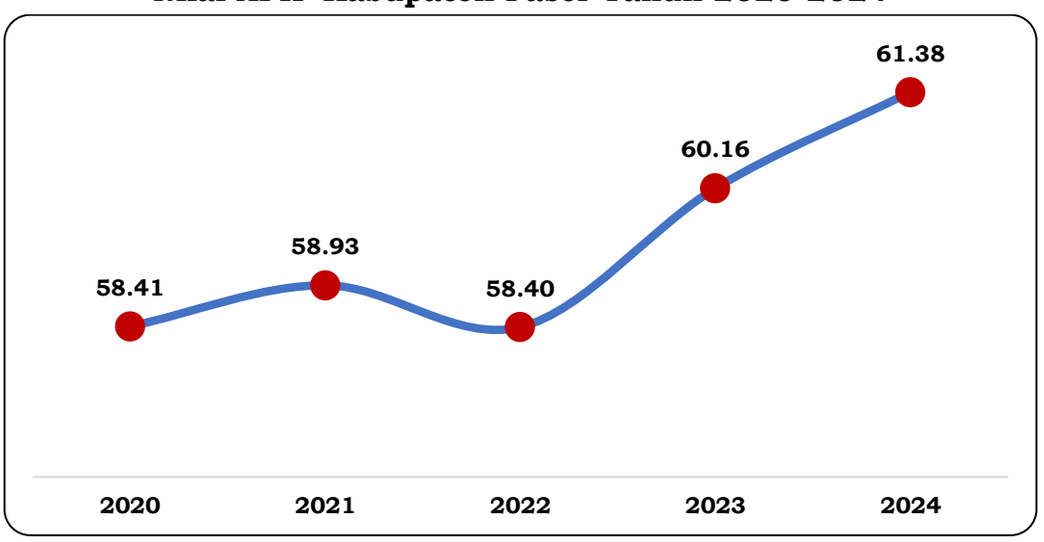

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Nilai APIP Kabupaten Paser tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintah daerah. Pada tahun 2020 nilai APIP tercatat sebesar 58,41 dan sempat mengalami fluktuasi dengan naik ke 58,93 di tahun 2021 namun turun tipis menjadi 58,40 pada 2022. Meski demikian, pada periode berikutnya terjadi lonjakan signifikan dengan nilai mencapai 60,16 di 2023 dan meningkat lagi menjadi 61,38 pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya penguatan fungsi pengawasan intern yang semakin efektif, baik dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan maupun memastikan tata kelola yang lebih transparan dan berkualitas.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Tata kelola keuangan daerah Paser masih menyisakan kendala. Walaupun opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Paser yang selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan dikuti oleh capaian

predikat nilai LPPD yang berada pada kriteria “Tinggi” hingga “Sangat Tinggi” namun tidak berbanding lurus dengan capaian AKIP Kabupaten Paser yang belum dapat memperoleh predikat “Baik”. Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan asset dan pengelolaan pendapatan yang dinilai masih belum optimal menunjang belanja pada APBD. Untuk itu ke depan diperlukan suatu organisasi yang dapat mengelola aset dan pendapatan secara optimal.

Tabel II.62
Perolehan Opini BPK, LPPD dan AKIP Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Hasil Penilaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Evaluasi AKIP	58,41	58,93	58,40	60,16	61,38

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Paser meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Paser masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas. Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum PNS masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN. Pelaksanaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) masih harus terus ditambah guna menjamin aparatur bebas dari praktek-praktek KKN.

Pemerintah Kabupaten Paser telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan beberapa tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

C. Pengawasan

Peningkatan sistem pengawasan internal menjadi hal pokok sebagai tindakan pertama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan tingkat maturitas Kabupaten mengalami kenaikan penilaian. Namun, untuk penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi belum mencapai level 3, dimana pada tahun 2022 berada pada level 3 (terdefinisi), dan pada tahun 2023 dilakukan Evaluasi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi meliputi Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencapai 3,008; Manajemen Risiko Indeks sebesar 2,841; dan Indeks Efektivitas Pengendalaian Korupsi sebesar 2,072.

Tabel II.63
Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 - 2024

No	Fokus Penilaian	Nilai Unsur		
		2022	2023	2024
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,008	3,309	3,432
2	MRI	2,841	3,203	3,513
3	IEPK	2,072	2,830	3,180

Sumber: LHE BPKP Perwakilan Prov. Kaltim

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Angka kriminal umum dan kriminal khusus di Kabupaten Paser mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 268 kasus, sedangkan tahun sebelumnya sebanyak 320 kasus, namun secara umum jumlah kasus kriminalitas mengalami kenaikan. Dari peningkatan kasus tersebut, maka angka kriminalitas di Kabupaten Paser juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebanyak 62 dari 100.000 penduduk dan meningkat menjadi 86 kasus kriminalitas diantara 100.000 penduduk. Beberapa kasus kriminalitas umum yang terjadi seperti kasus curanmor, kasus curat, penggelapan, penganiayaan, persetubuhan dibawah umur, perjudian, pengeroyokan, kebakaran, sedangkan kriminal khusus terjadi seperti kasus illegal, kasus illegal mining, kasus korupsi dan kasus *illegal logging*. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing, serta perlunya tindak pencegahan yang lebih intensif.

Tabel II.64
Pembangunan Keamanan Ketertiban Umum di Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kriminalitas	Angka Kriminalitas	Indeks Rasa Aman
2020	172 Kasus	62	NA
2021	186 Kasus	67	NA
2022	301 Kasus	107	100
2023	320 Kasus	105	100
2024	268 Kasus	86	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Gambaran kondisi demokrasi di Kabupaten Paser menunjukkan kondisi demokrasi yang positif. Hal ini di lihat dari partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sebesar 81,68% menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi dari masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Angka ini mencerminkan kesadaran politik yang baik dan antusiasme publik terhadap proses demokrasi, di mana lebih dari 80% warga negara yang memenuhi syarat memilih untuk terlibat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Angka ini juga menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik, meskipun masih ada peluang untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi di kalangan kelompok masyarakat tertentu.

Tabel II.65
Kondisi Demokrasi di Kabupaten Paser Tahun 2024

Uraian	Nilai	Satuan
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	81,68	%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Paser, 2025

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio- ekonomi masyarakat.

Salah satu hal yang dapat menarik minta investor untuk menanamkan modalnya adalah kemudahan layanan perizinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui DPMPTSP pada tahun 2023 telah menggunakan 3 aplikasi layanan perizinan yaitu OSS RBA, SIMBG untuk Persetujuan Bangunan (IMB) dan SIMYANDU.

1) Sistem Online Single Submission (OSS) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
   a) Jumlah layanan perizinan berusaha melalui OSS.RBA:
      - KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sebanyak1790 KBLI; dan
      - PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha) sebanyak 531.
   b) Berdasarkan risiko di dalam OSS dibedakan menjadi 4 (empat):
      - Risiko Rendah NIB sebagai izin. Lamanya izin terbit adalah 0 menit sejak pemohon selesai menginput dan mengklik penerbitan izin langsung terbit.
      - Risiko Menengah Rendah Sertifikat Standar sebagai izin dan terbit otomatis. Lamanya izin terbit adalah 0 menit sejak pemohon selesai menginput dan mengklik penerbitan izin langsung terbit.
      - Risiko Menengah Tinggi Sertifikat Standar izin terbit setelah di Verifikasi dan Validasi. Lamanya izin terbit adalah 30 menit melalui pemeriksa berjenjang oleh DPMTPSP.
      - Risiko Tinggi izin berupa Izin. Lamanya izin terbit adalah 30 menit melalui pemeriksa berjenjang oleh DPMTPSP.
2) SIMBG adalah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yakni sebuah sistem elektronik berbasis web terintegrasi yang dihadirkan untuk membantu proses pelayanan serta penyelenggaraan bangunan gedung secara keseluruhan dengan Online Single Submission (OSS). Layanan perijinan ini terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Lamanya proses izin terbit setelah Pemohon melakukan pembayaran SKRD diterima DPMPTSP kurang lebih 30 menit.
3) Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (Simyandu) dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Aplikasi diaktifkan dan berjalan mulai februari 2023. Jumlah layanan sebanyak 18 Izin dari 35 pelayanan

di sektor Kesehatan. Lama penyelesaian izin lebih kurang 60 menit sejak berkas di terima. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Simyandu kedepannya akan meliputi 35 layanan di sektor Kesehatan, 12 layanan disektor Pendidikan, 4 layanan di sektor social, 1 layanan di sektor perhubungan dan 1 layanan sektor perdagangan.

Dari ketiga aplikasi pelayanan terpadu tersebut memiliki lama waktu perijinan dengan rentang waktu selama 0 sampai dengan 60 menit. Durasi yang lebih cepat dalam proses perizinan ini mengindikasikan bahwa proses perizinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Paser.

Tabel II.66
Jumlah dan Macam Retribusi Daerah
di Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Jasa Umum	9	8	9	9	7
Retribusi Jasa Usaha	11	8	8	8	9
Retribusi Perijinan Tertentu	3	3	4	2	3
Jumlah Retribusi	**23**	**19**	**21**	**19**	**19**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2024 Kabupaten Paser memiliki 19 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Retribusi tersebut terdiri dari 7 retribusi jasa umum, 9 retribusi jasa usaha dan 3 retribusi perijinan tertentu yang ditangani oleh DPMPTSP Kabupaten Paser. Jumlah ini tidak mengalammi peningkatan maupujn penurunan seperti tahun tahun sebelumnya. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama tahun terakhir.

Tabel II.67
Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha/Investasi
di Kabupaten Paser

	Peraturan Daerah
1.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Paser Tahun 2021-2041
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser
4.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
5.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame
6.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana

Peraturan Daerah	
	Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2045
7.	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
8.	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Nila Jual Obyek Pajak dan Nilai Lokasi Strategi Pemasangan Reklame serta Tata Cara Penghitungan Pembayaran Pajak bagi Wajib Reklame dalam Wilayah Kabupaten Paser
9.	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana umum Penanaman Modal Kabupaten Paser Tahun 2024-2025
10.	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Perijinan Berusaha di Daerah
11.	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2028
12.	Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perijinan Berusaha, Perijinan Non Berusaha dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
14.	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Paser, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan tercermin dari kemampuannya dalam meningkatkan daya saing wilayah secara konsisten. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan daerah dalam menghadapi dinamika global, nasional, dan lokal. Pada tahun 2024, IDSD Kabupaten Paser mencapai titik tertinggi dengan capaian 3,38. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan capaian tahun 2022 (2,87) dan tahun 2023 (2,86). Dua pilar dengan capaian tertinggi adalah Pilar Ukuran Pasar dengan skor 4,69 dan Pilar Institusi dengan skor 4,54. Sebaliknya, dua pilar dengan nilai terendah adalah Pilar Pasar Produk (1,81) dan Pilar Kapabilitas Inovasi (1,23).

Tabel II.68
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2024

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	3,96	4,32	4,54
Pilar Infrastruktur	2,19	2,31	3,33
Pilar Adopsi TIK	2,97	4,17	4,17

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,83	3,51	3,67
Pilar Kesehatan	4,08	4,07	4,00
Pilar Keterampilan	3,02	3,56	3,93
Pilar Pasar Produk	0,59	0,50	1,81
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,20	3,22	3,74
Pilar Sistem Keuangan	3,85	0,67	1,53
Pilar Ukuran Pasar	2,40	4,69	4,69
Pilar Dinamisme Bisnis	5,00	1,86	3,03
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,31	1,44	1,23
Indeks Daya Saing Daerah	**2,87**	**2,86**	**3,31**

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Paser pada pembangunan periode sebelumnya di tahun 2021-2024 dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel II.69
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	43,29	98,59	63,15	73,51
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,20	99,98	99,90	99,95
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,36	99,98	97,61	97,36
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	%	70,88	0,45	18,08	23,17

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalarn pendidikan kesetaraan					
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,07	0,07	0,88	0,098
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,95	96,52	100	79
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	108,59	96,18	100	78
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	78,96	95,28	100	73
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	20,87	88,34	87,35	83
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,99	55,59	70,08	84,35
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	29,67	36,28	60,82	64,69
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	46,72	44,52	68,49	78,70
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16,50	25,77	100	66

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	107,76	64,64	100	100,40
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	89,81	71,06	100	98
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	52,15	100	100
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	72,15	72,60	100	110
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	20,00	17,20	0	5,35
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0	28,80	29,68	31,79
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	%	0	84,26	85,10	85,41

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota					
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,16	0,07	90,62	93,61
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	41,28	25,51	39,28	41,72
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	48,82	38	1,08
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0,052	100
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0	0	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	8,21	18,42	33,57	50,89
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,22	8,70	7,19	6,37
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0	0	0

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	13.441	15.000	15.414	11,93 %
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	15.000	15.000	0	0,38%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	0	100%	1.589	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	119,57	100	84,96	76,81
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	14,39	13,29	8	13,77
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	68,14	99,78	99,16	97,27
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	93,10	96,05	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota					
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	84,21	85	76,19	73,68
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	8,03	0,327	15,62	10,43
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1,60	165,49	144,73	111,2
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	15,25	40	9,85	2,52
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	10,80	25,35	20,16	24,27
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,28	0,44	5,48	13,51
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,02	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,20	10,62	68,24	7,36
h) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya	%	121,13	111,36	61,01	111,36

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)					
i) Pertanahan						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	0	44,85
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	83
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0	0	0	44,40
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	0	44,90
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	46,15	100	100	38
j) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	73	72,3	72,52	72,38
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	59,07	60,44	71,96	75,11
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	25	1

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	Kab/Kota					
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	%	99,37	99,01	99,95	99,13
2	persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	55,62	54,20	100	64,83
3	kepemilikan akta kelahiran	%	94,00	100	99,36	97,98
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	97,56	53,66	36,59
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	68,97	100	0	0
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	2,78	8	26,22	20,37
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,03	2,35	2,27	2,21
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	56,51	53,90	56,40	59,40
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,20	19,4	16,60	14,00
n) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	8,9	0,9	92,5	86,81
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	100	0,2	0,17	0,16
o) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	97,56
2	Persentase Layanan	%	75	90	63,64	64,29

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	69,51	71,50	55,00	90,38
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	35,42	57,14	37,07	40,54
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,02	100	0,066	0,16
q) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	-84,98	151,28	13,48	-13,55
r) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,06	0,20	11,81	11,23
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,30	2,37	0,92	0,92
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	21	136	7	3
s) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
t) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	381,82	33,33	0	0
u) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Item	8,40	100	13,33	13,33
v) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	55,67	46,27	52,18	59,74
2	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	Indeks	17,75	22,96	79,42	76,67
w) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	52,26	53,85	55,20	57,85
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	37,5	56,67	73,33	73,33
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	24.691 ,50	24.877 ,00	25.170 ,07	25.829 ,05
b) Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	0	23	56,52
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	241,09	440,10	68,68	322,65

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	nusantara yang datang ke kabupaten/kota					
3	Tingkat hunian akomodasi	%	8529,45	9664,33	12,60	12,41
4	Kontribusi sektor pariwisata Lerhadap PDRB harga berlaku	%	0,75	0,001	34376,81	0,434
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	15.000 (Rupiah)	0,103	4638,85	4,16
c) Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	3,96	4,13	4,34	4,47
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-4,42	-6,12	-7,27	0,29
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	0	0	0
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	0	30,36
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	38,14	20,20	70,31	83,97
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	25,23	28,31	53,00	50,85
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	54,14	11,27	3,42	5,40
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan	%	100	11,27	75	137,11

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0	0	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	5	25	80	80
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,26	17,14	11,42	9,49
2	Rasio PAD	%	2.903.639 (Rupia	4,47	9,45	7,29

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
			h)			
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,07	43,90	56,29	52,62
6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	35,61	27,36	35,51	96,46
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,27	35,71	44,95	74,39
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	200,33	61,46	67,90	68,84
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	10,44	21,27	22,85	27,56
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,48	7,76	55,97	30,82
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total	%	10,06	16,90	18,32	

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	dalani APBD					
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	110,97	22,26	86,47	
3	Manajemen Aset					
	1. Apakah ada daftar aset tetap?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	%	22,93	16,22	26,61	
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia unluk pelayanan	%	102,60	86,98	88,77	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	58,33	75,00

Sumber: LPPD Kabupaten Paser Tahun 2025

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memerhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkemban˙gan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Dinamika perekonomian global diprediksi akan mengalami stagnasi hingga tahun 2026. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam kebijakan negara-negara besar, khususnya AS yang berimplikasi pada perang dagang global antar negara-negara besar yang akan menyebabkan pergeseran rantai pasok global serta fluktuasi komoditas industri. International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa perang dagang 2.0 ini akan memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,8 persen pada tahun 2025 dan 1,3 persen pada tahun 2026. Sementara itu, dalam skala nasional, kebijakan negara besar akan berdampak pada beberapa hal, seperti, pertama, melemahnya nilai tukar mata uang rupiah yang akan mengganggu stabilitas ekonomi, terutama bagi sektor yang bergantung pada impor dan utang dalam mata uang asing. Kedua, memperlambat kinerja ekspor Indonesia, khususnya untuk komoditas alumunium dan baja. Hal ini dikarenakan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Republik Rakyat China (RRC) dengan pangsa ekspor sebesar 11,22 persen dari total pangsa ekspor Indonesia pada Bulan Desember 2024. Ketiga, terganggunya neraca perdagangan yang akan berimplikasi pada kenaikan inflasi. Keempat, stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional, menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan di AS akan berdampak pada penurunan perekonomian nasional sebesar 0,06 persen.

Dalam lingkup lokal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Paser beberapa tahun terakhir menempatkan Paser sebagai salah satu daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di Kalimantan Timur. Meskipun begitu Kabupaten Paser masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, terutama batu bara, sebagai sumber PAD. Hal ini membuat keuangan daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Diversifikasi ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Paser di masa depan.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70.
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Paser berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) berfluktuasi akan tetapi masih dalam tren positif, hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik. Ditahun 2020 DOFD Kabupaten Paser mencapai 7,21% kemudian pada tahun 2021 mencapai 12,12% yang merupakan nilai tertinggi dalam 5 tahun terakhir kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,27% dan meningkat pada akhir periode menjadi 8,09% (2023) dan Kembali menurun di tahun 2024 sebesar 7,29%. Peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya secara konsisten Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Paser terus bergerak positif walaupun masih masuk di kategori Sangat Kurang pada tahun 2024. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Paser perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Paser periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.71.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Paser, Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	173.315.327.565	2.404.053.512.177	7,21
2	2021	270.129.905.878	2.229.443.320.259	12,12
3	2022	196.204.202.094	3.131.568.472.495	6,27
4	2023	301.345.522.056	3.731.188.583.999	8,08
5	2024	348.985.389.628	4.784.412.678.749	7,29
	Rata-Rata	257.996.069.444	3.256.133.313.536	7,92

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Paser akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola

pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18,77% di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 2,404 triliun menjadi Rp. 4,784 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer kemudian PAD.

Grafik II.32.
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

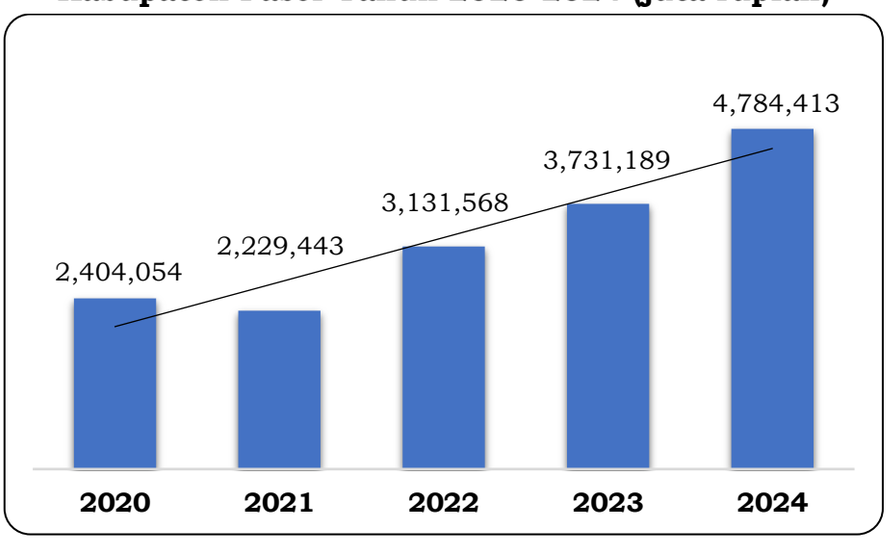

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan sebesar 19,12% dan 18,10%. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi sebesar 40,90% dari Rp. 47,92 miliar menjadi 188,912 miliar yang disebabkan adanya kenaikan drastis Pendapatan Lainnya.

Grafik II.33.
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

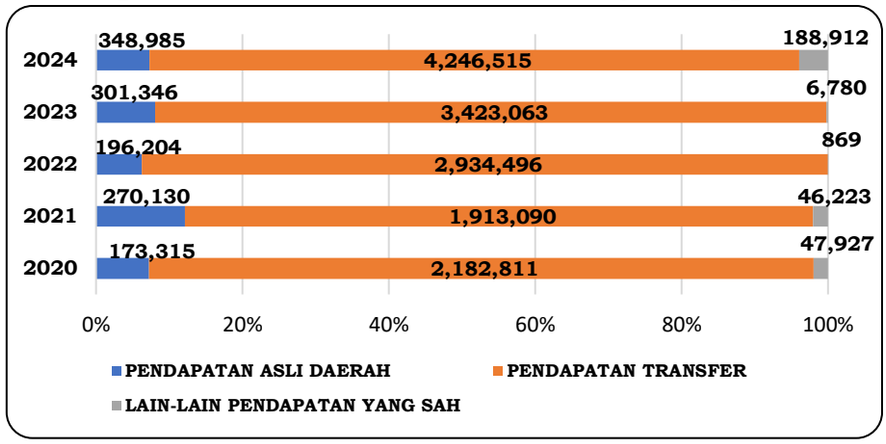

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

- Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: PBB-P2; Pajak BPHTB; Pajak PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opesen BBNKB. Perkembangan pajak Daerah mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,36% dari Rp. 33,269 miliar menjadi Rp. 59,94 miliar. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan pajak daerah di Kabupaten Paser, antara lain disumbangkan oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan BPHTB-Pemindahan Hak. Selain itu Peningkatan harga batu bara di pasar global berdampak positif pada pendapatan pajak daerah dari sektor pertambangan. Selain itu adanya peningkatan kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun begitu, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pajak daerah secara optimal. Masih banyak sektor ekonomi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini menyebabkan potensi pajak yang belum tergali. Dengan melakukan berbagai upaya, diharapkan PAD Kabupaten Paser dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan Sejahtera.

- Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan

kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Pendapatan retribusi di Kabupaten Paser mengalami tren meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,82% dari Rp. 9,528 miliar (2020) menjadi Rp. 12,87 miliar (2024).
Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -12,06% dari Rp. 4,16 miliar (2020) menjadi Rp. 6,56 miliar (2024). Penurunan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Paser pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 21,42% dari Rp. 126,35 miliar (2020) menjadi Rp. 274,60 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya didorong oleh Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik II.34.
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

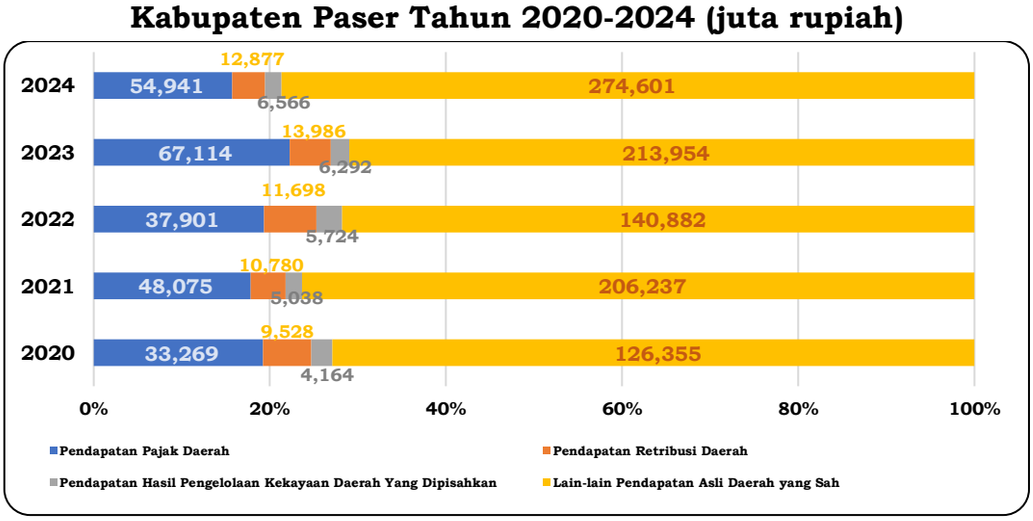

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Paser. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 74,1% pertahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 18,9% pertahun, berikutnya Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 4,8% pertahun, dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 2,2% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Grafik II.35.
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)

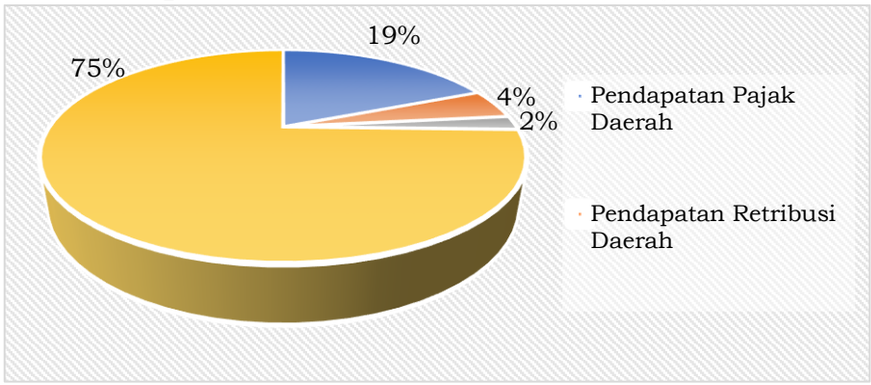

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Grafik II.36.
Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

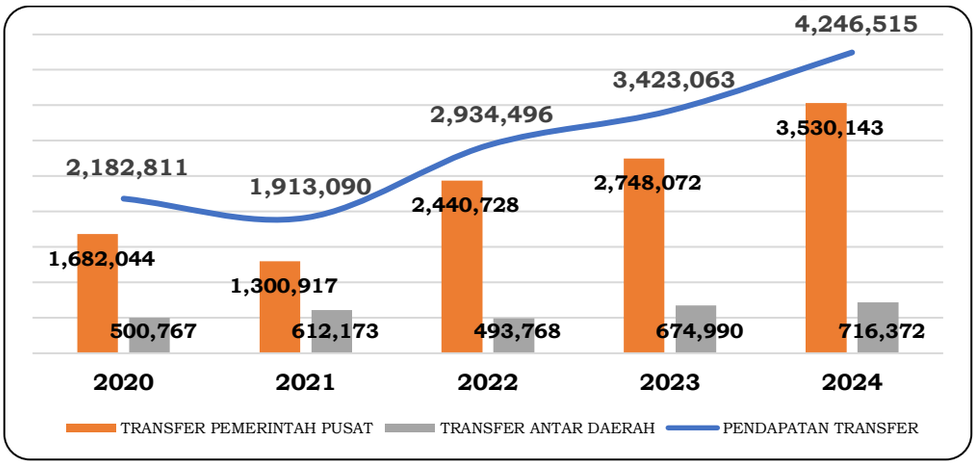

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Paser mengalami tren meningkat cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,10% dari Rp. 2,18 triliun (2020) menjadi Rp. 4,24 triliun (2024) yang merupakan Pendapatan transfer tertinggi yang diterima dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 78,3% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 92,8% adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Pendapatan transfer antar daerah juga mengalami tren meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 9,36% dari 500,76 miliar (2020) menjadi 716,37 miliar (2024) yang bersumber dari pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Grafik II.37.
Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

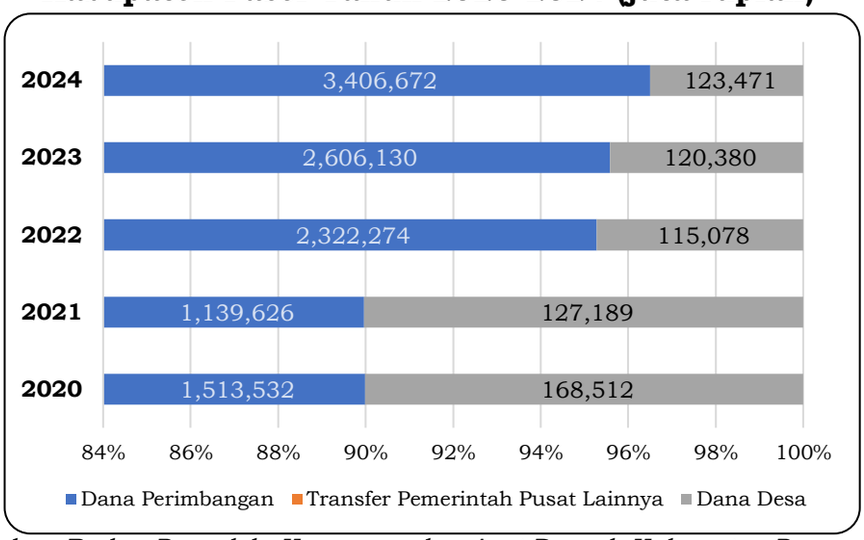

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,49% dari Rp. 1,513 triliun di tahun 2020 menjadi Rp. 3,406 triliun di tahun 2023. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 30,82% kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan sebesar 2,87% dari 382,20 miliar (2020) menjadi 428,05 miliar (2024). Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren menurun yang persentasenya secara berurutan sebagai berikut -2,87% pertahun. Dari nilai nominal yang ada DBH Pajak/Bukan Pajak khususnya dari pertambangan menjadi penyumbang utama Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Grafik II.38.
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)

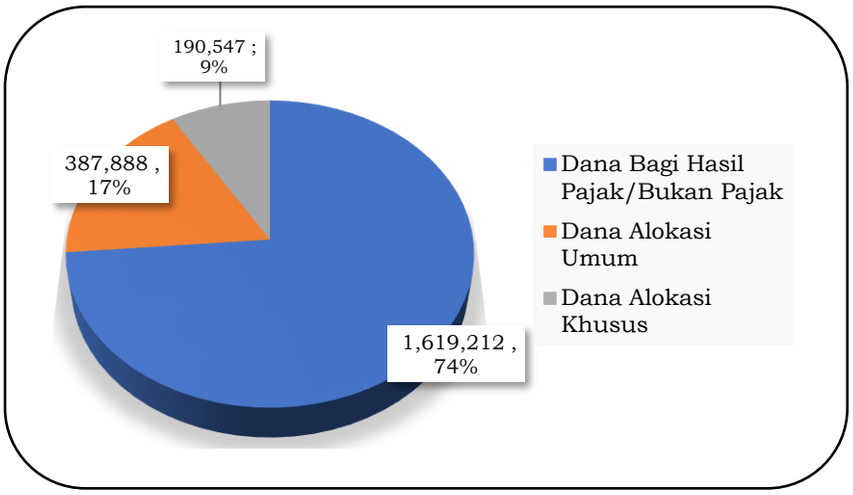

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Grafik II.39.
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

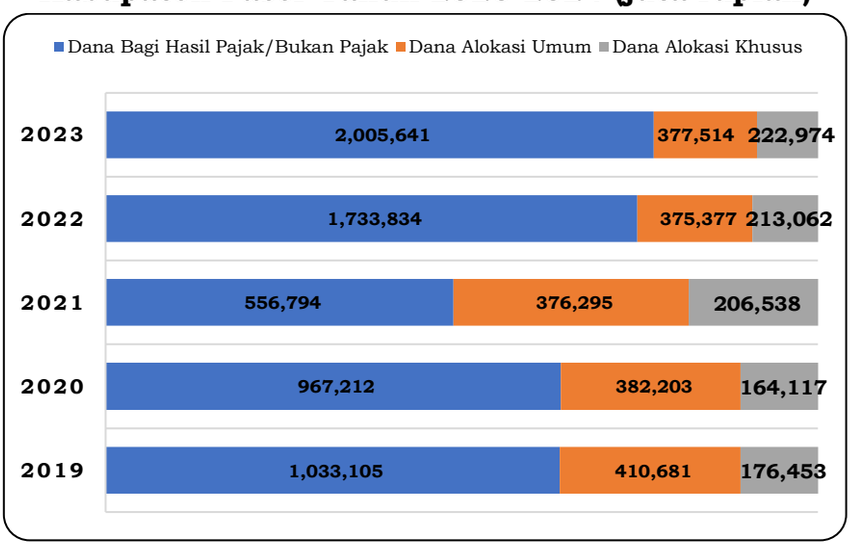

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang meningkat drastis cukup signifikan dari Rp. 47,92 miliar (2020) menjadi hanya Rp. 188,91 miliar (2024) atau rata-rata kenaikan 40,90%. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2024 yang sebesar Rp. 183,94 miliar yang diterima dari pos Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi. Jika dilihat lebih dalam dalam 5 (lima) tahun terakhir Sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp. 47,92 miliar (2020) menjadi Rp. 4,96 miliar (2024). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pendapatan Hibah

dan Pendapatan Lainnya merupakan penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi naik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik II.40.
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

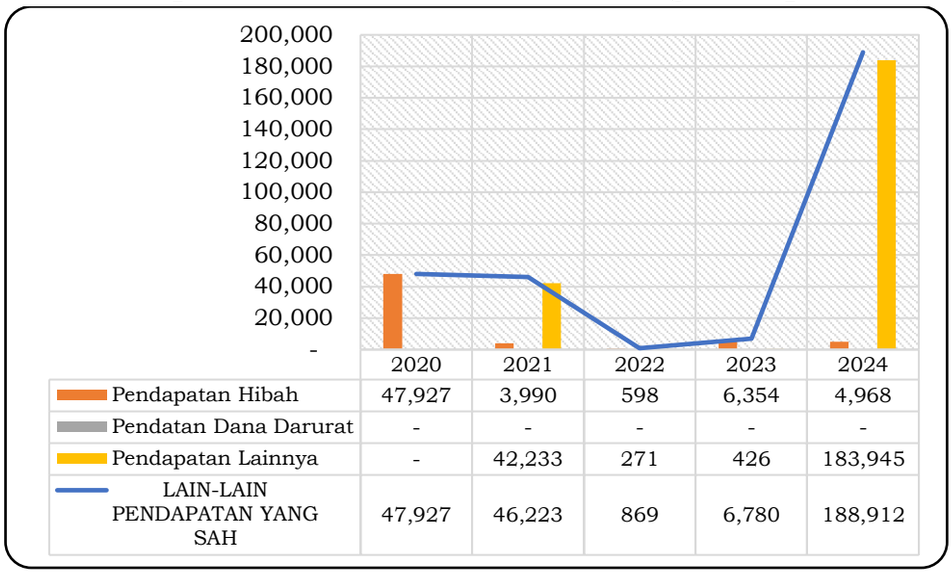

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Hibah	47,927	3,990	598	6,354	4,968
Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	42,233	271	426	183,945
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	47,927	46,223	869	6,780	188,912

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

a. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah;
b. Diversifikasi Pendapatan: Diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Paser;
c. Meningkatkan investasi di berbagai sektor: untuk meningkatkan geliat investasi maka perlu penyederhanaan proses perizinan investasi, memberikan insentif dan kemudahan bagi investor serta promosi potensi investasi di Kabupaten Paser;
d. Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi non-tambang;
e. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan;
f. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah;

g. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya;
h. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif;
i. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**2.404.054**	**2.229.443**	**3.131.568**	**3.730.762**	**4.784.413**	18,77
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**173.315**	**270.130**	**196.204**	**301.346**	**348.985**	**19,12**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.269	48.075	37.901	67.114	54.941	13,36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.528	10.780	11.698	13.986	12.877	7,82
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.164	5.038	5.724	6.292	6.566	12,06
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.355	206.237	140.882	213.954	274.601	21,42
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.182.811**	**1.913.090**	**2.934.496**	**3.423.063**	**4.246.515**	**18,10**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.682.044**	**1.300.917**	**2.440.728**	**2.748.072**	**3.530.143**	**20,36**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.513.532**	**1.139.626**	**2.322.274**	**2.606.130**	**3.406.672**	**22,49**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	967.212	556.794	1.733.834	2.005.641	2.832.577	30,82
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	382.203	376.295	375.377	377.514	428.051	2,87
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	164.117	206.538	213.062	222.974	146.043	-2,87
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**34.102**	**3.376**	**21.563**	**-**	**-100,00**
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	**Dana Desa**	**168.512**	**127.189**	**115.078**	**120.380**	**123.471**	**3,58**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**500.767**	**612.173**	**493.768**	**674.990**	**716.372**	**9,36**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	169.579	221.117	306.666	431.070	346.628	19,57
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**331.189**	**391.056**	**187.102**	**243.920**	**369.744**	**-1,85**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	331.189	391.056	187.102	243.920	369.744	-1,85
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**47.927**	**46.223**	**869**	**6.354**	**188.912**	**40,90**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	**47.927**	**3.990**	**598**	**6.354**	**4.968**	**-43,26**
1.3.2	**Pendapatan Dana Darurat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	**-**	**42.233**	**271**	**-**	**183.945**	**63,31**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

b. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2) Belanja modal
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3) Belanja tidak terduga
   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4) Belanja transfer
   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Grafik II.41.
Perkembangan Belanja Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

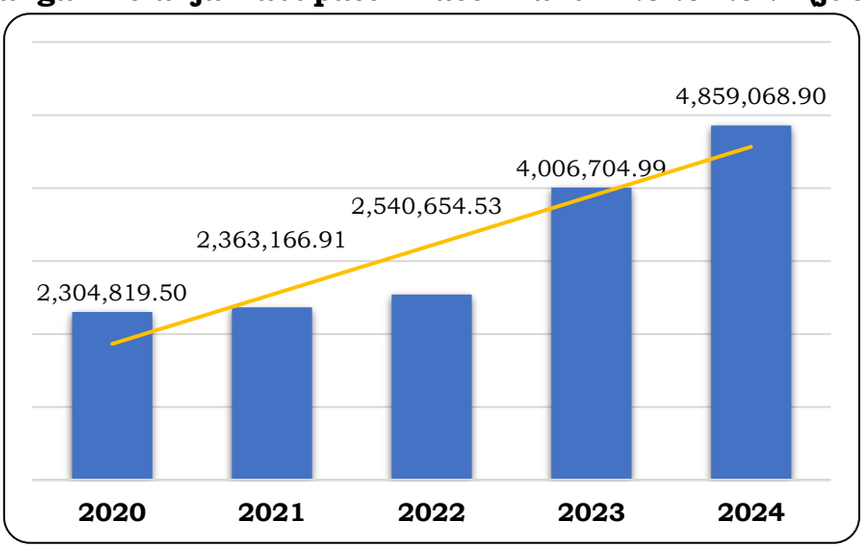

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Paser dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) trennya meningkat cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,47% pertahun. Pandemi Covid-19 membuat Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi 2,304 triliun kemudian setelah itu terus meningkat hingga mencapai Rp. 4,006 triliun di tahun 2023.

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat dimana Belanja Modal mengalami rata-rata peningkatan paling tinggi yaitu sebesar 32,26% pertahun kemudian diikuti Belanja transfer yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,87% pertahun. Sementara Belanja operasional mengalami kenaikan rata-rata yang persentasenya sebesar 16,87% pertahun. Sementara itu belanja tak terduga mengalami penurunan hingga -71,20% rata-rata pertahun. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 63% Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, kemudian 26% digunakan untuk belanja modal, dan 10% digunakan untuk belanja transfer dan sisanya 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Grafik II.42.
Rata-rata Struktur Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (%)

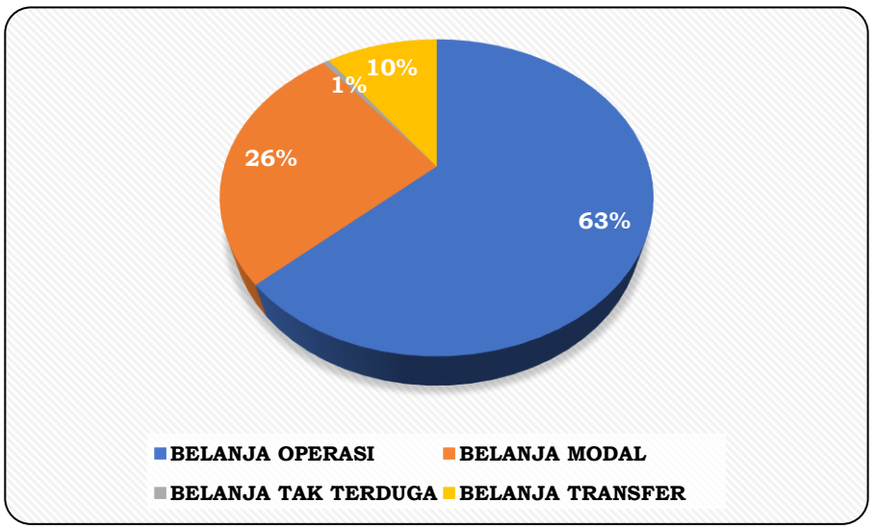

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

1) Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Paser telah tumbuh 16,87% pertahun dari Rp. 1,412 triliun (2020) menjadi Rp. 2,636 triliun (2024). Pada tahun-tahun awal (2020) secara proporsi sebagian besar belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian pada tahun 2021-2023 sebagian besar bahkan lebih dari separuhnya dengan rata-rata proporsinya sebesar 52,49% pertahun digunakan untuk belanja barang dan jasa dimana pertumbuhannya secara rata-rata tahunan sebesar 29,29%. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 52,76% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 34,14% di tahun 2024. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari

42,36% (2020) menjadi 63,43% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 10%.

Grafik II.43.
Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024 (%)

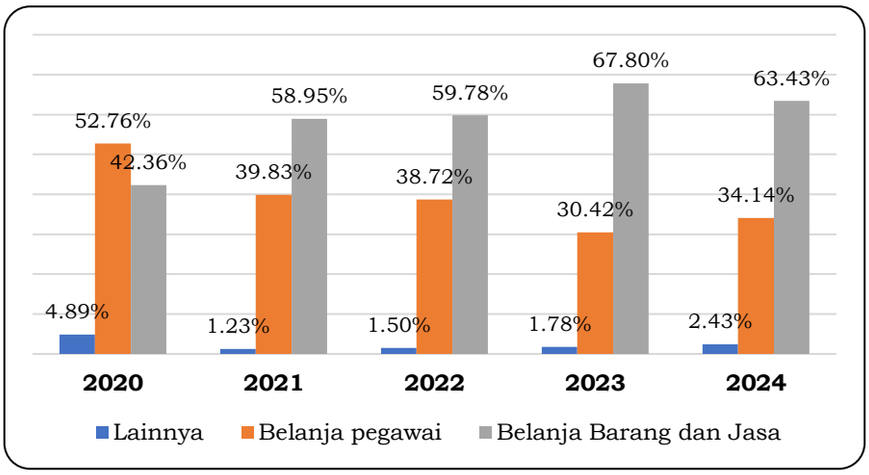

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Dengan meningkatnya Belanja Barang dan Jasa diikuti dengan Belanja Pegawai yang terus ditekan maka menunjukkan Kabupaten Paser memiliki perhatian yang lebih terhadap kualitas belanja publik yang tentunya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Grafik II.44.
Perkembangan Struktur Belanja Operasi
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

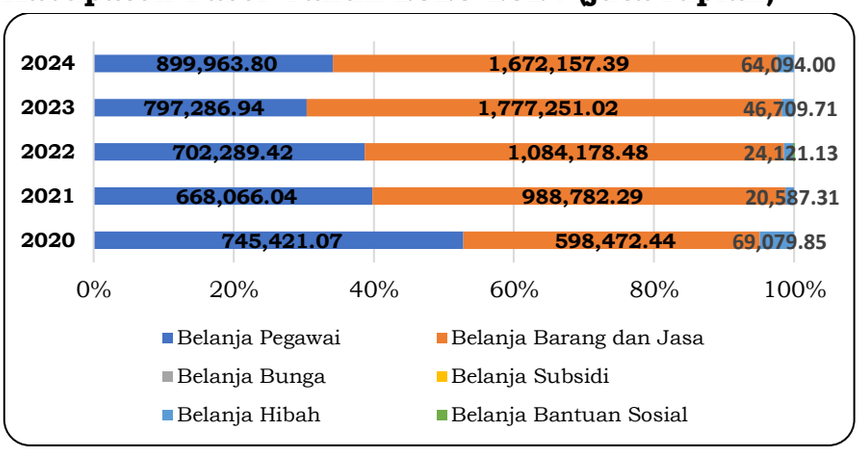

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2) Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Paser mengalami tren naik sebesar 32,26% pertahun dari Rp. 571,330 miliar (2020) menjadi Rp. 1,74 triliun (2024). Kenaikan belanja modal tersebut disebabkan oleh beberapa belanja yang mengalami rata-rata kenaikan yaitu sebagai berikut 130,72% pertahun (Belanja Tanah), 35,54% pertahun (Belanja Peralatan dan Mesin), dan 49,61% pertahun (Belanja Bangunan dan Gedung), 24,99% (Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan).

Sementara ada beberapa belanja yang mengalami rata-rata penurunan yaitu serta Belanja Aset Tetap Lainnya (-14,65% pertahun).

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Grafik II.45.
Perkembangan Struktur Belanja Modal
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

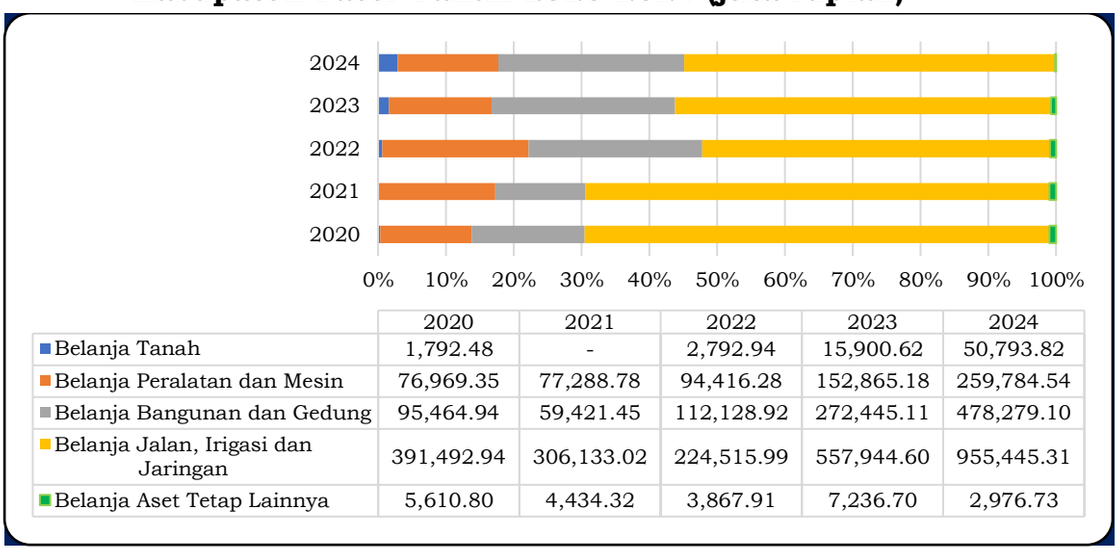

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Tanah	1,792.48	-	2,792.94	15,900.62	50,793.82
Belanja Peralatan dan Mesin	76,969.35	77,288.78	94,416.28	152,865.18	259,784.54
Belanja Bangunan dan Gedung	95,464.94	59,421.45	112,128.92	272,445.11	478,279.10
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	391,492.94	306,133.02	224,515.99	557,944.60	955,445.31
Belanja Aset Tetap Lainnya	5,610.80	4,434.32	3,867.91	7,236.70	2,976.73

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

3) Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Paser sebesar Rp. 69,96 miliar (2020) dan Rp. 481,36 miliar di tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -71,20% pertahun. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

4) Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Paser relatif naik sangat signifikan yaitu sebesar 17,30% pertahun dari Rp. 250,54 miliar (2020) menjadi Rp. 474,31 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relative meningkatnya belanja bagi hasil yang tumbuh 1,76% pertahun dari Rp. 3,665 miliar (2020) menjadi Rp. 3,929 miliar (2024). Sedangkan belanja transfer bantuan keuangan terjadi lonjakan sangat tinggi dari Rp. 246,88 miliar pada tahun 2020 menjadi 470,38

miliar pada tahun 2024 kemudian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,49% pertahun.

Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 98% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk belanja bagi hasil khususnya bagi hasil pajak.

Grafik II.46.
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

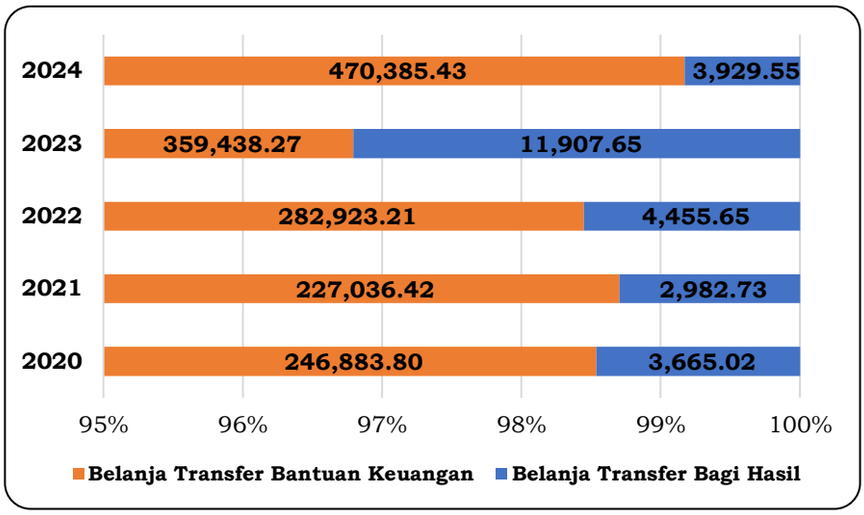

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2021,2023,2024 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar Rp. 133,723 miliar, Rp. 275,942 miliar dan Rp.74,65 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya;
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran;
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan;
4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat;

5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi;
6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai;
7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Paser tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.73.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**2.304.819,50**	**2.363.166,91**	**2.540.654,53**	**4.006.704,99**	**4.859.068,90**	**20,50**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.412.973,36**	**1.677.435,64**	**1.813.590,83**	**2.621.247,67**	**2.636.215,19**	**16,87**
2.1.1	Belanja Pegawai	745.421,07	668.066,04	702.289,42	797.286,94	899.963,80	4,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	598.472,44	988.782,29	1.084.178,48	1.777.251,02	1.672.157,39	29,29
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-		-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	69.079,85	20.587,31	24.121,13	46.709,71	64.094,00	-1,86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-		3.001,80	-	-	-100,00
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**571.330,52**	**447.277,56**	**437.722,03**	**1.006.392,20**	**1.748.057,37**	**32,26**
2.2.1	Belanja Tanah	1.792,48	#VALUE!	2.792,94	15.900,62	50.793,82	130,72
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	76.969,35	77.288,78	94.416,28	152.865,18	259.784,54	35,54
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	95.464,94	59.421,45	112.128,92	272.445,11	478.279,10	49,61
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	391.492,94	306.133,02	224.515,99	557.944,60	955.445,31	24,99
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.610,80	4.434,32	3.867,91	7.236,70	2.976,73	-14,65
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	777,87	-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**69.966,80**	**8.434,57**	**1.962,80**	**7.719,19**	**481,36**	**-71,20**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	**69.966,80**	**8.434,57**	**1.962,80**	**7.719,19**	**481,36**	**-71,20**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**250.548,82**	**230.019,14**	**287.378,87**	**371.345,92**	**474.314,98**	**17,30**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**3.665,02**	**2.982,73**	**4.455,65**	**11.907,65**	**3.929,55**	**1,76**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.874,55	2.982,73	4.455,65	11.907,65	3.929,55	8,13
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	790,47	-	-	-	-	0,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**246.883,80**	**227.036,42**	**282.923,21**	**359.438,27**	**470.385,43**	**17,49**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	716,91	-	-	-	-	**(100,00)**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	246.166,89	227.036,42	282.923,21	359.438,27	470.385,43	**17,57**
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	99.234,01	(133.723,59)	590.913,94	(275.516,41)	(74.656,22)	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

c. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata yang cukup signifikan yaitu 11,40% pertahun dari Rp. 429,20 miliar (2020) menjadi Rp. 661,09 miliar (2024) walaupun pada tahun 2022 (375,695 miliar) sempat terjadi penurunan. Naiknya pembiayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA khususnya dari tahun 2022 sebesar 383,195 miliar menjadi 966,609 miliar pada tahun 2023. Hal itu menunjukkan ada penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi penurunan. Pengeluaran pembiayaan menurun dari tahun 2020-2022 kemudian sempat terjadi kenaikan pada tahun 2023. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh adanya penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Grafik II.47.
Perkembangan Komposisi Pembiayaan
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

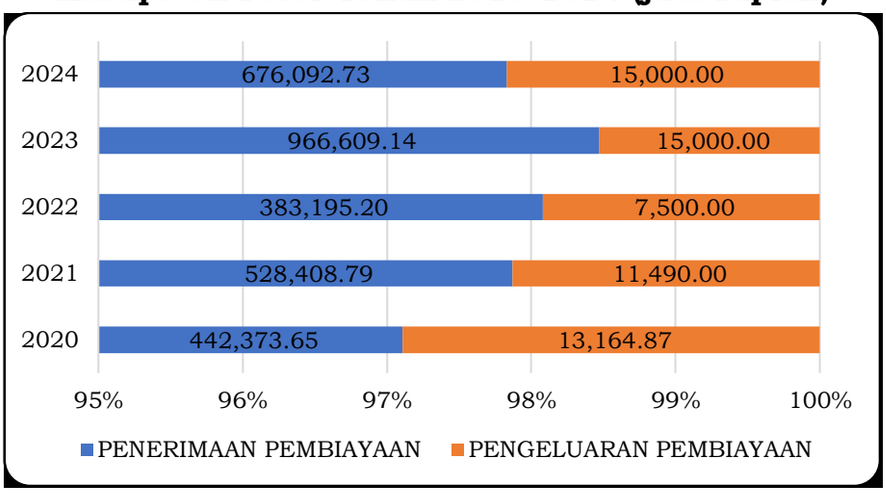

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Paser tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**2.404.053,51**	**2.229.443,32**	**3.131.568,47**	**3.731.188,58**	**4.784.412,68**	18,77
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**173.315,33**	**270.129,91**	**196.204,20**	**301.345,52**	**348.985,39**	**19,12**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.268,97	48.074,62	37.901,04	67.113,91	54.940,80	13,36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.527,59	10.780,22	11.697,76	13.986,27	12.877,07	7,82
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.164,14	5.038,45	5.723,82	6.291,75	6.566,16	12,06
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.354,62	206.236,62	140.881,58	213.953,59	274.601,37	21,42
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.182.811,36**	**1.913.090,03**	**2.934.495,60**	**3.423.062,64**	**4.246.514,79**	**18,10**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.682.044,07**	**1.300.917,44**	**2.440.727,80**	**2.748.072,20**	**3.530.142,96**	**20,36**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.513.531,81**	**1.139.626,32**	**2.322.273,50**	**2.606.129,56**	**3.406.672,18**	**22,49**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	967.212,09	556.793,99	1.733.834,22	2.005.640,69	2.832.577,30	30,82
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	382.202,55	376.294,80	375.377,43	377.514,45	428.051,49	2,87
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	164.117,17	206.537,53	213.061,86	222.974,43	146.043,39	-2,87
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**34.102,04**	**3.376,28**	**21.562,64**	**-**	**-100,00**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	**-**	**-**	-	-	**-**	**0,00**
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	**Dana Desa**	**168.512,26**	**127.189,09**	**115.078,01**	**120.380,00**	**123.470,78**	**3,58**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**500.767,29**	**612.172,58**	**493.767,80**	**674.990,44**	**716.371,83**	**9,36**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	169.578,62	221.117,07	306.665,55	431.070,44	346.628,30	19,57
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**331.188,66**	**391.055,52**	**187.102,25**	**243.920,00**	**369.743,53**	**-1,85**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	331.188,66	391.055,52	187.102,25	243.920,00	369.743,53	-1,85
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**47.926,83**	**46.223,39**	**868,67**	**6.780,42**	**188.912,50**	**40,90**
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.926,83	3.990,00	597,93	6.354,13	4.967,70	-43,26
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	42.233,39	270,74	426,29	183.944,80	63,31
2	**BELANJA**	**2.304.819,50**	**2.363.166,91**	**2.540.654,53**	**4.006.704,99**	**4.859.068,90**	**20,50**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.412.973,36**	**1.677.435,64**	**1.813.590,83**	**2.621.247,67**	**2.636.215,19**	**16,87**
2.1.1	Belanja Pegawai	745.421,07	668.066,04	702.289,42	797.286,94	899.963,80	4,82

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	598.472,44	988.782,29	1.084.178,48	1.777.251,02	1.672.157,39	29,29
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	#VALUE!	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	69.079,85	20.587,31	24.121,13	46.709,71	64.094,00	-1,86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	#VALUE!	3.001,80	-	-	-100,00
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**571.330,52**	**447.277,56**	**437.722,03**	**1.006.392,20**	**1.748.057,37**	**32,26**
2.2.1	Belanja Tanah	1.792,48	-	2.792,94	15.900,62	50.793,82	130,72
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	76.969,35	77.288,78	94.416,28	152.865,18	259.784,54	35,54
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	95.464,94	59.421,45	112.128,92	272.445,11	478.279,10	49,61
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	391.492,94	306.133,02	224.515,99	557.944,60	955.445,31	24,99
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.610,80	4.434,32	3.867,91	7.236,70	2.976,73	-14,65
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	777,87	
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**69.966,80**	**8.434,57**	**1.962,80**	**7.719,19**	**481,36**	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	69.966,80	8.434,57	1.962,80	7.719,19	481,36	
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**250.548,82**	**230.019,14**	**287.378,87**	**371.345,92**	**474.314,98**	**17,30**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**3.665,02**	**2.982,73**	**4.455,65**	**11.907,65**	**3.929,55**	**1,76**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.874,55	2.982,73	4.455,65	11.907,65	3.929,55	8,13
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	790,47	-	-	-	-	0,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**246.883,80**	**227.036,42**	**282.923,21**	**359.438,27**	**470.385,43**	**17,49**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	282.923,21	359.438,27	470.385,43	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	716,91	-	-	-	-	-100,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	246.166,89	227.036,42	282.923,21	359.438,27	470.385,43	17,57
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	99.234,01	(133.723,59)	590.913,94	(275.516,41)	(74.656,22)	-
3	**PEMBIAYAAN**	**429.208,78**	**516.918,79**	**375.695,20**	**951.609,14**	**661.092,73**	**11,40**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**442.373,65**	**528.408,79**	**383.195,20**	**966.609,14**	**676.092,73**	**11,19**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	442.373,65	528.408,79	383.195,20	966.609,14	676.092,73	11,19
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	-	-	-	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**13.164,87**	**11.490,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3,32**
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2	penyertaan modal daerah;	13.164,87	11.490,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	3,32
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PEMBIAYAAN NETTO	**429.208,78**	**516.918,79**	**375.695,20**	**951.609,14**	**661.092,73**	**11,40**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

a. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Paser dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 4,84% pertahun dari Rp. 7,224 triliun (2020) menjadi Rp. 8,728 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Aset lancar (1,16 pertahun), investasi jangka panjang (5,05% pertahun), aset tetap (1,82% pertahun), dan Aset Lainnya yang mengalami rata-rata kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 40,52% pertahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 79% nilai total aset yang ada berasal dari jenis Aset Tetap.

b. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Paser dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuasi namun relatif mengalami tren menurun sebesar -4,56% pertahun dari Rp. 31,748 miliar (2020) menjadi Rp. 26,345 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban yang trennya relatif meningkat sebesar 111,46% pertahun dari Rp. 1,051 miliar (2020) menjadi Rp. 21,025 miliar (2025).

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di

masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Paser berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,01% pertahun dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 7,156 Triliun menjadi Rp. 8,703 Triliun di tahun 2023. Ekuitas dari tahun 2019-2021 secara nilainya terus mengalami penurunan namun kemudian mulai menaik nilainya di tahun 2022 hingga 2023. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Paser disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.75.

Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	509.872.206.673	302.218.596.270	919.429.821.902	655.821.723.511	570.987.648.344	2,87
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-			
Kas di Bendahara Pengeluaran	106.186.500	-	979.020	-		-100,00
Kas di BLUD	16.543.421.270	78.759.386.374	45.149.216.756	13.851.391.633	11.394.075.690	-8,90
Kas di Bendahara FKTP	1.279.559.192	1.493.171.308	1.763.419.915	1.296.919.154	25.729	-93,30
Kas di Bendahara BOS	641.415.541	724.042.135	265.697.448	236.032.460	236.032.460	-22,11
Kas dana BOK Puskesmas					3.866.477.837	
Kas Lainnya	1.329.626.462	88.565.444	42.622.359	4.945.353.939	58.691.762	-54,16
Investasi Jangka Pendek	-	-				!
Piutang Pendapatan	92.949.420.529	65.407.449.064				-100,00
Piutang Pajak			37.557.447.643	37.330.628.209	71.814.845.520	38,28
Penyisihan Piutang Pajak						
Piutang Retribusi			3.482.478.096	3.813.667.886	4.398.677.846	12,39
Penyisihan Piutang Retribusi						
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.653.971.365	3.423.145.482	8.321.545.902	14.916.726.865	1.721.356.690	-17,15
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(27.722.759.911)	(29.675.387.698)				-100,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat					805.236.003.000	!
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			86.547.615.000	32.660.180.000	49.200.075.000	-24,60
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya						
Piutang Lainnya			2.009.264.800	49.380.447.510	1.271.082.182	-20,46
Penyisihan Piutang			(30.815.662.030)	(33.612.407.896)	(33.605.550.343)	4,43
Beban Dibayar Dimuka	5.140.477.993	2.395.315.356	1.730.138.400	2.649.781.913	3.103.365.148	-11,85
Persediaan	197.383.147.531	169.187.094.962	123.636.252.147	132.289.184.003	142.687.218.525	-7,79
Jumlah Aset Lancar	**801.176.673.144**	**594.021.378.697**	**1.199.120.837.358**	**915.579.629.187**	**1.632.370.025.390**	**19,47**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-				
Dana Bergulir	-	-	761.488.615	780.418.474	867.561.289	6,74
Penyisihan Investasi Jangka Panjang						
Jumlah Investasi Non Permanen	**-**	**-**	**761.488.615**	**780.418.474**	**867.561.289**	**6,74**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	215.578.303.687	227.268.811.064	238.680.314.549	253.403.737.977	274.678.895.933	6,24
Jumlah Investasi Permanen	**215.578.303.687**	**227.268.811.064**	**238.680.314.549**	**253.403.737.977**	**274.678.895.933**	**6,24**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**215.578.303.687**	**227.268.811.064**	**239.441.803.164**	**254.184.156.451**	**275.546.457.222**	**6,33**
ASET TETAP						
Tanah	856.166.594.710	860.261.514.057	863.825.671.926	880.012.588.616	927.624.407.760	2,02
Peralatan dan Mesin	899.646.826.247	970.898.203.254	1.047.425.546.343	1.225.319.782.779	1.486.140.140.209	13,37
Gedung dan Bangunan	2.277.799.257.360	2.330.892.598.634	2.230.016.161.044	2.655.673.470.881	2.946.569.313.887	6,65
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	5.220.039.592.817	5.527.816.463.913	5.733.553.484.049	6.289.365.460.138	7.245.734.365.644	8,54
Aset Tetap Lainnya	37.429.377.605	41.278.118.321	45.173.816.225	51.653.004.030	54.629.732.590	9,91

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Konstruksi dalam Pengerjaan	319.251.320.987	315.693.601.588	385.490.491.614	406.465.987.929	406.938.481.229	6,25
Akumulassi Penyusutan	(3.639.022.998.839)	(4.070.228.308.827)	(4.437.479.986.445)	(4.986.141.068.624)	(4.930.365.299.668)	7,89
Jumlah Aset Tetap	**5.971.309.970.887**	**5.976.612.190.941**	**5.868.005.184.756**	**6.522.349.225.749**	**8.137.271.141.650**	**8,04**
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi			396.489.667.308	**-**	**396.489.667.308**	-0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	(100.244.998.999)	-	(113.697.226.096)	6,50
Jumlah Properti	**-**	**-**	**296.244.668.309**	**-**	**282.792.441.212**	**-2,30**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	1.474.380.443	505.349.737	298.349.044	298.349.044	298.349.044	**-32,93**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				298.349.044	298.349.044	**0,00**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	162.337.142.777	201.926.745.568	-	201.926.745.568	-	**-100,00**
Aset Tak Berwujud	1.769.904.175	11.602.919.400,00	13.331.526.400	14.811.976.400	15.589.845.450	**72,28**
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(9.497.050.950)	(10.929.056.425)	(12.499.049.650)	(12.499.049.650)	**9,59**
Aset Lain-Lain	30.944.142.101	31.435.387.393	526.977.672.314	32.526.443.448	32.523.024.113	**1,25**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(43.376.829.781)		(50.928.319.104)		**-100,00**
Aset Lainnya - TPTGR yang belum ada SKTM	655.031.872					**-100,00**
Dana Transfer Treasury Deposit Facity				884.064.964.000	-	**-100,00**
Jumlah Aset Lainnya	**197.180.601.368**	**192.596.521.367**	**529.678.491.333**	**1.070.499.458.751**	**36.210.518.002**	**-34,54**
JUMLAH ASET	**7.185.245.549.086**	**6.990.498.902.069**	**8.132.490.984.920**	**8.762.612.470.137**	**10.364.190.583.475**	**9,59**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.797.959	73.893.261	42.622.359	58.691.762	58.691.762	**-0,47**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Pendapatan Diterima Dimuka	342.103.541	424.347.330	262.051.596	154.595.000	154.595.000	**-18,01**
Utang Beban	1.051.457.251	5.628.007.632	32.617.966.442	20.764.257.161	21.025.289.010	**111,46**
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.295.606.496	48.358.126.260	5.665.741.513	5.106.551.568	5.106.551.568	**-35,93**
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**31.748.965.247**	**54.484.374.482**	**38.588.381.910**	**26.084.095.491**	**26.345.127.340**	**-4,56**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**31.748.965.247**	**54.484.374.482**	**38.588.381.910**	**26.084.095.491**	**26.345.127.340**	**-4,56**
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	7.153.496.583.837	6.936.014.527.586	8.093.902.603.010	8.736.230.025.602	10.337.549.647.561	9,64
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	**7.153.496.583.837**	**6.936.014.527.586**	**8.093.902.603.010**	**8.736.230.025.602**	**10.337.549.647.561**	**9,64**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7.185.245.549.084**	**6.990.498.902.069**	**8.132.490.984.920**	**8.762.314.121.093**	**10.363.894.774.901**	**9,59**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

d. Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Paser periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut tidak likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2020-2024 trennya semakin meningkat dari nilai 25,23 (2020) menjadi 61,96 (2024) hanya saja pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 10,90. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 25-26 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 61-62 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Paser memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Berikut ini data rasio lancar Kabupaten Paser Tahun 2020-2024.

Tabel II.76.
Rasio Lancar Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Aset lancar	801.176.673.144	594.021.378.697	1.199.120.837.358	915.579.629.187	1.632.370.025.390
Kewajiban lancar	31.748.965.247	54.484.374.482	38.588.381.910	26.084.095.491	26.345.127.340
Rasio lancar	25,23	10,90	31,07	35,10	61,96

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2) Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh Utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

- *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt*

to Equity Ratio (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio Utang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio Utang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah Utang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio Utang terhadap ekuitas Kabupaten Paser dari tahun 2020-2024 cenderung menurun secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi ditahun 2024 yaitu sebesar 0,0025 dan yang tertinggi terjadi ditahun 2021 sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2024 dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,25% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,79% dari total ekuitas yang ada

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Paser cukup untuk menjamin pembayaran Utang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.77.
Rasio Utang Kabupaten Paser Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kewajiban	31.748.965.247	54.484.374.482	38.588.381.910	26.084.095.491	26.345.127.340
Ekuitas	7.153.496.583.837	6.936.014.527.586	8.093.902.603.010	8.736.230.025.602	10.337.549.647.561
Total *debt to equity ratio*	0,004	0,008	0,005	0,003	0,003

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

- *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Utang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara Utang (baik Utang lancar maupun Utang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh Utang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Utang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total Utang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio Utang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Paser dari tahun 2020-2024 mengalami tren menurun dimana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dengan nilai rasio 0,0078 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2024 dengan nilai rasio 0,0025. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Paser tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah Utang yang ada di Kabupaten Paser.

Tabel II.78.
Rasio Utang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Paser Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kewajiban	31.748.965.247	54.484.374.482	38.588.381.910	26.084.095.491	26.345.127.340
Aktiva	7.185.245.549.086	6.990.498.902.069	8.132.490.984.920	8.762.612.470.137	10.364.190.583.475
Total debt to asset ratio	0,0044	0,0078	0,0047	0,0030	0,0025

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

3) Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

- Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dan lain-lain. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren fluktuatif walaupun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,033 dan di tahun 2024 menurun di angka 0,043. Rasio tahun 2020 mencapai 0,029 dan meningkat hingga 0,045 di tahun 2023. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Paser dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik dimana pada tahun 2020 dari Rp. 5,971 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 173,31 miliar atau 2,90% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2024 berkinerja lebih baik lagi dimana dengan memanfaatkan aset senilai Rp. 8,137 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 348,98 miliar atau 4,29% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil walaupun sudah ada kecenderungan untuk naik. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.79.
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Paser Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	173.315.327.565	270.129.905.878	196.204.202.094	301.345.522.056	348.985.389.628
Aktiva tetap (aset tetap)	5.971.309.970.887	5.976.612.190.941	5.868.005.184.756	6.522.349.225.749	8.137.271.141.650
Trasio perputaran aktiva tetap	0,029	0,045	0,033	0,046	0,043

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

- Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif dimana rasio dari nilai rasio 0,024 ditahun 2020 menjadi 0,034 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 2,41% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2023 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 3,37% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan;
b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan;
c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan;
d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah;
e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa;
f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan;

g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan;
h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.80.
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Paser
Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	173.315.327.565	270.129.905.878	196.204.202.094	301.345.522.056	348.985.389.628
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	7.185.245.549.086	6.990.498.902.069	8.132.490.984.920	8.762.612.470.137	10.364.190.583.475
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,024	0,039	0,024	0,034	0,034

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Paser 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun dengan rata-rata persentasenya sebesar 23,63%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 32,16% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 18,46%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 33% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.81.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	745.421,07	2.317.984,37	32,16%
2	2021	668.066,04	2.374.656,91	28,13%
3	2022	702.289,42	2.548.154,53	27,56%
4	2023	797.286,94	4.021.704,99	19,82%
5	2024	899.963,80	4.874.068,90	18,46%
Rata-Rata		**762.605,46**	**3.227.313,94**	**23,63%**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,80% pertahun dari Rp. 1,148 triliun (2020) menjadi Rp. 1,453 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp. 745,42 miliar (2020) menjadi

Rp. 899,96 miliar (2024) dan belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp. 246,883 miliar (2020) menjadi Rp. 470,35 miliar (2024). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp. 3,214 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 36,09%. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 63,91% yang tentunya ini cukup baik karena persentasenya lebih dari 50%. Ruang fiskal untuk belanja publik ini ke depannya masih bisa ditingkatkan kembali, Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu;
2) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit;
3) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting;
4) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai;
5) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi;
6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82.

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**814.500,92**	**688.653,35**	**729.412,35**	**843.996,65**	**964.057,80**	**4,30**
1.1	Belanja Pegawai	745.421,07	668.066,04	702.289,42	797.286,94	899.963,80	4,82
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-			-	-
1.4	Belanja Hibah	69.079,85	20.587,31	24.121,13	46.709,71	64.094,00	(1,86)
1.5	Belanja Bantuan Sosial	-		3.001,80	-	-	#DIV/0!
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**250.548,82**	**230.019,14**	**287.378,87**	**371.345,92**	**474.314,98**	**27,28**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	3.665,02	2.982,73	4.455,65	11.907,65	3.929,55	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	246.883,80	227.036,42	282.923,21	359.438,27	470.385,43	27,48
3	**Belanja Tak Terduga**	**69.966,80**	**8.434,57**	**1.962,80**	**7.719,19**	**481,36**	**(71,20)**
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**13.164,87**	**11.490,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3,32**
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.2	penyertaan modal daerah;	13.164,87	11.490,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	3,32
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**1.148.181,41**	**938.597,07**	**1.026.254,02**	**1.238.061,77**	**1.453.854,14**	**6,08**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2021, 2023, dan 2024 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 145,213 miliar dan Rp. 290,942 miliar dan Rp 89,65 miliar. Sementara pada tahun 2020, dan 2023 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.83.
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.404.053,51	2.229.443,32	3.131.568,47	3.731.188,58	4.784.412,68
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.304.819,50	2.363.166,91	2.540.654,53	4.006.704,99	4.859.068,90
3	Pengeluaran Pembiayaan	13.164,87	11.490,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
	(Defisit Riil)	86.069,14	- 145.213,59	583.413,94	- 290.516,41	- 89.656,22

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2021 dan 2023 dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun 2021 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp 528,408 miliar dan Rp. 966,609 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan

Tabel II.84.
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	442.373,65	528.408,79	383.195,20	966.609,14	676.092,73
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**442.373,65**	**528.408,79**	**383.195,20**	**966.609,14**	**676.092,73**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Paser dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Paser.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2029

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2026-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu;
2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi,

tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah;

3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya;
4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan;
5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif;
6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan;
7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi;
8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2023 dan/atau target APBD tahun 2024.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Paser masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Paser masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Paser tahun 2026-2030 diproyeksikan hanya tumbuh ± 1,28% pertahun dari Rp. 3,96 triliun (2026) menjadi Rp. 4,17 triliun (2030). Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan 0%.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar 19,12% pertahun, maka proyeksi PAD tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 6,91% pertahun dari Rp. 307,26 miliar (2026) menjadi Rp. 401,36 miliar (2030). Dari seluruh

komponen sumber PAD baik itu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar ± 3,5 % pertahun dari Rp. 101,44 miliar (2026) menjadi Rp. 122,11 miliar (2030) telah mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh ± 13,36% pertahun dimana pertumbuhan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian;
2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan;
3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Paser. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja;
4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar;
5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah;
6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan;
7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan;
8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2026-2030 ditargetkan tumbuh ± 7% pertahun dari Rp 175,30 miliar (2026) menjadi Rp 246,36 miliar (2030) sudah mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan Retribusi daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh ± 7,82% dengan capaian tertinggi ada di tahun 2023 sebesar Rp. 13,986 miliar. Peningkatan target ini memerlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi dimana ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan daerah. Strategi untuk meningkatkan retribusi melalui:

1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya;
2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini;
3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan;
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien;
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan;
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi;
7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi;
8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan;
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima;
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 1,5% pertahun dari Rp. 6,500 miliar (2026) menjadi Rp. 6,898 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan masa lalu yang secara nominal capaiannya terus bertambah dari Rp 4,164 miliar (2020) menjadi Rp 6,566 miliar (2024). Untuk mencapai target

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain;
2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik;
3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran;
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru;
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam;
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran;
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi;
8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD;
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan;
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-2030 ditargetkan naik ± 2,00% pertahun dari Rp. 24,00 miliar (2026) menjadi Rp. 25,98 miliar (2030). Target ini cukup optimis namun masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2020-2024) yang sebesar ± 21,42% pertahun yang jika dilihat data per tahunnya terdapat fluktuasi. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini

adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Grafik II.48.
Target Komposisi PAD
Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (juta rupiah)

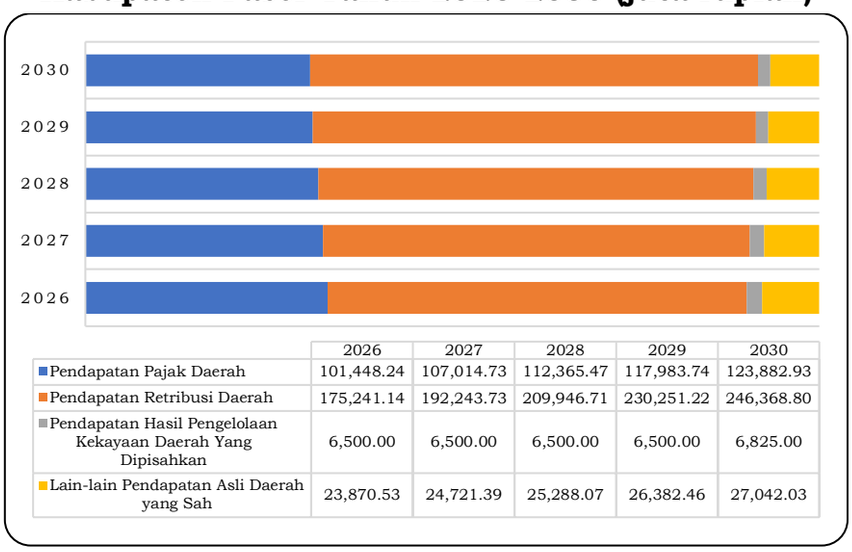

	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Pajak Daerah	101,448.24	107,014.73	112,365.47	117,983.74	123,882.93
Pendapatan Retribusi Daerah	175,241.14	192,243.73	209,946.71	230,251.22	246,368.80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,825.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23,870.53	24,721.39	25,288.07	26,382.46	27,042.03

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024.

Grafik II.49.
Target Dana Perimbangan
Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (juta rupiah)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Untuk sumber transfer pemerintah pusat ditargetkan turun dari target di tahun 2024 sebagaimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 3,530 triliun, target pendapatan transfer Kabupaten Paser sebesar Rp 3,52 Triliun di tahun 2026 sedangkan di tahun 2030 sebesar Rp 3,70 triliun. Transfer pemerintah pusat yang ditargetkan menurun memiliki asumsi adanya efisiensi oleh pemerintah pusat yang berakibat menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan ditargetkan dari tahun 2026-2030 dengan pertumbuhan 1,66% dengan nilai Rp. 3,13 triliun (2026) menjadi Rp 3,24 triliun (2030). Proyeksi dana perimbangan diperoleh dari dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum.

Target Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2026-2030 ditargetkan stagnan di 2026 sampai 2030 yaitu sebesar Rp 70 milyar.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Paser tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.85.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**18,77**	**1,28**	**3.965.770,00**	**4.016.466,23**	**4.067.999,55**	**4.122.692,11**	**4.173.247,44**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**19,12**	**6,91**	**307.263,10**	**330.344,61**	**353.987,07**	**380.509,86**	**401.368,39**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,36	3,50	101.448,24	107.014,73	112.365,47	117.983,74	122.113,17
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7,82	7,00	175.306,37	192.243,73	209.946,71	230.251,22	246.368,80
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,06	1,50	6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.796,91	6.898,86
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21,42	2,00	24.008,48	24.488,65	24.978,43	25.477,99	25.987,55
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**18,10**	**1,37**	**3.588.506,91**	**3.616.121,62**	**3.644.012,48**	**3.672.182,25**	**3.701.879,05**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**20,36**	**1,60**	**3.258.506,91**	**3.286.121,62**	**3.314.012,48**	**3.342.182,25**	**3.371.879,05**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**22,49**	**1,66**	**3.133.973,49**	**3.161.588,20**	**3.189.479,06**	**3.217.648,83**	**3.246.100,30**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	30,82	1,00	2.761.471,35	2.789.086,06	2.816.976,92	2.845.146,69	2.873.598,16
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,87	0,00	372.502,14	372.502,14	372.502,14	372.502,14	372.502,14
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	-2,87	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**-100,00**	**0,00**	-	-	-	-	-
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.4	**Dana Desa**	3,58	**0,00**	**124.533,42**	**124.533,42**	**124.533,42**	**124.533,42**	**125,778,75**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**9,36**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	19,57	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-1,85	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-1,85	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**40,90**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-43,26	0,00	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	**63,31**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib diluar Pagu PD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Perangkat Daerah (PD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif PD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Paser yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
    a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi PD;
    b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Paser, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Paser dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan ± 1,31% pertahun dari

Rp. 4,19 triliun (2026) menjadi Rp. 4,43 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relative jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2020-2024 yang tumbuh ± 20,50% pertahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Adapun belanja operasi akan ditargetkan meningkat 3,88% pertahun dari Rp. 2,80 triliun (2026) menjadi Rp. 2,87 triliun (2030). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah akan ditekan secara perlahan dengan target penurunan -5% pertahun dari Rp. 35,74 miliar (2026) menjadi Rp. 29,14 miliar (2030). Sedangkan belanja pegawai meskipun ditarget meningkat namun peningkatan tersebut untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan tambahan ASN dengan target peningkatan rata-rata sebesar ± 1% pertahun dari Rp. 1,20 miliar (2025) menjadi Rp. 1,25 triliun (2030). Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2023 dan target tahun 2024 secara berturut-turut sebesar Rp. 797,286 miliar dan 998,984 triliun. Untuk belanja Barang dan Jasa porsinya terus diturunkan dibandingkan nilai target APBD tahun 2024. Adapun target belanja Barang dan Jasa dari tahun 2026 sebesar Rp 1,56 triliun hingga 2030 sebesar Rp 1,59 triliun.

Grafik II.50.
Target Belanja Operasi
Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)

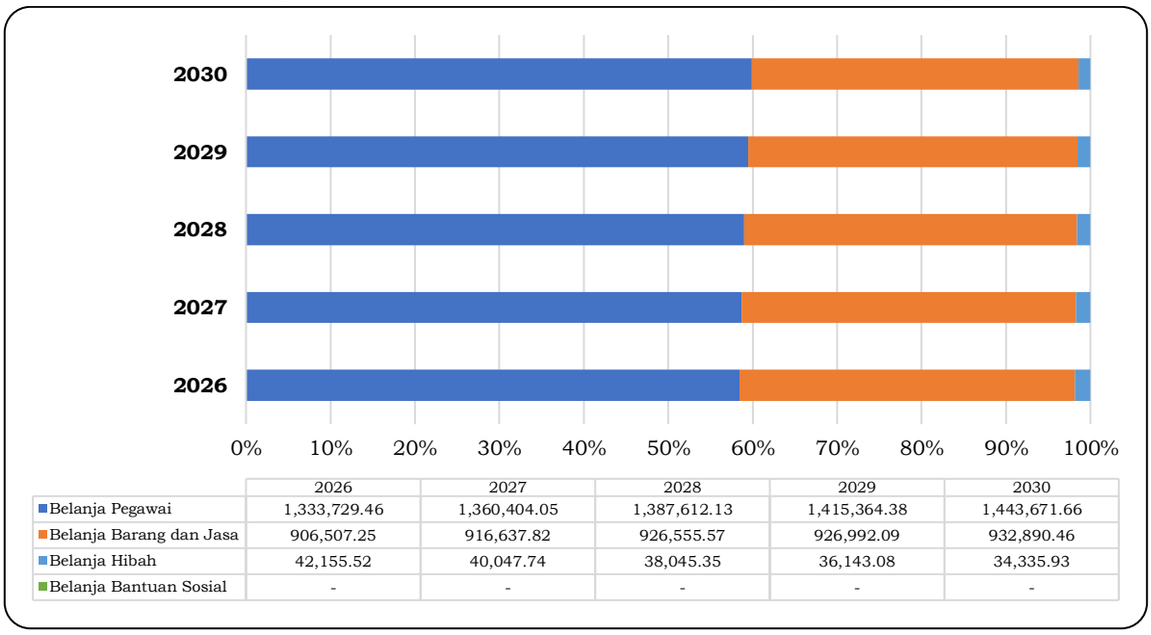

	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	1,333,729.46	1,360,404.05	1,387,612.13	1,415,364.38	1,443,671.66
Belanja Barang dan Jasa	906,507.25	916,637.82	926,555.57	926,992.09	932,890.46
Belanja Hibah	42,155.52	40,047.74	38,045.35	36,143.08	34,335.93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Porsi belanja modal Kabupaten Paser dalam waktu 2026 hingga 2030 akan ditekan sebesar -3,98%, meskipun rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir 32,36% (2020-2024). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada proyeksi belanja yang diperkirakan tidak akan

optimal. Proyeksi belanja modal Kabupaten Paser sebesar dari Rp. 42,74 miliar (2026) menjadi Rp. 1,09 triliun (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalanan, irigasi dan jaringan (56%), kemudian belanja Bangunan dan Gedung (28%), kemudian belanja peralatan dan mesin (16%) dan sementara belanja aset tetap lainnya dan Belanja Aset Lainnya 0%.

Grafik II.51.
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Paser Tahun 2026-2030

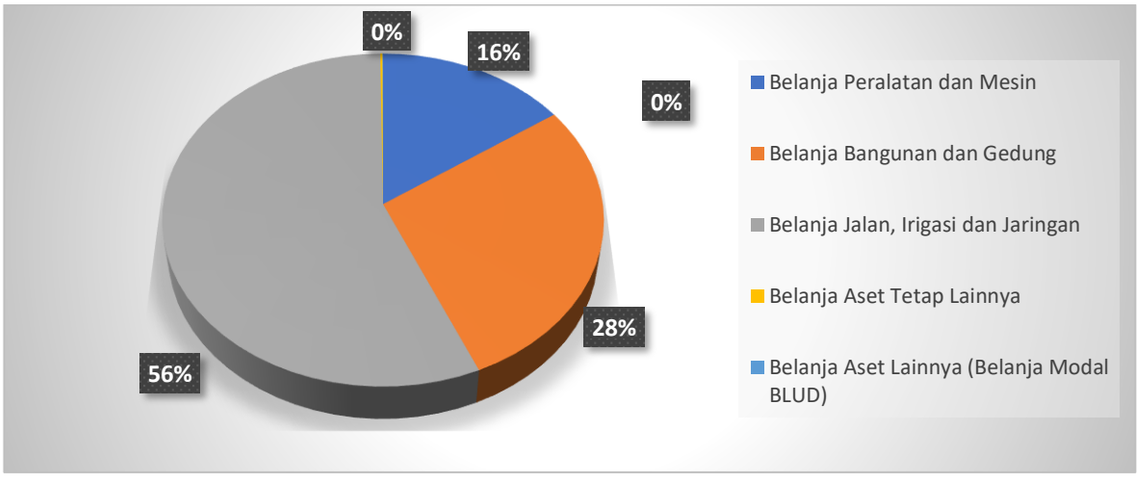

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan / diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunan juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan Gedung diarahkan pada bangunan dan Gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

Untuk Belanja Tak Terduga tahun 2026-2030 ditargetkan konstan sebagaimana nilai APBD 2025 yaitu sebesar Rp. 481,36 miliar pertahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya. Untuk Belanja Transfer ditargetkan dengan pertumbuhan yang relatif konstan hanya ± 0,90% pertahun dari Rp. 442,84 miliar (2026) menjadi Rp. 455,70 miliar (2030) yang didorong oleh meningkatnya belanja bagi hasil pajak. Untuk jenis belanja transfer selain belanja transfer bagi hasil yaitu belanja transfer bantuan keuangan ditargetkan sebesar 1,55% sebesar Rp 437,93 miliar (2026) menjadi Rp 450,33 miliar (2030) yang didasarkan pada formula minimal dana transfer ke desa dengan mempertimbangkan target pendapatan transfer yang juga konstan yaitu DAU, DBH Pajak dan Non Pajak/SDA, serta Pendapatan Dana Desa.

Grafik II.52.
Target Alokasi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)

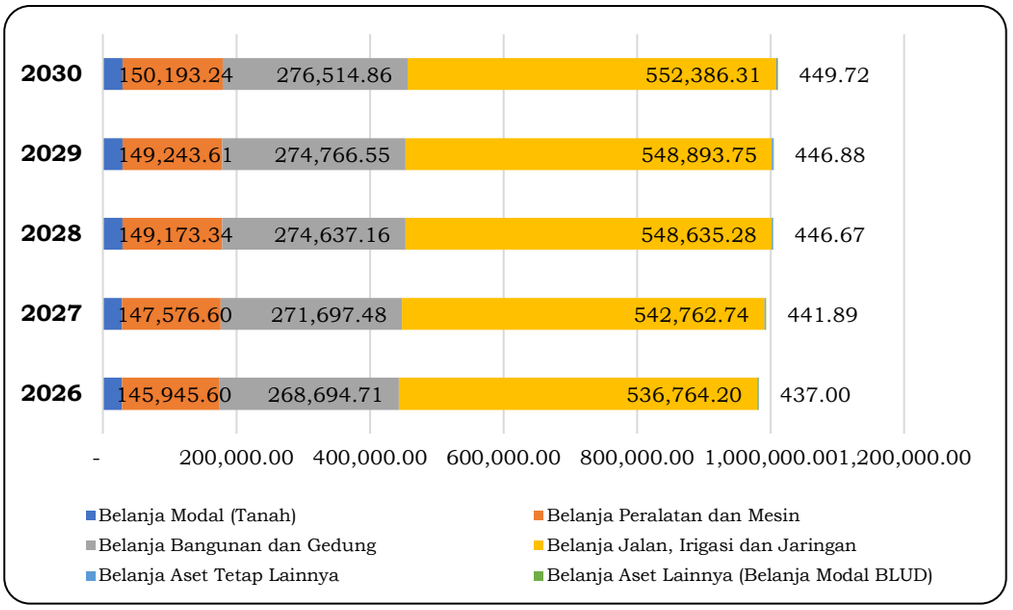

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Dengan melihat semakin terbatasnya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak;
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab;
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien;
4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang

canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan;

5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat;
6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis;
7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik;
8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.86.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
2	**BELANJA**	**20,50**	**1,31**	**4.195.770,00**	**4.296.466,23**	**4.347.999,55**	**4.402.692,11**	**4.438.247,44**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**16,87**	**3,88**	**2.800.184,80**	**2.818.227,66**	**2.836.519,11**	**2.855.056,08**	**2.873.835,74**
2.1.1	Belanja Pegawai	4,82	**1,00**	1.201.577,91	1.213.593,68	1.225.729,62	1.237.986,92	1.250.366,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,29	**0,50**	1.562.862,29	1.570.676,60	1.578.529,99	1.586.422,64	1.594.354,75
2.1.5	Belanja Hibah	-1,86	-5,00	35.744,60	33.957,37	32.259,50	30.646,53	29.114,20
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-100,00	0,00	-	-	-	-	-
2.2	**BELANJA MODAL**	**32,26**	**-3,98**	**942.743,97**	**1.022.537,66**	**1.052.890,27**	**1.086.126,70**	**1.098.707,68**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	130,72	**3,90**	27.393,59	29.712,18	30.594,14	31.559,90	31.925,47
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	35,54	**3,90**	140.104,27	151.962,68	156.473,48	161.412,85	163.282,55
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49,61	**3,90**	257.940,47	279.772,51	288.077,17	297.170,86	300.613,09
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,99	**3,90**	515.280,74	558.894,02	575.484,01	593.650,23	600.526,68
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-14,65	**3,90**	1.605,38	1.741,26	1.792,94	1.849,54	1.870,97
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)		**3,90**	419,51	455,02	468,53	483,32	488,91
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	**-71,20**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**17,30**	**0,90**	**442.841,24**	**445.700,92**	**448.590,18**	**451.509,33**	**455.704,03**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**1,76**	**-18,67**	**4.910,47**	**5.008,68**	**5.108,85**	**5.211,03**	**5.315,25**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	8,13	2,00	3.920,75	3.999,17	4.079,15	4.160,73	4.243,95
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	2,00	989,71	1.009,51	1.029,70	1.050,29	1.071,30
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**17,49**	**1,55**	**437.930,77**	**440.692,24**	**443.481,33**	**446.298,30**	**450.388,78**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	17,57	0,00	437.930,77	440.692,24	443.481,33	446.298,30	450.388,78
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)		-8,92	(280.000,00)	(280.000,00)	(280.000,00)	(280.000,00)	(265.000,00)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Paser tahun 2026-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan yang paling berkontribusi adalah besaran SiLPA. Pada pos pengeluaran pembiayaan hanya ada pos untuk penyertaan modal yang nilainya konstan sebagaimana target APBD 2024 sebesar Rp. 20 miliar pertahun hingga 2030. Nilainya lebih besar dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp. 15 miliar.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Paser tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.87.
Proyeksi APBD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**18,77**	**1,28**	**3.965.770,00**	**4.016.466,23**	**4.067.999,55**	**4.122.692,11**	**4.173.247,44**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**19,12**	**6,91**	**307.263,10**	**330.344,61**	**353.987,07**	**380.509,86**	**401.368,39**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,36	3,50	101.448,24	107.014,73	112.365,47	117.983,74	122.113,17
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7,82	7,00	175.306,37	192.243,73	209.946,71	230.251,22	246.368,80
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,06	1,50	6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.796,91	6.898,86
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21,42	2,00	24.008,48	24.488,65	24.978,43	25.477,99	25.987,55
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**18,10**	**1,37**	**3.588.506,91**	**3.616.121,62**	**3.644.012,48**	**3.672.182,25**	**3.701.879,05**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**20,36**	**1,60**	**3.258.506,91**	**3.286.121,62**	**3.314.012,48**	**3.342.182,25**	**3.371.879,05**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**22,49**	**1,66**	**3.133.973,49**	**3.161.588,20**	**3.189.479,06**	**3.217.648,83**	**3.246.100,30**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	30,82	1,00	2.761.471,35	2.789.086,06	2.816.976,92	2.845.146,69	2.873.598,16
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,87	0,00	372.502,14	372.502,14	372.502,14	372.502,14	372.502,14

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	-2,87	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	-100,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	0,00	0,00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.1.4	**Dana Desa**	3,58	0,00	**124.533,42**	**124.533,42**	**124.533,42**	**124.533,42**	**125,778,75**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	9,36	0,00	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	19,57	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-1,85	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-1,85	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	40,90	0,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-43,26	0,00	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.3.3	Pendapatan Lainnya	63,31	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	**BELANJA**	20,50	1,31	**4.195.770,00**	**4.296.466,23**	**4.347.999,55**	**4.402.692,11**	**4.438.247,44**
2.1	**BELANJA OPERASI**	16,87	3,88	**2.800.184,80**	**2.818.227,66**	**2.836.519,11**	**2.855.056,08**	**2.873.835,74**
2.1.1	Belanja Pegawai	4,82	1,00	1.201.577,91	1.213.593,68	1.225.729,62	1.237.986,92	1.250.366,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,29	0,50	1.562.862,29	1.570.676,60	1.578.529,99	1.586.422,64	1.594.354,75
2.1.5	Belanja Hibah	-1,86	-5,00	35.744,60	33.957,37	32.259,50	30.646,53	29.114,20
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-100,00	0,00	-	-	-	-	-
2.2	**BELANJA MODAL**	32,26	-3,98	**942.743,97**	**1.022.537,66**	**1.052.890,27**	**1.086.126,70**	**1.098.707,68**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	130,72	3,90	27.393,59	29.712,18	30.594,14	31.559,90	31.925,47
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	35,54	3,90	140.104,27	151.962,68	156.473,48	161.412,85	163.282,55
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49,61	3,90	257.940,47	279.772,51	288.077,17	297.170,86	300.613,09
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,99	3,90	515.280,74	558.894,02	575.484,01	593.650,23	600.526,68
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-14,65	3,90	1.605,38	1.741,26	1.792,94	1.849,54	1.870,97
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)		3,90	419,51	455,02	468,53	483,32	488,91
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**		0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-71,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	17,30	0,90	**442.841,24**	**445.700,92**	**448.590,18**	**451.509,33**	**455.704,03**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1,76	-18,67	4.910,47	5.008,68	5.108,85	5.211,03	5.315,25
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	8,13	2,00	3.920,75	3.999,17	4.079,15	4.160,73	4.243,95
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	2,00	989,71	1.009,51	1.029,70	1.050,29	1.071,30
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**17,49**	**1,55**	**437.930,77**	**440.692,24**	**443.481,33**	**446.298,30**	**450.388,78**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	17,57	0,00	437.930,77	440.692,24	443.481,33	446.298,30	450.388,78
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	-	-8,92	(280.000,00)	(280.000,00)	(280.000,00)	(280.000,00)	(265.000,00)
3	**PEMBIAYAAN**	**11,40**	**-1,37**	**230.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**265.000,00**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**11,19**	**-1,27**	**250.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**285.000,00**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	11,19	-5,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3,32**	**5,92**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	3,32	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026	2027	2028	2029	2030
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**11,40**	**-1,37**	**230.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**265.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**2,64**	**-99,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2026-2030 akan mengalami kenaikan dalam lima tahun dari Rp. 1,795 triliun (2026) menjadi Rp. 1,909 triliun (2030).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Paser tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.88.
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	**Belanja Operasi**	**1.237.322,51**	**1.247.551,05**	**1.257.989,12**	**1.268.633,44**	**1.279.480,99**
1.1	Belanja Pegawai	1.201.577,91	1.213.593,68	1.225.729,62	1.237.986,92	1.250.366,79
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	35.744,60	33.957,37	32.259,50	30.646,53	29.114,20
1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2	**Belanja Transfer**	**442.841,24**	**445.700,92**	**448.590,18**	**451.509,33**	**455.704,03**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4.910,47	5.008,68	5.108,85	5.211,03	5.315,25
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	437.930,77	440.692,24	443.481,33	446.298,30	450.388,78
3	**Belanja Tak Terduga**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**1.710.163,74**	**1.723.251,97**	**1.736.579,30**	**1.750.142,77**	**1.765.185,02**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/subkegiatan OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2026 meningkat namun tidak signifikan. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektivitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang meningkat juga tiap tahun dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel II.89.

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	3.965.770,00	4.016.466,23	4.067.999,55	4.122.692,11	4.173.247,44
2.	Penerimaan Pembiayaan	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
	TOTAL PENERIMAAN					
	(***Dikurangi***):					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.710.163,74	1.723.251,97	1.736.579,30	1.750.142,77	1.765.185,02
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**2.505.606,26**	**2.593.214,26**	**2.631.420,25**	**2.672.549,34**	**2.693.062,43**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Tabel II.90.

Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	3.965.770,00	4.016.466,23	4.067.999,55	4.122.692,11	4.173.247,44
2.	Penerimaan Pembiayaan	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
	TOTAL PENERIMAAN	4.215.770,00	4.316.466,23	4.367.999,55	4.422.692,11	4.458.247,44
	(***Dikurangi***):					
3	Belanja Transfer	442.841,24	445.700,92	448.590,18	451.509,33	455.704,03
4	Belanja Tak Terduga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	**3.742.928,76**	**3.840.765,32**	**3.889.409,37**	**3.941.182,78**	**3.972.543,41**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Tabel II.91.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Paser Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	3.742.928,76	3.840.765,32	3.889.409,37	3.941.182,78	3.972.543,41
2	Prioritas I	2.081.816,98	2.136.233,67	2.163.289,49	2.192.085,86	2.209.528,65
3	Prioritas II	1.122.878,63	1.152.229,59	1.166.822,81	1.182.354,83	1.191.763,02
4	Prioritas III	538.233,16	552.302,05	559.297,07	566.742,08	571.251,74
	JUMLAH	3.742.928,76	3.840.765,32	3.889.409,37	3.941.182,78	3.972.543,41

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindaklanjuti, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Paser, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional, nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Kabupaten Paser memiliki banyak potensi yang dapat membuka daerah untuk berkembang kea rah yang baik. Melihat dari letaknya, Kabupaten Paser berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membuka peluang besar dalam perdagangan, logistik, dan penyediaan bahan pangan dan tenaga kerja. Selain itu Kabupaten Paser berpeluang menjadi penyangga IKN dalam hal pasokan logistik, bahan makanan, energi, dan perumahan. Meskipun mineral logam dan non logam menjadi komoditas andalan daerah, Namun sektor strategis lain juga berpotensi menjadi unggulan daerah, seperti pertanian, baik tanaman pangan maupun Perkebunan, perikanan, pariwisata serta industri dan UMKM. Potensi yang cukup beragam menjadi arah pengembangan yang harapannya selaras dengan permasalahan yang muaranya nanti menjadi arah penyelesaiaan.

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada subbab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok Kabupaten Paser sebagai berikut:

Gambar II.8.
Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Paser, 2025 (diolah)

Dengan merujuk pada perumusan permasalahan pokok diatas, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Perwujudan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Kabupaten Paser, meskipun memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan terbatasnya infrastruktur pendukung. Sebagian besar masyarakat di wilayah perdesaan mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan yang memadai, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan industri modern menyebabkan lulusan pendidikan formal kesulitan bersaing di pasar kerja.

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan pelatihan keterampilan teknis dan manajerial masih kurang optimal. Minimnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri juga membuat lulusan pendidikan kesulitan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Paser, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan sektor swasta. Pengembangan program pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja serta peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan pelatihan akan sangat berkontribusi dalam mengatasi tantangan ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Paser mencapai 75,13, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian ini masih menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM secara optimal.

Grafik II.53.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

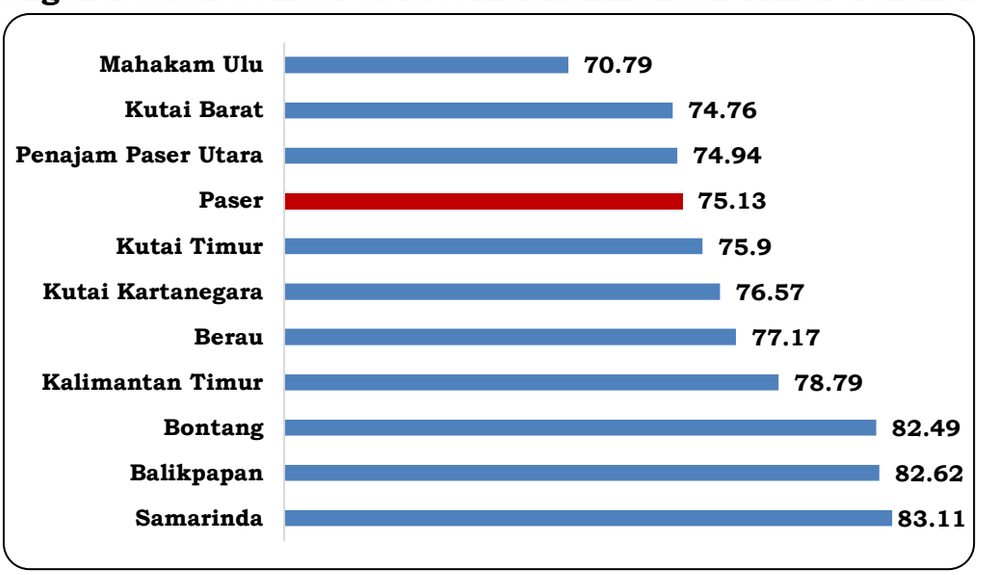

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, capaian IPM Kabupaten Paser masih tergolong rendah. Kabupaten Paser tertinggal dari Kabupaten Berau (77,17) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (76,57), serta masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 78,79. Bahkan, capaian IPM Kabupaten Paser masih terpaut cukup jauh dari kota-kota utama seperti Samarinda (83,11), Balikpapan (82,62), dan Bontang (82,49).

Melihat lebih dalam dari sisi pendidikan kualitas SDM Kabupaten Paser masih rendah terkait kualitas daya saingnya. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2024 mencapai 8,92 (kelas 3 SMP Semester 1), capaian ini masih dibawah standar maksimal nasional 15 Tahun. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Paser sebesar 8,92 tahun mengindikasikan bahwa secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama secara penuh. Hal ini mencerminkan masih terbatasnya akses, keterjangkauan, atau motivasi terhadap pendidikan lanjutan di tingkat SMA/SMK. Indikasi permasalahan yang muncul antara lain rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah, kemungkinan tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP atau transisi ke SMA yang belum optimal, serta belum meratanya fasilitas pendidikan yang berkualitas, khususnya di wilayah perdesaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing sumber daya manusia, terbatasnya kompetensi kerja, serta menurunnya peluang masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada sisi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Paser sebesar 74,10 tahun menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan kualitas kesehatan, angka ini masih berada jauh di bawah standar maksimal ideal sebesar 85 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Paser masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kesehatan dasar yang memengaruhi umur panjang, seperti belum optimalnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular, serta belum meratanya ketersediaan fasilitas dan tenaga medis di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pencegahan penyakit juga menjadi faktor yang turut memengaruhi AHH.

Permasalahan ini diperkuat dengan indikasi lain seperti belum tercapainya cakupan imunisasi secara menyeluruh, prevalensi gizi buruk dan stunting yang masih terjadi, serta keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi layak di sebagian wilayah. Di sisi lain, pembiayaan kesehatan yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin dan rentan juga berdampak terhadap keterlambatan penanganan penyakit kronis dan degeneratif. Dengan demikian, meskipun AHH Kabupaten Paser berada pada tingkat menengah nasional, masih dibutuhkan upaya peningkatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu guna mendorong peningkatan umur harapan hidup menuju standar yang lebih tinggi.

Selain itu, belum optimalnya perwujudan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Paser juga menjadi tantangan dalam menghadapi era digital, terutama dalam mengantisipasi pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter generasi muda. Maraknya informasi yang tidak terverifikasi, budaya instan, serta paparan konten negatif berpotensi melemahkan nilai-nilai disiplin, etos kerja, dan semangat inovasi yang seharusnya menjadi fondasi daya saing SDM. Minimnya literasi digital dan kurangnya kontrol terhadap penggunaan media sosial mengakibatkan generasi muda lebih rentan terhadap disinformasi dan tren destruktif, sehingga perlu ada intervensi dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan karakter serta literasi digital guna membentuk SDM yang unggul dan adaptif di tengah persaingan global.

2. Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan yang Berkeadilan

Penanganan kemiskinan yang berkeadilan di Kabupaten Paser belum optimal, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, pendistribusian bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan sering kali tidak merata dan tidak tepat sasaran. Banyak program bantuan yang hanya sampai kepada sebagian kecil masyarakat miskin, sementara yang lain tidak terjangkau karena keterbatasan data yang akurat dan mekanisme distribusi yang kurang efektif. Selain itu, program-program tersebut sering kali bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang yang dapat mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Kemudian kurangnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai turut memperparah kondisi kemiskinan di Kabupaten Paser. Pendidikan yang rendah menghambat masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Sementara itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan membuat masyarakat rentan terhadap penyakit, yang pada akhirnya meningkatkan beban ekonomi keluarga miskin.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser tercatat sebesar 8,63%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian ini masih menunjukkan bahwa Kabupaten Paser menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan, mengingat tingkat kemiskinan Kabupaten Paser masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 5,78%.

Grafik II.54.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

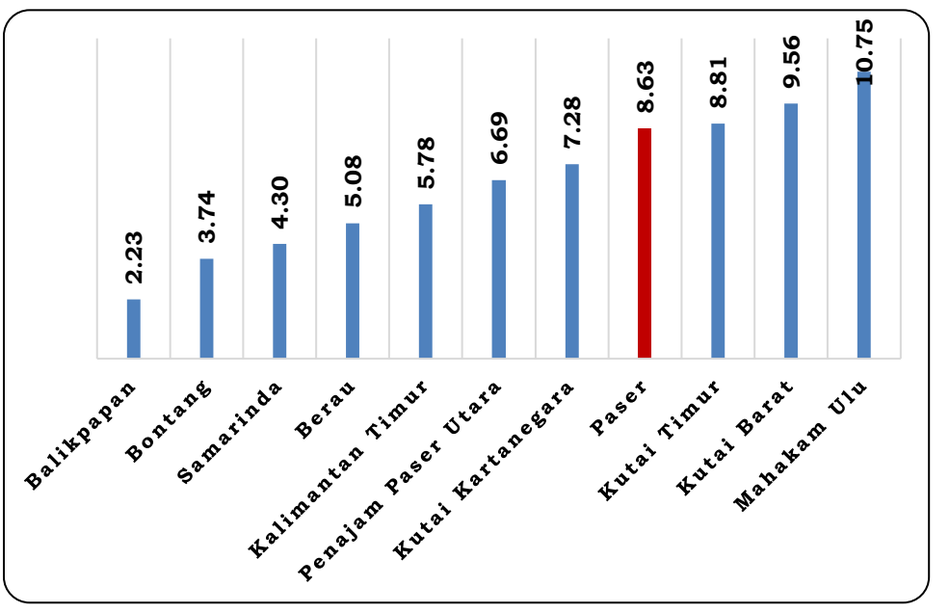

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser menempati posisi kedua tertinggi di antara Kabupaten/Kota, setelah Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatat tingkat kemiskinan sebesar 10,75%. Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Paser, masing-masing sebesar 9,56% dan 8,81%. Sementara itu, kota-kota utama seperti Balikpapan (2,23%), Samarinda (4,30%), dan Bontang (3,74%) memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan infrastruktur yang merata. Belum meratanya pembangunan antarkawasan dilihat dari adanya ketimpangan. Sebaliknya, Indeks Gini yang rendah mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Gini antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser mencatat nilai Indeks Gini sebesar 0,271, yang berada pada posisi ketiga terendah setelah Penajam Paser Utara (0,258) dan Kutai Barat (0,266). Meskipun nilai ini masih tergolong dalam kategori ketimpangan rendah (di bawah 0,3), posisinya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Paser lebih tinggi dibanding beberapa daerah lain di sekitarnya. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan akses dan manfaat pembangunan yang belum sepenuhnya merata antar kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan, atau antara kawasan pusat ekonomi dan wilayah pinggiran.

Grafik II.55.
Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (dalam juta per tahun)

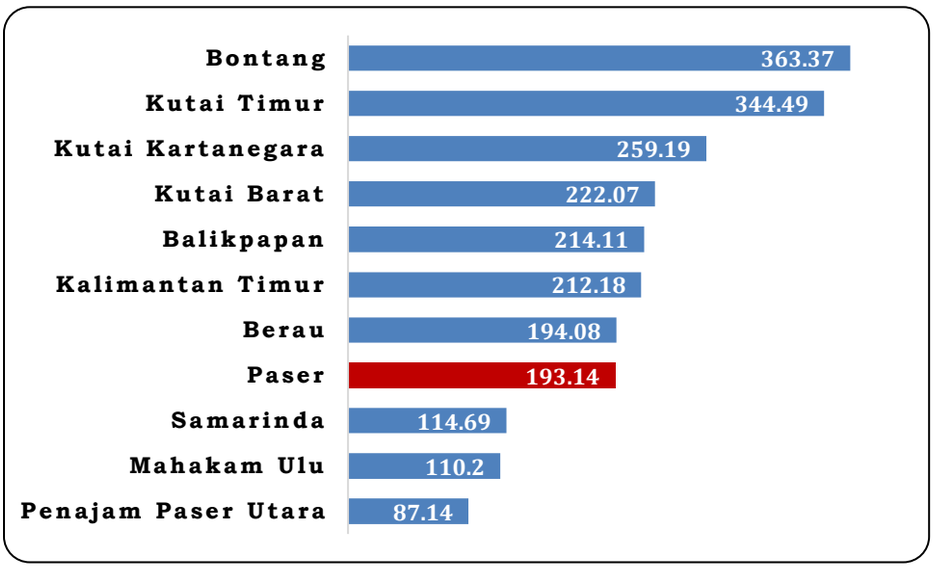

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, capaian PDRB per kapita Kabupaten Paser masih relatif rendah. Kabupaten Kutai Timur mencatat PDRB per kapita tertinggi sebesar 344,49 juta/kapita, diikuti oleh Kabupaten Bontang (363,37 juta/kapita) dan Kutai Kartanegara (259,19 juta/kapita). Sementara itu, Kabupaten Kutai Barat mencatat PDRB per kapita sebesar 222,07 juta/kapita, yang masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Paser.

Sebaliknya, beberapa daerah mencatat PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Paser, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (87,14 juta/kapita) dan Kabupaten Mahakam Ulu (110,2 juta/kapita). Kota-kota utama seperti Balikpapan (214,11 juta/kapita) dan Bontang (363,37 juta/kapita) mencatat PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi, mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih berkembang.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan PDRB per kapita, Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan PDRB per kapita perlu difokuskan pada diversifikasi ekonomi menghadapi tantangan seperti minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi

agrikultur dan berfokus pada akselerasi transformasi. Selain itu, pengembangan sektor industri serta peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk memperkuat konektivitas ekonomi daerah.

3. Belum Optimalnya Ketahanan Ekonomi yang Berkelanjutan

Permasalahan belum optimalnya ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Paser mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Paser belum optimal, dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor pertambangan dengan nilai tambah yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia yang membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kabupaten Paser terdapat pertambangan Di nonmigas (batubara) yang memiliki konstribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB. Secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan batubara tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Paser juga mengandalkan sektor Perkebunan sebagai komoditi unggulan. Namun sektor primer ini menyebabkan rendahnya diversifikasi ekonomi, sehingga ketika harga komoditas utama seperti kelapa sawit atau karet yang menukik tajam, dampaknya sangat signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Paser tercatat sebesar 3,77%. Meskipun angka ini menunjukkan adanya peningkatan, namun LPE Kabupaten Paser masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten lainnya di wilayah tersebut.

Grafik II.56.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%)

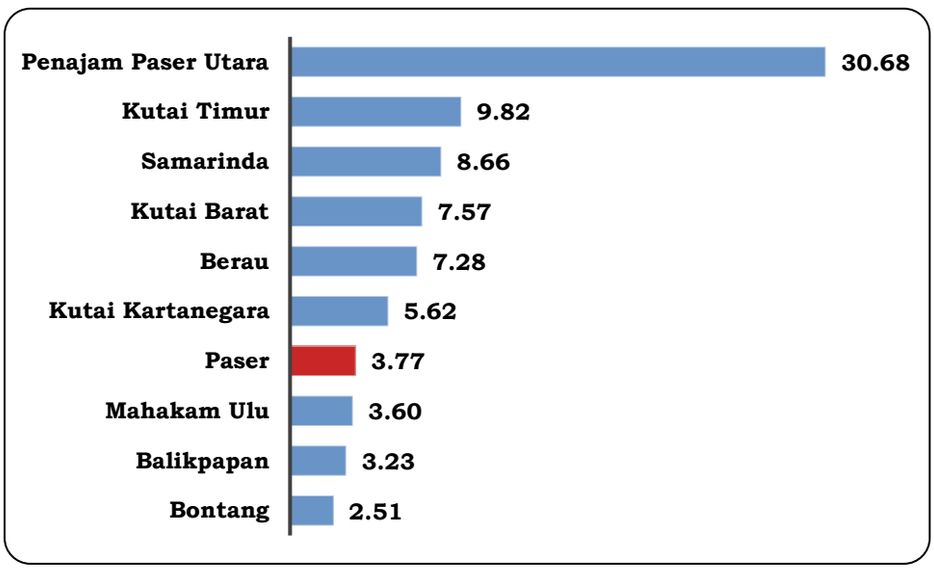

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, LPE Kabupaten Paser menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Bontang

yang mengalami kontraksi sebesar -2,51%. Kabupaten Kutai Timur mencatat LPE tertinggi sebesar 9,82%, diikuti oleh Samarinda (8,66%), Kutai Barat (7,57%), dan Berau (7,28%). Sementara itu, Penajam Paser Utara mencatat LPE tertinggi dengan angka 30,68% yang mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Masih rendahnya LPE Kabupaten Paser ini disebabkan diversifikasi ekonomi yang masih rendah menjadi salah satu tantangan utama. Kemudian perekonomian Kabupaten Paser masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan dan perkebunan, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Sehingga ketergantungan ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Selain itu, infrastruktur ekonomi yang belum memadai juga menjadi penghambat utama dalam mencapai ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Kualitas jalan, akses transportasi, dan fasilitas logistik yang masih kurang dapat menghambat arus barang dan jasa serta meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha. Selain itu, akses ke layanan keuangan yang terbatas juga menghalangi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal.

Selain ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE), ketahanan ekonomi Kabupaten Paser juga dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, kontribusi PDRB Kabupaten Paser terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,46%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 7,1%.

Grafik II.57.
Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Paser dengan Daerah Sekitar terhadap Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%)

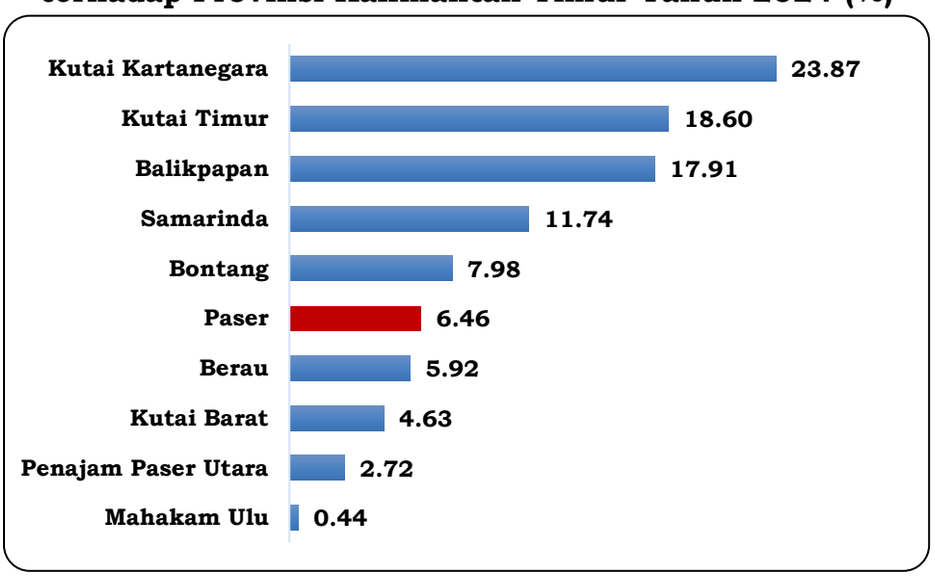

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, kontribusi PDRB Kabupaten Paser masih relatif rendah. Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat kontribusi PDRB tertinggi sebesar 23,87%, diikuti

oleh Kutai Timur (18,6%) dan Balikpapan (17,91%). Di sisi lain, Mahakam Ulu mencatat kontribusi PDRB terendah sebesar 0,44%.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor unggulan. Dengan ini kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Paser perlu memperhatikan dan optimalisasi dalam pengembangan produk lokal daerah sehingga bernilai tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian daerah secara makro maupun mikro.

4. Belum Optimalnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pembangunan

Infrastruktur memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi fondasi bagi distribusi logistik yang efisien, mobilitas penduduk yang lancar, serta pelayanan publik yang lebih merata. Namun demikian, kondisi infrastruktur di Kabupaten Paser hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser tercermin dari kondisi jalan tahun 2024 yang masih perlu perhatian, di mana 58,28% jalan berada dalam kategori tidak mantap dan hanya 41,72% yang tergolong dalam kondisi mantap. Selain itu masih belum optimalnya infrastruktur yang mendukung kawasan permukiman baik air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, persampahan, dan masih adanya kawasan kumuh di perkotaan, serta kurangnya kualitas perumahan yang ditandai dengan masih tingginya jumlah backlog dan rumah tidak layak huni. Pada Sektor transportasi permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi yang aman dan nyaman. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya kurangnya moda transportasi, belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum dan belum optimalnya penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan, saat ini kondisi sarana dan prasarana transportasi masih banyak yang belum memenuhi standar.

Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ini menghambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya terlihat pada terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, yang berimbas pada rendahnya efisiensi distribusi barang dan mobilitas penduduk. Selain kendala anggaran, permasalahan juga muncul dari aspek perencanaan dan pengelolaan proyek yang belum berjalan secara optimal. Ketimpangan pembangunan infrastruktur turut memengaruhi distribusi pendapatan, yang tercermin dalam nilai Indeks Gini. Ketimpangan yang tinggi menunjukkan belum meratanya pembangunan antarkawasan. Sebaliknya, Indeks Gini yang rendah mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Gini antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser mencatat nilai Indeks Gini sebesar 0,271, yang berada pada posisi ketiga terendah setelah Penajam Paser Utara (0,258) dan Kutai Barat (0,266). Meskipun nilai ini masih tergolong dalam kategori

ketimpangan rendah (di bawah 0,3), posisinya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Paser lebih tinggi dibanding beberapa daerah lain di sekitarnya. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan akses dan manfaat pembangunan yang belum sepenuhnya merata antar kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan, atau antara kawasan pusat ekonomi dan wilayah pinggiran.

Grafik II.58.
Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

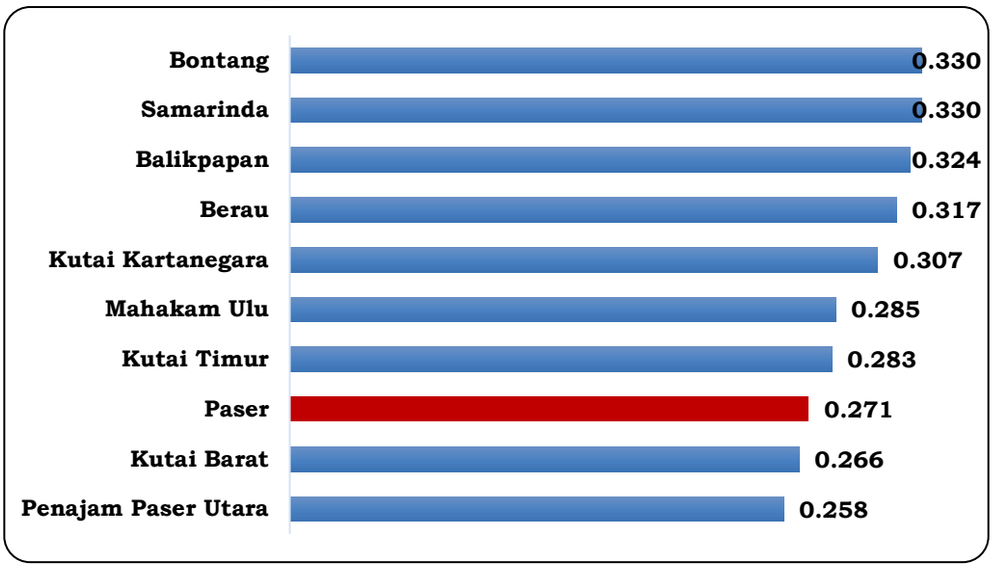

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025.

Indikasi permasalahan ini terlihat dari belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, layanan internet, dan akses rumah layak huni yang lebih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten dan wilayah tertentu. Selain itu belum optimalnya konektivitas antar wilayah juga menjadi penyebab ketimpangan pembangunan. Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di beberapa daerah menghambat mobilitas barang, jasa, dan manusia, serta menghambat penyebaran informasi dan teknologi. Hal ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut, menciptakan kesenjangan dengan daerah lain yang memiliki konektivitas lebih baik.

Dengan adanya beberapa permasalahan infrastruktur di Kabupaten Paser, kondisi ini dapat menghambat peningkatan pendapatan rumah tangga serta memperkuat polarisasi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah menjadi salah satu kunci strategis untuk menekan ketimpangan dan memperbaiki nilai Indeks Gini secara berkelanjutan di Kabupaten Paser.

5. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser hingga saat ini masih belum optimal, yang tercermin dari sejumlah indikator kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang belum mencapai standar yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang menghambat proses reformasi ini adalah adanya resistensi internal terhadap perubahan, di mana sebagian aparatur masih enggan mengadopsi sistem kerja baru yang lebih efisien dan transparan.

Kebiasaan menjalankan prosedur lama yang kurang efektif menyebabkan proses birokrasi tetap lamban dan berbelit-belit, sehingga berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 85,16 dengan predikat Sangat Baik, sementara Kabupaten Paser masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan nilai 78,67 dengan kategori Baik Sekali. Dengan capaian ini mengindikasikan perlunya upaya lebih serius dan sistematis untuk mempercepat reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Paser, yang mana hal ini terlihat pada pilar Adopsi TIK ditahun 2023 dan 2024 mencapai 4,17 tidak mengalami peningkatan. Transformasi digital yang seharusnya menjadi tulang punggung reformasi birokrasi belum berjalan maksimal, dengan banyaknya proses administrasi yang masih dilakukan secara manual. Penggunaan teknologi yang terbatas ini mengakibatkan rendahnya efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah untuk menguasai teknologi baru juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser, karena masih kurangnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk melakukan perubahan budaya kerja dengan memperkuat program pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan kebijakan yang tegas dan konsisten untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses birokrasi.

Berdasarkan data nilai SAKIP tahun 2024 mencapai 61,38 dengan kategori,”Baik”. Beberapa indikasi permasalahan terkait capaian SAKIP yaitu masih ditemukan ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, RENSTRA dan dokumen perjanjian kinerja hingga level terendah. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi pada hasil/*outcome*, dengan kata lain keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Selanjutanya dari capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Paser yang mencapai 3,38 pada tahun 2024 dengan nilai maksimal 5, maka hal ini mengindikasikan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah pada beberapa aspek bidang pemerintahan yang nantinya akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Paser. Kondisi ini menggambarkan suatu permasalahan pada tata kelola pemerintahan di Kabupaten Paser, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser berjalan lambat dan belum optimal. Capaian tata kelola pemerintahan Kabupaten Paser yang belum sepenuhnya optimal tercermin dari berbagai indikator kinerja, masih rendahnya tingkat digitalisasi layanan publik, serta belum meratanya kualitas pelayanan antar kecamatan. Indikasi permasalahan lainnya mencakup masih adanya resistensi terhadap perubahan birokrasi, lemahnya koordinasi lintas perangkat

daerah, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada lemahnya efisiensi birokrasi, lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan belum maksimalnya inovasi dalam pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, atas permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memperkuat reformasi birokrasi secara konsisten melalui penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan akselerasi digitalisasi layanan berbasis e-government. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap capaian indikator reformasi birokrasi, termasuk melalui peningkatan nilai SAKIP dan MCP KPK, serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh APIP. Mendorong kolaborasi antar-OPD dan memperluas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan juga menjadi strategi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.

6. Meningkatnya Potensi Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Aktivitas Ekonomi, Khususnya Sektor Pertambangan dan Penggalian

Adanya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas di sektor pertambangan dan penggalian perlu diperhatikan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menyebabkan deforestasi yang luas, mengancam ekosistem lokal dan mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, aktivitas pertambangan berkontribusi terhadap pencemaran air dan tanah akibat limbah bahan kimia, yang memperburuk kualitas lingkungan hidup. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat perubahan struktur tanah dan hilangnya tutupan hutan yang berpengaruh pada keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup Kabupaten Paser.

Berdasarkan data tahun 2024, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Paser berada pada angka 72,38, yang menunjukkan kualitas lingkungan dalam kategori baik namun tetap memerlukan perhatian serius. Dengan capaian ini juga masih dibawah capaian IKLH Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 76,63. Hal ini mengindikasikan IKLH Kabupaten Paser masih perlu peningkatan secara rinci, Indeks Kualitas Air (IKA) hanya mencapai 50,43, menunjukkan bahwa kualitas air permukaan berada pada ambang bawah mutu layak guna dan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 93,38 mencerminkan kondisi udara yang tergolong baik, namun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) justru stagnan di angka 71,24, mengindikasikan berkurangnya daya dukung ekosistem darat yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan tekanan aktivitas pembangunan. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Rendahnya kualitas air dapat disebabkan oleh limbah domestik, pertambangan, serta terbatasnya infrastruktur pengelolaan air limbah. Sementara itu, menurunnya indeks tutupan lahan menunjukkan degradasi kawasan hijau, deforestasi, dan belum optimalnya rehabilitasi lingkungan. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap aktivitas pencemar, pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik dan industri, serta

reforestasi dan perlindungan kawasan lindung secara lebih masif. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat, edukasi lingkungan, serta kebijakan yang berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Paser secara menyeluruh.

Kabupaten Paser memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan lahan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang menyebabkan panjangnya musim kemarau atau musim penghujan. Untuk bencana alam banjir seringkali terjadi pada wilayah-wilayah dataran rendah dan sekitar sungai, hal ini juga dipicu karena adanya pendangkalan sungai sehingga kemampuan menampung air hujan semakin berkurang. Risiko bencana yang tinggi di Kabupaten Paser dapat diukur melalui Indeks Risiko Bencana (IRBi). Pada tahun 2024, IRBi Kabupaten Paser mencapai 187,98 dengan kategori tinggi. Capaian Indeks Risiko Bencana (IRBi) Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebesar 187,98 yang tergolong kategori tinggi, menunjukkan bahwa wilayah ini menghadapi tingkat kerentanan dan potensi bahaya bencana yang sangat signifikan. Angka ini bahkan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, jauh di atas rata-rata provinsi yang berada di angka 136,11 (kategori sedang). Kondisi ini mencerminkan tingginya eksposur terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, serta bencana hidrometeorologi lainnya yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Indikasi permasalahan dari tingginya IRBi di Paser meliputi: lemahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah, belum optimalnya infrastruktur mitigasi risiko seperti sistem peringatan dini dan drainase, serta belum meratanya upaya edukasi dan pelatihan kebencanaan. Selain itu, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, degradasi hutan, serta pembangunan yang belum memperhitungkan aspek risiko bencana turut memperparah kerentanan wilayah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memperkuat sistem manajemen risiko bencana melalui integrasi kebijakan mitigasi dalam perencanaan wilayah, membangun infrastruktur adaptif terhadap bencana, meningkatkan kapasitas BPBD dan relawan desa tangguh bencana, serta memperluas kolaborasi dengan instansi pusat dan komunitas lokal dalam rangka membangun ketangguhan wilayah secara menyeluruh.

7. Minimnya Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Produk Turunan Berbasis SDA dan Produkstivitas Tenaga Kerja

Kabupaten Paser memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Namun, potensi ini belum dioptimalkan melalui pengembangan hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan. Sebagian besar hasil SDA masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut, sehingga nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian daerah menjadi rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih kecil, di mana pada tahun 2023 sektor ini hanya tumbuh sebesar 4,32% dan diproyeksikan

turun menjadi 2,87% pada tahun 2024. Ketergantungan terhadap komoditas mentah seperti kelapa sawit dan batu bara juga membuat perekonomian Kabupaten Paser rentan terhadap fluktuasi harga pasar global.

Minimnya diversifikasi produk turunan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Potensi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan belum sepenuhnya diolah menjadi produk dengan nilai jual tinggi, sehingga Kabupaten Paser kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,45% pada tahun 2023, meskipun diproyeksikan meningkat menjadi 3,19% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada bahan mentah masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Di sisi lain, rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor industri pengolahan memperburuk situasi. Keterbatasan keterampilan tenaga kerja, kurangnya inovasi teknologi, dan minimnya pelatihan kerja menyebabkan daya saing sektor industri di Kabupaten Paser masih rendah. Sektor industri pengolahan yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hilirisasi industri, peningkatan diversifikasi produk turunan berbasis SDA, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Paser.

8. Industri non sektor pertambangan belum menunjang pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser masih menghadapi ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan, sementara kontribusi dari sektor industri nonpertambangan belum mampu menjadi pendorong utama.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser, Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Paser hanya tumbuh 1,38% pada tahun 2023, sedikit meningkat dari 1,1% di tahun 2022. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 3,77% masih belum mencerminkan kontribusi yang signifikan dari sektor industri nonpertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor-sektor di luar pertambangan belum berjalan optimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor Industri Pengolahan yang seharusnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan tren perlambatan. Setelah mencatat pertumbuhan sebesar 4,95% di tahun 2022, sektor ini melemah menjadi 4,32% pada tahun 2023 dan diperkirakan turun lebih jauh menjadi 2,87% di tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam pengembangan kapasitas produksi dan kurangnya daya saing industri lokal. Selain itu, sektor konstruksi yang sempat tumbuh tinggi hingga 16,94% pada tahun 2023, mengalami penurunan tajam menjadi 7,14% di tahun 2024, mengindikasikan ketidakpastian dalam proyek infrastruktur dan investasi di sektor ini.

Di sisi lain, meskipun sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 14,77% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 15,76% di tahun 2024, namun kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan masih kecil. Hal ini dikarenakan sektor jasa memiliki *multiplier effect* yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri pengolahan atau konstruksi. Sektor lain seperti transportasi dan pergudangan juga tumbuh dari 4,72% di tahun 2023 menjadi 6,9% di tahun 2024, namun belum cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor industri nonpertambangan. Strategi yang dapat dilakukan meliputi pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan daya saing industri melalui perbaikan infrastruktur dan kebijakan investasi, serta memperkuat sektor pariwisata dan jasa untuk memperluas basis ekonomi daerah. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Dengan penjabaran permasalahan pokok diatas, maka beberapa akar masalah sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.92.
Permasalahan Perurusan Kabupaten Paser

PERMASALAHAN PER URUSAN	PERMASALAHAN PER URUSAN	URUSAN
Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya tata kelola SDM ASN Paser	Kepegawaian
	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan	Perencanaan
	Belum optimalnya implementasi inovasi dan kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan
	Masih lemahnya sistem akuntabilitas kinerja	Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya fungsi pengawasan	Pengawasan
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan	Keuangan
	Belum optimalnya pengelolaan aset	Keuangan
	Belum optimalnya kemandirian daerah	Keuangan
	Belum optimalnya infrastuktur dan layanan komunikasi dan informatika	Komunikasi dan Informatika
	Belum optimalnya penggunaan dan	

PERMASALAHAN PER URUSAN	PERMASALAHAN PER URUSAN	URUSAN
	pemanfatan aplikasi e-gov	
	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informatika dalam pelayanan publik	
	Belum optimalnya sistem keamanan data	Persandian
	Belum optimalnya penggunaan data	Statistik
	Belum optimalnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belum optimalnya penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
	Belum optimalnya pengelolaan arsip	Kearsipan
	Belum optimalnya deteksi dini konflik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Belum optimalnya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan kecamatan terhadap masyarakat	Kecamatan
	Belum optimalnya pelayanan kebakaran masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Belum Optimalnya Perwujudan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum optimalnya daya saing pendidikan	Pendidikan
	Belum optimalnya minat baca masyarakat	Perpustakaan
	Belum optimalnya akses dan daya saing tenaga kerja	Tenaga kerja
	Belum optimalnya peran kepemudaaan	Kepemudaan dan Olahraga
	Belum optimalnya akses penyaluran aktivitas olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
	Belum optimalnya status Kesehatan serta	Kesehatan

PERMASALAHAN PER URUSAN	PERMASALAHAN PER URUSAN	URUSAN
	aksesbilitas layanan kesehatan	
	Belum optimalnya aksesbilitas dan kualitas pendidikan	Pendidikan
	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Belum optimalnya kualitas perlindungan Perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya Seni dan budaya budaya daerah	Kebudayaan
	Belum optimalnya perencanaan keluarga dan kemandirian keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
• Belum Optimalnya Ketahanan Ekonomi yang Berkelanjutan • Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertambangan dan penggalian • Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA dan produkstivitas tenaga kerja • Industri non sektor pertambangan belum menunjang pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya nilai tambah sektor tanaman pangan dan holtikultura	Pertanian
	Belum optimlanya nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan	Pertanian
	Belum optimlanya nilai tambah sektor perikanan	Perikanan
	Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Perindustrian
	Belum optimlanya peran Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah bagi perekonomian lokal	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Belum optimalnya pertumbuhan investasi	Penanaman Modal
	Belum optimalnya pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Perdagangan
	belum optimalnya rantai pasok pangan	Perdagangan

PERMASALAHAN PER URUSAN	PERMASALAHAN PER URUSAN	URUSAN
	belum optimalnya upaya stabilitas bahan pokok	Perdagangan
Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan yang Berkeadilan	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Sosial
	Belum optimalnya diversifkasi pangan masyarakat	Ketahanan Pangan
	Belum optimalnya penyelenggaraan transmigrasi	Transmigrasi
	Belum optimalnya pembangunan perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum Optimalnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pembangunan	Belum optimalnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Pertanahan
	Belum sesuainya pemanfaatan ruang dengan rencana penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya konektivitas Antarwilayah	Perhubungan
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat tanggap bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memandang isu-isu strategis sebagai *warning action* dalam merancang kebijakan pembangunan. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang dan mengantisipasi tantangan pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1. Isu Strategis Internasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat berbagai isu strategis internasional (isu global) yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik dan geoekonomi global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 5.0, serta pergeseran budaya akibat digitalisasi. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi daerah, termasuk Kabupaten Paser. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertambangan, Kabupaten Paser perlu merespons isu-isu global ini secara adaptif dan inovatif untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif:

Gambar II.9
Isu Global

Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Paser, terutama di sektor pertambangan dan pariwisata. Fluktuasi harga komoditas tambang akibat ketidakstabilan politik dan kebijakan perdagangan internasional memengaruhi pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Paser perlu memperkuat strategi hilirisasi dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global. Di sektor pariwisata, kerja sama dengan negara mitra dan pengembangan destinasi

wisata berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik dan kontribusi ekonomi lokal.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global menjadi tantangan bagi Kabupaten Paser, terutama dalam bentuk peningkatan suhu, curah hujan yang tidak teratur, dan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas pertambangan dan merusak infrastruktur pariwisata, sehingga diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, rehabilitasi lahan pasca-tambang, dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung ekonomi daerah.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Perkembangan teknologi di era Industri 5.0 membuka peluang bagi Kabupaten Paser untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di sektor pertambangan dan pariwisata melalui penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT). Pemanfaatan teknologi dalam proses pertambangan dapat meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja, sementara pengembangan smart tourism melalui platform digital, *augmented reality* (AR), dan *virtual reality* (VR) dapat memperkuat promosi dan pengalaman wisata di Kabupaten Paser.

4. Pergeseran Budaya Akibat Digitalisasi

Digitalisasi membawa perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat Kabupaten Paser, menciptakan peluang untuk memperkenalkan budaya lokal ke pasar global melalui platform digital. Namun, arus informasi global juga berisiko melunturkan tradisi dan nilai lokal, sehingga Kabupaten Paser perlu memperkuat literasi budaya dan digital di kalangan generasi muda, mempromosikan seni dan budaya lokal melalui festival dan platform digital, serta mendorong partisipasi komunitas dalam pengelolaan dan pelestarian budaya daerah.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, serta rendahnya produktivitas. Isu-isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Paser. Berikut penjabaran isu strategis nasional:

Gambar II.10
Isu Strategis Nasional

Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Pembangunan nasional menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan (resiliensi) ekonomi nasional melalui penguatan sektor unggulan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, penguatan daya tahan ekonomi di tingkat daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat mendorong peningkatan investasi, penguatan rantai pasok domestik, dan peningkatan nilai tambah produk lokal sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Kabupaten Paser memiliki potensi besar dalam mendukung resiliensi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pertambangan dan pariwisata, yang menjadi komoditas unggulan daerah. Dengan memperkuat hilirisasi produk tambang dan pengolahan hasil pariwisata, Paser dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar ekspor. Selain itu, pengembangan sektor ekowisata dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam juga dapat meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam meningkatkan infrastruktur produksi dan distribusi akan mempercepat penguatan ekonomi Paser di tengah dinamika ekonomi global.

2. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendorong daya saing nasional. Peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas dalam memperkuat kapasitas manusia di era ekonomi digital dan industri 5.0. Pemerintah pusat juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan literasi teknologi untuk memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi dan industri. Kabupaten Paser memiliki potensi besar dalam pengembangan SDM melalui penguatan sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan

masyarakat di sektor unggulan. Pengembangan pendidikan vokasi berbasis pertambangan dan pariwisata, serta pelatihan teknologi pengolahan hasil tambang dan pariwisata, akan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan lokal akan memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan di sektor pertambangan dan pariwisata juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi terjadinya pergeseran struktur kelas masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia menciptakan peluang dalam pengembangan pasar domestik, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Penguatan akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, dan inklusi keuangan menjadi strategi utama dalam mengatasi ketidaksetaraan ini. Sebagai daerah dengan sektor pertambangan dan pariwisata yang kuat, Kabupaten Paser dapat berperan dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengembangan industri pengolahan hasil tambang dan penguatan ekowisata. Peningkatan akses terhadap pembiayaan usaha, penguatan koperasi, serta pelatihan kewirausahaan berbasis sektor unggulan akan memperkuat kelas ekonomi menengah di Paser. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Paser.

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. Kabupaten Paser memiliki peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Penerapan sistem *e-government* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik, akan mempercepat proses pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertambangan, pariwisata, dan kesehatan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan.

5. Rendahnya Produktivitas

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam isu strategis RPJMN 2025-2029 adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi di Indonesia. Keterbatasan teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya inovasi menjadi faktor utama yang menyebabkan stagnasi produktivitas. Pemerintah pusat mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan riset dan pengembangan (R&D), penerapan teknologi industri 5.0, serta pengembangan ekosistem inovasi di tingkat daerah. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertambangan dan pariwisata, Kabupaten Paser dapat meningkatkan produktivitas dengan penerapan teknologi pertambangan presisi, pengembangan sistem pengelolaan tambang berbasis teknologi, serta penguatan rantai pasok berbasis teknologi. Pengembangan industri pengolahan hasil tambang dan sektor pariwisata dengan teknologi modern juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah ekonomi. Selain itu, penguatan pendidikan dan pelatihan kerja di sektor unggulan akan menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi Paser di tingkat nasional dan internasional.
Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk prioritas nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada prioritas nasional tersebut, Kabupaten Paser dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

- RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:
  1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
  2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
  3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
  4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  5. Pemberantasan kemiskinan;
  6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
  7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
  8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
  9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
  10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas ;
  11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
  12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
  13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
  14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
  15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
  16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
  17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:
  1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
  2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
  3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
  4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
  5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas RPJMN 2025-2029 melalui penguatan sektor unggulannya, terutama di bidang ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi hijau. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Paser berkontribusi dalam program prioritas hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pembangunan dari desa dan penguatan ekonomi lokal di Paser mendukung pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan sesuai dengan misi pembangunan nasional. Dalam aspek ketahanan pangan, Paser memiliki potensi besar dalam swasembada melalui optimalisasi sektor pertanian dan perikanan. Penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan industri berbasis ekonomi hijau di Paser menjadi kontribusi nyata dalam mendukung transformasi ekonomi dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.3.2.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah mencakup berbagai tantangan utama yang perlu segera diantisipasi dan ditangani secara terencana dengan melihat isu regional. Dengan memahami isu-isu strategis ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih fokus, integratif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing di lingkup regional.

A. Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2025-2029 disusun dengan mengacu pada arahan strategis dari RPJMN 2025-2029 untuk memastikan sinkronisasi pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Proses ini bertujuan untuk menciptakan program dan kebijakan yang terintegrasi dan efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah. adapun isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Paser, mencakup:

1. Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan;

2. Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya;
3. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM);
4. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara;
5. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria tertinggi di Kalimantan Timur;
6. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta. tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia;
7. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

Pada tingkat nasional, RPJMN 2025-2029 arah pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser sebagai bagian dari Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur merespons arahan ini melalui highlight indikasi intervensi sebagai berikut:

Tabel II.93.
Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kewilayahan Terhadap Provinsi Kalimantan Timur

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
Kawasan Transmigrasi (KT) Kabupaten Paser	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser melalui: ● Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik → Output: pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. ● Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi → Output: bantuan sarana produksi pertanian. ● Redistribusi aset (tanah transmigrasi) → Output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik. ● Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil → Output: perpindahan dan penempatan transmigran.
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Strategis	Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik berkelanjutan → Output: layanan angkutan penyeberangan perintis.
Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	● Peningkatan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) melalui Tempat Pengolahan Sistem Terpadu (TPST) guna pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor pengolahan sampah, dengan output sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. ● Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak, dengan output bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di bidang perumahan.

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga tidak mampu atau yang berada di daerah teraliri, serta implementasi transisi energi.	● Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pemanfaatan energi rendah karbon, dengan output Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro. ● Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk. ● Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan.
Pewujudan swasembada sektor pangan, hortikultura, dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim.	Peningkatan produksi pangan nabati dan pemberdayaan ekonomi, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen subsektor hortikultura. Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan output rekomendasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, dengan output Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan. Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan output area pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura dan sarana perlindungan hortikultura. Peningkatan produksi pangan nabati dan modernisasi jaringan irigasi guna peningkatan irigasi yang direhabilitasi serta alat dan mesin pertanian pra panen subsektor hortikultura. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi).
Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan	Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan output: Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk meningkatkan kapasitas layanan medis. Fasilitasi pengelolaan proyek penguatan rumah sakit Layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-neurologi (KJSU) di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan layanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, dan sistem rujukan berbasis komputer untuk meningkatkan respons dan efisiensi pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan rujukan, dengan output Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) mutu dan akreditasi rumah sakit.
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan output: ● Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data. ● Data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan ketepatan dalam penyaluran bantuan dan program sosial. ● Data dan informasi ketersediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. ● Data pengadaan tanah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan tata ruang. ● Data dan informasi pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. ● Pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik) untuk memastikan keamanan dan kelancaran sistem informasi pemerintahan.

Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang STEM, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan, dengan output:
	● Peningkatan kapasitas dan kualitas gedung serta fasilitas pendidikan tinggi (PT dan vokasi).
	● Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan output:
	  ○ SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan berbasis industri dan mendapat pendampingan peningkatan mutu.
	  ○ Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan output:
	  ▪ Guru kejuruan mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan industri.

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	▪ Penerapan inovasi model pembelajaran vokasi. ▪ Pendidik dan tenaga kependidikan vokasi mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. ● Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK, dengan output: o Siswa SMK/MAK yang mendapatkan penguatan persiapan program magang luar negeri. o Siswa yang tersertifikasi terhadap kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. ● Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan output: o Pengembangan kerja sama pelatihan di satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja.
Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam	Mitigasi bencana di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan output: ● Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan risiko dan penanggulangan bencana, termasuk koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pelayanan publik lainnya. ● Pelaksanaan bantuan kebencanaan melalui analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana untuk meningkatkan respons dan kesiapsiagaan. ● Pengembangan mitigasi berbasis alam *(nature-based solution),* dengan output berupa koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan ketahanan wilayah. ● Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan dalam penanggulangan bencana, dengan output: o Pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana (PB). o Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana di tingkat daerah. o Pelatihan teknis PB bagi fasilitator nasional dan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi. ● Penyusunan dokumen penanggulangan bencana, dengan output: o Analisis pengembangan strategi dan rekomendasi kebijakan terkait mitigasi bencana. o Penyusunan strategi respons cepat bencana dan pemulihan pasca bencana. ● Peningkatan ketahanan bangunan terhadap bencana, dengan output: o Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung yang tahan bencana. o Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana. o Penataan kawasan rawan bencana dan percepatan pengendalian pembangunan gedung melalui fasilitasi perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang berketahanan bencana
Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat	Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat melalui: a. Pembinaan talenta seni budaya, dengan output: o Fasilitasi pengembangan bakat dan kreativitas pelaku seni dan budaya melalui pelatihan dan pendidikan. o Penyelenggaraan festival budaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan seni serta warisan budaya daerah. o Pemberian bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi komunitas seni dan budaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. b. Registrasi dan perlindungan warisan budaya, dengan output: o Warisan budaya yang diregistrasi secara nasional dan diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. o Penetapan status perlindungan warisan budaya untuk menjamin kelestarian dan keaslian nilai budaya. o Penyusunan kebijakan perlindungan warisan budaya termasuk mekanisme pengelolaan dan pelestariannya. c. Revitalisasi kawasan warisan budaya, dengan output:

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	○ Konservasi dan restorasi situs budaya untuk menjaga keaslian dan kelestariannya. ○ Peningkatan aksesibilitas ke kawasan warisan budaya melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum. ○ Pengembangan kawasan pariwisata berbasis budaya untuk mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan daya tarik wisata. d. Pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat adat, dengan output: ○ Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. ○ Fasilitasi penyelesaian konflik lahan melalui mekanisme mediasi dan penguatan kelembagaan adat. ○ Pengembangan kawasan adat sebagai pusat budaya untuk memperkuat identitas lokal dan mendorong partisipasi masyarakat adat.

Sumber: RPJMN, 2025

RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029 disusun selaras dengan arahan strategis RPJMN 2025-2029 untuk memastikan sinkronisasi pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kabupaten Paser menghadapi tantangan strategis seperti ketergantungan pada sektor hulu, minimnya pusat pertumbuhan baru, keterbatasan infrastruktur layanan dasar, tingginya kemiskinan dan kesenjangan, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, RPJMD Kabupaten Paser menindaklanjuti arahan RPJMN melalui pengembangan kawasan transmigrasi, peningkatan konektivitas dan infrastruktur logistik, penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, penguatan kapasitas layanan kesehatan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengentasan kemiskinan berbasis data, serta pengembangan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga menjadi perhatian utama dengan penguatan strategi mitigasi berbasis alam dan peningkatan kapasitas respons bencana. Melalui keterpaduan kebijakan dan program ini, Kabupaten Paser diharapkan mampu mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan

B. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Kabupaten Paser memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian visi Provinsi Kalimantan Timur, yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Visi ini diturunkan ke dalam enam misi utama yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis industrialisasi, penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pelestarian budaya dan agama, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, berbagai isu strategis tingkat provinsi harus ditelaah secara mendalam untuk dirumuskan ke dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser yang adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan dinamika daerah serta peranannya sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

a. Adapun beberapa isu strategis Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM;**
2. **Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan;**
3. **Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif**
4. **Pemerataan Pembangunan Wilayah;**
5. **Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi;**
6. **Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN;**
7. **Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK;**
8. **Kemandirian Pangan;**
9. **Tata kelola Pemerintahan yang Baik.**

b. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Dengan merujuk pada Rancangan Awal Provinsi Kalimantan timur, visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah

"Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas"

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
Misi 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
Misi 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Dengan segala potensi, tantangan, dan posisi strategisnya, Kabupaten Paser memainkan peran penting sebagai motor penggerak pembangunan Kalimantan Timur bagian selatan. Tidak hanya sebagai penopang sektor ekonomi dan pangan provinsi, tetapi juga sebagai mitra kunci dalam pengembangan kawasan penyangga IKN. Oleh karena itu, integrasi pembangunan Paser ke dalam kerangka pembangunan provinsi menjadi keniscayaan demi terwujudnya Kaltim yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan menuju Generasi Emas 2045.

C. Telaah RPJPD Kabupaten Paser

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahapan yang penting dari hasil analisis. Gambaran cita-cita dan pandangan masa depan serta langkah untuk mewujudkannya merupakan dasar dalam merumuskan visi dan misi.

A) Visi

Visi Kabupaten Paser di Tahun 2045 dirumuskan sejalan dengan Visi Kaltim Sejahtera 2045, dengan memperhatikan karakteristik daerah, potensi wilayah dan tantangan yang dihadapi maka visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Paser tahun 2025-2045 adalah:

"PASER MULIA 2045:
BUMI DAYA TAKA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI AGRIKULTUR YANG MAJU, ADIL DAN BERKELANJUTAN"

Visi Pembangunan Kabupaten Paser tahun 2025-2045 merupakan perwujudan cita-cita masyarakat Kabupaten Paser. Salah satu faktor penting dalam mencapai Paser Mulia 2045 adalah dengan memperhatikan posisi Kabupaten Paser sebagai penggerak ekonomi agrikultur di Kalimantan Timur. Penjelasan makna visi Kabupaten Paser tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a) Paser Mulia

Visi Paser Mulia merupakan cita-cita besar yang membutuhkan kerja keras, kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta keberanian untuk menghadapi tantangan.

Mewujudkan Paser Mulia berarti menetapkan standar tinggi terkait dengan integritas dan kejujuran dalam pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Menghargai nilai-nilai moral dan etika yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjadikan Kabupaten Paser sebagai tempat yang terhormat.

Menjadi Paser Mulia juga berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan memberikan akses yang lebih luas pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Mewujudkan Paser Mulia juga berarti mewujudkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, dan upaya konservasi.

Makna Mulia dalam pembangunan Kabupaten Paser juga mencakup aspek keadilan dan kesetaraan. Menjamin akses yang setara terhadap layanan publik bagi seluruh warga.

b) Bumi Daya Taka

Bumi Daya Taka adalah julukan yang merupakan identitas khusus atau ciri khas dari Kabupaten Paser, dimana kata "Bumi" bermakna tempat atau daerah, sedangkan "Daya Taka" bermakna Kekuatan atau Tekad Kita.

Secara kontekstual "Bumi Daya Taka" berarti suatu daerah dengan tekad dari masyarakat Kabupaten Paser yang akan terus berjuang dengan penuh semangat, ikhlas dan taqwa untuk bekerja dengan kemampuan sendiri.

c) Penggerak Ekonomi Agrikultur

Merupakan optimalisasi perekonomian daerah dengan memberdayakan bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta peternakan melalui pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, yang inklusif dan berkelanjutan.

Perekonomian agrikultur menjadi fokus pembangunan Kabupaten Paser sehingga mampu memberi manfaat kepada kemajuan:

1) Ketahanan Pangan

Ekonomi agrikultur merupakan pilar utama dalam menciptakan ketahanan pangan. Penyediaan bahan pangan seperti beras, sayuran dan daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat sehingga menjadi landasan untuk kestabilan sosial dan ekonomi;

2) Penciptaan Lapangan Kerja
   Sektor pertanian menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja, terutama di wilayah perdesaan. Petani, pekerja pertanian dan pekerja di sektor terkait lainnya menciptakan kesempatan kerja yang signifikan sehingga mendorong mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
3) Pendapatan masyarakat
   Pendapatan masyarakat didorong tidak hanya mencakup hasil penjualan tanaman tetapi juga berasal dari kegiatan peternakan dan usaha agribisnis lainnya. Dengan demikian, agrikultur berkontribusi pada distribusi pendapatan di masyarakat;
4) Peluang Investasi
   Pengembangan investasi dalam pertanian dapat mengembangkan infrastruktur lokal, meningkatkan akses ke layanan dasar dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut;
   Produk pertanian menjadi komoditas ekspor sehingga dapat memberikan devisa yang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi;
5) Pengembangan Desa dan Perdesaan
   Pengembangan desa dan perdesaan ini membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

d) Maju

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang berkualitas dan inklusif yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, inovasi, keamanan daerah dan pemberdayaan demokrasi serta stabilitas ekonomi yang unggul.

e) Adil

Wilayah Kabupaten Paser yang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, infrastruktur, layanan publik dan perekonomian, yang artinya tidak terjadi diskriminasi maupun disparitas antara wilayah di Kabupaten Paser. Masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan. Mencakup penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial (*social inclusion*). Tidak hanya itu, cita-cita dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk memastikan bahwa hasil dari pertanian didistribusikan secara adil.

f) Berkelanjutan

Menciptakan sistem ekonomi, pertanian, sosial, budaya yang tidak hanya mampu bertahan dalam jangka waktu panjang, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan ekologi, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran ekonomi masyarakat Kabupaten Paser secara keseluruhan

dengan memperhatikan keseimbangan dan interaksi antara aspek kehidupan manusia dan lingkungan alam.

Di samping itu berkelanjutan disini merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

Berikut sasaran visi dalam RPJPD Kabupaten Paser disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.94.
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Target Tahap 1 Tahun 2029	Target Akhir Tahun 2045
1	**Peningkatan pendapatan per kapita**		
	a. PDRB per kapita (Rp juta)	330,42-423,42	675,77-001,63
	b. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	9,61	21,14
	c. Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)	5,60	3,31
	d. Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,86	20,00
2	**Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan**		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,63	0,8
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,265-0,290	0,250-0,270
3	**Peningkatan perekonomian dan daya saing daerah**		
	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,16-4.50	6,00-7,00
	b. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,21	4,00
4	**Peningkatan daya saing sumber daya manusia**		
	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,44	84,70
5	**Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission***		
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	61,20	89,91
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	80,48	83,22

B) Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Paser tahun 2025-2045 maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Paser tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Misi Kesatu: Mewujudkan Tranformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Yang Maju dan Berdaya Saing;
2. Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Unggul dan Berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Inovatif;
4. Misi Keempat: Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, *Demokrasi Substansial* dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah yang Unggul;
5. Misi Kelima: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal dan Ekologi yang Berkelanjutan;
6. Misi Keenam: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

7. Misi Ketujuh: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Serta Berkelanjutan;
8. Misi Kedelapan: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan yang Berkeadilan.

C) Agenda Pembangunan Tahap 1 (2025-2029)

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 1 adalah **PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI** yaitu **Pembangunan Landasan Transformasi sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur.** Arah kebijakan pembangunan pada tahap 1 ini memastikan terwujudnya:

Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar. **Transformasi Ekonomi** difokuskan pada upaya pembangunan dan pengembangan daerah yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. **Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada peningkatan manajemen ASN, peningkatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, pembentukan regulasi, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah difokuskan pada peningkatan kondusifitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. **Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi** difokuskan pada peningkatan peran keluarga, agama dan budaya serta kearifan lokal dalam pembentukan karakter manusia. Perencanaan tata ruang, yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.

Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan dan daerah *hinterland* guna pemerataan ekonomi dan menurunkan ketimpangan antarwilayah. **Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan** difokuskan pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak dan aman. **Kesinambungan Pembangunan** difokuskan pada peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi pembiayaan guna keberlanjutan pembangunan.

D) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Games Changer*)

Dalam upaya mewujudkan Paser Mulia 2045, terdapat 19 (Sembilan belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*games changer*), yaitu:

Transformasi Sosial

1. Akselerasi wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesadaran perilaku pola hidup bersih dan sehat, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis lainnya;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi berbasis *Science, Technology, Engineering, Art, Mathemathic* (STEAM);
4. Pengurangan kemiskinan secara masif melalui intervensi yang efektif dan tepat sasaran, serta perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi;
5. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Transformasi Ekonomi

6. Hilirisasi industri berbasis potensi unggulan daerah, industri padat karya terampil serta berorientasi ekspor;
7. Penggunaan energi terbarukan dalam rangka transisi energi berkeadilan.
8. Pertumbuhan transformasi digital, pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
10. Penguatan kolaborasi pendanaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan.

Transformasi Tata Kelola

11. Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
12. Penataan organisasi dan percepatan implementasi manajemen SDM aparatur berbasis sistem merit.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

13. Penguatan ideologi bangsa melalui pendekatan budaya, internalisasi dan penegakan hukum;
14. Pembuatan peraturan daerah yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

15. Penguatan karakter berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan budaya;
16. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
17. Percepatan *zero waste* dan peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
18. Penguatan ketahanan energi, air dan pangan secara terpadu dan berkelanjutan;
19. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak, aman, terintegrasi dan berkelanjutan;

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok dalam dokumen RPJPD memuat 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang merupakan hasil penyelarasan dengan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 serta target yang merupakan pencapaian keberhasilan dokumen jangka panjang, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.95.
Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Paser
Tahun 2025-2045

NO	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	PM1. Kesehatan untuk Semua
		PM 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		PM 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Transformasi Ekonomi	PM 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		PM 5. Penerapan Ekonomi Hijau
		PM 6. Transformasi Digital
		PM 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		PM 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	PM 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	PM 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		PM 11. Stabilitas Ekonomi Makro
		PM 12. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	PM 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		PM 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		PM 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		PM 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		PM 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

D. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Paser

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Paser sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penyusunan KLHS dalam rangka mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 serta mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. KLHS disusun dengan pendekatan sistematis, menyeluruh, berbasis bukti, dan partisipatif guna menjamin integrasi isu-isu strategis lingkungan dalam setiap tahap perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam prosesnya, KLHS Kabupaten Paser tidak hanya melakukan identifikasi dampak potensial kebijakan terhadap lingkungan, tetapi juga menggali interkoneksi antara aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Melalui forum multipihak, KLHS membuka ruang partisipasi publik dan kelompok rentan dalam penyusunan prioritas pembangunan. Tujuannya adalah

memastikan bahwa pembangunan yang dirancang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Adapun isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Paser digambarkan sebagai berikut:

1) Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Pendidikan);
3) Perlindungan Kelompok Rentan, Perempuan dan Anak;
4) Ketahanan Pangan;
5) Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah;
6) Penguatan Ekonomi Lokal (Pariwisata dan UMKM);
7) Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi;
8) Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi;
9) Perlindungan Hutan dan Gambut;
10) Pengelolaan Sampah dan Limbah;
11) Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim;
12) Perlindungan Keanekaragaman Hayati;
13) Penguatan *Good and Smart Government*;
14) Perbaikan Pelayanan Publik.

Isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 selaras dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan lingkungan. Isu seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal berkontribusi langsung terhadap pilar sosial dan ekonomi pembangunan berkelanjutan, sementara isu perlindungan hutan, pengelolaan limbah, mitigasi perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati mencerminkan komitmen daerah terhadap pelestarian lingkungan. Di sisi lain, penguatan good and smart governance serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fondasi tata kelola yang mendukung integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, keseluruhan isu tersebut saling terhubung dan berfungsi sebagai landasan strategis bagi perumusan RPJMD Kabupaten Paser agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

E. Telaah RTRW Kabupaten Paser

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Ini memprioritaskan pelestarian lingkungan, memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Arah perencanaan untuk periode 2015-2035 di Kabupaten Paser diuraikan dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait yang fokus pada pengelolaan ruang yang efektif dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Tata Ruang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu perencanaan, pengendalian pembangunan, dan pemanfaatan ruang. Dalam kerangka ini, RTRW Kabupaten Paser berperan penting dalam memberikan arahan spasial dan memastikan

kepastian hukum sebagai peraturan daerah. Dokumen ini divisualisasikan melalui peta untuk memperjelas arahan dan pengendalian pembangunan.

Proses penyusunan tata ruang di Kabupaten Paser didasarkan pada analisis terperinci terhadap isu-isu prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi lebih lanjut dilakukan untuk menyinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memastikan keduanya mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan RTRW Kabupaten Paser adalah **"Mewujudkan penataan ruang kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamais, dan sejahtera."** Kerangka tujuan RTRW Kabupaten Paser mengarahkan fokus pengembangan wilayah pada pembentukan sektor agropolitan, yang diperkuat oleh sektor-sektor pendukung seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, jasa, serta pariwisata. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam skema pembangunan spasial seperti yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar II.11
Rencana Spasial Arah Perkembangan Daerah

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Paser merupakan kerangka untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD Kabupaten Paser, agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan sektor-sektor utama seperti agropolitan, pertanian, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, dan bertujuan untuk penggunaan sumber daya yang efektif, optimisasi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pengaturan alokasi ruang yang tepat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun kebijakan pengembangan penataan ruang Kabupaten Paser, sebagai kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dokumen rencana pembangunan (RPJMD) sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki;
2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;
4. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
6. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan;
7. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser; dan
8. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya.

Untuk memastikan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser tercapai, perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap keselarasan penataan ruang Kabupaten Paser. Selain itu, diperlukan strategi dalam penataan ruang di Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki;
2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;
4. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
6. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan;
7. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten;
8. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut.

Langkah ini penting untuk mengonfirmasi bahwa pola ruang yang ada mendukung transformasi Kabupaten Paser menjadi pusat kegiatan kawasan dan agropolitan. Fokus pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan harus terintegrasi secara efektif dalam pola ruang yang ada.

1. Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Paser

Dalam konteks kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 bahwa sistem pusat kegiatan di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

a. PKW berada di perkotaan Tana Paser di Kecamatan Tanah Grogot
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi :
   - Perkotaan Long Kali di Kecamatan Long Kali;
   - Perkotaan Long Ikis di Kecamatan Long Ikir;
   - Perkotaan Kuaro di Kecamatan Kuaro;
   - Perkotaan Muara Komam di Kecamatan Muara Komam; dan
   - Perkotaan Batu Kajang di Kecamatan Batu Sopang.
c. Pusat Pelayanan Kawasan, berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, adapun wilayah PPK di Kabupaten Paser meliputi:
   1. Perkotaan Pasir Belengkong di Kecamatan Pasir Belengkong;
   2. Perkotaan Kerang di Kecamatan Batu Engau;
   3. Perkotaan Muser di Kecamatan Muara Samu; dan
   4. Perkotaan Tanjung Aru di Kecamatan Tanjung Harapan.
d. Pusat Pelayanan Lingkungan yang terletak di setiap kelurahan di wilayah kabupaten. Kawasan ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa dan desa puat pertumbuhan.

Selain menitikberatkan pada daerah yang telah diidentifikasi sebagai pusat kegiatan dalam rencana tata ruang Kabupaten Paser, fokus terhadap pertumbuhan wilayah juga bisa ditinjau pada keberadaan kawasan strategis. Pengembangan sistem perkotaan harus melibatkan integrasi dan sinergi antara fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK). Ini mencakup peningkatan hubungan produksi, distribusi, dan fungsi perkotaan, serta pengembangan dan pemerataan fungsi-fungsi tersebut di seluruh wilayah, terintegrasi dengan sistem kegiatan yang akan dikembangkan di masa depan.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kabupaten adalah kerangka konseptual yang mengatur penggunaan ruang di tingkat kabupaten, terkait erat dengan tata ruang dan pembangunan wilayah. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ruang yang terorganisir dan terpadu, dengan fokus pada kebijakan penggunaan lahan, perkembangan sektor utama, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Paser memiliki dua rencana pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Paser.

Tabel II.96.
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Paser

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Alam	132.531
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	131.860
3	Kawasan Perlindungan Setempat	26.117

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2025

Grafik II.59.
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Paser

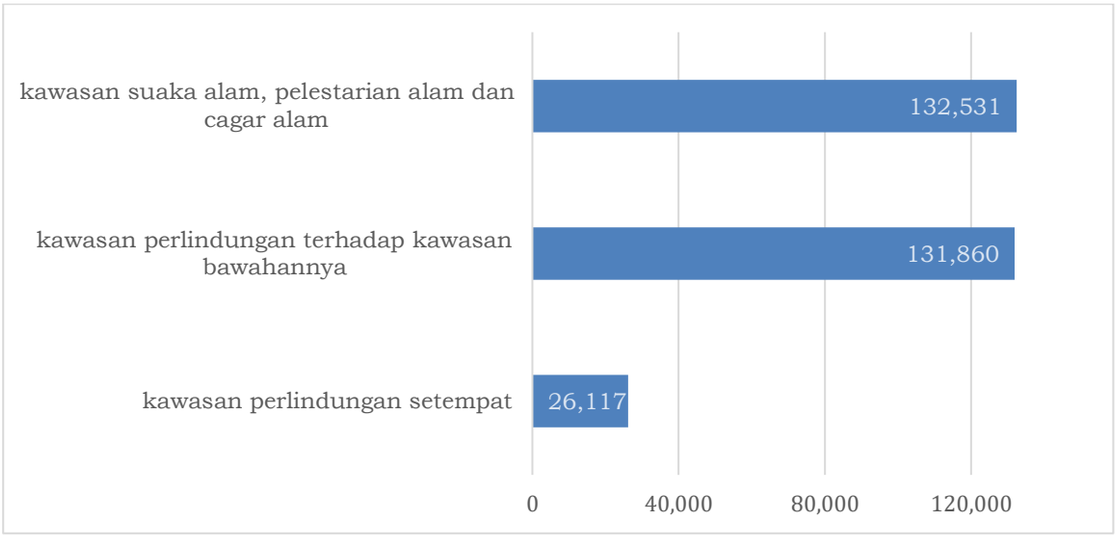

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2025

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Paser, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar alam dengan luas 132.531 Ha selajutnya kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu seluas 131.860 Ha dan kemudian disusul oleh kawasan perlindungan setempat seluas 26.117 Ha.

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Paser adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Paser berdasarkan arahan Rancangan Peraturan Daerah RTRW.

Tabel II.97.
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Paser

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	
	▪ Kawasan hutan produksi tetap	240.256
	▪ Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	9.698
	▪ Hutan Produksi Terbatas (HPT)	180.036
2	Kawasan Pertanian	
	▪ Kawasan tanaman pangan	37.787
	▪ Kawasan hortikultura	14.109
	▪ Kawasan perkebunan	344.485
3	Kawasan Perikanan	123.067
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	9.604
5	Kawasan Peruntukan Industri	1.093
6	Kawasan Pariwisata	13
7	Kawasan Permukiman	
	▪ Kawasan permukiman perkotaan	3.251
	▪ Kawasan permukiman perdesaan	11.592
8	Kawasan Transportasi	188
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2025

Grafik II.60.
Luas Kawasan Budidaya

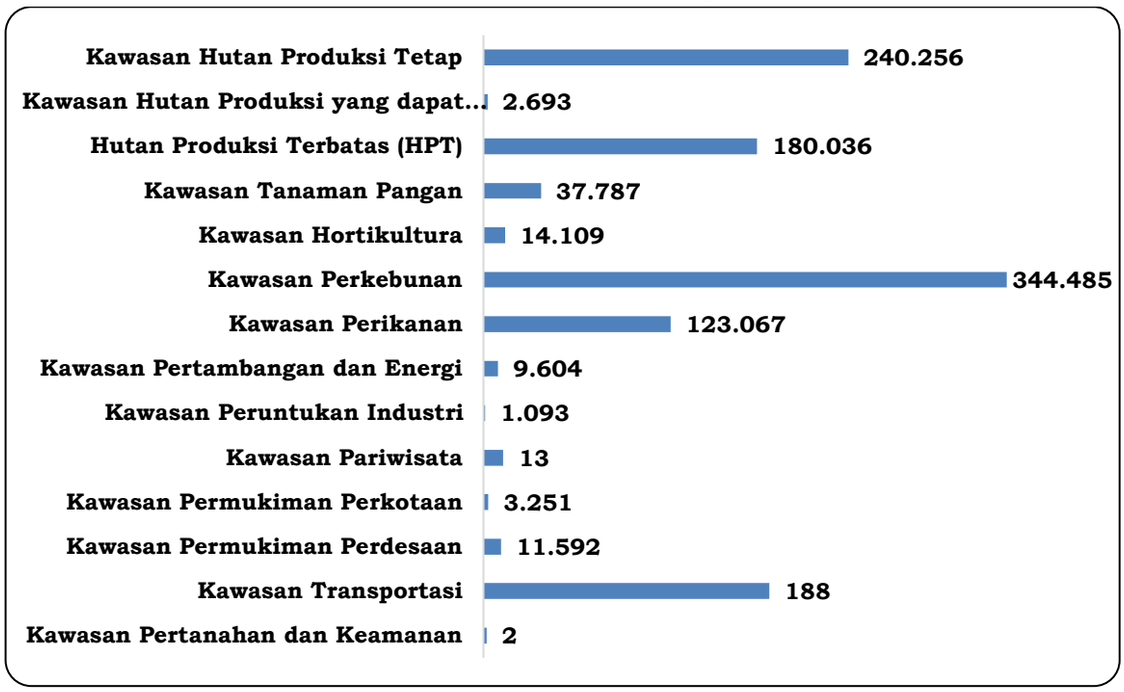

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2025

Dari analisis di atas, berdasarkan tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Paser, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Paser dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Paser tahun 2015-2035, adalah pengembangan sektor agropolitan didukung dengan luas kawasan perkebunan yang paling luas di wilayah kabupaten. Pengembangan wilayah juga akan didukung dengan alokasi lahan untuk sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, pariwisata yang diharapkan bisa mendukung dan menyokong pengembangan sektor agropolitan di Kabupaten Paser.

F. Isu Strategis Kabupaten Paser

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Dengan beberapa isu global, isu nasional, isu regional dan isu KLHS yang dijabarkan pada beberapa poin diatas, maka berikut disajikan perumusan isu strategis Kabupaten Paser yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.98.
Perumusan Isu Strategis Kabupaten Paser

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Adanya kerja sama dengan pihak swasta (Tanoto Foundation) untuk meningkatkan kualitas	Belum Optimalnya Perwujudan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Pendidikan)	Pergeseran Budaya Akibat Digitalisasi	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Pemanfaatan bonus demografi dalam akselerasi pencapaian pembangu-nan daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
pendidikan dan pengasuhan anak usia dini sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing						Antisipasi pengaruh media sosial pada pembentu-kan karakter generasi muda
	Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan yang Berkeadilan	Perlindungan Kelompok Rentan, Perempuan dan Anak				Akselerasi Pengentasan Kemiskinan
		Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan	
				Rendahnya Produktivitas		
Pengembangan sektor non-tambang, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, untuk meningkatkan perekonomian daerah	Belum Optimalnya Ketahanan Ekonomi yang Berkelanjutan	Ketahanan Pangan	Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekono-mian yang Positif	Peluang Pembangu-nan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Stabilitas ketahanan ekonomi yang berkelan-jutan
		Penguatan Ekonomi Lokal (Pariwisata dan UMKM)				
	Belum Optimalnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pembangu-nan	Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah			Pemerataan Pembangu-nan Wilayah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Konektivitas Antarwilayah
		Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi			Infrastruktur Dasar dan Penunjang Ekonomi	
Adanya penyederhanaan birokrasi dalam rangka efektivitas kinerja pemda	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penguatan *Good and Smart Government*		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penguatan implement-tasi Reformasi Birokrasi yang melayani, adaptif, dan responsif berbasis IT
Komitmen tinggi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah		Perbaikan Pelayanan Publik				
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup dengan penanaman pohon (Gerami) dan pengelolaan ekosistem gambut; Optimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertambangan dan penggalian	Perlindungan Hutan dan Gambut	Dampak Perubahan Iklim Global		Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Optimalisasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi yang inklusif dan berkelan-jutan
		Pengelolaan Sampah dan Limbah				
		Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim				
		Perlindungan Keanekaraga-man Hayati				

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tingginya komitmen Pemerintah daerah Kabupaten Paser mengembangkan produk unggulan lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor tambang	Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA dan produkstivitas tenaga kerja	Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Perkembangan Teknologi Industri 5.0		Transformasi Ekonomi Berbasis Industriali-sasi yang Inklusif	
	Industri non sektor pertamba-ngan belum menunjang pertumbuhan ekonomi	Penguatan Ekonomi Lokal (Pariwisata dan UMKM)			Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	
					Kemandirian Pangan	

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Paser yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) **Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi yang melayani, adaptif, dan responsif berbasis IT**

   Reformasi birokrasi yang melayani, adaptif, dan responsif berbasis teknologi informasi (IT) di Kabupaten Paser menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi sistem informasi yang efisien dan transparan akan mempercepat proses administrasi, mengurangi korupsi, dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Pemerintah daerah perlu membangun infrastruktur IT yang kuat, serta melatih aparatur sipil negara (ASN) agar mampu memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, penguatan reformasi birokrasi juga mencakup pengembangan sistem pengawasan yang efektif, memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, seperti pelayanan administrasi kependudukan, izin usaha, dan pengelolaan keuangan daerah, harus didorong untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Adanya sistem IT yang berbasis *cloud* dan integrasi antar instansi akan mempercepat alur informasi serta meminimalisasi birokrasi yang berbelit, memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2) **Pemanfaatan bonus demografi dalam akselerasi pencapaian pembangunan daerah**

   Bonus demografi yang ditandai dengan tingginya proporsi usia produktif di Kabupaten Paser, merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar, Kabupaten Paser memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui pemberdayaan generasi muda dalam berbagai sektor. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan akan memastikan bahwa generasi muda dapat

berkontribusi secara maksimal dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar juga penting, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Pemanfaatan bonus demografi akan meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3) Antisipasi pengaruh media sosial pada pembentukan karakter generasi muda

Pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter generasi muda di Kabupaten Paser memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif, namun juga berisiko membawa dampak negatif seperti penyebaran informasi yang tidak benar, budaya instan, dan perilaku adiktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat perlu mengembangkan program literasi digital yang dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kebudayaan daerah juga perlu diperkuat untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas, disiplin, dan etos kerja yang tinggi. Kolaborasi dengan media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif dan edukatif juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengimbangi pengaruh negatif media sosial. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Paser dapat mencetak generasi muda yang lebih tangguh, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan.

4) Optimalisasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan

Transformasi ekonomi berbasis hilirisasi di Kabupaten Paser merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Hilirisasi yang mengedepankan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi dalam industri pengolahan, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun sumber daya alam lainnya, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Pendekatan hilirisasi ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan, untuk memastikan hasilnya dapat dinikmati secara merata. Pengembangan industri berbasis teknologi ramah lingkungan juga perlu diperhatikan, agar dampak negatif terhadap ekosistem dapat diminimalkan. Dengan demikian, Kabupaten Paser dapat mengoptimalkan potensi ekonominya, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.

5) Stabilitas ketahanan ekonomi yang berkelanjutan

Stabilitas ketahanan ekonomi yang berkelanjutan menjadi isu penting dalam pembangunan Kabupaten Paser. Seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, pemerintah daerah harus memastikan bahwa keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, termasuk pemeliharaan hutan, pengendalian deforestasi, serta konservasi keanekaragaman hayati, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Penerapan prinsip pembangunan hijau dan berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan masyarakat lokal, organisasi lingkungan, serta sektor swasta untuk menciptakan program-program yang mendukung ketahanan ekologi, seperti program penghijauan dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, Kabupaten Paser dapat mencapai tujuan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan bagi masa depan.

6) Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Akselerasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegratif, mengingat masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan dasar serta rendahnya tingkat produktivitas masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada bantuan sementara, tetapi juga mencakup peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang memadai sebagai fondasi jangka panjang. Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi permodalan usaha menjadi penting untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Program perlindungan sosial yang inklusif seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, serta subsidi pada sektor padat karya juga perlu diperluas agar mampu menjangkau kelompok rentan. Pembangunan infrastruktur yang merata antarwilayah akan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

7) Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Konektivitas Antarwilayah

Kabupaten Paser memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses jalan yang memadai di sentra produksi pertanian dan perkebunan, misalnya, akan mempercepat distribusi hasil panen dan menekan biaya logistik. Selain itu, penyediaan jaringan listrik dan akses air bersih yang merata akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah

perdesaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar, produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Paser juga menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Konektivitas yang baik akan mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mempercepat pengembangan kawasan strategis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas jalan antar kecamatan yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil, dikarenakan masih ada kecamatan yang perlu diakses melalui sungai/laut. Peningkatan jaringan jalan dan pembangunan jembatan akan memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke pusat-pusat ekonomi, sehingga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan penguatan konektivitas, Kabupaten Paser akan mampu meningkatkan daya saing daerah dan membuka peluang investasi baru yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Saat ini layanan transportasi di Kabupaten Paser masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi baik transportasi darat laut, maupun udara. Transportasi laut atau sungai memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah Kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antarwilayah. Beberapa wilayah di Kabupaten Paser masih terdapat yang belum terjangkau oleh angkutan darat, sehingga angkutan sungai dan laut menjadi alternatif untuk angkutan penumpang dan barang.

Transportasi udara sangat penting dalam menghubungkan antarwilayah, baik secara domestik maupun internasional, dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan perdagangan. Dalam rangka pengembangan bandar udara guna mendukung kebutuhan jasa pelayanan transportasi antarwilayah yang cepat aman dan nyaman maka Pemerintah Kabupaten Paser telah berupaya untuk mengembangkan moda transportasi udara, lokasi bandar udara berada di desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot. Pada tahun 2023 dan 2024 telah dilaksanakan penyusunan dokumen kajian sebagai tindak lanjut rencana pelaksanaan pembangunan bandar udara, yaitu :

1. Outline Business Case Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Paser.
2. Review DED Bandara Kabupaten Paser;
3. Study Pendahuluan Pembangunan Bandara Udara Kabupaten Paser (Skema Kelayakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha);
4. Review Rencana Induk Bandar Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Paser akan mampu meningkatkan daya saing daerah dan membuka peluang investasi baru yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

2025-2029

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Paser merupakan arahan strategis yang menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah. Bab ini mengejawantahkan Visi, misi dan program prioritas dari Kepemimpinan Bapak Dr. Fahmi Fadli sebagai Bupati dan Bapak H. Ikhwan Antasari, S.Sos sebagai Wakil Bupati untuk Kabupaten Paser periodesasi 2025-2029. Visi, misi, dan program prioritas tidak hanya berfungsi sebagai arah pembangunan jangka menengah, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah. Kabupaten Paser dikenal memiliki sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Paser dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan Tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1.1 Visi

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Paser, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

"PASER TUNTAS"
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)

Dalam rumusan visi ini terkandung lima rumusan pokok visi yakni "***Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera***". Kelima rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Paser dijelaskan sebagai berikut.

1. **Tangguh**, Pokok visi ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser untuk mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang tangguh. Perwujudan pokok visi "Tangguh" dilakukan melalui peningkatan kemampuan birokrasi yang adaptif (*agile*) dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan secara cepat, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, tata kelola pemerintahan dan budaya tanpa mengurangi nilai-nilai kearifan lokal demi menjaga integritas masyarakat. Ketercapaian pokok visi "Tangguh" juga diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Paser dapat memberikan pelayanan publik yang inovatif dan terintegrasi;
2. **Unggul**, Pokok visi ini berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Dengan modal tersebut, Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser diharapkan akan menjadi semakin produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia juga diimbangi dengan pendidikan karakter yang jujur, beretika dan mempunyai integritas sehingga terwujudlah Sumber Daya Manusia yang "Unggul" dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Paser dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara luas;
3. **Transformatif dan Sejahtera,** Fokus pada pokok visi ini adalah 'Pembangunan perekonomian daerah menuju kondisi pembangunan daerah yang lebih baik'. Dengan kata lain, dibutuhkan upaya Transformasi ekonomi ke arah hilirisasi produk SDA unggulan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang transformatif, inklusif, dan berkelanjutan merupakan fondasi penting bagi Kabupaten Paser dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan produksi dan nilai tambah sektor agrikultur yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk sumber daya alam unggulan daerah agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah. Pengembangan daya saing ekonomi dilakukan dengan memperkuat infrastruktur, inovasi, dan kualitas SDM, sehingga mampu menarik investasi serta memperluas peluang usaha masyarakat. Pada saat yang sama, pengendalian stabilitas harga barang dan jasa dijaga agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat meningkat. Keseluruhan strategi tersebut diarahkan untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Paser;
4. **Adil,** pokok visi ini berfokus pada pemerataan pembangunan secara adil dan berkualitas. Pemerataan pembangunan dilakukan sesuai dengan pengembangan potensi daerah serta penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat sehingga terwujudlah pembangunan tanpa

diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, dan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara luas. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan menjadi prioritas strategis Kabupaten Paser untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok desa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan kelestarian daerah melalui pengelolaan lingkungan yang berwawasan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang terbangun tidak hanya mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang maupun mendatang.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1) **MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif**

   Misi ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser. Pemenuhan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini.

2) **MISI 2: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat**

   Misi ini berfokus pada Pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan misi ini diharapkan mampu membentuk masyarakat Kabupeten Paser yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat

3) **MISI 3: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan**

   Misi ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan sosial-budaya di tengah pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan

Kabupaten Paser tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga memperhatikan pembangunan karakter berbasis sosial-budaya baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun masyarakat secara luas.

4) **MISI 4: Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal**

Fokus dari misi ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Paser sebagai daerah yang berdaya saing secara ekonomi melalui pengembangan inovasi dan ilmu pengetahuan disertai dengan pengelolaan sumber daya lokal secara bertanggungjawab.

5) **MISI 5: Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan**

Pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas dan merata dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal dan merata, pembangunan daerah juga harus memperhatikan kelestarian alam agar pembangunan yang ada tidak mengurangi kualitas lingkungan di masa yang akan datang.

Selain sebagai alat untuk mencapai visi pembangunan daerah Kabupaten Paser 2025-2029, Misi RPJMD Kabupaten Paser juga disesuaikan dengan Misi Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat pusat. Adapun keselarasan Misi RPJMD Kabupten Paser dengan Misi RPJMN (Asta Cita) adalah sebagai berikut:

Gambar III.1.
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Paser dengan Misi RPJMN

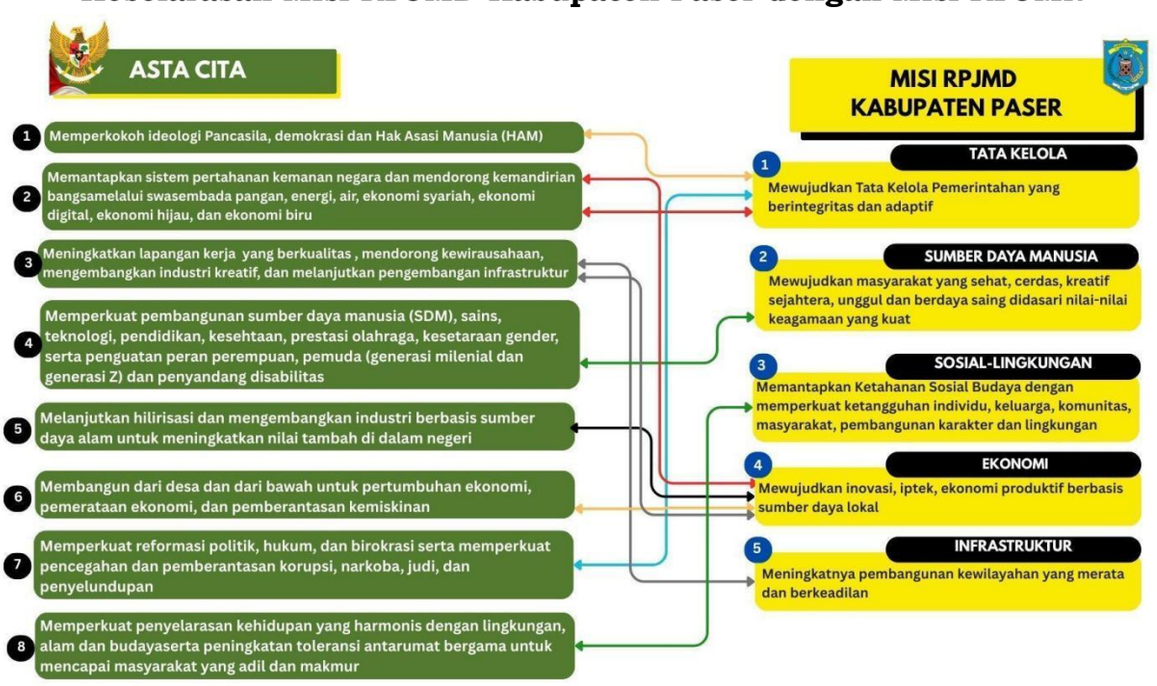

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhaan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Adapun kerangka logis dalam keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1.
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD
Tahun 2025-2029

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)			
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**TARGET PEMBANGUNAN**	
		2025	**2030**
Tujuan 1: Meningkatkan ketangguhan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	81,72	91,72
Tujuan 2: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia**	75,66	78,22

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)			
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**TARGET PEMBANGUNAN**	
		2025	**2030**
Tujuan 3: Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah Yang Transformatif dan Inklusif menuju Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	3,78-3,80	4,80-5,90
	Tingkat Kemiskinan	8,00-8,38	5,80-6,20
Tujuan 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,31	70,11

Keterangan:
*** Indikator Utama Pembangunan (IUP)**
**** Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Paser dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan pertama, Meningkatkan ketangguhan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif**

   Tujuan meningkatkan ketangguhan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif dengan indikator utama Indeks Reformasi Birokrasi merupakan wujud nyata dari implementasi pokok visi Tangguh. Upaya ini dilaksanakan melalui misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif dengan sasaran peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan sasaran lainnya yaitu meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan internal tata kelola, tetapi juga diarahkan untuk menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan inovatif. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian integral dari visi Tangguh yang menekankan pada terwujudnya pemerintahan yang responsif terhadap dinamika pembangunan, menjunjung tinggi integritas, serta memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Paser, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel
- Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital

2. **Tujuan kedua, Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul**

   Tujuan meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dengan indikator utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perwujudan dari pokok visi Unggul. Pokok visi ini diupayakan melalui misi Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat selain itu juga misi Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan. Sasaran yang mendukung ketercapaian tujuan tersebut selaras dengan fokus pembangunan SDM yang menekankan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta karakter masyarakat. Perwujudan SDM unggul mencakup kemampuan yang kreatif dan inovatif, meningkatnya derajat kesehatan, serta ketangguhan individu, keluarga, dan komunitas dalam menghadapi dinamika pembangunan. Selain itu, peningkatan produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk hidup layak juga menjadi prioritas, yang diperkuat dengan pembangunan karakter berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, arah pembangunan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan daya saing daerah secara menyeluruh

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Paser, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan kreatif;
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
   - Meningkatnya produktifitas dan kemampuan untuk hidup layak masyarakat;
   - Meningkatnya kualitas gender dalam pembangunan;
   - Meningkatnya peran budaya dalam meperkuat karakter daerah;
   - Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam pembangunan.

3. **Tujuan ketiga, Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah Yang Transformatif Dan Inklusif menuju Masyarakat yang Sejahtera**

   Tujuan mewujudkan struktur ekonomi daerah yang transformatif dan inklusif, menuju masyarakat yang sejahtera dengan indikator utama laju pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan merupakan perwujudan dari pokok visi Transformatif dan Sejahtera. Pokok visi ini diupayakan melalui misi Mewujudkan inovasi, iptek, dan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal yang secara langsung berkaitan dengan fokus pembangunan perekonomian daerah. Sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian, penguatan hilirisasi sumber daya alam unggulan, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi daerah juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan yang

inklusif. Keseluruhan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga struktur ekonomi Kabupaten Paser benar-benar mencerminkan transformasi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Paser, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk SDA unggulan daerah;
- Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser;
- Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa;
- Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat.

4. **Tujuan keempat, Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan**

   Tujuan keempat, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan dengan indikator utama Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, merupakan perwujudan dari pokok visi Adil. Pokok visi ini diupayakan melalui misi Pembangunan Kewilayahan yang menekankan pada pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah diarahkan tidak hanya untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran ini memiliki keterkaitan erat dengan pokok visi Adil, karena menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Paser, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur
   - Meningkatnya kenyamanan dan kelestarian daerah dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut

Tabel III.2.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)											
MISI	**POKOK VISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**BASELINE**	**TARGET PEMBANGUNAN**					
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	**TANGGUH**	**Tujuan 1. Meningkatkan ketangguhan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**79,69**	**81,72**	**83,87**	**84,11**	**86,01**	**90,62**	**91,72**
			Sasaran 1.1 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)	61,38	62,56	63,68	65,95	68,23	70,5	72,78
				Indeks Integritas Pemerintah*	74	76,49	78,98	80,47	83,96	85,31	86,45
			Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital	1,6	1,65	1,7	1,8	1,9	2,05	2,2
				Indeks Pelayanan Publik*	4,03	4,11	4,27	4,43	4,59	4,75	4,86
MISI 2: Mewujudkan masyarakat yang sehat,	**UNGGUL**	**Tujuan 2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul**		**Indeks Pembangunan Manusia****	**75,13**	**75,66**	**76,48**	**76,99**	**77,50**	**78,01**	**78,22**
				Indeks Pendidikan	66,90	67,61	68,09	68,56	69,04	69,51	69,99

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)											
MISI	**POKOK VISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**BASELINE**	**TARGET PEMBANGUNAN**					
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat			Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan kreatif	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi)	76,59	77,74	78,89	80,04	81,19	82,34	83,98
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	55,24	57,99	60,74	63,48	66,24	68,99	71,74
			Sasaran 2.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,8	82,1	82,4	82,8	83,1	83,4	83,8
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita*	24,9	22,3	19,7	17,1	15,5	14,2	13,2
			Sasaran 2.3 Meningkatnya produktifitas dan kemampuan untuk hidup layak masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka*	4,53	4,16 - 4,40	3,50 - 4,20	3,40 - 4,10	3,35 - 4,00	3,30 - 3,90	3,20 - 3,50
				PDRB Per Kapita**	193,14	214,63	231,08 - 250,59	245,20 - 280,35	260,00 - 310,45	330,42 - 423,42	350,00 - 450,00

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)											
MISI	**POKOK VISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**BASELINE**	**TARGET PEMBANGUNAN**					
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
MISI 3: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan			Sasaran 2.4. Meningkatnya kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	0,527	0,48	0,472	0,465	0,449	0,445	0,439
			Sasaran 2.5. Meningkatnya peran budaya dalam meperkuat karakter daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)*	55,05	55,88	56,51	57,15	57,78	58,43	59,07
			Sasaran 2.6. Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	62,2	70,1	75,2	78,6	80,8	82,2	83,2
MISI 4: Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis	**TRANSFORMATIF DAN SEJAHTERA**	**Tujuan 3. Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah yang Transformatif dan Inklusif menuju Masyarakat yang Sejahtera**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi****	**3,77**	**3,78-3,80**	**3,75-5,00**	**3,92-5,35**	**4,09-5,65**	**4,26-5,75**	**4,80-5,90**
				Tingkat Kemiskinan**	**8,63**	**8,00-8,38**	**7,90-8,30**	**7,03-7,88**	**6,39-6,63**	**6,21-6,39**	**5,80-6,20**

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)											
MISI	**POKOK VISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**BASELINE**	**TARGET PEMBANGUNAN**					
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
sumber daya lokal			Sasaran 3.1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan**	16,41*	16,5	16,57	17,49	18,4	19,32	20,23
			Sasaran 3.2. Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk SDA unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	2,87	3,37	3,87	4,37	4,87	5,62	6,37
			Sasaran 3.3. Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi**	6,46	7,01	7,11	7,21	7,31	7,41	7,53
				Indeks Daya Saing Daerah**	3,31	3,54	3,79	4,05	4,34	4,64	4,97
			Sasaran 3.4. Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Disparitas Harga	11,97	11,55	11,13	10,71	10,29	9,87	9,45
			Sasaran 3.5. Menurunnya ketimpangan	Gini Rasio**	0,271	0,268-0,271	0,265-0,270	0,263-0,270	0,262-0,270	0,261-0,270	0,255-0,264

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)											
MISI	**POKOK VISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**BASELINE**	**TARGET PEMBANGUNAN**					
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
			pendapatan Masyarakat								
MISI 5: Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan	**ADIL**	**Tujuan 4. Mewujudkan Pembangunan infrastruktur yang Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan**		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**65.46**	**66.31**	**67.05**	**67.8**	**68.56**	**69.33**	**70.11**
			Sasaran 4.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	65,79	66,64	67,38	68,13	68,89	69,66	70,44
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	55,35	56,2	56,94	57,69	58,45	59,22	60
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	70,01	70,86	71,6	72,35	73,11	73,88	74,66

VISI: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)											
MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Sasaran 4.2. Meningkatnya kenyamanan dan kelestarian daerah dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK**	35,29	38,09	43,87	49,65	55,42	61,2	65,6

Keterangan:

*** Indikator Utama Pembangunan (IUP)**

**** Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045**

Dokumen RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029 dirancang dengan kerangka logis yang menggambarkan hubungan kausalitas berjenjang antara Visi, Pokok Visi, Tujuan, dan Sasaran. Analisis ini menguraikan bagaimana setiap level kinerja secara sistematis berkontribusi pada pencapaian cita-cita pembangunan daerah.

1. Visi: *Ultimate Outcome* (Dampak Akhir)
Pada level tertinggi, Ultimate Outcome RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029 adalah Visi daerah:

- "PASER TUNTAS" (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)

Argumentasi Kausalitas:

Visi ini merupakan gambaran kondisi ideal dan dampak akhir yang ingin dicapai Kabupaten Paser dalam jangka menengah panjang. Pencapaian Visi "TUNTAS" (akronim dari lima pilar) adalah hasil sinergis dan kumulatif dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun. Setiap pilar dalam Visi merupakan komponen esensial yang, jika terwujud, akan menandakan keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. Tanpa visi yang jelas, arah pembangunan akan tidak terarah, dan dampak yang diinginkan sulit tercapai.

2. Pokok Visi: Strategi Pencapaian Visi
Untuk mencapai Visi "PASER TUNTAS", RPJMD menjabarkan lima Pokok Visi sebagai fokus pencapaian masing-masing pilar. Setiap Pokok Visi kemudian diterjemahkan ke dalam Tujuan-tujuan strategis (*Intermediate Outcome*). Pokok Visi dijalankan sesuai Misi Daerah sebagai strategi utama dalam upaya kolektif yang secara langsung menyebabkan terwujudnya visi daerah.

A. Pokok Visi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif (TANGGUH)

- Argumentasi Pokok Visi: Pokok Visi ini adalah strategi untuk mencapai pilar "TANGGUH" dalam Visi. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif adalah fondasi utama untuk memastikan seluruh aspek pembangunan berjalan efektif dan efisien. Pemerintahan yang kuat adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan.
    - Tujuan 1 (Intermediate Outcome): "Meningkatkan keTANGGUHan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif"
        - *Indikator Tujuan:* Indeks Reformasi Birokrasi (Target 2029: 91,72)
          Analisis Kausalitas Tujuan ke Pokok Visi: Tujuan ini adalah hasil langsung dari pelaksanaan Pokok Visi 1. Peningkatan reformasi birokrasi yang tercermin dari integritas, inovasi, dan adaptabilitas akan secara langsung menyebabkan terciptanya pemerintahan yang tangguh.
        - Sasaran 1.1 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel"
            - *Indikator Sasaran:* Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Target 2029: 72.78), Indeks Integritas

Pemerintah (Target 2029: 86,45)
Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan SAKIP dan Indeks Integritas Pemerintah secara langsung berkontribusi pada penguatan integritas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kinerja yang bersih dan akuntabel adalah pilar utama dari reformasi birokrasi yang berintegritas, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 1.

- Sasaran 1.2 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital"
  - *Indikator Sasaran:* Indeks Pemerintahan Digital (Target 2029: 1,9), Indeks Pelayanan Publik (Target 2029: 4,86)
    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik (terutama melalui digitalisasi) secara langsung berkontribusi pada peningkatan inovasi dan adaptasi birokrasi, serta efektivitas pelayanan pemerintah. Pelayanan publik yang baik adalah hasil nyata dari birokrasi yang efektif dan adaptif, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 1.

B. Pokok Visi 2 : SDM & Ketahanan Sosial yang UNGGUL

- Argumentasi Pokok Visi: Pokok Visi ini adalah strategi untuk mencapai pilar "UNGGUL" dalam Visi, dengan fokus pada pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta penguatan ketahanan sosial budaya. SDM yang unggul adalah mesin penggerak utama pembangunan.
  - Tujuan 2 (Intermediate Outcome): "Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul"
    - *Indikator Tujuan:* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Target 2029: 78,22)
      Analisis Kausalitas Tujuan ke Pokok Visi: Tujuan ini adalah hasil langsung dari pelaksanaan Pokok Visi 2. Peningkatan IPM (indikator komposit kesehatan, pendidikan, dan standar hidup) sebagai pondasi dasar pembangunan akan secara langsung menyebabkan peningkatan daya saing SDM daerah.
    - Sasaran 2.1 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan kreatif"
      - *Indikator Sasaran:* Indeks Pendidikan (Target 2029: 69,99), Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi) (Target 2029: 83,98), Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (numerasi) (Target 2029: 71,74)
        Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan indikator-indikator pendidikan ini secara langsung menyebabkan SDM yang lebih cerdas dan kreatif, yang secara fundamental berkontribusi pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 2.
    - Sasaran 2.2 (Immediate Outcome): "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"
      - *Indikator Sasaran:* Indeks Kesehatan (Target 2029: 83,1),

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Target 2029: 13,2)

Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan Indeks Kesehatan dan penurunan Prevalensi Stunting secara langsung berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan yang prima adalah prasyarat mutlak bagi SDM yang produktif dan berdaya saing, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 2.

- Sasaran 2.3 (Immediate Outcome): "Meningkatnya produktifitas dan kemampuan untuk hidup layak masyarakat"
  - *Indikator Sasaran:* Tingkat Pengangguran Terbuka (Target 2029: 3,20-3,50), PDRB per kapita (Target 2029: 450,00)

    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan peningkatan PDRB per kapita secara langsung menyebabkan peningkatan kemampuan ekonomi individu dan masyarakat untuk mencapai hidup layak. Ini adalah dimensi penting dari daya saing SDM, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing SDM, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 2.
- Sasaran 2.4 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan"
  - *Indikator Sasaran:* Indeks Ketimpangan Gender (Target 2029: 0,439)

    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan kualitas kesetaraan gender (melalui penurunan Indeks Ketimpangan Gender) secara langsung menyebabkan optimalisasi partisipasi dan pemanfaatan seluruh potensi SDM dalam pembangunan, yang esensial untuk daya saing SDM yang unggul secara menyeluruh, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 2.
- Sasaran 2.5 (Immediate Outcome): "Meningkatnya peran budaya dalam meperkuat karakter daerah"
  - *Indikator Sasaran:* Indeks Pembangunan Kebudayaan (Target 2029: 59,07)
  - Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang mencerminkan penguatan peran budaya lokal, secara langsung menyebabkan penguatan identitas, kreativitas, dan kohesi sosial masyarakat. Karakter yang kuat dan kohesi sosial ini merupakan modal sosial dan budaya yang tak terpisahkan dari kapasitas SDM yang unggul, sehingga kuat berkontribusi pada peningkatan daya saing SDM (Tujuan 2).
- Sasaran 2.6 (Immediate Outcome): "Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam pembangunan"
  - *Indikator Sasaran:* Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Target 2029: 83,2)
  - Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan IPBK secara langsung menyebabkan penguatan ketahanan individu,

keluarga, dan komunitas. Keluarga dan komunitas yang tangguh adalah unit dasar yang menghasilkan individu yang kuat secara mental dan sosial, menjadi SDM yang lebih produktif, resilient, dan berdaya saing, secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing SDM, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 2.

C. Pokok Visi 3 dan 5: Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal (TRANSFORMATIF DAN SEJAHTERA)

- Argumentasi Pokok Visi: Pokok Visi ini adalah strategi untuk mencapai pilar "TRANSFORMATIF" dan "SEJAHTERA" dalam Visi, dengan fokus pada pengembangan ekonomi yang inovatif dan berbasis lokal. Ekonomi yang kuat dan inklusif adalah jalan menuju kesejahteraan.
  - Tujuan 3 (Intermediate Outcome): "Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah yang Transformatif dan Inklusif menuju Masyarakat yang Sejahtera"
    - *Indikator Tujuan:* Laju Pertumbuhan Ekonomi (Target 2029: 4,80-5,80), Tingkat Kemiskinan (Target 2029: 5,80-8,30)
      Analisis Kausalitas Tujuan ke Pokok Visi: Tujuan ini adalah hasil langsung dari pelaksanaan Pokok Visi 3 dan 5. Transformasi struktur ekonomi menuju yang lebih produktif, inovatif (Iptek), berbasis sumber daya lokal, dan inklusif adalah kunci peningkatan kesejahteraan. Perwujudan tujuan ini (termasuk penurunan Tingkat Kemiskinan) akan secara langsung menyebabkan fondasi ekonomi yang kuat dan merata, mendukung pilar "Transformatif dan Sejahtera" dalam Visi.
    - Sasaran 3.1 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi sektor Agrikultur"
      - *Indikator Sasaran:* Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Target 2029: 20,23)
        Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan kontribusi PDRB dari sektor-sektor primer ini secara langsung menyebabkan peningkatan produksi dan nilai tambah di sektor agrikultur. Ini adalah bagian fundamental dari transformasi ekonomi berbasis SDA lokal, yang secara langsung berkontribusi pada terwujudnya struktur ekonomi yang transformatif dan inklusif, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 3.
    - Sasaran 3.2 (Immediate Outcome): "Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk SDA unggulan daerah"
      - *Indikator Sasaran:* LPE Kategori Industri Pengolahan (Target 2029: 9,45)
        Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan LPE Kategori Industri Pengolahan secara langsung menyebabkan peningkatan aktivitas hilirisasi SDA unggulan daerah. Hilirisasi adalah motor penggerak transformasi ekonomi dan penciptaan nilai tambah yang signifikan, sehingga kuat berkontribusi pada terwujudnya struktur ekonomi transformatif, sehingga

menyebabkan tercapainya Tujuan 3.

- Sasaran 3.3 (Immediate Outcome): "Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser"
  - *Indikator Sasaran:* Indeks Daya Saing Daerah (Target 2029: 4,97), Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (Target 2029: tidak disebutkan, namun baseline 2024: 6,46)
    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dan Kontribusi PDRB terhadap Provinsi secara langsung menyebabkan penguatan posisi ekonomi Kabupaten Paser. Daya saing ekonomi adalah hasil dari struktur ekonomi yang transformatif dan inklusif, sehingga secara langsung berkontribusi pada tercapainya Tujuan 3.
- Sasaran 3.4 (Immediate Outcome): "Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa"
  - *Indikator Sasaran:* Disparitas Harga (Target 2029: 9,45)
    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Penurunan Disparitas Harga secara langsung menyebabkan peningkatan stabilitas harga barang dan jasa. Stabilitas harga ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga kuat berkontribusi pada terwujudnya struktur ekonomi yang inklusif, sehingga menyebabkan tercapainya Tujuan 3.
- Sasaran 3.5 (Immediate Outcome): "Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat"
  - *Indikator Sasaran:* Gini Rasio (Target 2029: 0,255-0,264)
    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Penurunan Gini Rasio secara langsung menyebabkan pengurangan ketimpangan pendapatan. Ini adalah elemen kunci dari ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, secara langsung berkontribusi pada Tujuan 3.

D. Pokok Visi 4: Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan (ADIL)

- Argumentasi Pokok Visi: Pokok Visi ini adalah strategi untuk mencapai pilar "ADIL" dalam Visi, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan. Pemerataan akses dan pembangunan adalah inti keadilan.
  - Tujuan 4 (Intermediate Outcome): "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan"
    - *Indikator Tujuan:* Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Target 2029: 70,11)
      Analisis Kausalitas Tujuan ke Pokok Visi: Tujuan ini adalah hasil langsung dari pelaksanaan Pokok Visi 5. Infrastruktur yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan adalah penopang bagi pemerataan akses dan keberlanjutan lingkungan. Perwujudan tujuan ini akan secara langsung menyebabkan terjaminnya akses layanan dasar dan sarana prasarana yang merata tanpa merusak lingkungan,

mendukung pilar "ADIL" dalam Visi.

- Sasaran 4.1 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur"
  - *Indikator Sasaran:* Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Target 2029: 70,11), Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (Target 2029: 70,44), Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan (Target 2029: 60,00), Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Target 2029: 74,66)

    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Peningkatan berbagai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur secara langsung menyebabkan terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan memadai, yang merupakan aspek "Kualitas" dan "Adil" dari Tujuan 4. Sasaran ini secara kuat menyebabkan tercapainya Tujuan 4.
- Sasaran 4.2 (Immediate Outcome): "Meningkatnya kenyamanan dan kelestarian daerah dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana"
  - *Indikator Sasaran:* Penurunan Intensitas Emisi GRK (Target 2029: 65,6)

    Analisis Kausalitas Sasaran ke Tujuan: Penurunan Intensitas Emisi GRK secara langsung menyebabkan peningkatan kelestarian daerah. Kelestarian ini adalah inti dari aspek "Berkelanjutan" dalam pembangunan infrastruktur, sehingga secara kuat berkontribusi pada tercapainya Tujuan 4.

Secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029 dibangun di atas kerangka logis yang kokoh:
Sasaran (Immediate Outcome) → Tujuan (Intermediate Outcome) → Pokok Visi → Visi (Ultimate Outcome)

Setiap Sasaran dirancang sebagai penyebab langsung bagi tercapainya Tujuan di atasnya. Keberhasilan dalam merealisasikan sasaran-sasaran secara akumulatif dan sinergis akan menyebabkan tercapainya Tujuan. Selanjutnya, seluruh Tujuan dari berbagai Pokok Visi, jika berhasil diwujudkan, akan secara kolektif dan komprehensif menyebabkan terwujudnya Visi "PASER TUNTAS".

Pembangunan tidak akan mencapai visi besar tanpa tahapan yang jelas. Setiap pilar visi (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, Sejahtera) ditopang oleh Pokok Visi sebagai strategi, yang kemudian diuraikan dalam Tujuan-tujuan spesifik. Setiap Tujuan hanya dapat direalisasikan jika Sasaran-sasaran yang lebih operasional berhasil dicapai. Kerangka ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, memastikan bahwa setiap upaya pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga mengarah pada dampak yang diinginkan

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan

efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Tabel III.3.

Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif								
Meningkatkan ke**tangguh**an reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP			S: Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja (nama OPD) (level sasaran)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan (nama urusan yang diampu OPD) (level sasaran OPD)***	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
							Nilai SAKIP (nama OPD)	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
				T: Meningkatkan kualitas perencanaan yang didukung riset dan inovasi dalam akselerasi pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	S: Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
						S: Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
						S: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
				T: Meningkatkan kualitas layanan publik daerah dan efektivitas program pembangunan yang didukung oleh peningkatan kolaborasi antar opd dan sinergi lintas sektor	Indeks Kepuasan Masyarakat Persepsi dan Ekspektasi Terhadap Hasil Pembangunan	S: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sekretariat Daerah
						S: Meningkatnya Efektifitas kinerja dan Layanan Sekretariat Pemerintah Daerah	Nilai kinerja Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				T: Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset Daerah yang akuntabel, transparan dan efisien	Opini BPK	S: Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						S: Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah yang tertib efektif dan bernilai ekonomis	Indeks Pengelolaan aset daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				T: Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	S: Meningkatnya PAD bersumber dari Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah	Rasio Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD*	Badan Pendapatan Daerah
							Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB	
				T: Meningkatkan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	S: Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
			Indeks Integritas Pemerintah*	T: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern	Kapabilitas APIP	S: Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital	T: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola Pemerintah Digital	S: Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Digital Pemerintah yang lebih cepat dan efisien	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
							Persentase Aplikasi Strategis yang telah dilakukan audit Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						S: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						S: Meningkatnya keamanan dokumen negara	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						S: Meningkatnya validitas data dan informasi dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				T: Meningkatkan tata kelola dan	Indeks Kepuasan	S: Meningkatnya masyarakat yang	Persentase penduduk yang memiliki	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
			Indeks Pelayanan Publik*	layanan administrasi kependudukan daerah dan pencatatan sipil	Layanan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	dokumen kependudukan	
							Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Persentase Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				T: Meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan terhadap Layanan DPRD	S: Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Propemperda yang berhasil diselesaikan	Sekretariat DPRD
							Persentase ketepatan waktu pengesahan dokumen anggaran	Sekretariat DPRD
							Persentase rekomendasi DPRD yang tersusun berdasarkan pengelompokan urusan penyelenggaraan pemerintahan	Sekretariat DPRD
				T: Meningkatkan Budaya Literasi dan Tata kelola kearsipan daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	S: Meningkatnya kualitas kearsipan daerah	Persentase dokumen yang telah diarsipkan dengan “baik”	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
				T: Meningkatkan Toleransi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Harmoni Indonesia	S: Meningkatnya penanganan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ipoleksosbud) di daerah	Persentase konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ipoleksosbud) yang dapat di tangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				T: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	S: Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				T: Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	S: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP (Nama OPD Kecamatan)	Kecamatan
				T: Meningkatkan kualitas penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	Indeks kepuasan layanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	S: Meningkatnya layanan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan non kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Kreatif Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Didasari Nilai-Nilai Keagamaan Yang Kuat								

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
Misi 3: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan Memperkuat Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, Masyarakat, Pembangunan Karakter dan Lingkungan								
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang **unggul**	Indeks Pembangunan Manusia**	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan kreatif	Indeks Pendidikan	T: Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelestarian kebudayaan	Harapan Lama Sekolah *	S: Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rata-rata Lama Sekolah*			
				T: Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan olahraga serta pariwisata	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	Meningkatnya Prestasi atlet Daerah	Proporsi jumlah atlet yang berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi)	T: Meningkatkan Budaya Literasi dan Tata kelola kearsipan daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	S: Meningkatnya keinginan baca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase siswa yang mencapai standar					

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
			kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (numerasi)					
		Meningkatnya produktifitas dan kemampuan untuk hidup layak masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka*	T: Meningkatkan Produktifitas tenaga kerja dan kemandirian satuan pemukiman transmigrasi	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	S: Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PDRB Per Kapita*				Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun ke atas yang bekerja di sektor Formal*	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						S: Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang harmonis	Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase Pengembangan satuan Pemukiman pada tahap kemandirian	S: Meningkatnya status perkembangan satuan pengembangan satuan permukiman transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang diberdayakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				T: Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan	Indeks Pembangunan Pemuda	S: Meningkatnya peran pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
				olahraga serta pariwisata		dalam pembangunan	kegiatan ekonomi mandiri	
					Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	S: Meningkatnya Kunjungan wisatawan	Rata-rata lama tinggal	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	T: Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	S1: Menurunnya Angka Kesakitan masyarakat	Angka Kesakitan	Dinas Kesehatan
						S2 : Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Jumlah Kematian Balita	Dinas Kesehatan
							Jumlah Kematian Ibu	
						S3: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Keshatan (RS dan PKM) terakreditasi Paripurna	Dinas Kesehatan
							Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Dinas Kesehatan
							Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional *	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	T: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta fungsi keluarga	Indeks Pembangunan Gender	S: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Perlindungan Anak	S: Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Rasio kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya peran budaya dalam meperkuat karakter daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)*	T: Meningkatkan daya saing pendidikan dan pelestarian kebudayaan	Nilai Dimensi Warisan Budaya	S: Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentasi warisan budaya benda tak benda yang telah ditetapkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan komunitas masyarakat	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	T: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta fungsi keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)*	S: Meningkatnya kemandirian keluarga	Nilai dimensi kemandirian	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
		dalam pembangunan				S: Meningkatnya perencanaan keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 4: Mewujudkan Inovasi, Iptek, Ekonomi Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal								
Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah Yang **Transformatif**, Inklusif Dan Berkelanjutan menuju Masyarakat yang **Sejahtera**	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan**	T: Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	LPE subsektor tanaman pangan	S: Meningkatnya Produksi pada Komoditas Tanaman Pangan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					LPE subsektor hortikultura	S: Meningkatnya Produksi pada Komoditas Hortikultura	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				T: Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas perkebunan dan peternakan	LPE subsektor perkebunan	S: Meningkatnya Produksi pada Komoditas perkebunan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					LPE subsektor peternakan	S: Meningkatnya Produksi pada Komoditas peternakan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				T: Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas perikanan	LPE Subsektor Perikanan	S: Meningkatnya Produksi dan nilai tambah sektor perikanan	Kontribusi PDRB Sub Sektor perikanan	Dinas Perikanan

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
		Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk SDA unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	T: Meningkatkan peran sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM melalui hilirisasi unggulan daerah, pengawasan distribusi dan akses pasar	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha industri pengolahan	Pertumbuhan Industri Pengolahan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	Meningkatnya peran koperasi dalam penguatan rantai nilai produk unggulan daerah	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Tingkat Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha sektor pengolahan produk unggulan	Rasio Kewirausahaan Daerah*	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi**	T: Meningkatkan Daya Saing Dan Iklim Investasi Yang Kondusif	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB*	S: Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Indeks Daya Saing Daerah**			S: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Perijinan Terpadu Sau Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
		Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Disparitas harga	T: Meningkatkan peran sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM melalui hilirisasi unggulan daerah, pengawasan distribusi dan akses pasar	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	S: Meningkatnya Daya Saing Perdagangan Daerah	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB**	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						S: Meningkatnya rantai distribusi kebutuhan pokok	Indeks Perkembangan Harga**	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Tingkat Kemiskinan**	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Rasio**	T: Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS	Tingkat penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	S: Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Dinas Sosial
				T: Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	S: Meningkatnya kecukupan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan*	Dinas Ketahanan Pangan
						S; Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan utama	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Ketahanan Pangan
							Tingkat Konsumsi Pangan Utama	
				T: Meningkatkan Kemajuan dan kemandirian desa yang berkelanjutan	Persentase Desa mandiri	S: Meningkatnya status desa	Persentase Desa yang Naik Status	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
Misi 5: Pembangunan Kewilayahan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Keadilan Pembangunan								
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang **Adil**, Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	T: Meningkatkan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan*	S: Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						S: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rasio Pemukiman Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Indeks tertib administrasi pertanahan	S: Meningkatnya penataan dan pengelolaan lahan milik Pemerintah Daerah	Presentase lahan milik pemerintah daerah yang memiliki status hukum yang jelas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	T: Meningkatkan konektivitas Antar wilayah	Rasio Konektivitas Wilayah	S: Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas dan berkeselamatan	Tingkat Layanan Transportasi	Dinas Perhubungan
							Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	T: Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Kinerja	Persentase ketersediaan infrastrutktur pekerjaan umum	S: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							Persentase pengurangan luas genangan	

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
				Penyelenggaran Penataan Ruang			Cakupan rumah tangga dengan akses air minum aman	
							Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	
							Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
							Persentase Bangunan Gedung yang terkelola dengan baik	
							Indeks Kinerja Irigasi	
						S: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian pembangunan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatnya kenyamanan dan kelestarian daerah dengan memperhatikan	Penurunan Intensitas Emisi GRK**	T: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	S: Meningkatnya kualitas udara, air, dan tutupan lahan	Persentase Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

Visi: PASER TUNTAS								
POKOK VISI (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)								
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan OPD**	**Indikator Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Penanggung Jawab**
		prinsip mitigasi bencana					Indeks Kualitas Udara	
							Indeks Kualitas Air	
							Indeks Kualitas Lahan	
						S: Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah*	Dinas Lingkungan Hidup
						S: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan yang Mandiri dan Aktif	
				T: Meningkatkan kenyamanan dan kelestarian daerah dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana*	S: Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterangan :

*** Indikator Utama Pembangunan (IUP)**

**** Sasaran Visi RPJPD Kab.Paser 2025-2045**

***** Dibeberapa Perangkat Daerah Indikator tersebut menjadi tujuan Perangkat Daerah**

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 adalah "PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)" Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga capaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana

tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Paser.

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan penahapan tersebut, RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 menetapkan sejumlah strategi utama yang menjadi arah besar pembangunan daerah. Rumusan strategi utama berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dengan pendekatan ini, kesinambungan, relevansi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat terjaga, sekaligus memastikan setiap strategi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel III.4.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Strategi Utama Kabupaten Paser

Tujuan	Sasaran	Strategi Utama
Visi: PASER TUNTAS		
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		
Meningkatkan Ke**tangguh**an Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Berintegritas, Inovatif, Dan Adaptif	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi dan Integritas Aparatur
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital	Optimalisasi fungsi kelembagaan pelayanan masyarakat yang merata dan berkualitas pada seluruh tingkatan pemerintahan dan pendukungnya
Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat		
Misi 3: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan		
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang **Unggul**	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan kreatif	Meningkatkan kemampuan masyarakat Paser yang produktif, sehat, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
	Meningkatnya produktifitas dan kemampuan untuk hidup layak masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Strategi Utama
	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan	Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis norma agama, identitas budaya lokal, dan ketahanan sosial
	Meningkatnya peran budaya dalam meperkuat karakter daerah	
	Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam pembangunan	
Misi 4: Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal		
Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah Yang **Transformatif**, dan Inklusif menuju Masyarakat yang **Sejahtera**	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur	Peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk unggulan daerah serta pengembangan UMKM
	Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk SDA unggulan daerah	
	Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser	Penguatan Pondasi Ekonomi Berbasis Karakteristik Kewilayahan
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	
	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Penuntasan kemiskinan dengan pemanfaatan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Naisonal (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif
Misi 5: Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan		
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang **Adil**, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur	Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
		Peningkatan konektivitas dan penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	Meningkatnya kenyamanan dan	Penguatan aksi pembangunan rendah

Tujuan	Sasaran	Strategi Utama
	kelestarian daerah dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana	karbon dan ketahanan bencana daerah

Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing **strategi utama** RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029.

1) Strategi Utama: Peningkatan reformasi birokrasi melalui pengembangan kompentensi dan integritas aparatur

Strategi pembangunan Kabupaten Paser difokuskan pada penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mendukung sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, penguatan pengawasan internal dan penegakan hukum. Sementara itu, peningkatan kualitas SDM aparatur dilakukan melalui pengembangan kompetensi, sistem merit, dan penegakan integritas birokrasi.

2) Strategi Utama: Optimalisasi fungsi kelembagaan pelayanan masyarakat yang merata dan berkualitas pada seluruh tingkatan pemerintahan dan pendukungnya

Strategi optimalisasi fungsi kelembagaan pelayanan masyarakat yang merata dan berkualitas pada seluruh tingkatan pemerintahan dan pendukungnya merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga ke wilayah terkecil, memiliki peran yang efektif dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif. Dengan memperkuat peran kelembagaan secara menyeluruh, tata kelola pemerintahan diarahkan untuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, sekaligus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, sehingga membangun sistem pelayanan yang tidak hanya handal, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan.

3) Strategi Utama: Meningkatkan kemampuan masyarakat Paser yang produktif, sehat, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif

Strategi transformasi sosial di Kabupaten Paser berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat yang produktif, sehat, mandiri, dinamis, kreatif, dan inovatif untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas SDM yang produktif, cerdas, kreatif dan berdaya saing; meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat; meningkatnya kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan. Di sektor pendidikan, akses dan kualitas pembelajaran diperkuat dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik guna menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dalam bidang kesehatan, pelayanan yang berkualitas dan merata diperluas dengan

memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta peningkatan akses terhadap layanan preventif dan kuratif. Sementara itu, perlindungan sosial dioptimalkan dengan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat, penyempurnaan skema bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pemberdayaan kelompok rentan agar lebih mandiri secara ekonomi.

4) Strategi Utama: Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis norma agama, identitas budaya lokal, dan ketahanan sosial

Strategi mewujudkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal di Kabupaten Paser dilakukan untuk mendukung sasaran meningkatnya peran budaya lokal dalam memperkuat karakter daerah dan meningkatnya ketangguhan individu, keluarga, dan komunitas masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan gotong royong sejak dini. Peran agama diperkuat melalui pembinaan spiritual dan edukasi keagamaan yang mendorong toleransi serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pelestarian budaya lokal dan kearifan tradisional menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat ikatan sosial antargenerasi.

5) Strategi Utama: Peningkatan produktivitas dan kualitas generasi muda dalam pengembangan ekonomi mandiri

Strategi peningkatan produktivitas dan kualitas generasi muda di Kabupaten Paser dalam pengembangan ekonomi mandiri dilakukan untuk mewujudkan sasaran daerah meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Sektor Agrikultur dan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi produk SDA unggulan daerah. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan keterampilan usaha, pendampingan berbasis teknologi, serta optimalisasi infrastruktur digital untuk memperluas akses pasar dan jejaring bisnis. Proses hilirisasi produk unggulan daerah yang dikelola generasi muda didorong agar memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi, baik di pasar regional maupun nasional. Selain itu, kemudahan perizinan dan penguatan perlindungan usaha terus ditingkatkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong keberanian generasi muda dalam memulai maupun mengembangkan usaha.

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan di Kabupaten Paser, di mana kegiatan usaha generasi muda tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan teknologi digital dalam produksi, manajemen, dan pemasaran akan mempercepat tumbuhnya pelaku usaha muda yang inovatif. Dengan dukungan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi, generasi muda Paser diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

6) Strategi Utama: Penguatan pondasi ekonomi berbasis karakteristik kewilayahan

Strategi pembangunan Kabupaten Paser difokuskan pada penguatan pondasi ekonomi berbasis karakteristik kewilayahan untuk mewujudkan

sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser dan Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa. Pemanfaatan potensi lokal di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata dilakukan secara bijak dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. Pemerintah daerah mendorong penerapan praktik produksi yang efisien dan rendah emisi, peningkatan nilai tambah berbasis industri hijau, serta penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi ditingkat Desa dan Kelurahan.

7) Strategi Utama: Penuntasan kemiskinan dengan pemanfaatan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif

Dalam rangka mewujudkan inovasi, iptek, dan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal, Kabupaten Paser mengarahkan strategi pembangunannya pada sasaran Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan dilakukan melalui pemanfaatan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta perlindungan sosial yang adaptif dan integratif. Strategi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Paser tidak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga membangun ekosistem sosial ekonomi yang lebih inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memanfaatkan potensi lokal sebagai pendorong utama pertumbuhan yang berkeadilan

8) Strategi Utama: Peningkatan Perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, terjangkau, dan berkelanjutan

Strategi Peningkatan Perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, terjangkau, dan berkelanjutan diarahkan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur, dengan cara mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau, sekaligus didukung prasarana dan sarana utilitas umum yang memadai. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik dilakukan secara terintegrasi untuk menciptakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Seluruh upaya ini dilaksanakan melalui perencanaan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga pertumbuhan permukiman tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan utilitas umum, seperti jaringan telekomunikasi, penerangan jalan, dan ruang publik, menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan perencanaan yang matang dan pembangunan infrastruktur dasar yang merata, kawasan perumahan dan permukiman dapat berkembang menjadi lingkungan yang produktif, inklusif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

9) Strategi Utama: Peningkatan konektivitas dan penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas

Strategi peningkatan konektivitas dan penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur dengan difokuskan pada terciptanya kemudahan dan keamanan dalam mobilitas orang maupun barang di seluruh wilayah. Pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dilakukan secara terencana melalui kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, sehingga mampu memperluas akses transportasi yang merata hingga ke wilayah terpencil. Upaya ini tidak hanya mendukung kelancaran arus logistik dan pergerakan masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ekonomi, pariwisata, dan perdagangan di daerah.

Dalam rangka memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi wilayah, telah direncanakan pembangunan Bandar udara di Kabupaten Paser, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional bahwa Bandar Udara Kabupaten Paser direncanakan sebagai bandara pengumpan dengan klasifikasi 3C. Kehadiran bandara ini diharapkan menjadi simpul transportasi strategis yang membuka akses lebih cepat antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas peluang investasi dan perdagangan. Dengan dukungan infrastruktur berkualitas dan akses transportasi yang aman dan mudah dijangkau, masyarakat akan merasakan manfaat nyata berupa peningkatan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

10) Strategi Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur dengan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antara pusat produksi dengan pasar, baik di tingkat lokal maupun antarwilayah. Pembangunan akses jalan, jembatan, dan jaringan transportasi lain yang terintegrasi akan mempermudah distribusi barang dan jasa, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Infrastruktur yang memadai juga menjadi pendorong bagi sektor-sektor strategis, termasuk pertanian, perdagangan, dan industri kreatif, untuk berkembang secara berkelanjutan.

Upaya ini dilaksanakan melalui pembangunan pekerjaan umum yang berbasis pada tata ruang ekonomi wilayah, sehingga setiap proyek infrastruktur disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya mengutamakan aspek kecepatan dan kemudahan, tetapi juga relevan terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Dengan infrastruktur yang berkualitas, terencana, dan berkelanjutan, pelayanan publik akan mampu

menjangkau masyarakat secara lebih luas, meningkatkan produktivitas daerah, dan memperkuat daya saing wilayah di masa depan.

11) Strategi Utama: Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah

Strategi penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana di Kabupaten Paser dilakukan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya kenyamanan dan kelestarian daerah berbasis pengelolaan lingkungan yang difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang mendukung produktivitas daerah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui pengurangan emisi karbon dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, ketahanan bencana diperkuat dengan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko bencana, pengelolaan tata ruang berbasis mitigasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Konservasi ekosistem dan restorasi lahan kritis juga menjadi prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Paser, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transofrmasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Paser adalah sebagai berikut.

Gambar III.2.
Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Paser

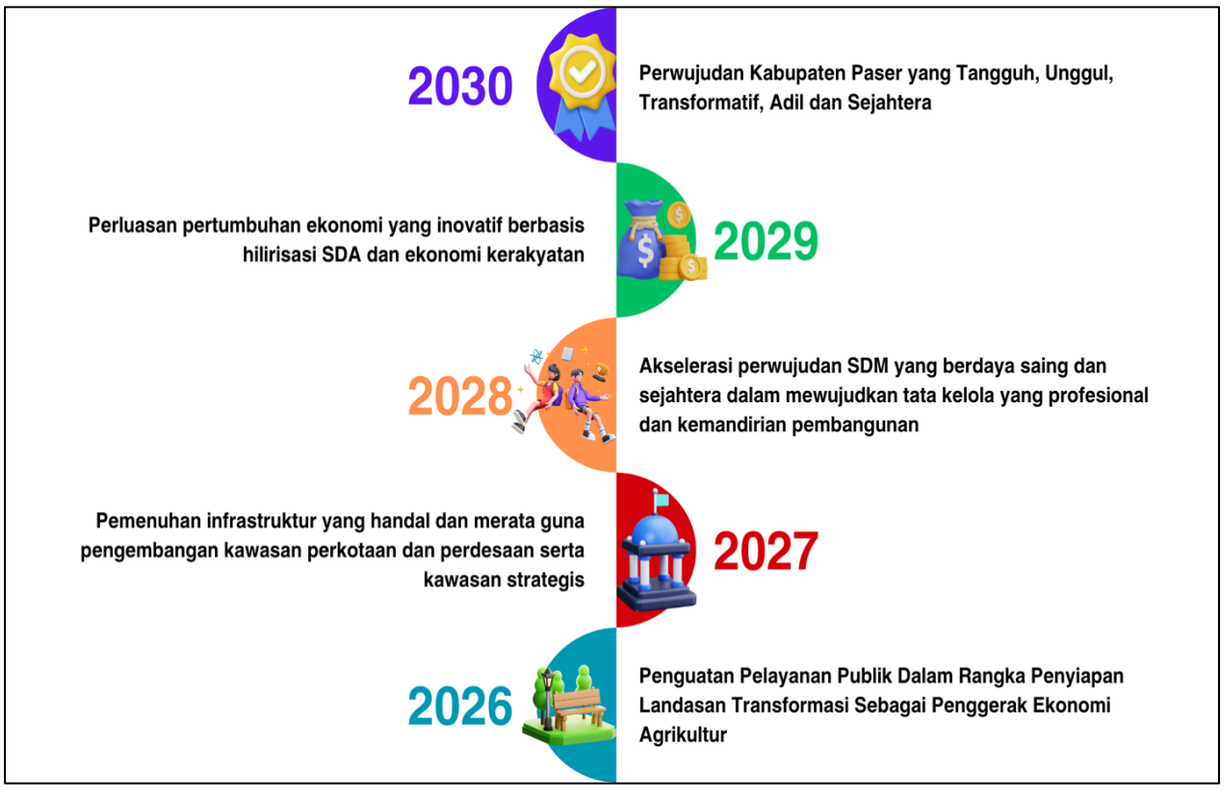

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun

penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.
Penahapan Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2026-2030

Strategi Utama	Tema Tahap I 2026	Tema Tahap II 2027	Tema Tahap III 2028	Tema Tahap IV 2029	Tema Tahap V 2030
	Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur	**Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis**	**Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan**	**Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi SDA dan ekonomi kerakyatan**	**Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera**
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Digitalisasi dan modernisasi tata kelola dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan fondasi reformasi birokrasi berbasis transparansi dan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi	Pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN berbasis pelatihan berkelanjutan dan penerapan sistem merit	Integrasi reformasi dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan budaya kerja dan profesionalisme yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pelayanan
Optimalisasi fungsi kelembagaan pelayanan masyarakat yang merata dan berkualitas pada seluruh tingkatan pemerintahan dan pendukungnya	Penataan kelembagaan sesuai kebutuhan urusan pemerintahan dan kapasitas daerah	Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang terintegratif hingga ke wilayah terpencil dan kawasan perdesaan	Pengembangan kompetensi ASN berbasis digital dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan publik yang prima	Mendorong inovasi pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Perwujudan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mempercepat akses dan efisiensi
Meningkatkan kemampuan masyarakat Paser yang produktif, sehat, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif	Penguatan Fondasi Pendidikan dan Literasi serta penguatan kesehatan dan kesejahteraan dasar masyarakat	Peningkatan sarana prasarana pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dengan basis ekonomi lokal yang kuat dan inklusif	Akselerasi penataan kelembagaan pemerintah dalam rangka mewujudkan SDM sejahtera dan berdaya saing	Perluasan cakupan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas peserta didik	Pemantapan Kemandirian dan Daya Saing SDM Berkelanjutan
Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis norma agama,	Integrasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal ke dalam bidang	Pengembangan ruang-ruang ekspresi budaya lokal seperti sanggar	Penguatan regulasi daerah dan peningkatan peran forum komunikasi	Pemantapan pembinaan generasi muda yang produktif, kreatif, dan	Perwujudan masyarakat yang berkarakter menuju Paser yang Tangguh,

Strategi Utama	Tema Tahap I 2026	Tema Tahap II 2027	Tema Tahap III 2028	Tema Tahap IV 2029	Tema Tahap V 2030
	Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur	**Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis**	**Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan**	**Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi SDA dan ekonomi kerakyatan**	**Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera**
identitas budaya lokal, dan ketahanan sosial	pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi	seni, festival budaya, dan rumah adat	lintas agama, adat, dan generasi untuk memperkuat harmoni sosial	inovatif dengan fondasi karakter yang kuat	Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera
Peningkatan produktivitas dan kualitas generasi muda dalam pengembangan ekonomi mandiri	Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda Baik Dalam Ekonomi UMKM maupun Agrikultur	Pengembangan Infrastruktur Digital, Produksi serta Hilirisasi pada Komoditas Potensial Daerah	Integrasi kebijakan daerah yang berpihak pada pengembangan wirausaha muda, ekonomi kreatif, dan UMKM, termasuk insentif fiskal, perizinan yang sederhana, serta perlindungan usaha kecil.	Ekspansi komoditas dan pengayaan hilirisasi SDA berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan	Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi mandiri yang inovatif dan berdaya saing
Penguatan Pondasi Ekonomi Berbasis Karakteristik Kewilayahan	Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, dan pemasaran secara efektif dan berkelanjutan	Penguatan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, dan pemasaran secara efektif dan berkelanjutan	Peningkatan iklim investasi berbasis stabilitas ekonomi makro dan regulasi yang mendukung	Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif	Perwujudan produktivitas daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkokoh kemandirian ekonomi

Strategi Utama	Tema Tahap I 2026	Tema Tahap II 2027	Tema Tahap III 2028	Tema Tahap IV 2029	Tema Tahap V 2030
	Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur	**Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis**	**Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan**	**Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi SDA dan ekonomi kerakyatan**	**Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera**
Penuntasan kemiskinan dengan pemanfaatan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Naisonal (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif	Penguatan pelayanan publik guna penuntasan kemiskinan yang terintegratif	Peningkatan sarana prasarana dasar pendukung pengentasan kemiskinan	Akselerasi penataan pengelolaan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial	Pemantapan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi rumah tangga	Perwujudan keluarga dan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera
Peningkatan Perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, terjangkau, dan berkelanjutan	Penguatan regulasi dan kesesuaian tata ruang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan infrastruktur guna mendukung perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, dan terjangkau	Penguatan kemitraan dan kelembagaan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan	Perwujudan Perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
Peningkatan konektivitas, dan penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas	Peningkatan regulasi dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan transportasi.	Peningkatan infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintegrasi	Peningkatan kualitas layanan transportasi dan penguatan kemitraan dalam penyelenggaraan trasnportasi	Perluasan infrastruktur transportasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi	Pemantapan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Paser
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang	Pembangunan dan pemeliharaan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang	Penguatan kemitraan dalam rangka	Perluasan dan pemerataan	Perwujudan pembangunan

Strategi Utama	Tema Tahap I 2026	Tema Tahap II 2027	Tema Tahap III 2028	Tema Tahap IV 2029	Tema Tahap V 2030
	Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur	**Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis**	**Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan**	**Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi SDA dan ekonomi kerakyatan**	**Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera**
didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	infrastruktur dasar yang berkualitas	menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat	peningkatan infrastruktur yang berkualitas, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap bencana	pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi	infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan persampahan	Pembangunan infrastruktur perdesaan yang ramah lingkungan dan tahan bencana, dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar	Penguatan regulasi dalam pembangunan rendah karbon, ketahanan air, energi dan pangan serta ketahanan bencana daerah	Penguatan pembangunan ekonomi hijau berbasis potensi lokal	Implementasi inovasi teknologi hijau pada sektor unggulan daerah guna meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi karbon

Sinkronisasi Antar Tahapan

Pembangunan Kabupaten Paser dari tahun 2026 hingga 2030 mengikuti sebuah alur yang logis dan berkelanjutan:

- **Tahap I (2026):** Fokus pada **Penguatan Pelayanan Publik** dan **Reformasi Birokrasi** sebagai landasan transformasi ekonomi agrikultur. Prioritas pada tahap ini mencakup **peningkatan kualitas pelayanan publik** yang didukung oleh infrastruktur berkualitas, **reformasi birokrasi**, dan **penguatan pondasi ekonomi** berbasis karakteristik kewilayahan.
- **Tahap II (2027):** Melanjutkan dengan **Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata**, termasuk di kawasan perkotaan, pedesaan, dan strategis. Prioritasnya adalah **mendorong infrastruktur** sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal melalui konektivitas antarwilayah.
- **Tahap III (2028):** Berfokus pada **Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera**. Tahap ini menargetkan **peningkatan kapasitas SDM** yang terampil dan adaptif, serta **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel**.
- **Tahap IV (2029): Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif** berbasis hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan ekonomi kerakyatan. Prioritasnya mencakup **mendorong pertumbuhan ekonomi inovatif** melalui pengembangan industri hilir berbasis SDA dan **mendistribusikan manfaat pembangunan** secara adil.
- **Tahap V (2030):** Menuju **Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera**. Prioritas akhir ini bertujuan untuk **mewujudkan generasi yang produktif**, **memperkuat sistem akuntabilitas birokrasi**, dan **mewujudkan keadilan sosial** bagi seluruh masyarakat.

Strategi dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2025-2029 didesain sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan dinamis. Setiap tahapannya saling terkait, memastikan pencapaian visi daerah yang komprehensif. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan selalu disesuaikan dengan tema dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan untuk setiap tahapan RPJMD.

Penyesuaian Prioritas Pembangunan

Mekanisme penyesuaian ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika perubahan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan tetap relevan dan selaras dengan kebijakan yang lebih tinggi. Jika terjadi perubahan prioritas baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pusat, tema dan strategi pembangunan akan ditinjau dan disesuaikan kembali agar tetap optimal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, setiap tema dan strategi pembangunan telah ditetapkan untuk menopang prioritas pembangunan pada setiap tahapannya, menciptakan sebuah fondasi yang kokoh untuk mencapai visi Kabupaten Paser secara bertahap dan terukur. Adapun prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6.
Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2026-2030

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur	**Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis**	**Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan**	**Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi SDA dan ekonomi kerakyatan**	**Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera**
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan. 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Penguatan Pondasi Ekonomi Berbasis Karakteristik Kewilayahan	1. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, serta Masyarakat 3. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim 4. Mendorong pemenuhan infrastruktur sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konektivitas	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, inovatif, serta adaptif terhadap dinamika global 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja 3. Mendorong pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ekosistem 4. Mengembangkan basis ekonomi daerah yang produktif, inovatif, dan berdaya saing 5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas akses layanan	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berperan aktif dalam rantai nilai ekonomi daerah. 2. Mendorong tata kelola pembangunan ekonomi daerah yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif 3. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hilirisasi sumber daya alam 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif melalui pengembangan industri hilir berbasis SDA, 5. Mendorong distribusi manfaat pembangunan ekonomi secara lebih adil dan merata, baik di kawasan	1. Mewujudkan generasi produktif, berdaya saing, dan memiliki etos kerja tinggi sebagai fondasi kemandirian pembangunan daerah 2. Mewujudkan efektivitas birokrasi dan memperkuat sistem akuntabilitas 3. Mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan konservasi ekosistem 4. Mewujudkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing daerah 5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Paser

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur	**Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis**	**Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan**	**Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi SDA dan ekonomi kerakyatan**	**Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera**
	antarwilayah, aksesibilitas logistik, serta dukungan terhadap kawasan industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM 5. Menjamin infrastruktur dasar yang merata baik diperkotaan maupun perdesaan	dasar, perlindungan sosial yang adaptif	perkotaan maupun perdesaan	

Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut terkait keselarasan antara strategi utama, strategi prioritas dan arah kebijakan dengan **tema pembangunan Kabupaten Paser**:

Tema Tahap I Tahun 2026
Penguatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur

Penguatan pelayanan publik menjadi kunci dalam menyiapkan landasan transformasi menuju penggerak ekonomi agrikultur yang modern, inklusif, dan berkelanjutan melalui pelayanan publik dapat dikelola secara lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku sektor pertanian. Integrasi teknologi digital memungkinkan proses perizinan, pendampingan usaha, hingga distribusi sarana produksi dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien. Dengan dukungan tata kelola yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, adopsi teknologi tepat guna, akses informasi, pembiayaan, serta konektivitas pasar dapat diperkuat sehingga mendorong produktivitas dan daya saing komoditas lokal di tingkat nasional maupun global.

Transformasi ekonomi agrikultur membutuhkan sinergi antara inovasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan infrastruktur publik yang memadai. Pelayanan publik yang terintegrasi akan membentuk ekosistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan dan peluang. Dengan demikian, penguatan pelayanan publik tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang menghubungkan petani, pelaku usaha, dan pasar dalam rantai nilai agrikultur yang berkelanjutan.

Tema Tahap II Tahun 2027
Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis

Pemenuhan infrastruktur yang andal dan merata menjadi pondasi penting bagi pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, serta kawasan strategis. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, bandara, serta sarana prasarana dasar pendukung pengentasan kemiskinan akan memperkuat konektivitas dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Kehadiran bandara tidak hanya membuka akses transportasi udara yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar yang terencana dengan baik tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mempercepat mobilitas barang, jasa, dan manusia, terutama melalui peningkatan akses antar-desa yang membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat integrasi wilayah.

Di era transformasi digital, pengembangan infrastruktur digital menjadi elemen penting yang melengkapi pembangunan fisik. Akses internet yang cepat dan merata akan mendorong keterhubungan informasi antara perkotaan dan perdesaan, mempermudah layanan publik, dan mendukung inovasi ekonomi berbasis teknologi. Sinergi antara infrastruktur fisik dan digital menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan..

Tema Tahap III Tahun 2028
Akselerasi perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan kemandirian pembangunan

Akselerasi perwujudan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan sejahtera menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional serta mendorong kemandirian pembangunan. Pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berbasis hasil. Upaya ini diperkuat dengan penataan kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan, sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat dan mendorong inovasi kebijakan. Peningkatan iklim investasi juga menjadi faktor kunci dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang usaha.

Selain itu, penataan pengelolaan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan menggabungkan penguatan kapasitas SDM, kelembagaan yang efektif, iklim investasi yang kondusif, dan sistem perlindungan sosial yang inklusif, daerah akan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warganya.

Tema Tahap IV Tahun 2029
Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif Berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan.

Perluasan pertumbuhan ekonomi yang inovatif berbasis hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan ekonomi kerakyatan menjadi strategi penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi SDA yang dikelola secara berkelanjutan mampu menciptakan nilai tambah produk lokal, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah di pasar nasional maupun global. Pendekatan ini akan semakin optimal jika diiringi dengan perluasan cakupan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat juga harus diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal, mendorong UMKM, koperasi, serta inisiatif kewirausahaan yang inklusif. Upaya ini akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui penciptaan peluang ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara hilirisasi SDA berbasis ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membentuk ekosistem pertumbuhan yang tidak hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi juga memanfaatkan inovasi dan kreativitas masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan.

Tema Tahap V Tahun 2030
Perwujudan Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera.

Perwujudan Kabupaten Paser yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera memerlukan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas menuju *smart government*. Peningkatan profesionalisme pelayanan, termasuk penerapan pelayanan publik berbasis teknologi, akan memastikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemantapan kemandirian daerah melalui penguatan kapasitas ekonomi, optimalisasi sumber daya lokal, serta pemerataan aksesibilitas di seluruh kawasan menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan dan daya saing daerah.

Pencapaian visi tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu kesatuan gerak pembangunan. Integrasi kebijakan dan program yang berpihak pada pemerataan, pengentasan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup akan memastikan Kabupaten Paser berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan inovasi, teknologi, serta sinergi multipihak, Paser dapat menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara sosial, adil dalam pemerataan manfaat pembangunan, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

b. Arah Kebijakan

Selaras dengan strategi, arah kebijakan merupakan rumusan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Paser. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut ini penjabaran arah kebijakan berdasarkan Misi.

Tabel III.7.
Keterkaitan Misi dan Arah Kebijakan Kabupaten Paser

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi serta digitalisasi pelayanan publik yang inovatif
	Pengembangan *Smart Government* serta penguatan manajemen dan kapasitas aparatur daerah dan tata kelola kelembagaan
	Penguatan riset dan inovasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD
Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat	Percepatan wajib belajar 13 tahun untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi anak usia sekolah melalui a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini b) pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas c) penyaluran bantuan pendidikan d) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik pada pendidikan dasar a) pengembangan PAUD holistik-integratif b) pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kualitas pembelajaran c) pemenuhan dan pemerataan distribusi pendidik d) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
	Penguatan peran agama dalam pembentukan generasi yang berakhlak mulia a) penguatan pendidkan agama dan pendidikan karakter b) penyaluran bantuan pendidikan keagamaan
	Peningkatan literasi dan numerasi bagi peserta pendidikan dasar
	Peningkatan gerakan membaca melalui kampanye literasi nasional dan lokal
	Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka penuntasan stunting a) pemenuhan gizi seimbang mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan b) peningklatan edukasi gizi masyarakat c) peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif a) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan sesuai standar b) pemenuhan tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas sesuai standar c) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan d) pengembangan layanan kesehatan yang inovatif
	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakti tidak menular. a) peningkatan pengendalian penyakit menular seperti TB, dan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
	eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria b) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa c) peningkatan kualitas dan kompetensi instruktur vokasi d) penguatan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik masyarakat e) kampanye gerakan masyarakat hidup sehat f) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Perempuan dan penyandang disabilitas melalui : • peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; • peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi pelatihan vokasi bagi perempuan, termasuk perempuan • pelatihan vokasi bagi perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas
Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan	Peningkatan ketangguhan keluarga melalui penguatan institusi keluarga : a) Penguatan tata kelola dan pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b) peningkatan peran lintas sektor termasuk organisasi masyarakat dalam pembinaan ketahanan keluarga
	Peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Paser Layak Anak: a) penguatan edukasi dan advokasi tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak b) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat c) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak
	Peningkatan kualitas pemuda a) penguatan fasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda b) peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pemuda c) peningkatan kewirausahaan pemuda d) pembinaan kepemudaan di bidang sosial dan politik.
	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan a) peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan b) peningkatan partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan c) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
	d) Advokasi kebijakan dan penguatan layanan perlindungan perempuan
	Pengembangan pembudayaan olahraga dan peningkatan pembinaan prestasi olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional a) pengembangan sarana dan prasarana olahraga b) penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga c) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi melalui keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat d) pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga termasuk para pelaku olahraga
	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia serta mendorong peran aktif penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan a) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia b) penyediaan sarana prasarana ramah terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia c) peningkatan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia
	Penguatan kerukunan umat beragama untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat a) penguatan moderasi beragama dan kehidupan beragama yang harmonis dan rukun b) peningkatan peran tokoh agama, lembaga agama, dan lembaga sosial keagamaan c) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan budaya lokal untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa a) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai seni, budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal b) penyelenggaraan festival budaya c) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas seni dan budaya d) peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan e) peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan
Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal	Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian.
	Pengembangan ekonomi biru,dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal, tanpa menghasilkan limbah berlebihan
	Menyediakan bantuan dalam bentuk pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, serta kepastian pasar untuk mendukung kesejahteraan petani.
	Peningkatan kapasitas, kualitas dan bantuan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) termasuk pembiayaan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
	dan pemasaran serta penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan
	Pengembangan wirausaha muda mandiri berbasis potensi unggulan daerah
	Pembentukan Koperasi yang berbadan hukum disetiap Desa/Kelurahan dan peningkatan kapasitas SDM Koperasi serta Mendorong koperasi desa sebagai pusat pengembangan produk unggulan lokal yang berdaya saing
	Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif
	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi yang tepat sasaran dengan peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial yang sesuai dengan kondisi kerentanan, perbaikan mekanisme penyaluran bansos, pengembangan mekanisme graduasi masyarakat miskin dan rentan menuju sejahtera.
	Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan dan penargetan program pengentasan kemiskinan a) Penyediaan akurasi, validitas, dan keterbaruan data kemiskinan berbasis rumah tangga/individu, b). Penggunaan data DTSEN oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan program sosial dan ekonomi.
	Menjaga stabilisasi harga barang dan jasa melalui : a) Penguatan sistem pemantauan dan pengendalian harga daerah; b) Penguatan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan stablisiasi harga melalui intervensi pasar; c) Peningkatan produksi dan kemandirian pangan lokal; dan d) Penguatan regulasi dan koordinasi pengendalian inflasi daerah
	Peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah dengan memberikan kemudahan investasi dan meningkatkan promosi investasi melalui penyusunan dan penyebarluasan profil investasi Daerah (*investment profile)* dalam bentuk digital dan cetak
Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pembangunan	Peningkatan akses hunian yang layak
	Peningkatan sarana dan prasarana permukiman yang inklusif dan berkelanjutan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi yang berkualitas dan berkeselamatan
	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Paser
	Peningkatan Akses air minum dan sanitasi aman
	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.
	Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik
	Peningkatan pembinaan dan ketersediaan data informasi jasa konstruksi
	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola pertanahan
	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup, khususnya aktivitas pertambangan
	Peningkatan upaya transformasi industri ke arah yang lebih hijau
	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan dan tanggap bencana

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Program-program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Paser. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang dapat disusun adalah sebagai berikut.

Tabel III.8.
Program Bupati Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

Kode	Program Bupati Terpilih	
P	**P**ERTANIAN MENINGKAT, JALAN BERKUALITAS DAN AIR TERUS MENGALIR	a. Pertanian Meningkat
		b. Jalan Berkualitas
		c. Air Terus Mengalir
A	**A**YO SEKOLAH	a. Beasiswa diberikan kepada 10.000 siswa dengan kategori
		b. Penghargaan kepada Guru diberikan kepada 500 guru dengan kategori
S	**S**ATU JUTA BIBIT IKAN, SERIBU SAPI	a. Bantuan 1.000.000 Bibit Ikan kepada Nelayan
		b. Bantuan 1.000 Sapi kepada petani (peternak)

Kode	Program Bupati Terpilih	
E	**E**MPATI KEPADA WARGA KURANG MAMPU	a. Seluruh warga kurang mampu mendapatkan BPJS Kesehatan
		b. 97.884 pekerja rentan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan
R	**R**EHABILITASI RUMAH WARGA KURANG MAMPU	Target 2025-2029 sebanyak 900 unit
T	**T**ERIMAKASIH GURU NGAJI, MARBOT MASJID, IBU HAMIL DAN LANSIA	a. Insentif kepada Guru Ngaji
		b. Insentif kepada Marbot Masjid
		c. Bantuan biaya persalinan bagi ibu hamil
		d. Bantuan kepada Lansia
U	**U**MKM BERDAYA	a. Pelatihan dan Pendampingan UMKM
		b. Bantuan modal UMKM
N	**N**ANTI ANAK DESA HARUS SEHAT DAN CERDAS	a. Kuliah gratis 1 Da'I pembangunan 1 desa
		b. Kuliah gratis 1 Bidan 1 desa
		c. Kuliah gratis 1 Perawat 1 desa
		d. Puskesmas dan Pusban Keliling untuk Layanan Kesehatan Gratis bagi warga kurang mampu
		e. Insentif Kader Posyandu
T	**T**UNJANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN BPD	Pemberian tunjangan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
A	**A**NAK MUDA MANDIRI	• Pelatihan wirausaha pemuda (Entrepreneurship)
		• Pelatihan digital pemuda (Digital Skills Training)
		• Bantuan modal usaha pemuda
		• Pemuda Tani (Petani Milenial)
S	**S**EMUA RT DAPAT BANTUAN	Target 2025-2029 sebanyak 1.224 RT dapat bantuan operasional Rp.100.000.000

Program Bupati dan Wakil Bupati Paser, terdiri dari 11 (sebelas) pemetaan program yang mendukung Upaya perwujudan Paser Tuntas, Yaitu :

Tabel III.9.
11 (SEBELAS) PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2025-2030

1). PERTANIAN MENINGKAT, JALAN BERKUALITAS DAN AIR TERUS MENGALIR

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, baik melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru maupun pemberdayaan tenaga kerja yang sudah ada. Penyerapan tenaga kerja ini bertujuan untuk meningkatkan	500 orang	1000 orang	1000 orang	1500 orang	2000 orang	2000 orang	8000 orang	Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial di pedesaan.								
2	Peningkatan Produksi	Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dari berbagai komoditas yang dibudidayakan oleh petani berdasarkan data pada Dinas	22.837,75 Ton	23.840,89 Ton	24.889,32 Ton	25.985,16 Ton	27.130,59 Ton	28.327,89 Ton	28.327,89 Ton	Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				9.250,00 Ton	9.573,75 Ton	9.573,75 Ton	10.255,64 Ton	10.614,59 Ton	10.986,10 Ton	10.986,10 Ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				13.587,75 Ton	14.267,14 Ton	14.980,49 Ton	15.729,52 Ton	16.516,00 Ton	17.341,79 Ton	17.341,79 Ton	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan selain komoditi padi, jagung, kelapa sawit dan Komoditi Hortikultura pada Program Paser Berbuah (Jambu Air, Durian/Lai, Lengkeng, Alpukat, Jeruk, Pisang, Langsat/Duku, dan Cempedak).								
3		Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian (Padi dan Jagung)	Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan	32.216,00 Ton	35.276,52 Ton	38.627,79 Ton	42.297,43 Ton	46.315,69 Ton	50.715,68 Ton	50.715,68 Ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			untuk meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian khususnya komoditi Padi dan Jagung.								
4		Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura (Program Paser Berbuah)	Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi hasil hortikultura pada Program Paser Berbuah meliputi komoditi : Jambu Air, Durian/Lai, Lengkeng, Alpukat, Jeruk, Pisang,	31.154,79 Ton	33.179,85 Ton	35.336,54 Ton	37.633,42 Ton	40.079,59 Ton	42.684,76 Ton	42.684,76 Ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			Langsat/Duku, dan Cempedak.								
5		Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	Peningkatan Produksi Komoditi Perkebuna adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi hasil perkebunan khususnya Kelapa Sawit.	1.620.079,31 Ton	1.800.088,12 Ton	1.904.864,81 Ton	2.009.641,50 Ton	2.114.418,18 Ton	2.219.194.87 Ton	2.219.195 Ton	Dinas Perkebunan dan Peternakan,
6		Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging sapi)	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging sapi) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan	434,60 Ton	434,60 Ton	777,85 Ton	877,85 Ton	977,85 Ton	1.277,85 Ton	4.346 Ton	Dinas Perkebunan dan Peternakan,

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			kualitas produksi daging sapi di sektor peternakan.								
7		Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging unggas)	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan jumlah produksi unggas, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan kabupaten.	1.500 Ton	3.000 Ton	4.320 Ton	4.500 Ton	4.780 Ton	5.000 Ton	21.600 Ton	Dinas Perkebunan dan Peternakan,

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
8		Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (telur)	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan jumlah produksi telur ayam ras dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan kabupaten.	704.510 Butir	1.409.019 Butir	1.509.019 Butir	1.619.019 Butir	1.739.019 Butir	1.869.019 Butir	8.145.097 Butir	Dinas Perkebunan dan Peternakan,
9		Peningkatan Produksi Komoditi	Upaya terencana untuk meningkatkan	10.936,17 Ton	11.001,79 Ton	11.067,80 Ton	11.134,20 Ton	11.201,01 Ton	11.268,22 Ton	11.268,22 Ton	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
		Perikanan Tangkap	volume hasil tangkapan ikan dan sumber daya hayati perairan lainnya secara legal, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup optimalisasi alat tangkap, penguatan kapasitas nelayan, pemanfaatan wilayah penangkapan yang sesuai regulasi, serta dukungan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.								
10		Peningkatan Produksi Komoditi	Serangkaian kegiatan yang bertujuan	14.579,00 Ton	14.651,90 Ton	14.725,15 Ton	14.798,78 Ton	14.872,77 Ton	14.947,14 Ton	14.947,14 Ton	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
		Perikanan Budidaya	untuk meningkatkan hasil panen ikan melalui penerapan teknologi budidaya yang tepat guna, penyediaan benih berkualitas, perbaikan manajemen pakan dan lingkungan budidaya, serta pendampingan terhadap pembudidaya dalam pengelolaan usaha secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.								
11		Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Strategi pengembangan sektor pengolahan ikan melalui	3.015,49 Ton	3.016,39 Ton	3.017,29 Ton	3.018,19 Ton	3.019,00 Ton	3.019,99 Ton	3.019,99 Ton	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta penguatan akses pasar bagi pelaku usaha pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan.								
12	Desa Rawan Pangan	Mengurangi Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan adalah desa yang mengalami kondisi ketidakcukupan atau keterbatasan akses terhadap pangan yang	1 Desa	1 Desa	2 Desa	2 Desa	1 Desa	1 Desa	8 Desa	Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			cukup, bergizi, aman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari penduduknya.								
13	Konstribusi Terhadap PDRD	Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah ukuran dari seberapa besar peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu wilayah atau daerah, yang dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor	17,00 %	17,51 %	18,04 %	18,56 %	19,08 %	19,61 %	19,61 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			pertanian terhadap total output ekonomi daerah.								
14	Jalan Berkualitas	Jalan kondisi mantap	Jalan dengan kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tertangani melalui kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan	60 Km	60 Km	60 Km	60 Km	60 Km	60 Km	360 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	Air Terus Mengalir	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan adalah sistem penyediaan air	85 %	85,5 %	86 %	86,5 %	87 %	88 %	88 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			minum melalui jaringan perpipaan yang dapat menyediakan air yang memenuhi standar kualitas air minum yang aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.								

1) **A**YO SEKOLAH

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Beasiswa	Beasiswa SD (tidak mampu, stimultan akademik dan non akademik)	Beasiswa SD atau sederajat adalah program pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, atau yang berprestasi dalam bidang		500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	2.500 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			akademik atau non akademik dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Kriteria Penerima: sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2024 tentang pedoman beasiswa Paser Maju Adil dan Sejahtera								
2		Beasiswa SMP (tidak mampu, stimultan akademik dan non akademik)	Beasiswa SMP atau sederajat adalah program pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, atau yang berprestasi dalam bidang akademik atau non akademik dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Kriteria Penerima: sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2024 tentang pedoman beasiswa Paser Maju Adil dan Sejahtera		500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	2.500 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
3		Beasiswa SMA/SMK (tidak mampu, stimultan akademik dan non akademik)	Beasiswa SMA atau sederajat adalah program pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, atau yang berprestasi dalam bidang akademik atau non akademik dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Kriteria Penerima: sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2024 tentang pedoman beasiswa Paser Maju Adil dan Sejahtera		250 Siswa	250 Siswa	250 Siswa	250 Siswa	250 Siswa	1.250 Siswa	Sekretariat Daerah/ Bagian Kesra
4		Beasiswa Mahasiswa (tidak mampu, kerjasama, stimultan akademik dan non akademik)	Beasiswa Mahasiswa adalah program pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, atau yang berprestasi dalam bidang akademik atau non akademik dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan.		500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	2.500 Siswa	Sekretariat Daerah/ Bagian Kesra

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			Beasiswa kerja sama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa daerah berdasarkan program kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak penyelenggara pendidikan Kriteria Penerima: sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2024 tentang pedoman beasiswa Paser Maju Adil dan Sejahtera								
5		Beasiswa Santri Pondok Pesantren (tidak mampu, stimultan akademik dan non akademik)	Beasiswa santri/pondok pesantren adalah program pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan yang diberikan kepada santri yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, atau yang berprestasi dalam bidang akademik atau non akademik dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Kriteria Penerima: sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2024		250 Siswa	250 Siswa	250 Siswa	250 Siswa	250 Siswa	1.250 Siswa	Sekretariat Daerah/ Bagian Kesra

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			tentang pedoman beasiswa Paser Maju Adil dan Sejahtera								

a. Penghargaan kepada Guru diberikan kepada 500 guru dengan kategori

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Pengahargaan Guru	**Penghargaan Guru Inovatif**	Penghargaan bagi guru inovatif diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya dan kreativitas guru dalam mengembangkan metode, pendekatan, atau strategi pembelajaran yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		**Penghargaan Guru Teladan**	Guru Teladan adalah seorang pendidik yang menunjukkan sikap, perilaku, dan kinerja yang dapat dijadikan contoh atau panutan oleh rekan sejawat, siswa, dan masyarakat di sekitarnya. Guru Teladan tidak hanya mengedepankan kemampuan akademik dan profesionalisme dalam mengajar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang tinggi. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
											dan Kebudayaan
3		**Penghargaan Guru Inspiratif**	Guru Inspiratif adalah seorang pendidik yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mendorong siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka, baik dalam aspek akademik maupun pribadi. Guru ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang membangkitkan semangat belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendorong siswa untuk terus berkembang. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4		**Penghargaan Guru Berpendidikan Karakter**	Guru Berpendidikan Karakter adalah seorang pendidik yang tidak hanya mengutamakan pengajaran akademik, tetapi juga secara aktif menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik dalam kehidupan siswa. Guru ini berperan penting dalam membentuk karakter siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan nilai-nilai positif, dan menanamkan prinsip-prinsip etika yang membimbing siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
5		**Penghargaan Guru Kreativias dan Seni**	Guru Kreativitas dan Seni adalah seorang pendidik yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengajarkan, dan menginspirasi siswa dalam bidang seni dan kreativitas. Guru ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang mengundang imajinasi, mengasah keterampilan artistik, dan mendorong ekspresi diri siswa melalui berbagai media seni, seperti seni rupa, musik, drama, tari, dan lainnya. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6		**Penghargaan Guru Penggerak Desa**	Guru Penggerak Desa adalah seorang pendidik yang berperan aktif dalam memimpin, menginisiasi, dan melaksanakan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan di desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Guru ini tidak hanya fokus pada pengajaran di dalam kelas, tetapi juga aktif menggerakkan potensi lokal, menghubungkan sekolah dengan komunitas desa, dan mendorong partisipasi warga dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
7		**Penghargaan Guru Desa Terpencil**	Penghargaan kepada Guru Desa Terpencil diberikan kepada guru yang berkontribusi luar biasa dalam memberikan pendidikan di daerah terpencil dengan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Guru ini tidak hanya mengajar di lingkungan yang kurang memadai, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas meskipun dengan keterbatasan. Kriteria Penerima: Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh instansi yang menangani pendidikan								
		Guru SD		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru SMP		5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	5 Guru	25 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2) **S**ATU JUTA BIBIT IKAN, SERIBU SAPI

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Bantuan Kepada Nelayan	Bantuan Bibit Ikan (1 juta Bibit)	Bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat atau kelompok pembudidaya ikan dalam bentuk pemberian benih ikan yang sehat dan bermutu, dengan tujuan mendukung peningkatan produksi budidaya, memperluas usaha perikanan	100.000 Ekor	100.000 Ekor	200.000 Ekor	200.000 Ekor	200.000 Ekor	200.000 Ekor	1.000.000 Ekor	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			rakyat, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan pelaku utama sektor perikanan budidaya.								
2	Bantuan Kepada Petani	Bantuan Sapi	Bantuan sapi kepada petani adalah program yang diberikan untuk mendukung petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sapi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti ternak pembibitan, penghasil pupuk organik, atau sebagai sumber pendapatan tambahan. Bantuan ini ditujukan untuk mendorong petani agar lebih mandiri secara ekonomi, meningkatkan produksi pertanian, serta memperbaiki pola pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian di tingkat keluarga dan komunitas. Kriteria penerima bantuan ternak pemerintah : 1) Penerima dalam bentuk poktan/gapoktan yang	100 Ekor	100 Ekor	200 Ekor	200 Ekor	200 Ekor	200 Ekor	1.000 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			berbadan hukum dan terdaftar di simluhtan, 2) Penerima tidak menerima bantuan sejenis dari pemerintah per tahun pengusulan, 3) Lokasi memenuhi syarat teknis dasar (ketersediaan air, lahan hijauan pakan ternak), 4) Mendapatkan rekomendasi dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan, 5) SK Poktan/Gapoktan diketahui oleh PPL/BPP dan Camat serta Kades/Lurah, 6) Bersedia menyediakan prasarana seperti kandang koloni, kandang soliter jika diperlukan, 7) Mengajukan proposal bantuan ternak pemerintah kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, dan 8) Tunduk dan taat pada ketentuan yang dibuat								

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.								

3) **E**MPATI KEPADA WARGA KURANG MAMPU

a. Seluruh warga kurang mampu mendapatkan BPJS Kesehatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	BPJS Kesehatan	Universal Health Coverage (UHC) 95%	Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem kesehatan yang memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan finansial. Pembiayaan yang bersumber dari APBN/APBD diutamakan untuk masyarakat kurang mampu. Kriteria penerima adalah Penerima Bantuan Iuran APBD adalah masyarakat kurang mampu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan

b. 97.884 pekerja rentan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan adalah program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) untuk melindungi pekerja yang berada dalam kondisi rentan atau tidak memiliki status formal sebagai pekerja tetap, seperti pekerja harian lepas, pekerja mandiri, pekerja sektor informal, atau pekerja yang terlibat dalam pekerjaan dengan status kontrak jangka pendek.	49.719 Jiwa	54.691 Jiwa	60.160 Jiwa	66.176 Jiwa	72.794 Jiwa	97.884 Jiwa	97.884 Jiwa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4) **R**EHABILITASI RUMAH WARGA KURANG MAMPU

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1		Rumah Warga Kurang	Rehabilitasi Rumah Warga Kurang Mampu adalah program atau kegiatan yang bertujuan untuk	900 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	3.400 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
		Mampu yang direhab	memperbaiki, merenovasi, atau meningkatkan kualitas bangunan rumah yang dimiliki oleh keluarga atau warga yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan sehat. Rehabilitasi ini dapat mencakup perbaikan struktur bangunan dan perbaikan kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan atau keselamatan. Kriteria penerima adalah 1) Sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Peraturan Bupati Paser No. 63 Tahun 2019 perihal Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser. Adapun Kriteria masyarakat masyarakat penerima bantuan adalah: 2) Warga Negara Indonesia;								dan Pertanahan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			3) Berdomisili di Kabupaten Paser yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku; 4) Berdomisili di kabupaten Paser paling singkat 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa; 5) MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum kabupaten atau keluarga miskin; 6) Telah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga yang tercatat sebagai penduduk miskin yang menempati /memiliki rumah yang memenuhi kriteria tidak layak huni; 7) Memiliki rumah di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang; 8) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari								

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial; dan 9) Didahulukan kepada : • Keluarga dengan kepala keluarga yang telah lanjut usia;dan • Telah memiliki rencana membangun atau peningkatan kualitas rumah yang dibuktikan dengan telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan **Perhitungan Target termasuk sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Paser**								

5) **T**ERIMAKASIH GURU NGAJI, MARBOT MASJID, IBU HAMIL DAN LANSIA

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1		Insentif Guru Ngaji	Insentif Guru Ngaji adalah bantuan finansial atau penghargaan yang diberikan kepada guru ngaji (pengajar Al-Qur'an) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengajar dan membimbing anak-anak, remaja, dan masyarakat dalam mempelajari Al-Qur'an dan ajaran Islam. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, memotivasi mereka untuk terus memberikan pengajaran yang berkualitas, serta memastikan keberlanjutan pendidikan agama di tingkat masyarakat.		1.542 Orang	1.542 Orang	1.542 Orang	1.542 Orang	1.542 Orang	1.542 Orang	BKAD dan Kecamatan
		Bantuan Ibu Hamil	Pemberian Layanan Kesehatan Terhadap Ibu Hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai dengan standar secara gratis di fasyankes tingkat pertama milik pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinkes

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
		Bantuan Ibu Hamil	Pemberian bantuan bagi ibu bersalin tidak mampu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial
		Bantuan Lansia	Bantuan Lansia adalah Bantuan yang diberikan kepada orang lanjut usia miskin dan terlantar untuk pemenuhan hidup berupa pemberian permakanan dan sandang		1.899 Lansia	1.899 Lansia	1.899 Lansia	1.899 Lansia	1.899 Lansia	1.899 Lansia	Dinas Sosial
		Bantuan Marbot Masjid	Bantuan Marbot Masjid adalah program pemberian dukungan finansial atau fasilitas lainnya kepada marbot masjid (pengelola dan penjaga masjid) sebagai bentuk apresiasi atas peran penting mereka dalam merawat dan menjaga kelancaran operasional masjid. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan marbot masjid, memastikan kelangsungan aktivitas keagamaan di masjid, serta mendukung tugas marbot dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan masjid bagi jamaah.		370 Orang	370 Orang	370 Orang	370 Orang	370 Orang	370 Orang	Sekretariat daerah/ Bagian Kesra

6) UMKM BERDAYA

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Pelatihan dan Pendampingan UMKM	Pelatihan Branding dan Pengemasan Produk	Pelatihan Branding dan Pengemasan Produk adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, pengusaha, atau pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam membangun merek (branding) yang kuat dan mengemas produk dengan cara yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Program ini mengajarkan teknik-teknik untuk meningkatkan daya tarik produk melalui penciptaan identitas merek yang jelas, serta cara mengemas produk yang efektif agar dapat bersaing di pasar. Kriteria penerima Adalah Pelaku UMKM yang memiliki Ijin Edar	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	900 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
2		Pelatihan Inovasi Produk dan Pengembangan Kreativitas	Pelatihan Inovasi Produk dan Pengembangan Kreativitas adalah program pelatihan yang dirancang untuk membantu individu, pengusaha, atau pelaku usaha dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan terkait dengan inovasi produk dan peningkatan kreativitas dalam proses penciptaan produk. Program ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, menciptakan produk yang inovatif, dan menerapkan pendekatan kreatif dalam pengembangan produk, guna meningkatkan daya saing di pasar. Kriteria penerima Adalah Pelaku UMKM yang Memiliki Industri Pengolahan dan Kerajinan yang bisa dikembangkan	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	720 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
3		Pelatihan Kemitraan dan Jaringan Usaha	Pelatihan Kemitraan dan Jaringan Usaha adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengusaha, pelaku usaha kecil menengah (UKM), atau individu dalam membangun, mengelola, dan memperluas jaringan bisnis serta kemitraan usaha yang efektif. Program ini bertujuan untuk membantu peserta memahami pentingnya kerjasama dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam dunia usaha untuk meningkatkan potensi pertumbuhan, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Kriteria penerima Adalah Pelaku UMKM yang masih berjalan dan memerlukan bimbingan dan pendampingan dalam mengembangkan produknya	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM	720 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
4		Pelatihan *E-commerce*	Pelatihan E-commerce adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, pengusaha, atau pelaku usaha dalam menjalankan bisnis melalui platform digital atau online. Pelatihan ini mengajarkanberbagai aspek yang diperlukan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha e-commerce (perdagangan elektronik), termasuk strategi pemasaran digital, manajemen toko online, pengelolaan transaksi, serta penggunaan teknologi dan platform untuk menjangkau pasar secara luas. Kriteria penerima Adalah Pelaku UMKM yang Memiliki Ijin Edar, Sertifikasi Halal, dan Kemasan sesuai standar yang dapat dipasarkan melalui platform digital.	150 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	350 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
5		Pelatihan Manajemen Bisnis	Pelatihan Manajemen Bisnis adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kepada individu atau pemilik usaha dalam mengelola berbagai aspek bisnis secara efisien dan efektif. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang penting dalam manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha secara berkelanjutan. Kriteria penerima yaitu Pelaku UMKM yang memiliki usaha berkelanjutan guna mengatur pembukuan keuangan usahanya.	150 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	350 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM
6		Pelatihan Legalitas dan Perizinan Usaha	Pelatihan Legalitas dan Perizinan Usaha adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman	450 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	650 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			dan keterampilan kepada individu, pengusaha, atau pelaku usaha terkait dengan proses, persyaratan, dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha dan memenuhi aspek hukum dalam menjalankan suatu bisnis. Pelatihan ini mengajarkan pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku di bidang usaha dan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sah secara hukum serta beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria penerima yaitu Pelaku UMKM pemula yang belum memiliki persyaratan perijinan.							
7		Pelatihan Ekspor dan Impor	Pelatihan Ekspor dan Impor adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada individu, pengusaha, atau pelaku usaha mengenai proses, prosedur, dan regulasi yang	30 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	230 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa antarnegara. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek teknis dan hukum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan ekspor dan impor dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kriteria penerima yaitu Pelaku UMKM yang memiliki NIB dan memiliki Badan Hukum Usaha								
8	Bantuan modal UMKM	Bantuan modal UMKM	Bantuan Modal UMKM adalah pemberian dana atau fasilitas finansial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing usaha tersebut. Bantuan modal ini diberikan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau instansi lainnya untuk membantu	150 UMKM	280 UMKM	280 UMKM	280 UMKM	280 UMKM	280 UMKM	1.550 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Komperasi dan UMKM

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			UMKM dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk memperluas usaha, membeli bahan baku, meningkatkan infrastruktur, atau mengembangkan inovasi dalam produk dan jasa yang ditawarkan. Keretria penerima yaitu Pelaku UMKM Pemula yang memiliki usaha minimal telah berjalan selama 1 tahun atau lebih.								

7) **N**ANTI ANAK DESA HARUS SEHAT DAN CERDAS

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Kuliah Gratis	1 Dai Pembangunan 1 Desa	Desa yang memiliki 1 dai pembangunan yang berfokus pada pembangunan sosial dan kemasyarakatan Kriteria Penerima Adalah Usulan dari Desa setempat dengan	139 Dai	139 Dai	139 Dai	139 Dai	139 Dai	139 Dai	139 Dai	Sekretariat Daerah/ Bagian Kesra

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			pendidikan sarjana keagamaan								
2		1 Bidan 1 Desa	Kuliah Gratis Bidan Desa adalah program pendidikan yang menyediakan akses pendidikan tinggi secara gratis bagi perempuan dari desa untuk menjadi bidan profesional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di desa, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak, dengan mempersiapkan perempuan dari desa untuk menjadi tenaga medis yang terampil dan berkompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di komunitas pedesaan. Peserta program ini akan diberikan		10 Mahasiswa	106 Mahasiswa	139 Makasiswa	139 Makasiswa	139 Makasiswa	139 Makasiswa	Sekretariat Daerah/ Bagian Kesra

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di bidang kebidanan tanpa biaya, dan diharapkan setelah lulus dapat kembali ke desa mereka untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.								
3		1 Perawat 1 Desa	Kuliah Gratis Perawat bagi Anak Desa adalah program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari desa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang keperawatan secara gratis. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga perawat yang terampil dan		32 Mahasiswa	139 Makasiswa	139 Makasiswa	139 Makasiswa	139 Makasiswa	10 Mahasiswa	Sekretariat Daerah/ Bagian Kesra

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			profesional yang akan kembali ke desa mereka setelah lulus untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam perawatan dasar dan pengelolaan kesehatan masyarakat.								
4	Layanan Kesehatan Gratis	Puskesmas dan Pusban Keliling untuk Layanan Kesehatan Gratis bagi warga kurang mampu	Pusban untuk Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kurang Mampu adalah program kesehatan yang menyediakan layanan medis secara gratis bagi warga yang kurang mampu, baik melalui layanan kesehatan di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang terpusat di fasilitas kesehatan setempat, maupun melalui		105 Pusban	105 Pusban	105 Pusban	105 Pusban	105 Pusban	105 Pusban	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			layanan Pusban Keliling (Pusat Pelayanan Kesehatan Keliling) yang memberikan akses layanan kesehatan langsung ke daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga, khususnya yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. bantuan ini di berikan kepada semua pusban dan digunakan untuk operasional pusban seperti biaya operasional kegiataan kesehatan, belanja alat kesehatan dan							

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			meubeler serta peralatan kerja								
5	Posyandu	Insentif Kader Posyandu		2.071 Kader	3.000 Kader	3.000 Kader	3.000 Kader	3.000 Kader	3.000 Kader	3.000 Kader	Dinas Kesehatan

8) **T**UNJANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN BPD

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1			Kenaikan Tunjangan kepada Pemerintah Desa dan BPD adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan BPD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.	139 Desa	139 Desa	139 Desa	139 Desa	139 Desa	139 Desa	139 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

9) **A**NAK MUDA MANDIRI

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1	Pelatihan Pemuda	Pelatihan Wirausaha Pemuda *(Entrepreneurship)*	Pelatihan Wirausaha Pemuda (Entrepreneurship) adalah program pendidikan dan pelatihan	50 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	100 Pemuda	Disporapar

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			yang dirancang untuk membekali pemuda dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis secara mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha pemuda, dengan memberikan pemahaman tentang dunia bisnis, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, inovasi produk, serta teknik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha muda dalam menjalankan bisnis. Kriteria penerima adalah 1) Pemuda yang berumur antara 16 s/d 30 tahun							

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			2) Mempunyai usaha atau yang mempunyai keinginan kuat untuk berwirausaha, 3) Pemuda yang berdomisili di wilayah kabupaten paser								
2		Pelatihan Digital Pemuda *(Digital Skills Training)*	Pelatihan Digital Pemuda (Digital Skills Training) adalah program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk membekali pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi digital yang relevan dengan perkembangan industri dan pasar kerja saat ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam mengoperasikan alat digital, memahami tren teknologi terbaru, serta mengaplikasikan keterampilan digital dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, dan	95 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	20 Pemuda	100 Pemuda	Disporapar

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			kewirausahaan. Pelatihan ini juga dapat mencakup pengajaran terkait penggunaan aplikasi digital, perangkat lunak, keamanan siber, pemasaran digital, dan pengembangan keterampilan teknis lainnya yang mendukung kesuksesan di dunia digital. Kriteria penerima adalah 1) Pemuda yang berusia antara 16 s/d 30 tahun, 2) Wirausaha muda yang bergerak di bidang pemasaran secara online, 3) Wirausaha muda bidang pemasaran off line yang ingin mengembangkan usahanya secara online, 4) Pelajar setingkat SLTA yang mengambil								

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			jurusan marketing/pemasaran								
3	Bantuan Modal	Bantuan Modal Usaha Pemuda	Bantuan Modal Usaha Pemuda adalah program yang memberikan dukungan finansial berupa dana atau fasilitas lain untuk membantu pemuda memulai atau mengembangkan usaha mereka. Program ini bertujuan untuk mendorong kewirausahaan pemuda, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha yang dijalankan oleh generasi muda. Kriteria penerima adalah 1) Peserta Pelatihan Wirausaha Pemuda (Entrepreneurship), 2) Peserta Pelatihan Digital Pemuda	40 Pemuda	40 Pemuda	40 Pemuda	40 Pemuda	40 Pemuda	40 Pemuda	200 Pemuda	Disporapar

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			(Digital Skills Training), 3) Kelompok Pemuda yang tergabung dalam Petani Milenial 4) Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)								
4	Pembentukan dan Pengembangan usaha pertanian pemuda	Pembentukan dan Pengembangan usaha Taruna Tani (Petani Milenial)	Taruna Tani atau yang lebih populer dikenal sebagai Petani Milenial, adalah generasi muda yang aktif terlibat dalam sektor pertanian, baik sebagai petani langsung, pelaku agribisnis, maupun inovator teknologi pertanian, dengan pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan berkelanjutan. Kriteria penerima adalah 1) Generasi muda berusia antara 19–39 tahun, 2) Memiliki minat dan komitmen dalam sektor pertania,	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH)

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
			3) Menggunakan pendekatan inovatif, berbasis teknologi digital, 4) Memiliki orientasi kewirausahaan dalam usaha tani atau agribisnis								

10) **S**EMUA RT DAPAT BANTUAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030		
1		Bantuan Operasional RT	Bantuan Operasional RT (Rukun Tetangga) adalah program yang memberikan dukungan dana atau fasilitas untuk membantu operasional kegiatan administrasi dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Rukun Tetangga (RT) dalam suatu lingkungan. Program ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.		1.224 RT	1.224 RT	1.224 RT	1.224 RT	1.224 RT	1.224 RT	Kecamatan/ BKAD

Selain program kepala daerah, program prioritas yang dihasilkan dari cascading kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.10.
Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerinta-han yang berintegritas dan adaptif	Meningkat-kan Ketangguhan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional ASN	Persentase ASN yang Naik Jenjang	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi Jabatan		
					Meningkatnya konsistensi perencanaan kebutuhan administrasi pegawai sesuai dengan formasi	Rata-rata tingkat pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi Jabatan Berdasarkan jenis Jabatan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Meningkatnya Kedisiplinan ASN	Persentase ASN yang pernah mendapatkan hukuman disiplin		
					Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase pegawai bernilai berkinerja "baik"		
					Meningkatkan kualitas penetapan target, alokasi anggaran, strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target RKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovas
					Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi pengendalian dan evaluasi ditindaklanjuti		
						Tingkat efektivitas capaian program prioritas daerah		
					Meningkatnya Konsistensi dan Sinkronisasi Perencanaan bidang/urusan pemerintahan	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovas
					Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tingkat kesesuaian target dengan realisasi kinerja program dan kegiatan		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovas
					Meningkatnya pemanfaatan riset potensi unggulan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase kajian/riset pengembangan potensi unggulan daerah menjadi kebijakan pembangunan daerah	Program Riset Dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
					Meningkatnya inisiasi dan implementasi inovasi dan Invensi	Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah,masya-rakat, industri dan Badan Usaha Di Daerah		
					Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kinerja layanan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya tata kelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan	Tingkat kinerja layanan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah dan Asisten Administrasi Umum
					Meningkatnya perencanaan anggaran sesuai ketentuan	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Indeks dimensi penyerapan anggaran		
					Meningkatnya implementasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis akrual dan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	Tingkat kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		
					Meningkatnya potensi pajak	Tingkat pertumbuhan	Program Pengelolaan	

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						potensi pajak daerah	Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
					Meningkatnya sumber penerimaan baru (ekstensifikasi pajak baru)	Persentase peningkatan objek pajak baru		
					Meningkatnya realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dari objek pajak	Persentase peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dari objek pajak		
					Meningkatnya upaya intensifikasi pajak daerah	Persentase realisasi piutang pajak yang dibayarkan		
				Indeks Integritas Pemerintah*	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Tindaklajut hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Pemerintah dan Desa yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
						Persentase Rekomendasi Pengawasan Kinerja yang ditindaklanjuti		
						Persentase Rekomendasi Pengawasan Tata		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Kelola Keuangan dan Aset yang ditindaklanjuti		
						Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan PDTT yang ditindaklanjuti		
					Meningkatnya peran aktif perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian interen	Persentase perangkat daerah yang melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi sesuai ketentuan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
					Meningkatnya pencegahan dan pengendalian korupsi	Nilai Monitoring Center for (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		
						Rata-rata Nilai Evaluasi Implementasi Zona Integritas		
					Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan	Rata-Rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital	Meningkatnya kualitas pembangunan/pengembangan aplikasi	Tingkat Kematangan pembangunan/ pengembangan aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
					Meningkatnya kualitas layanan jaringan intra pemerintah	Tingkat Kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah		
					Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Indeks Pelayanan Publik*	Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk yang cepat dan tepat	Cakupan layanan pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Rata-rata waktu penyelesaian dokumen KK, KTP dan KIA		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya cakupan pendaftaran catatan sipil yang cepat dan tepat	Cakupan layanan pendaftaran catatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil		
					Meningkatnya pengguna data kependudukan	Persentase instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat dan termutakhirkan secara berkala	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan Pembangunan		
					Meningkatnya kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan fungsi DPRD dalam	Program Dukungan Pelaksanaan	Sekretariat DPRD

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						pembentukan perda yang difasilitasi	Tugas Dan Fungsi DPRD	
						Persentase dukungan pelaksanaan fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi		
					Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Meningkatnya kualitas pengelolaan penyusutan arsip pada perangkat daerah	Nilai Sub Aspek Penyusutan Arsip		
					Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar	Tingkat Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Meningkatnya mutu tata Kelola dan layanan perpustakaan sesuai standard	Persentase perpustakaan yang terakreditasi		
					Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan politik pada masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						dan kader Partai Politik	Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
					Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						beragama dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan		
					Meningkatnya Penyelesaian Kasus Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan perkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
					Meningkatnya kinerja penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Penanganan ganguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
					Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (IPM satlinmas)		
					Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan	Tingkat kepuasan atas pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
					Meningkatnya Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa dan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						kelurahan yang aktif	Desa Dan Kelurahan	
					Menurunnya konflik Sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
					Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Kelompok Relawan yang aktif	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran		
Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif sejahtera, unggul dan berdaya saing didasari nilai-nilai	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia**	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan kreatif	Indeks Pendidikan	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
keagamaan yang kuat				nasional (literasi)				
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (numerasi)	Meningkatnya akses Pendidikan Non formal (PNF)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan		
					Meningkatnya pemerataan akses san kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI		
						Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI		
						Skor kemampuan literasi SD/MI		
						Skor kemampuan numerasi SD/MI		
					Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan Menengah (SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs		
						Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs		
						Skor kemampuan literasi SMP/MTs		
						Skor kemampuan numerasi SMP/MTs		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya tenaga pendidik yang kompeten	Persentase Guru yang Bersertifikasi		
						Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		
					Meningkatnya Pemerataan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
					Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	Persentase Atlet berprestasi dari olahraga yang dibina		
			Meningkatnya produktifitas dan kemampuan untuk hidup layak masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka*	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja di sektor prioritas	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang	Program Pelatihan Kerja Dan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Dimagangkan dan Bekerja	Produktivitas Tenaga Kerja	
					Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PDRB Per Kapita*	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang sesuai perencanaan	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun sesuai perencanaan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
						Rasio wirausaha pemuda		
					Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungannya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
					Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase merokok penduduk 10 - 21 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Dinas Kesehatan
						persentase kesakitan akibat		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						penyakit menular dan tidak menular	Upaya Kesehatan Masyarakat	
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
						Angka keberhasilan pengebotan TB		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita*	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lansia	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
						Persentase Usia Lanjut yang Mandiri		
						Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		
						Cakupan penerima pemeriksaan		
						kesehatan gratis		
						Prevalensi wasting		
						Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal lengkap K6		
						Prevalensi Obesitas > 18 Tahun		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan.	Persentase Faskes telah menerapkan sistem rujukan terpadu		
						Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat kesehatan diatas 70 persen		
					Meningkatnya Pemenuhan Perbekalan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan perbekalan kesehatan (obat dan BMHP) sesuai standar		
					Meningkatnya Pemerataan kuantitas dan kompetensi SDM kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan (PKM/RSUD) dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		
					Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase keluarga yang	Program Pemberdayaan	Dinas Kesehatan

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						berperilaku hidup bersih dan sehat	Masyarakat Bidang Kesehatan	
Misi 3: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan			Meningkatnya kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD	Program Pengarusuta-maan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase perempuan menduduki jabatan profesional		
						Pengeluaran Perkapita Perempuan (ribu rupiah/tahun)		
					Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan terhadap kekerasan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk,

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
								Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya peran budaya dalam meperkuat karakter daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)*	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatnya Pelestarian Cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatnya Pengelolaan Museum	Persentase Peningkatan Kunjungan	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Wisatawan ke Museum		
			Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana serta penguatan kelembagaan kampung keluarga berkualitas secara berkelanjutan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern		
						Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
					Meningkatnya kapasitas keluarga dalam pengasuhan remaja dan pemberdayaan lansia secara berkelanjutan	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Indeks Lansia Berdaya		
Misi 4: Mewujudkan	Mewujudkan Struktur		Meningkatkan kualitas	Kontribusi PDRB Sektor	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana	Persentase Peningkatan	Program Penyediaan Dan	Dinas Tanaman

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal	Ekonomi Daerah Yang **Transforma-tif** dan Inklusif menuju Masyarakat yang **Sejahtera**	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan**	produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan	Pengembangan Sarana Pertanian	Pangan dan Hortikultura
						Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		
					Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura yang dimanfaatkan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Meningkatnya Pembinaan dan Penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kapasitas SDM Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Meningkatnya pemanfatan Sarana Perkebunan dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
						Persentase peningkatan produksi peternakan		
					Meningkatnya pemanfatan Prasarana Perkebunan dan Peternakan	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	Prasarana Pertanian	
					Meningkatnya Populasi Ternak yang Sehat	Persentase Populasi ternak yang sehat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
					Meningkatnya Nilai Tambah Produksi OLahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi OLahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan industri baru sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan Industri Baru Sektor Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
			produk SDA unggulan daerah					Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Berkompeten	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya Omzet koperasi	Persentase Peningkatan omzet koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kemandirian pelaku UMKM	Persentase kenaikan omzet UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya UMKM yang naik kelas	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Program Pengembangan Umkm	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
			Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Paser	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi**	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Indeks Daya Saing Daerah**	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Disparitas Harga	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Program Stabilisasi Harga Barang Dan Kebutuhan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Pokok Dan Barang Penting	Pokok Dan Barang Penting	Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam transaksi perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Tingkat Kemiskinan**	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio**	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan dasar hidupnya	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
					Meningkatnya kualitas layanan pemberdayaan sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar komunitas adat terpencil	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang sesuai standar		Dinas Sosial
					Meningkatnya kualitas layanan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Persentase anak terlantar dan kelompok rentan yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial		
					Meningkatnya kualitas layanan penanganan korban bencana	Tingkat capaian standar pelayanan minimal penanganan bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
					Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatnya Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatnya Penanganan Desa Rawan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					Terwujudnya Penyaluran Cadangan Pangan	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan		
					Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang memiliki rancangan perbup batas desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana desa	Persentase sarana dan Prasarana desa yang berfungsi dengan baik		
					Meningkatnya Pendapatan Asli Desa bersumber dari kerjasama Desa	Rata-rata Persentase pertumbuhan PADes yang bersumber dari kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Meningkatnya akuntabilitas administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes sesuai ketentuan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Meningkatnya kualitas pembinaan administrasi pemerintahan desa;	Persentase desa yang menerapkan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan;		
					Meningkatnya kualitas Pengelolaan Bumdes/Bumdes Bersama.	Persentase Bumdes berstatus Maju		
					Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Lembaga Adat Desa (LAD) aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	n, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
Misi 5: Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang **Adil**, Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
					Meningkatnya penanganan Luasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Meningkatnya Lalu Lintas yang aman, tertib dan lancer	Indeks Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
						Rasio Volume Terhadap Kapasitas (V/C Rasio)		
					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
						Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi dengan baik		
					Meningkatnya Kualitas layanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio Konektivitas SDP (Sungai, Danau, Penyebrangan)	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
						Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran yang berfungsi dengan baik		
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan layanan air minum layak Perpipaan*	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
							Penyediaan Air Minum	
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak*	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Meningkatnya bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi baik	Persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi baik	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Meningkatnya pengelolaan Kawasan Sumber Daya air	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase Peningkatan Perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/Kota		
			Meningkatnya kenyamanan dan	Penurunan Intensitas Emisi GRK**	Meningkatnya integrasi RPPLH dalam Rencana pembangunan daerah	Persentase rekomendasi RPPLH menjadi	Program Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
			kelestarian daerah dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana			kebijakan terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah	Lingkungan Hidup	
					Terkendalinya kualitas air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dari ancaman pencemaran dan kerusakan	Persentase titik pantau kualitas air sungai/danau yang memenuhi baku mutu air.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase titik pantau kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu udara ambien		Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase rehabilitasi lahan		
					Meningkatnya pertumbuhan dan berkembangnya inisiatif dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	Persentase pengurangan sampah di sumber (rumah tangga, pasar, perkantoran) melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang terfasilitasi.		
					Meningkatnya pengelolaan Tahura	Persentase Luasan Tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningktnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggula-ngan Bencana Daerah
					Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana		

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Penanggung Jawab
"**Visi: PASER TUNTAS**								
(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)"								
					Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		

Keterangan :

*** Indikator Utama Pembangunan (IUP)**

**** Sasaran Visi RPJPD Kab.Paser 2025-2045**

***** Dibeberapa Perangkat Daerah Indikator tersebut menjadi tujuan Perangkat Daerah**

3.2.3 Dukungan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 Terhadap Program Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Utama RPJM Nasional 2025-2029, sinkronisasi dengan program Pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah.

Terdapat arahan dari Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengakomodasi Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dukungan Pemerintah Kabupaten Paser terhadap arahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.11.
Penyelarasan Program Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Paser	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Sekolah Rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Ketahanan Pangan Dengan Proyek/Kegiatan Pengadaan Dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
Kesehatan Utnuk Semua Dengan Proyek/Kegiatan	Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Dinas Kesehatan

Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Paser	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
		Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Makan Bergizi Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Perluasan Akses Pendidikan Dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Proyek/Kegiatan	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Kemudahan Perizinan Di Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Strategis Nasional Dengan		Program Pengembangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Paser	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
Proyek/Kegiatan Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Presiden		Kawasan Transmigrasi	

Kabupaten Paser yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, juga menyelaraskan dengan program unggulan yang telah dipetakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kotanya. Harapannya Kabupaten Paser menjadi salah satu kontributor keberhasilan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029.

Tabel III.12.
Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan Jospol	Lokus Indikatif	Prioritas Provinsi	Program	Perangkat Daerah
Program Unggulan Gratispol					
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	10 Kecamatan		1. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas pendidikan
				2. Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 Kecamatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	10 Kecamatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Gratis Internet di Setiap Desa	10 Kecamatan		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
5	Gratis Seragam Sekolah	10 Kecamatan		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 Kecamatan		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

No	Program Unggulan Jospol	Lokus Indikatif	Prioritas Provinsi	Program	Perangkat Daerah
7	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	10 Kecamatan		Program Kesejahteraan Rakyat	Sektretariat Daerah
Program Unggulan Jospol					
1	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Kecamatan Pasir Belengkong. Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Tanah Grogot	Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pemberdayaan UMKM - Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	- Kecamatan Pasir Belengkong - Kecamatan Kuaro		- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	Pengembangan Kawasan Tanaman Karet	Kecamatan Long Kali		- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Program Unggulan Jospol	Lokus Indikatif	Prioritas Provinsi	Program	Perangkat Daerah
4	Peningkatan pengendalian OPT dan Pengembangan APH	10 Kecamatan		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Dinas Perkebunan dan Peternakan - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 Kecamatan	Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat daerah
6	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	10 Kecamatan	Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	10 Kecamatan		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
8	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	10 Kecamatan		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9	Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya		Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
10	Pelestarian dan Pemanfaatan			Program Pelestarian Dan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program Unggulan Jospol	Lokus Indikatif	Prioritas Provinsi	Program	Perangkat Daerah
	Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya			Pengelolaan Cagar Budaya	
11	Kegiatan peningkatan /rehabilitasi ruas jalan Provinsi		Jospol 7 Pembangu-nan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
12	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi		Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah,Pusat, serta Swasta	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Forum Investasi Daerah		Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah,Pusat, serta Swasta	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Salah satu penyelarasan yang dilakukan adalah penyelarasan target indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian target indikator kinerja makro pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah agar dapat merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan intervensi kebijakan serta karakteristik dan potensi setiap daerah. Adapun penyelarasan target

indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro provinsi dengan target indikator makro daerah yaitu Laju Pertumbuhan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran.

Tabel III.13.
Penyelarasan Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Makro RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJMD Prov. Kaltim		Target RPJMD Kab. Paser	
	2025	2029	2025	2029
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia**	0,59	0,62	75,66	78,01
Laju Pertumbuhan Ekonomi** (%)	6,20-6,40	8,10-8,60	3,78-3,80	4,16-4,50
PDRB Per Kapita**	219,29-222,74	282,10-326,90	214,63	330,42-423,42
Penurunan Intensitas Emisi GRK**	40,00-55,00	66,68-70,05	38,09	61,20
Tingkat Pengangguran Terbuka* (%)	4,60-5,14	4,14-4,77	4,16-4,40	3,30-3,90
Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Kontribusi PDB Nasional / Kontribusi PDRB terhadap Provinsi**	3,95	4,60	7,01	7,41
Tingkat Kemiskinan** (%)	4,24-5,05	2,37-3,37	8,00-8,38	6,21-6,39
Gini Ratio**	0,310-0,321	0,306-0,310	0,268-0,271	0,261-0,270
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	80,20	81,46	79,80	80,48

Keterangan :
Indikator Kinerja Makro ditetapkan berdasarkan Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025
**Indikator Utama Pembangunan (IUP)*
*** Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045*

3.2.4 Arah Kebijakan Kewilayahan

Kebijakan kewilayahan merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan potensi ruang, pemerataan pembangunan, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan struktur wilayah yang lebih seimbang, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat pertumbuhan kawasan-kawasan strategis melalui pengelolaan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterkaitan antarkawasan, serta potensi dan permasalahan yang spesifik di setiap wilayah. Kebijakan kewilayahan juga mengintegrasikan aspek potensi kewilayahan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

A. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMN

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Paser yakni sebagai Kawasan Afirmasi Transmigrasi Kerang (D4) dengan highlight Indikasi Intervensi meliputi :

a) Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman;
b) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian;
c) Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi;
d) Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran.

Selain itu, terdapat pula highlight indikasi intervensi dengan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur yakni:

1) Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui:
   - Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan, dengan *output*: layanan angkutan penyeberangan perintis.
2) Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif (hulu) beserta penanganannya (hilir), melalui:
   - Peningkatan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* melalui Tempat Pengolahan Sistem Terpadu (TPST) guna pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor pengolahan sampah, dengan *output*: sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat;
   - Pemanfaatan teknologi pengolahan *Refuse Derived Fuel (RDF)* plant dan teknologi tepat guna lainnya di berbagai lini industri, dengan *output*: pemanfaatan teknologi pengolahan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau;
   - Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak, dengan *output*: bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan.
3) Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi, melalui:
   - Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pemanfaatan energi rendah karbon, dengan *output*: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro;
   - Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk;
   - Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan.
4) Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T

5) Perwujudan swasembada sektor pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui:
   - Peningkatan produksi pangan nabati dan pemberdayaan ekonomi, dengan *output*: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura;
   - Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: rekomendasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
   - Pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, dengan *output*: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;
   - Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output*: area pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura dan sarana perlindungan hortikultura;
   - Peningkatan produksi pangan nabati dan modernisasi jaringan irigasi guna peningkatan pemberdayaan ekonomi, dengan *output*: jaringan irigasi yang direhabilitasi dan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura;
   - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi).
6) Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), melalui:
   - Penguatan intervensi spesifik stunting, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock*;
   - Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan sebagai upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, layanan survei faktor risiko dan layanan pencegahan penyakit TBC;
   - Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menuju eliminasi malaria serta layanan survei faktor risiko penyakit malaria;
   - Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian serta layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS;
   - Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian serta tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit kusta.
7) Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui:
   - Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya, fasilitas pengelolaan proyek penguatan Rumah Sakit layanan kanker, jantung, stroke, dan *uro-nefrologi* (KJSU) dan pengembangan layanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan RS tingkat rujukan berbasis komputer di seluruh Kabupaten/Kota;

- Peningkatan kualitas pelayanan rujukan, dengan *output*: NSPK mutu dan akreditasi rumah sakit.

8) Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui:
   - Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketahanan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dalam pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;
   - Penyaluran bantuan sosial adaptif dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyandang disabilitas dan lanjut usia pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran dan pemberian perlindungan kerja melalui fasilitasi PBI Jamsostek dan jaminan kehilangan pekerjaan.

9) Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang *STEAM*, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat, melalui:
   - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan;
   - Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi (PT) Vokasi, dengan *output*: gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya;
   - Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan, berbasis industri dan mendapatkan pendampingan peningkatan mutu;
   - Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidikan SMK, dengan *output*: guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan, inovasi model pembelajaran vokasi dan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri untuk kebutuhan dunia kerja;
   - Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK, dengan *output*: siswa SMK/MAK yang mendapatkan penguatan persiapan program magang luar negeri dan tersertifikasi terhadap kompetensi riil yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
   - Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan *output*: pengembangan kerja sama pelatihan dan satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja.

10) Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, melalui:
- Mitigasi bencana di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: koordinasi, pelayanan publik lainnya dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan bantuan kebencanaan, dengan *output*: analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana;
- Pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan *output*: koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah penanggulangan bencana, dengan *output*: pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana (PB), daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana, pendidikan dan pelatihan teknis PB bagi fasilitator nasional dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi;
- Penyusunan dokumen penanggulangan bencana, dengan *output*: analisis pengembangan strategi, rekomendasi kebijakan dan analisis strategi penanggulangan bencana;
- Peningkatan keandalan bangunan berketerkaitan bencana, dengan *output*: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana, penataan bangunan kawasan rawan bencana dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian Pelaksanaan Bangunan Gedung (PBG) berketerkaitan bencana.

11) Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya, dengan *output*: warisan budaya yang diregistrasi nasional dan/atau ditetapkan dan warisan budaya yang dilindungi

Gambar III.3.
Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Kalimantan Timur Pada RPJMN 2025-2029

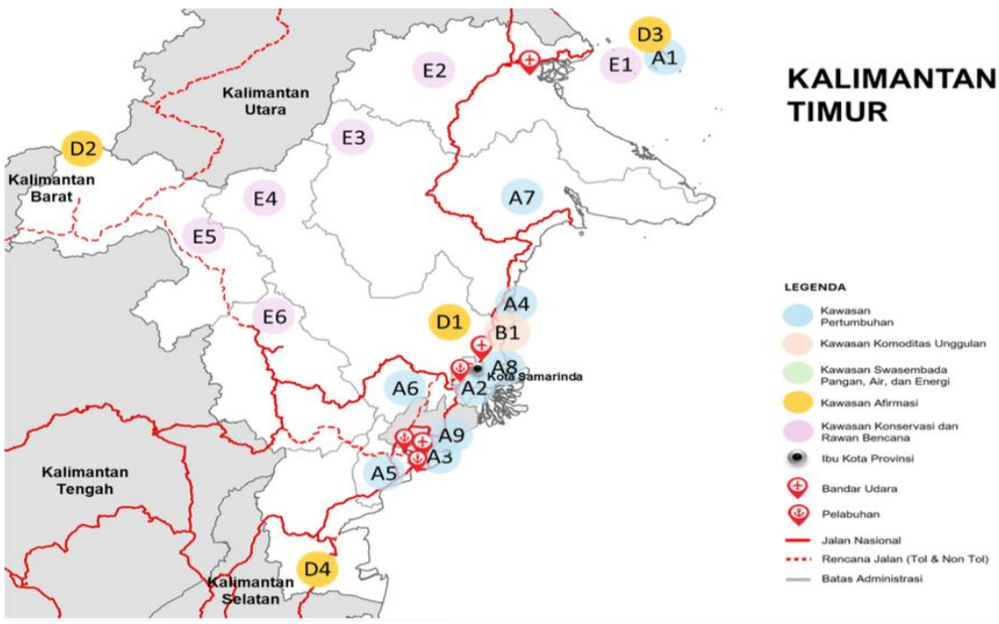

Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

B. Arah Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota. Pengarusutamaan setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan.kabupaten Paser menjadi salah satu Kabupaten yang menyumbang perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,32 persen di 2024.

Kabupaten Paser di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, terutama batu bara. Sektor ini menyumbang sekitar 67% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Namun, pemerintah daerah juga fokus pada pengembangan sektor-sektor lain untuk diversifikasi ekonomi seperti komoditas unggulan di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sektor ini juga turut menjadi arahan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Paser yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang professional. Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan arahan untuk target indikator makro sebagai berikut:

Tabel III.14.
Capaian Indikator Makro Kabupaten Paser

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
Indeks Pembangunan Manusia**	75,13	75,66	78,22
Laju Pertumbuhan Ekonomi** (%)	3,77	3,78-3,80	4,80-5,90
Tingkat Kemiskinan** (%)	8,63	8,00–8,38	5,80-6,20
Gini Ratio**	0,271	0,268-0,271	0,255-0,264
Tingkat Pengangguran Terbuka* (%)	4,53	4,16-4,40	3,20-3,50

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029
Keterangan:
*Indikator Utama Pembangunan (IUP)
** Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045

Adapun Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Paser beserta dukungan program daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
5. Penyediaan afirmasi akses pendidikan;

6. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat
7. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi;
8. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan;
9. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
10. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
11. Pengembangan destinasi wisata potensial serta pengembangan desa wisata dan budaya;
12. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
13. Pengembangan pemasaran ekraf berbasis digital;
14. Peningkatan daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
15. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
16. Pengembangan ekonomi maritim;
17. Penyelesaian permasalahan Outstanding Boundary Problems;
18. Pengelolaan Terminal Janju Penumpang Tipe B;
19. Pembangunan SPAM Regional Sistem Long Kali;
20. Pengelolaan kawasan hutan adat Mului;
21. Penghijauan lingkungan;
22. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial;
23. Pemantauan sampah laut;
24. Penanganan kawasan kumuh;
25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
26. Pengendalian banjir;
27. Penyelenggaraan jalan Janju - Simp.3 Jone - Pondong Baru;
28. Penyelenggaraan jalan Keluang Lolo - Bekoso - Sangkuriman - Tanah Periuk;
29. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
30. Penyediaan PSU permukiman;
31. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
32. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan.

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi provinsi menuju struktur yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Selain menjadi penyumbang signifikan terhadap PDRB provinsi melalui sektor pertambangan, Kabupaten Paser juga menjadi salah satu lokus prioritas dalam pengembangan sektor pangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Peran Paser semakin penting dalam mendukung arah pembangunan provinsi yang menekankan penguatan infrastruktur wilayah, pengurangan kesenjangan pelayanan dasar, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, termasuk melalui pengelolaan kawasan strategis seperti sentra produksi pangan, kawasan perdesaan, serta perhutanan sosial. Dengan demikian, kemajuan pembangunan di Kabupaten Paser tidak hanya berdampak pada

kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target makro dan sasaran strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029.

C. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Kecamatan

Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik, potensi unggulan, serta tantangan yang berbeda-beda, baik dari aspek sumber daya alam, sosial ekonomi, maupun infrastruktur. Keberagaman potensi ini mencerminkan peluang besar dalam mendorong pertumbuhan wilayah secara berkeadilan, namun juga menuntut penanganan yang tepat terhadap berbagai kendala yang dihadapi setiap kecamatan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, perlu dilakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi dan permasalahan tiap kecamatan guna merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Intervensi ini akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang relevan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Gambar III.4.
Peta Prioritas Wilayah

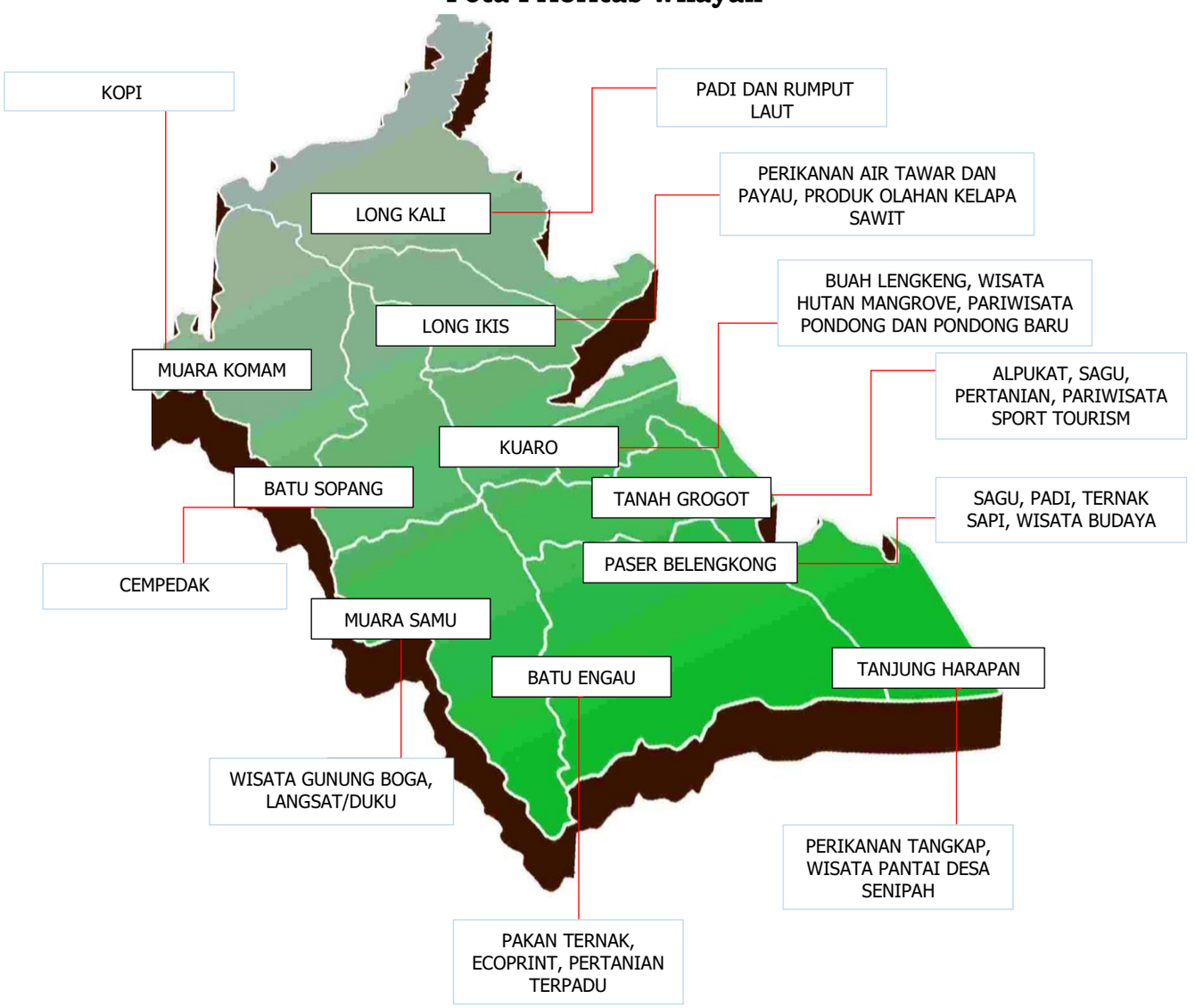

Berikut ini pemetaan potensi dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Paser dalam perencanaan jangka menengah.

1) Kecamatan Tanah Grogot

Gambar III.5.
Kampung Buah di Kecamatan Tanah Grogot

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
   - Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura, dan perkebunan pengembangan komoditi alpukat;
   - Pengembangan kawasan komoditi sagu;
   - Pengembangan kawasan industri berbasis pertanian;
   - Pengembangan pariwisata melalui *Sport Tourism*.

b) Program Pemerintah
   - Program Paser Berbuah: Komoditi Alpukat.

c) Kendala
   - Belum adanya sentra produksi komoditi alpukat;
   - Belum ada budidaya sagu;
   - Pengolahan sagu masih bersifat tradisonal;
   - Belum optimalnya pemasaran hasil olahan sagu;
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang *Sport Tourism*;
   - Belum adanya kalender *event* olahraga;
   - Keterbatasan infrastruktur pendukung;
   - Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha.

d) Intervensi Kebijakan
   - Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
   - Pengembangan teknologi perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor perikanan;
   - Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan;
   - Peningkatan infrastruktur penunjang;

- Pengembangan Industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha melalui pendampingan dan pelatihan;
- Peningkatan promosi investasi.

e) Intevensi Program
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Pemberdayaan UMKM;
- Program Perencanaan Kawaan Industri;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- Program Penyelenggaraan Jalan.

f) OPD
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2) Kecamatan Kuaro

Gambar III.6.
Wisata Mangrove Lati Tuo Klempang Sari

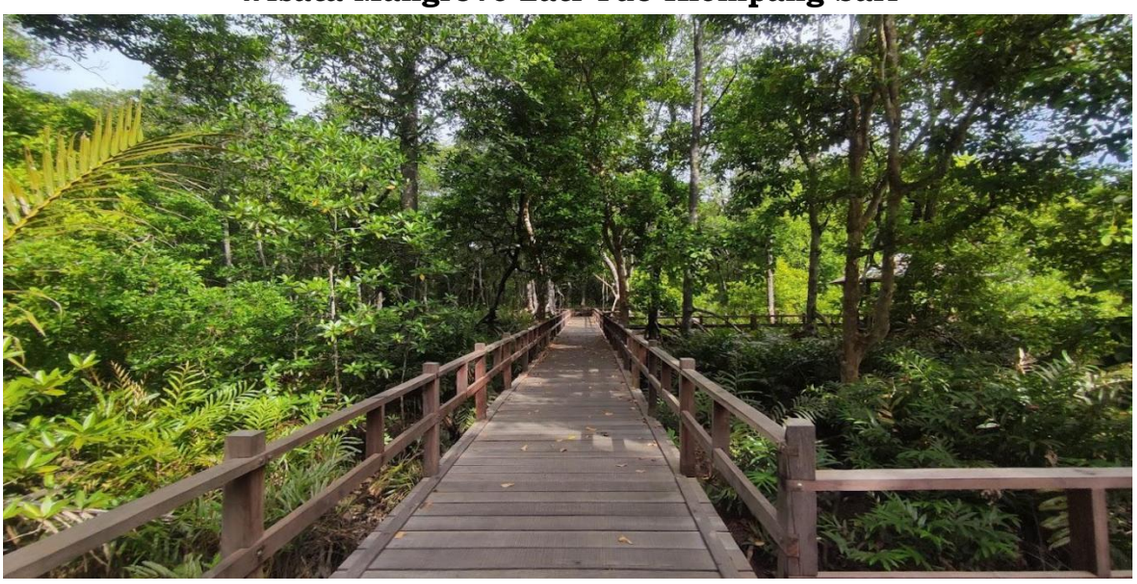

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
- Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perhutanan sosial (kawasan buah dengan komoditi utama kelengkeng);
- Pengembangan kawasan wisata Hutan Mangrove;
- Pengembangan pariwisata di Kemilau Laut Pondong, Desa Pondong Baru.

b) Program Pemerintah
   - Program Paser Berbuah: komoditi kelengkeng;
   - Program Sawit Berbasis Korporasi;
   - Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) Sapi.

c) Kendala
   - Adanya organisme pengganggu tanaman kelengkeng;
   - Belum adanya investor;
   - Belum adanya sarana prasarana peternakan;
   - Masih kurangnya promosi pariwisata;
   - Belum optimalnya sarpras penunjang wisata;
   - Masih kurangnya area parkir di tempat wisata;
   - Belum optimalnya kebersihan tempat wisata;
   - Belum optimalnya pemberdayaan UMKM.

d) Intervensi Kebijakan
   - Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
   - Peningkatan promosi investasi;
   - Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung daya tarik destinasi pariwisata;
   - Penguatan teknologi dan kapasitas SDM.

e) Intervensi Program
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
   - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
   - Program Promosi Penanaman Modal;
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
   - Program Pemasaran Pariwisata;
   - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
   - Program Pengelolaan Persampahan;
   - Program Pengembangan UMKM;
   - Program Penyelenggaraan Jalan;
   - Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung;
   - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

f) OPD
   - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
   - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
   - Dinas Lingkungan Hidup;
   - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3) Kecamatan Long Ikis

Gambar III.7.
Komoditi Kelapa Sawit

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
   - Komoditi perikanan air tawar dan payau;
   - Industri produk olahan kelapa sawit.

b) Program Pemerintah
   - Program Sawit Berbasis Korporasi.

c) Kendala
   - Masih rendahnya daya Tarik investasi terkait industri produk olahan kelapa sawit;
   - Keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM;
   - Keterbatasan infrastruktur.

d) Intervensi Kebijakan
   - Meningkatkan promosi investasi;
   - Penguatan teknologi dan kapasitas SDM;
   - Peningkatan infrastruktur penunjang;
   - Pengembangan industri perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
   - Meningkatkan ketersedian dan kualitas bahan baku.

e) Intervensi Program
   - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
   - Program Promosi Penanaman Modal;
   - Program Penyelenggaraan Jalan.

f) OPD
- Dinas Perikanan;
- Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4) Kecamatan Paser Belengkong

Gambar III.8.
Proses Pembuatan Sagu di Kecamatan Paser Belengkong

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
- Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui pengembangan kawasan komoditi sagu;
- Pengembangan kawasan komoditi padi;
- Pengembangan komoditi ternak sapi;
- Pengembangan wisata budaya Museum Sadurengas, Desa Pasir Belengkong.

b) Program pemerintah
- Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Sagu;
- Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) Sapi.

c) Kendala
- Belum adanya budidaya sagu;
- Pengolahan sagu masih bersifat tradisonal;
- Belum optimalnya pemasaran hasil olahan sagu;
- Belum optimalnya pengairan untuk komoditi padi;
- Jalan usaha tani dalam kondisi kurang baik;
- Belum adanya sarana prasarana peternakan;
- Masih rendahnya minat investor.

d) Intervensi Kebijakan

- Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
- Penguatan infrastruktur penunjang;
- Pengembangan industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- Peningkatan promosi investasi.

e) Intervensi Program
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Pemberdayaan UMKM;
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

f) OPD
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5) Kecamatan Long Kali

Gambar III.9.
Panen Rumput Laut Gracilaria di Desa Maruat Kecamatan Long Kali

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
- Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura melalui kawasan pengembangan komoditi padi;
- Pengembangan komoditi kawasan air payau yaitu rumput laut.

b) Program pemerintah
- Pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan.

c) Kendala
   - Kawasan pengembangan komoditi padi berada dalam daerah rawan banjir;
   - Minimnya infrastruktur penunjang;
   - Belum adanya pengolahan rumput laut;
   - Masih rendahnya minat investor;
   - Keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM.

d) Intervensi Kebijakan
   - Peningkatan produksi dan budidaya rumput laut;
   - Pengembangan teknologi perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor perikanan;
   - Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan;
   - Peningkatan infrastruktur penunjang;
   - Pengembangan Industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
   - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha melalui pendampingan dan pelatihan;
   - Peningkatan promosi investasi.

e) Intervensi Program
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   - Program Pengolahan dan Pemasaranan Hasil Perikanan;
   - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
   - Program Penyelenggaraan Jalan;
   - Program Pemberdayaan UMKM;
   - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   - Program Pengelolaan Pelayaran;
   - Program Promosi Penanaman Modal.

f) OPD
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   - Dinas Perikanan;
   - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
   - Dinas Perhubungan;
   - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6) Kecamatan Batu Sopang

Gambar III.10.
Pengembangan Sentra Buah di Kecamatan Batu Sopang

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
   - Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura dan perkebunan.

b) Program Pemerintah
   - Program Paser Berbuah: komoditi cempedak.

c) Kendala
   - Belum adanya budidaya cempedak.

d) Intervensi Kebijakan
   - Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
   - Pengembangan industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

e) Intervensi Program
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
   - Program Penyelenggaraan Jalan.

f) OPD
   - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

7) Kecamatan Muara Komam

Gambar III.11.
Kopi Paser Khas Desa Uko

Sumber: Uko.desa.id (2025)

a) Konsentrasi Ekonomi
   - Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, perhutanan sosial melalui hilirisasi kopi.

b) Kendala
   - Masih terbatasnya bahan baku kopi;
   - Rendahnya teknologi pengolahan pasca panen;
   - Minimnya kapasitas SDM.

c) Intervensi Kebijakan
   - Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
   - Peningkatan nilai tambah ekonomi dari produk kopi local;
   - Pengembangan industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
   - Penguatan infrastruktur penunjang.

d) Intevensi Program
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   - Program Pengembangan UMKM;
   - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
   - Program Penyelenggaraan Jalan.

e) OPD
- Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

8) Kecamatan Muara Samu

Gambar III.12.
Gunung Boga di Kecamatan Muara Samu

Sumber: Bappedalitbang, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
- Pengembangan wisata di Gunung Boga;
- Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b) Program Pemerintah
- Program Paser Berbuah: komoditi langsat/duku.

c) Kendala
- Belum optimalnya sarpras penunjang wisata Gunung Boga;
- Belum optimalnya kebersihan tempat wisata Gunung Boga;
- Belum ada kekhasan hasil ekonomi kreatif wisata Gunung Boga;
- Belum optimalnya pemberdayaan UMKM;
- Belum adanya sentra produksi komoditi langsat/duku;
- Masih rendahnya minat investor.

d) Intervensi Kebijakan
- Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
- Peningkatan promosi investasi;
- Penguatan infrastruktur penunjang;
- Pengembangan industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

e) Intervensi Program
- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- Program Pengelolaan Persampahan;
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Program Pemberdayaan UMKM;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

f) OPD
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
-

9) Kecamatan Batu Engau

Gambar III.13.
Panen Jagung Perdana di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau

Sumber:: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
   - Aktivitas pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
   - Pengembangan industri pakan ternak;
   - Penetapan kawasan *ecoprint*;
   - Pengembangan kawasan pertanian terpadu.

b) Program Pemerintah
   - Pengembangan komoditi jagung;
   - Kawasan pertanian terpadu.

c) Kendala
   - Kurangnya promosi produk unggulan;
   - Belum dimanfaatkannya bahan baku jagung sebagai industri pakan ternak;
   - Kualitas produk ecoprint yang kurang beragam;
   - Belum optimalnya teknologi dan kapasitas SDM;
   - Belum terbangunnya kawasan pertanian terpadu;
   - Minimnya infrastruktur penunjang.

d) Intervensi Kebijakan
   - Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian;
   - Peningkatan promosi investasi;
   - Peningkatan hilirisasi produk unggulan;
   - Peningkatan infrastruktur penunjang;
   - Pengembangan Industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

e) Intervensi Program
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
   - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
   - Program Pengembangan UMKM;
   - Program Penyelenggaraan Jalan;
   - Program Penataan Bangunan Gedung;
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
   - Program Promosi Penanaman Modal.

f) OPD
   - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
   - Dinas Perkebunan dan Peternakan
   - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
   - Dinas Perikanan
   - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10) Kecamatan Tanjung Harapan

Gambar III.14.
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
di Kecamatan Tanjung Harapan

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

a) Konsentrasi Ekonomi
   - Kecamatan pesisir dengan pelabuhan, aktivitas nelayan, dan potensi perikanan tangkap dan budidaya (air payau) dan wisata bahari;
   - Pengembangan wisata Pantai Desa Senipah.

b) Program Pemerintah
   - Program Industri Produk Olahan Perikanan.

c) Kendala
   - Belum optimalnya kapasitas SDM nelayan;
   - Belum adanya fasilitas tempat pendaratan ikan;
   - Belum optimalnya pemberdayaan UMKM;
   - Minimnya infrastruktur penunjang;
   - Belum adanya sarpras penunjang wisata Pantai Desa Senipah.

d) Intervensi Kebijakan
   - Pengembangan Industri pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

e) Intervensi Program
   - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
   - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
   - Program Pengembangan UMKM;
   - Program Pengelolaan Pelayaran;
   - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
   - Program Pemasaran Pariwisata;
   - Program Pemberdayaan UMKM;
   - Program Penyelenggaraan Jalan;
   - Program Pengelolaan Pelayaran;

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

f) OPD
- Dinas Perikanan;
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- Dinas Perhubungan.

Menyadari pentingnya sinergi antara pengelolaan hutan dan pembangunan di wilayah Kecamatan hingga Desa, pemerintah Indonesia mendorong penerapan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021, Perpres Nomor 28 Tahun 2023, serta Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Kebijakan ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, serta konservasi lingkungan.

Kabupaten Paser menerapkan pendekatan *Integrated Area Development* (IAD), yakni pengembangan kawasan secara terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor: kehutanan, pertanian, ekonomi desa, serta infrastruktur dasar. Pengembangan Kawasan Terpadu ini telah diidentifikasi pada Lanskap Perhutanan Sosial di Kabupaten Paser.

Tabel III.15.
Pengembangan Kawasan Terpadu
Pada Lanskap Perhutanan Sosial di Kabupaten Paser

No	Nama Lanskap	Kecamatan	Desa	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Diversifikasi Usaha Ekonomi Produktif				
					Sektor Pertanian	Sektor Kehutanan & Jasa Lingkungan	Sektor Pariwisata	Inovasi Produk	Hasil Hutan Non-Kayu
1	Lanskap Komam (Kecamatan Muara Komam-Kecamatan Batu Sopang	Muara Komam	Swan Slutung	8 KUPS	Pengembangan ternak sapi, tanaman kacang sacha inci, usaha tanaman buah-buahan, talas beneng, pengelolaan perkebunan karet, dan komoditas kemiri.	Usaha kayu balsa, pengelolaan tanaman herbal, dan pengembangan jasa lingkungan melalui jual beli karbon.	Pengembangan wisata alam (air terjun/riam, Goa Tengkorak)	Usaha pupuk organik dan budidaya lebah kelulut menunjukkan potensi inovasi dan nilai tambah.	
			Selerong						
			Muara Langon						
			Selerong						
			Muara Langon						
		Batu Sopang	Busui						
2	Lanskap Batu Engau – Muara Samu (Kecamatan Batu Engau – Kecamatan	Batu Engau	Saing Prupuk	8 KUPS	Pengembangan ternak sapi, tanaman buah-buahan, tanaman hortikultura, dan komoditi karet	Keberadaan jasa lingkungan (*carbon stock*), pengembangan lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta produksi arang	Pengembangan ekowisata (Gunung Boga, Air Terjun, dan *offroad*)	Pengembangan usaha pupuk organik menunjukkan upaya hilirisasi dan pemanfaatan limbah	Pengembangan tanaman kemiri
			Kerang Dayo						
		Muara Samu	Luan						

No	Nama Lanskap	Kecamatan	Desa	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Diversifikasi Usaha Ekonomi Produktif				
					Sektor Pertanian	Sektor Kehutanan & Jasa Lingkungan	Sektor Pariwisata	Inovasi Produk	Hasil Hutan Non-Kayu
	Muara Samu)					kayu alaban dan budidaya lebah kelulut			
3	Lanskap Long Ikis (Kecamatan Long Ikis – Kecamatan Kuaro)	Kuaro	Modang	8 KUPS	Pengembangan ternak sapi, tanaman obat, tanaman pangan, aren dan buah-buahan	Keberadaan jasa lingkungan (*carbon stock*) dan Agroforestri	Pengembangan ekowisata	Pengembangan madu	
			Semuntai						
		Long Ikis	Lombok						

Melalui *Integrated Area Development* (IAD), pengelolaan kawasan ini diarahkan untuk mengintegrasikan potensi kehutanan dengan sektor-sektor lain seperti pertanian terpadu, peternakan, agroforestri, jasa lingkungan, dan ekowisata. Pendekatan ini didesain untuk:

- Menguatkan peran masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi lokal berbasis sumber daya alam;
- Mendorong diversifikasi ekonomi desa;
- Menurunkan tekanan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak lestari;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan modal sosial masyarakat desa;
- Mengurangi ketimpangan akses dan memperkuat keadilan sosial-ekologis.

Lebih lanjut, strategi pengembangan kawasan ini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Kabupaten Paser pasca ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti batu bara. Dengan *Integrated Area Development* (IAD), kawasan hutan bukan hanya sebagai sumber bahan baku, tetapi juga sebagai basis pengembangan ekonomi hijau yang mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan penguatan ketahanan iklim melalui pengurangan emisi deforestasi, degradasi hutan, serta peningkatan stok karbon hutan.

Sejalan dengan arah dan kebijakan integrasi terhadap pengunaan perhutanan sosial dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat di sekitar hutan, maka memungkinkan intervensi dari pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah untuk membantu pengembangan usahatani berupa sarana dan prasarana pertanian. Diharapkan dari intervensi ini dapat meningkatkan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bertujuan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dan menciptakan peluang kerja baru dan pemenuhan ketahanan pangan daerah.

Kabupaten Paser melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029 menetapkan strategi menyeluruh untuk mengatasi berbagai persoalan ketahanan pangan dan gizi yang bersifat kompleks dan multidimensi. Strategi ini dirancang dengan pendekatan multisektor yang menekankan sinergi lintas organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, masyarakat, hingga dunia akademik, dengan tujuan akhir: mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing melalui pemenuhan pangan yang cukup, bergizi, dan aman.

Tujuan utama dari RAD-PG Kabupaten Paser adalah menjamin ketersediaan dan kualitas pangan serta pemenuhan gizi sebagai prasyarat hidup sehat dan produktif. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah hilangnya seluruh desa dengan status rawan pangan prioritas 1, 2, dan 3 pada akhir tahun 2029. Berdasarkan indeks komposit ketahanan pangan tahun 2024, terdapat delapan desa yang termasuk ke dalam kategori tersebut, yaitu:

- Prioritas 1: Rantau Layung (Kec. Batu Sopang);
- Prioritas 2: Rantau Buta (Batu Sopang), Keladen (Tanjung Harapan), Kayungo Sari (Long Ikis), Makmur Jaya (Long Kali);
- Prioritas 3: Mendik, Muara Pias, dan Muara Toyu (Long Kali).

Penurunan jumlah desa rawan pangan akan difokuskan pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Berikut ini adalah strategi

dalam RAD-PG yang dibangun di atas empat pilar utama yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan lokal.

Tabel III.16.
Strategi dan Aksi Utama RAD-PG Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

No	Strategi	Aksi
1	**Tujuan Strategis: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman**	
1.1	Peningkatan produksi pangan	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani/ikan, dan pangan lokal
		Penyuluhan dan Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
		Perbaikan penggunaan varietas tanaman
		Sosialisasi pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
		Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
		Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi/fortifikasi
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten
1.2	Luas lahan	Peningkatan luas lahan (Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk)
		Pengembangan lahan sawah
		Optimalisasi penggunaan lahan
		Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
		Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
		Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
1.3	Penguatan kelembagaan bagi petani	Kredit untuk ketahanan pangan
		Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
1.4	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Menguatkan kapasitas keamanan pangan asal tumbuhan
		Penguatan kapasitas pengawasan keamanan pangan asal hewan
		Penguatan produksi pangan asal hewan

No	Strategi	Aksi
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah
		Peningkatan produksi ikan budidaya (ton)
1.5	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan
		Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes) terutama desa prioritas 1,2 dan 3
1.6	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern (*smart farming*) untuk mengurangi *food loss*
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss
2	**Tujuan Strategis: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman**	
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai *early warning system* (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribuskan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
2.3	Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan	Peningkatan jumlah desa yang memiliki BUMDes aktif dan produktif.
		Peningkatan sarana pendukung perekonomian yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah perdesaan (Pasar desa,toko pangan, koperasi, BUMDes).
2..4	Mendorong tumbuh dan berkembang nya pusat-pusat	Peningkatan pelaku usaha/UMKM baru yang tumbuh di wilayah strategis dan cepat tumbuh

No	Strategi	Aksi
	agrobisnis dan agroindustri	
2..5	Pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota dan daerah terisolir	Peningkatan dan pemerataan Desa yang Terjangkau Jalan Beraspal atau Jalan Layak
		Peningkatan Cakupan Layanan Internet atau Telekomunikasi
2.6	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Pengadaan Beras fortifikasi dalam bantuan pangan
		Pemanfaatan pangan lokal dalam bantuan pangan
2.7	Penyediaaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal
		Mendampingi desa rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
2.8	Pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan *supply chain ecosystem* berdasarkan kondisi daerah
3	**Tujuan Strategis : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi**	
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3.	Peningkatan pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	Gerakan diversifikasi konsumsi pangan serta Edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA
		Peningkatan ketersedian pangan beragam pada rumah tangga
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Edukasi dan sosialisasi gerakan makan ikan “Gemari”
		Edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan hewani
		Edukasi dan sosialisasi konsumsi umbi-umbian

No	Strategi	Aksi
		Edukasi dan sosialisasi sayur dan buah
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji
		Meningkatkan Sosialiasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah
3.5	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif	Promosi ASI Esklusif dan Menyusui 0-24 bulan
3.6	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan konsumsi TTD pada remaja Putri
		Perbaikan gizi balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB
		Perbaikan gizi anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U
		Perbaikan gizi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
		Perbaikan gizi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)
		Keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)
3.7	Pengendalian pemborosan pangan (food waste);	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi *food waste*
3.8	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Melaksanakan pengawasan mutu dan kemanan pangan secara kontiniu
3.9	Pelaksanaan makan bergizi	Siswa PAUD/SD/SMP/SMA sederajat mendapat makan bergizi
		Ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
		Anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
		Ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
		Ibu hamil, ibu menyusui dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik
		Siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik
		Petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan
4	**Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi**	
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan,	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev

No	Strategi	Aksi
	pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting
		Mengintegrasikan RAD-PG penurunan stunting dan makan bergizi gratis (MBG)
		Memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan RAD- PG
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, *food loss* dan *food waste*.
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini
4.4	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan *food loss* dan *food waste* termasuk inovasi smart farming
		Melakukan kajian strategi *food coping* dalam peningkatan ketahanan pangan
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro pada masyarakat
		Mengembangkan *community based* data untuk pemetaan dan evaluasi masalah ketahananan pangan dan gizi
		Melakukan penelitian status gizi anak sekolah (PAUD, SD, SMP dan SMA sederajat) mendukung outcome program makan bergizi gratis (MBG)
		Menyelenggarakan forum daerah penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala
		Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku

No	Strategi	Aksi
		makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting
4.5	Penguatan RAD-PG dengan Lintas Sektor	Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak

Melalui pendekatan RAD-PG yang menyeluruh dan berbasis data, Kabupaten Paser menargetkan transformasi sistem pangan dan gizi menuju kondisi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sehingga menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masyarakat Paser yang sehat, produktif, dan berdaya saing dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

2025-2029

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah di Kabupaten Paser untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia, sementara belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang harus dialokasikan guna membiayai berbagai program pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk mendukung pembangunan daerah, sedangkan pagu indikatif berfungsi sebagai gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk mendukung penyusunan program dan kegiatan tahunan oleh Perangkat Daerah.

4.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penyusunan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser. Meskipun demikian sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi, hibah dan bantuan serta kerja sama pihak ketiga dapat mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan. Sinergi dengan berbagai sumber pendanaan lain ini mendorong hasil yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Paser. Dengan perencanaan yang matang dan terarah, diharapkan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Paser. Selain itu, kerangka pendanaan yang jelas juga akan menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1.
Program Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026-2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.897.088.352.989**		**2.979.614.983.323**		**3.012.900.922.069**		**3.056.947.888.810**		**3.077.072.163.755**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**892.735.082.080**		**909.979.497.796**		**914.979.478.284**		**928.358.340.706**		**936.018.933.642**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**892.735.082.080**		**909.979.497.796**		**914.979.478.284**		**928.358.340.706**		**936.018.933.642**	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				550.841.536.849		558.548.253.722		566.287.959.242		570.803.335.727		577.348.486.017	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				324.609.349.103		334.073.117.786		331.259.146.134		340.079.316.283		341.131.971.620	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	76,55	79,59		82,63		85,6		88,56		91,53		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Proporsi Jumlah PAUD Terakreditasi minimal B	60,55	71,52		86,14		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akses pengelolaan Pendidikan Non formal (PNF)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	23,17	31,36		35,46		39,56		43,66		47,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,95	99,97		99,97		99,98		99,99		99,99		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Skor kemampuan literasi SD/MI	61,71	66,71		69,21		71,71		74,21		76,71		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Skor kemampuan numerasi SD/MI	52,83	58,63		61,53		64,43		67,22		70,23		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan Menengah (SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	97,39	98,16		98,55		98,94		99,33		99,61		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTS	0,28	0,28		0,25		0,2		0,15		0,15		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Skor kemampuan literasi SMP/MTS	71,23	73,43		74,53		74,53		75,63		77,83		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Skor kemampuan Numerasi SMP/MTS	61,7	64,7		66,2		66,2		67,7		70,7		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya tenaga pendidik yang kompeten	Persentase Guru Bersertifikasi	70	70,7		71,41		72,12		72,84		73,57		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	69,79	67,04		67,79		68,54		69,29		70,04		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1.771.355.428		1.796.138.117		1.821.026.889		1.835.547.103		1.856.594.512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal tentang karateristik daerah	Persentase kurikulum muatan lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				2.906.414.900		2.947.077.986		2.987.915.130		3.011.739.691		3.046.273.983	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya pemerataan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks distribusi guru	70	72		74		76		78		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				356.425.800		361.412.484		366.420.514		369.342.219		373.577.304	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kelayakan perizinan satuan pendidikan PAUD dan PNF	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin	86,9	92,9		95,9		98,9		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kelayakan perizinan satuan pendidikan SD	Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki izin	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				250.000.000		253.497.701		257.010.375		259.059.683		262.030.206	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	56,87	62,70		65,83		69,13		72,58		76,21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**598.291.548.212**		**606.494.239.304**		**614.732.042.064**		**619.538.010.555**		**626.504.381.171**	
	DINAS KESEHATAN				**598.291.548.212**		**606.494.239.304**		**614.732.042.064**		**619.538.010.555**		**626.504.381.171**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				440.422.199.518		449.775.842.645		458.816.854.656		461.297.445.178		466.840.941.340	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				108.871.010.841		107.202.422.252		105.879.360.701		107.901.454.670		108.884.711.439	Dinas Kesehatan
		Persentase merokok	N/A	9		5		4		3		2		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penduduk 10 - 21 tahun												
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	persentase kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	9,68	9,33		9,15		8,98		8,81		8,65		Dinas Kesehatan
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	60,90	80,00		85,00		90,00		93,00		95,00		Dinas Kesehatan
		Angka keberhasilan pengobatan TB	84	86		86,34		86,67		87		87,33		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lansia	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	57,10	59,00		60,00		61,00		62,00		63,00		Dinas Kesehatan
		Persentase Usia Lanjut yang Mandiri	91,37	92,7		93,4		94,1		94,8		95,5		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	2,20	1,80		1,60		1,40		1,20		1,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	0	40		50		60		65		70		Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting	12,40	10,60		9,70		8,90		8,20		7,70		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal lengkap K6	81,77	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	28	25		24		23		21,5		20		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Faskes telah menerapkan sistem rujukan terpadu	28,57	38,09		52,38		61,9		71,43		77,27		Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat kesehatan diatas 70 persen	23,80	33,30		38,10		47,60		57,10		66,70		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemenuhan Perbekalan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan perbekalan kesehatan (obat dan BMHP) sesuai standar	90	90		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				28.185.842.853		28.580.185.502		28.976.216.137		29.207.262.061		29.542.168.863	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemerataan kuantitas dan kompetensi SDM kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan (PKM/RSUD) dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar	95	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50	50		66,6		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1.050.000.000		1.064.690.346		1.079.443.574		1.088.050.669		1.100.526.866	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di pemerintah daerah	Persentase Pengelola Kefarmasian dan Pangan taat Ketentuan BPOM	N/A	70		75		80		85		90		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				19.762.495.000		19.871.098.559		19.980.166.996		20.043.797.977		20.136.032.663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	48,54	52,80		57,10		61,40		65,70		70,00		Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.267.624.581.156**		**1.322.599.367.875**		**1.340.533.777.229**		**1.365.162.744.740**		**1.368.872.548.047**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				**1.267.624.581.156**		**1.322.599.367.875**		**1.340.533.777.229**		**1.365.162.744.740**		**1.368.872.548.047**	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.451.437.031		43.045.366.835		43.641.838.959		43.989.823.284		44.494.235.201	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				158.206.599.600		159.020.956.821		169.838.799.903		170.315.932.969		171.007.549.190	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya pengelolaan Kawasan Sumber Daya air	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	73	76		78		81		85		88		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota		5,03		6,29		9,44		12,58		15,10		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				147.772.400.000		148.440.774.363		149.112.009.706		154.503.611.205		154.071.247.298	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan layanan air minum layak Perpipaan*	87,17	88,17		88,67		89,17		89,67		90,17		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				18.000.000.000		18.251.834.501		18.504.746.982		18.652.297.178		18.866.174.849	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi baik	Persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi baik	80	86		86,59		87		87,5		88		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6.226.693.333		6.313.809.789		6.401.299.148		6.452.340.804		6.526.326.953	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak*	93,61	94,89		96,17		97,45		98,72		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				76.141.502.000		76.507.242.673		76.874.548.902		82.088.836.887		81.399.452.642	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	80	86		86,25		87		88		90		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				162.241.759.007		160.845.373.176		162.381.338.137		168.277.426.502		168.576.328.829	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya bangunan gedung pemerintah yang berfungsi baik	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	80	93		94		95		96		97		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				651.653.286.185		705.174.118.397		708.710.021.553		715.772.882.202		718.763.049.917	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	46,43	51,15		55,86		60,57		65,28		70		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.543.224.000		2.578.805.753		2.614.539.813		2.635.387.213		2.665.606.037	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya Tenaga Terampil yang bersertifikat standar nasional	Persentase tenaga kerja konstruksi yang	21,36	35		42		48		55		62		Dinas Pekerjaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis												Umum dan Tata Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.387.680.000		2.421.085.567		2.454.634.126		2.474.206.496		2.502.577.131	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaran penataan ruangruang	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW	41,05	78,91		83,2		84,94		85,92		87,52		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**73.823.485.061**		**74.856.335.091**		**75.893.606.242**		**76.498.754.557**		**77.375.932.063**	
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				**73.823.485.061**		**74.856.335.091**		**75.893.606.242**		**76.498.754.557**		**77.375.932.063**	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.641.618.146		12.818.484.568		12.996.108.068		13.099.734.359		13.249.943.240	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3.315.611.530		3.587.172.683		4.260.889.951		4.346.107.750		4.476.490.983	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	62,99	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0	0		0		33		66		100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7.151.600.000		7.251.656.646		7.352.141.584		7.410.764.916		7.495.740.892	Dinas Perumahan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya penanganan Luasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	50,89	75		80		90		95		100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				9.004.059.770		9.206.959.364		9.258.449.624		9.475.448.627		9.643.231.187	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni.	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	93,63	93,78		94,04		94,3		94,56		94,82		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				41.710.595.615		41.992.061.830		42.026.017.015		42.166.698.905		42.510.525.761	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	58,33	68		71		74		77		80		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**63.537.423.975**		**64.426.363.724**		**65.319.108.584**		**65.839.939.660**		**66.594.897.231**	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**34.146.171.029**		**34.623.903.471**		**35.103.680.849**		**35.383.584.972**		**35.789.312.948**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.097.096.029		27.476.206.233		27.856.939.220		28.079.060.432		28.401.030.644	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.049.075.000		7.147.697.238		7.246.741.629		7.304.524.540		7.388.282.304	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan perkada	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kinerja penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Penanganan ganguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (IPM satlinmas)	80	85		90		95		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				**16.113.607.310**		**16.339.049.658**		**16.565.457.013**		**16.697.544.009**		**16.889.007.386**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.425.697.250		12.599.542.765		12.774.132.427		12.875.988.764		13.023.632.052	Dinas Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				3.687.910.060		3.739.506.893		3.791.324.586		3.821.555.245		3.865.375.334	Dinas Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase kelompok Relawan yang aktif	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemadam Kebakaran
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**13.277.645.636**		**13.463.410.595**		**13.649.970.722**		**13.758.810.679**		**13.916.576.897**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.798.319.536		9.935.405.920		10.073.079.103		10.153.398.213		10.269.822.755	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.479.326.100		3.528.004.675		3.576.891.619		3.605.412.466		3.646.754.142	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningktnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**13.076.232.505**		**13.259.179.533**		**13.442.909.666**		**13.550.098.592**		**13.705.471.601**	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS SOSIAL				**13.076.232.505**		**13.259.179.533**		**13.442.909.666**		**13.550.098.592**		**13.705.471.601**	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.774.854.517		9.911.612.607		10.048.956.090		10.129.082.851		10.245.228.580	Dinas Sosial
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama perangkat daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				384.562.270		389.942.606		395.345.973		398.498.319		403.067.724	Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas layanan pemberdayaan sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Komunitas adat terpencil	48	70		75		80		85		90		Dinas Sosial
		Persentase Potensi sumber Kesejahteraan sosial yang sesuai standar	42	50		58		67		75		83		Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.244.099.768		1.261.505.726		1.278.986.190		1.289.184.366		1.303.966.875	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan dasar hidupnya	99,4	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				881.864.700		894.202.698		906.593.508		913.822.359		924.300.757	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualitas layanan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	0,07	4,01		4,23		4,45		4,67		4,89		Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar dan kelompok rentan yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				790.851.250		801.915.896		813.027.905		819.510.697		828.907.665	Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas layanan penanganan korban bencana	Tingkat capaian standar pelayanan minimal penanganan bencana	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**316.804.992.593**		**318.859.571.148**		**306.854.005.229**		**301.350.799.834**		**321.014.713.052**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**30.337.737.354**		**30.762.186.740**		**31.188.452.986**		**31.437.138.490**		**31.797.614.303**	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**30.337.737.354**		**30.762.186.740**		**31.188.452.986**		**31.437.138.490**		**31.797.614.303**	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.331.959.320		12.504.493.366		12.677.765.945		12.778.853.890		12.925.383.376	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				212.660.300		215.635.589		218.623.614		220.366.840		222.893.689	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				4.898.172.610		4.966.701.991		5.035.524.712		5.075.676.175		5.133.876.717	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja di sektor prioritas	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja	91,45	91,60		91,65		92,00		94,00		95,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.652.887.834		1.676.013.066		1.699.237.287		1.712.786.393		1.732.426.160	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya Pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	51,15	51,75		52		52,5		53		55		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				11.242.057.290		11.399.342.728		11.557.301.428		11.649.455.192		11.783.034.361	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	75	77		80		82		85		87		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**14.922.435.547**		**15.131.212.442**		**15.340.883.009**		**15.463.205.690**		**15.640.515.457**	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA				**14.922.435.547**		**15.131.212.442**		**15.340.883.009**		**15.463.205.690**		**15.640.515.457**	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.257.741.889		13.443.228.379		13.629.508.845		13.738.185.645		13.895.715.366	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya Dukungan manajemen internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kinerja manajemen internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Berencana. PPPA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				630.461.751		639.282.419		648.140.844		653.308.885		660.800.091	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD	20	20		20		20		23,3		23,3		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		persentase perempuan menduduki jabatan profesional	54	54		56		56,2		56,4		56,8		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		Pengeluaran Perkapita Perempuan(ribu rupiah/tahun)	3.386	3.533		3.649		3.765		3.882		4000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				113.026.207		114.607.535		116.195.631		117.122.133		118.465.121	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan terhadap kekerasan	Rasio KDRT	6,024	5,5		5,1		4,92		4,64		4,36		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				108.319.800		109.835.281		111.357.250		112.245.172		113.532.238	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya kualitas layanan lembaga pemberdayaan perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang sesuai standar	N/A	10		20		30		40		50		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya layanan pusat pembelajaran keluarga	Persentase layanan pusat pembelajaran keluarga sesuai NSPK	100	100		100		100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				11.162.000		11.318.165		11.474.999		11.566.497		11.699.125	Dinas Pengendalian Penduduk,

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data gender dan anak	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan data gender dan anak	76,09	78,26		80,43		82,60		84,78		86,96		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				353.318.900		358.262.116		363.226.492		366.122.729		370.320.897	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Nilai Evaluasi kabupaten layak anak	600	600		650		650		700		700		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				448.405.000		454.678.547		460.978.948		464.654.629		469.982.619	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	40	42		44		46		48		50		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**15.523.929.650**		**15.741.121.932**		**15.959.243.907**		**16.086.497.179**		**16.270.953.950**	
	DINAS KETAHANAN PANGAN				**15.523.929.650**		**15.741.121.932**		**15.959.243.907**		**16.086.497.179**		**16.270.953.950**	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.508.402.918		8.627.442.329		8.746.991.290		8.816.736.652		8.917.834.285	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				1.498.338.200		1.519.301.159		1.540.353.849		1.552.636.077		1.570.439.470	Dinas Ketahanan Pangan
	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	55	60		65		70		80		90		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN				2.900.153.250		2.940.728.730		2.981.477.894		3.005.251.127		3.039.711.017	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Ketersediaan	98,17	99,08		99,31		99,54		99,77		100		Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Konsumsi	87	91,7		93,8		95,9		97,9		100		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				2.043.435.282		2.072.024.588		2.100.736.270		2.117.486.786		2.141.767.073	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Penanganan Desa Rawan Pangan	Persentase penanganan desa rawan pangan	17,36	100		100		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan
	Terwujudnya Penyaluran Cadangan Pangan	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				573.600.000		581.625.126		589.684.604		594.386.537		601.202.105	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnyan Keamanan Pangan Segar yang diuji	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	84,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		Dinas Ketahanan Pangan
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**21.076.782.000**		**21.371.663.161**		**21.667.806.561**		**21.840.577.857**		**22.091.014.136**	
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				**21.076.782.000**		**21.371.663.161**		**21.667.806.561**		**21.840.577.857**		**22.091.014.136**	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				349.600.000		354.491.186		359.403.308		362.269.061		366.423.040	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat	71,43	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				20.218.262.000		20.501.131.774		20.785.212.373		20.950.946.180		21.191.181.446	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	77,78	27,27		45,45		63,64		81,82		100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				508.920.000		516.040.201		523.190.880		527.362.616		533.409.650	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														dan Pertanahan
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	N/A	25,00		44,00		63,00		81,00		100,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**49.679.620.434**		**50.374.678.347**		**51.072.711.460**		**51.479.946.888**		**52.070.244.752**	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**49.679.620.434**		**50.374.678.347**		**51.072.711.460**		**51.479.946.888**		**52.070.244.752**	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.368.947.580		30.793.833.623		31.220.538.393		31.469.479.735		31.830.326.390	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				588.696.400		596.932.737		605.204.329		610.030.011		617.024.956	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya integrasi RPPLH dalam Rencana pembangunan daerah	Persentase rekomendasi RPPLH menjadi kebijakan terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah	51,85	55,56		55,56		59,26		59,26		62,96		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.043.382.958		2.071.971.532		2.100.682.479		2.117.432.566		2.141.712.232	Dinas Lingkungan Hidup
	Terkendalinya kualitas air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dari ancaman pencemaran dan kerusakan	Persentase titik pantau kualitas air sungai/danau yang memenuhi baku mutu air	10	15		20		25		30		35		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase titik pantau kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu udara ambien	60	70		80		80		90		90		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Rehabilitasi Lahan	0,001	0,002		0,003		0,004		0,005		0,006		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penurunan emisi GRK Kumulatif	10,28	14,09		15,65		17,4		18,98		20,75		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penurunan emisi GRK Tahunan	6,51	18,99		27,1		34,63		42,46		48,21		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.984.678.359		3.026.436.414		3.068.373.214		3.092.839.318		3.128.303.544	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlindunginya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kabupaten Paser.	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan	0,475	2,475		4,475		6,475		8,475		10,475		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Konservasi yang Terkelola Efektif												
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				138.953.136		140.897.202		142.849.590		143.988.621		145.639.676	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengendalian pengelolaan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Paser	Persentase pelaporan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), agroindustri dan/atau industri yang tercatat dan terkelola sesuai standar	7,93	23,81		31,75		39,68		47,62		55,56		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Limbah B3 yang terkelola	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				183.795.800		186.367.251		188.949.710		190.456.327		192.640.206	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	91,67	93,75		93,75		96,88		96,88		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				34.164.000		34.641.982		35.122.010		35.402.060		35.808.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan wilayah kelola adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui keberadaannya dan wilayah kelolanya	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				225.170.400		228.320.715		231.484.516		233.330.290		236.005.785	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya aktivitas dan praktik pengelolaan lingkungan hidup pada kelompok masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	48,50	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				35.898.250		36.400.495		36.904.891		37.199.157		37.625.703	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pertumbuhan dan berkembangnya inisiatif dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	56,00	64,00		68,00		72,00		76,00		80,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				178.252.000		180.745.889		183.250.453		184.711.626		186.829.633	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait isu Lingkungan dan PPLH	Persentase penurunan kasus pengaduan isu lingkungan	25,93	25,00		24,00		23,00		22,00		21,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				12.897.681.551		13.078.130.507		13.259.351.875		13.365.077.177		13.518.328.627	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	61,58	63,58		65,22		66,86		68,50		70		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah di sumber (rumah tangga, pasar, perkantoran) melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang terfasilitasi	13,53	15,00		18,00		20,00		25,00		30,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**15.432.673.851**		**15.648.589.391**		**15.865.429.158**		**15.991.934.383**		**16.175.306.848**	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**15.432.673.851**		**15.648.589.391**		**15.865.429.158**		**15.991.934.383**		**16.175.306.848**	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.236.760.225		12.407.962.359		12.579.897.324		12.680.204.900		12.825.603.222	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				271.815.975		275.618.899		279.438.102		281.666.241		284.895.984	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk yang cepat dan tepat	Cakupan layanan pendaftaran penduduk	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen KK, KTP dan KIA	60	60		50		45		40		30		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				188.710.000		191.350.205		194.001.711		195.548.611		197.790.881	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya cakupan pendaftaran pencatatan sipil yang cepat dan tepat	Cakupan layanan pendaftaran pencatatan sipil	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil	30 Menit	30 Menit		27 Menit		25 Menit		22 Menit		20 Menit		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.570.471.251		2.606.434.215		2.642.551.118		2.663.621.870		2.694.164.448	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya pengguna data kependudukan	Persentase instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan	39,02	39,02		41,46		43,90		46,43		48,78		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				164.916.400		167.223.713		169.540.903		170.892.761		172.852.313	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat dan termutakhirkan secara berkala	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**21.334.829.901**		**21.633.321.362**		**21.933.090.516**		**22.107.977.092**		**22.361.479.524**	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**21.334.829.901**		**21.633.321.362**		**21.933.090.516**		**22.107.977.092**		**22.361.479.524**	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.273.991.809		11.431.724.037		11.590.131.439		11.682.546.978		11.816.505.595	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama perangkat daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				182.479.500		185.032.536		187.596.501		189.092.328		191.260.566	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang memiliki rancangan perbaturan bupati batas desa	3.60	5.76		7.91		10.07		12.23		14.39		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Desa	Persentase sarana dan prasarana desa yang berfungsi dengan baik	0	20		25		30		35		40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				516.250.000		523.472.753		530.726.423		534.958.245		541.092.376	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Pendapatan Asli Desa bersumber dari Kerjasama desa	Rata-rata Persentase pertumbuhan PADes yang bersumber dari kerjasama Desa	2.94	4.41		5.88		7.35		8.82		10.29		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				6.558.267.316		6.650.022.760		6.742.170.963		6.795.930.611		6.873.856.553	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya akuntabilitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas pembinaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menerapkan Administrasi pemerintahan Desa sesuai ketentuan	7.19	10.79		14.39		17.99		21,58		25.18		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Bumdes/Bumdes Bersama	Persentase Bumdes berstatus maju	N/A	2,88		4,32		7,19		10,79		14,39		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.803.841.276		2.843.069.276		2.882.465.190		2.905.448.930		2.938.764.434	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa	Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	5.18	15.23		30.22		50.21		75.26		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**2.054.277.296**		**2.083.018.290**		**2.111.882.311**		**2.128.721.700**		**2.153.130.814**	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA				**2.054.277.296**		**2.083.018.290**		**2.111.882.311**		**2.128.721.700**		**2.153.130.814**	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				811.748.596		823.105.613		834.511.243		841.165.336		850.810.608	Dinas Pengendalian Penduduk,

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Keluarga Berencana. PPPA
	Menurunnya angka kelahiran pada remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	24,60	19,00		17,60		16,70		16,10		15,70		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				598.584.000		606.958.672		615.369.193		620.275.925		627.388.356	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana serta penguatan kelembagaan kampung keluarga berkualitas secara berkelanjutan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	8,30	25,50		27,90		29,10		29,60		29,80		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	80,70	81,70		82,30		82,80		83,30		83,80		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	12,10	10,80		10,20		9,70		9,20		8,80		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				643.944.700		652.954.005		662.001.875		667.280.439		674.931.850	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Meningkatnya kapasitas keluarga dalam pengasuhan remaja dan pemberdayaan lansia secara berkelanjutan	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	87,70	88,90		89,50		90,00		90,50		91,00		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		Indeks Lansia Berdaya	57,00	58,70		59,50		60,30		61,10		61,90		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**32.268.835.027**		**32.720.302.026**		**33.173.701.532**		**33.438.216.694**		**33.821.637.988**	
	DINAS PERHUBUNGAN				**32.268.835.027**		**32.720.302.026**		**33.173.701.532**		**33.438.216.694**		**33.821.637.988**	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.048.008.701		21.342.487.300		21.638.226.416		21.810.761.849		22.060.856.243	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah													
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.710.762.226		8.832.632.807		8.955.025.056		9.026.429.205		9.129.931.290	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Lalu Lintas yang aman, tertib dan lancar	Rasio Konektivitas Darat	0,83	0,83		0,83		0,93		0,93		1,00		Dinas Perhubungan
		Rasio Volume Terhadap Kapasitas (V/C Ratio)	0,168	0,166		0,165		0,164		0,163		0,162		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi dengan baik	45,83	53,4		57,24		60,73		64,11		66,94		Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.510.064.100		2.545.181.919		2.580.450.060		2.601.025.640		2.630.850.455	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas layanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio Konektivitas SDP (sungai, danau, penyebrangan)	0,95	0,95		0,95		1,00		1,00		1,00		Dinas Perhubungan
		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran yang berfungsi dengan baik	72,55	80,39		84,31		88,24		94,12		100		
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**23.958.100.220**		**24.293.293.343**		**24.629.921.263**		**24.826.311.395**		**25.110.983.767**	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**23.958.100.220**		**24.293.293.343**		**24.629.921.263**		**24.826.311.395**		**25.110.983.767**	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.074.056.958		11.228.991.936		11.384.590.115		11.475.366.741		11.606.949.714	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.839.084.135		3.892.796.015		3.946.737.809		3.978.207.676		4.023.824.031	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi public	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	N/A	60		65		70		75		80		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pemerintah daerah (survey)												
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				9.044.959.127		9.171.505.392		9.298.593.339		9.372.736.978		9.480.210.022	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya kualitas pembangunan/pengembangan aplikasi	Tingkat Kematangan pembangunan/ pengembangan aplikasi	1,50	2,00		2,50		3,00		3,50		4,00		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya kualitas layanan jaringan intra pemerintah	Tingkat Kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah	1,50	2,50		3,00		3,50		4,00		4,50		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.756.601.449**		**6.851.131.746**		**6.946.066.682**		**7.001.452.120**		**7.081.734.684**	
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**6.756.601.449**		**6.851.131.746**		**6.946.066.682**		**7.001.452.120**		**7.081.734.684**	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				300.000.000		304.197.242		308.412.450		310.871.620		314.436.247	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	65	70		75		85		87		90		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				134.996.686		136.885.398		138.782.195		139.888.795		141.492.838	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	67	68		69		69,5		70		71		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				664.996.686		674.300.525		683.644.190		689.095.323		696.996.875	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang berkompeten	60	65		70		75		80		85		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1.622.196.686		1.644.892.525		1.667.685.513		1.680.983.037		1.700.258.129	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya omzet Koperasi	Persentase peningkatan omzet koperasi	10,96	17,10		17,15		17,20		17,25		17,30		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				623.128.554		631.846.624		640.602.013		645.709.943		653.114.014	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya daya saing, produktivitas, dan kemandirian pelaku UMKM	Persentase kenaikan omzet UMKM	10	12		13		14		15		16		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				3.411.282.837		3.459.009.432		3.506.940.321		3.534.903.402		3.575.436.581	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya UMKM yang naik Kelas	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	0,01	0,03		0,04		0,05		0,06		0,07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**15.089.211.115**		**15.300.321.335**		**15.512.335.213**		**15.636.024.993**		**15.815.316.402**	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**15.089.211.115**		**15.300.321.335**		**15.512.335.213**		**15.636.024.993**		**15.815.316.402**	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.310.140.965		10.454.388.143		10.599.252.772		10.683.767.401		10.806.273.454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.335.551.731		1.354.237.176		1.373.002.604		1.383.950.432		1.399.819.582	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	56	90		91		92		93		94		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				732.000.000		742.241.270		752.526.377		758.526.752		767.224.444	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	15	17		19		21		23		25		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.887.108.633		1.913.510.803		1.940.025.988		1.955.495.057		1.977.917.857	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	90,00	95,00		95,50		96,00		96,50		97,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				619.150.632		627.813.048		636.512.544		641.587.866		648.944.671	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kepatuhan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban laporan penanaman modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu	73	80		85		90		95		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				205.259.154		208.130.895		211.014.928		212.697.485		215.136.394	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	80	85		87		90		95		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**47.144.318.958**		**45.426.127.442**		**29.631.642.083**		**21.917.965.288**		**38.377.745.338**	
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				**47.144.318.958**		**45.426.127.442**		**29.631.642.083**		**21.917.965.288**		**38.377.745.338**	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.124.808.345		12.294.444.182		12.464.806.146		12.564.196.026		12.708.264.125	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				4.360.212.900		4.421.215.791		4.482.479.806		4.518.221.487		4.570.029.942	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,91	0,93		0,94		0,95		0,96		0,97		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Rasio wirausaha pemuda	11,21	11,23		11,24		11,25		11,26		11,27		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				30.659.297.713		28.710.467.469		12.684.356.131		4.835.547.775		21.099.451.271	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	74	78		80		82		83		85		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	Persentase atlet berprestasi dari olahraga yang dibina	27,49	27,83		28		28,08		28,16		28,25		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**497.232.085**		**504.188.762**		**511.175.218**		**515.251.145**		**521.159.303**	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**497.232.085**		**504.188.762**		**511.175.218**		**515.251.145**		**521.159.303**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				497.232.085		504.188.762		511.175.218		515.251.145		521.159.303	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya kualitas, konsistensi, dan pemuktahiran data sectoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Data Sektoral yang dimanfaatkan	75	80		85		90		95		100		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**198.011.400**		**200.781.739**		**203.563.936**		**205.187.082**		**207.539.872**	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				198.011.400		200.781.739		203.563.936		205.187.082		207.539.872	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya pengamanan dokumen dan informasi pemerintah melalui implementasi sitem persandia yang handal dan terstandar	Persentase jumlah insiden keamanan informasi yang berhasil ditangani melalui sistem persandian	20	30		40		50		60		70		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.881.949.000**		**2.922.269.788**		**2.962.763.170**		**2.986.387.178**		**3.020.630.764**	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**2.881.949.000**		**2.922.269.788**		**2.962.763.170**		**2.986.387.178**		**3.020.630.764**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				525.000.000		532.345.173		539.721.787		544.025.334		550.263.433	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	58	60		62		64		66		68		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				909.660.000		922.386.876		935.168.230		942.624.925		953.433.590	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	97	97,87		97,97		98,00		98,10		98,10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				595.000.000		603.324.529		611.684.692		616.562.046		623.631.891	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	19	20		21		22		23		24		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				66.224.000		67.150.527		68.081.020		68.623.874		69.410.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Pelestarian Cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	41	42		43		44		45		46		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				786.065.000		797.062.683		808.107.441		814.550.999		823.891.096	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Pengelolaan museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Museum	14	16		18		20		22		24		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.573.657.307**		**3.623.655.652**		**3.673.868.015**		**3.703.162.117**		**3.745.624.645**	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				**3.573.657.307**		**3.623.655.652**		**3.673.868.015**		**3.703.162.117**		**3.745.624.645**	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				3.422.730.039		3.470.616.790		3.518.708.520		3.546.765.436		3.587.434.632	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar	Tingkat Kunjungan Perpustakaan	5,98	6,50		7,00		7,25		7,50		7,75		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya mutu tata Kelola dan layanan perpustakaan sesuai standard	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	8,05	8,50		9,00		9,50		10,00		10,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				150.927.268		153.038.862		155.159.495		156.396.681		158.190.013	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	5,13	10,26		15,38		20,51		25,64		30,77		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		yang Dipelihara dan Dilestarikan												
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**14.074.789.999**		**14.271.707.650**		**14.469.468.209**		**14.584.842.543**		**14.752.080.505**	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.935.850.154		12.102.842.313		12.270.549.284		12.368.390.230		12.510.213.110	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama OPD	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				696.625.621		706.371.975		716.160.048		721.870.450		730.147.821	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	26	29		31		33		35		37		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan penyusutan arsip pada perangkat daerah	Nilai Sub Aspek Penyusutan Arsip	11	14		16		18		20		22		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				999.203.024		1.013.182.679		1.027.222.175		1.035.412.875		1.047.285.498	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	Persentase Arsip Daerah Bernilai Penting (Nilai Guna Arsip) yang Diamankan	23,25	17		29		31		33		35		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				443.111.200		449.310.683		455.536.702		459.168.988		464.434.076	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	5,56	11		16		22		27		33		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**178.986.417.079**		**183.379.344.644**		**203.327.280.509**		**191.101.531.777**		**196.503.359.911**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**18.269.486.051**		**20.413.854.273**		**23.103.605.823**		**24.560.422.941**		**28.148.979.545**	
	DINAS PERIKANAN				**18.269.486.051**		**20.413.854.273**		**23.103.605.823**		**24.560.422.941**		**28.148.979.545**	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.209.532.361		9.338.381.138		9.467.781.453		9.543.274.137		9.652.702.656	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama OPD	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				4.323.561.392		6.272.814.893		6.359.736.193		7.683.043.716		11.078.074.851	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,61	0,65		0,68		0,70		0,72		0,75		Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				3.565.910.702		3.615.800.666		6.072.784.523		6.121.206.723		6.191.395.902	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi	1,02	1,05		1,08		1,10		1,12		1,13		Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perikanan Budidaya												
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				35.000.000		35.489.678		35.981.452		36.268.356		36.684.229	Dinas Perikanan
	Meningkatnya kepautuhan pelaku usaha perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	45,00	45,30		45,50		45,80		46,00		46,10		Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.135.481.596		1.151.367.898		1.167.322.202		1.176.630.009		1.190.121.907	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi OLahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	1,09	2,50		2,70		2,90		3,15		3,30		Dinas Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**7.543.524.312**		**7.649.064.294**		**7.755.056.041**		**7.816.892.069**		**7.906.524.925**	
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				**7.543.524.312**		**7.649.064.294**		**7.755.056.041**		**7.816.892.069**		**7.906.524.925**	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2.996.149.546		3.038.068.092		3.080.166.070		3.104.726.207		3.140.326.734	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungannya	36,36	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.702.396.566		1.726.214.465		1.750.134.318		1.764.089.259		1.784.317.293	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat hunian akomodasi pada destinasi pariwisata yang dipromosikan	17	19		20		23		24		25		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.619.978.200		1.642.643.000		1.665.404.817		1.678.684.156		1.697.932.887	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang mendapat Serifikat Hak Kekayaan Intelektual	20	22		24		26		28		30		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Serifikat Hak Kekayaan Intelektual	2	2		3		3		4		5		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.225.000.000		1.242.138.737		1.259.350.836		1.269.392.447		1.283.948.011	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif	75	80		83		85		87		90		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**114.969.110.267**		**116.577.620.742**		**133.193.016.456**		**119.135.445.054**		**120.405.136.731**	
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				**73.046.530.971**		**74.068.510.788**		**90.094.865.194**		**75.693.644.638**		**76.465.208.335**	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.019.619.190		25.369.663.819		25.721.206.816		25.926.298.467		26.223.583.905	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				14.831.931.635		15.039.442.308		15.247.841.231		15.369.422.032		15.545.656.421	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,02	1,14		1,20		1,26		1,32		1,38		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	1,10	2,50		3,20		3,90		4,60		5,30		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				26.628.545.346		27.001.100.148		27.375.249.673		27.593.530.067		27.813.550.950	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan prasarana tanaman pangan dan hortikultura	Persentase prasarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	85	86		87		88		89		90		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1.863.816.000		1.889.892.287		1.916.080.194		1.931.358.329		1.953.504.363	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80	82		83		84		85		86		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap pertanian	100	100		100		100		100		100		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.702.618.800		4.768.412.226		19.834.487.280		4.873.035.743		4.928.912.696	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kapasitas SDM Pertanian	85	86		87		88		89		90		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN				**41.922.579.296**		**42.509.109.954**		**43.098.151.262**		**43.441.800.416**		**43.939.928.396**	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.782.549.675		17.017.351.065		17.253.157.525		17.390.727.996		17.590.139.810	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5.510.075.220		5.587.165.611		5.664.585.989		5.709.753.360		5.775.224.585	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya pemanfatan Sarana Perkebunan dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi perkebunan	4	6		8		10		11		12		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase peningkatan produksi peternakan	4,82	5,63		6,10		6,52		6,92		7,35		Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				13.668.352.330		13.859.583.591		14.051.633.418		14.163.676.088		14.326.084.720	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya pemanfatan Prasarana Perkebunan dan Peternakan	Persentase prasarana Perkebunan yang dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase Prasarana Peternakan yang dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4.491.963.715		4.554.809.906		4.617.925.111		4.654.746.785		4.708.120.715	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Populasi Ternak yang Sehat	Persentase Populasi Ternak yang Sehat	94,95	94,98		95,00		95,03		95,05		95,08		Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				892.256.678		904.740.068		917.276.893		924.590.929		935.192.805	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				577.381.678		585.459.713		593.572.326		598.305.258		605.165.761	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Perizinan usaha Perkebunan	Persentase Rekomendasi Perizinan usaha Perkebunan yang diterbitkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**2.532.842.217**		**2.568.278.720**		**2.603.866.909**		**2.624.629.208**		**2.654.724.674**	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**2.532.842.217**		**2.568.278.720**		**2.603.866.909**		**2.624.629.208**		**2.654.724.674**	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				2.532.842.217		2.568.278.720		2.603.866.909		2.624.629.208		2.654.724.674	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengelolaan Tahura	Persentase Luasan Tahura yang dikelola dan berfungsi dengan Baik	80	82		83		84		85		86		Dinas Lingkungan Hidup
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**10.318.381.694**		**10.462.744.166**		**10.607.724.583**		**10.692.306.764**		**10.814.910.733**	
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**10.318.381.694**		**10.462.744.166**		**10.607.724.583**		**10.692.306.764**		**10.814.910.733**	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				198.884.690		201.667.247		204.461.715		206.092.019		208.455.185	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				7.292.527.180		7.394.555.510		7.497.020.573		7.556.799.119		7.643.449.604	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	11,00	11,50		12,00		12,50		13,00		14,00		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				775.988.680		786.845.387		797.748.566		804.109.526		813.329.895	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	58	60		62		63		64		65		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				278.884.690		282.786.511		286.705.035		288.991.118		292.304.851	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya produk ekspor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Produk Ekspor Daerah	4	5		6		7		8		10		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.187.358.794		1.203.970.900		1.220.654.114		1.230.387.171		1.244.495.479	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam transaksi perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50,85	52		54		56		58		60		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				584.737.660		592.918.611		601.134.580		605.927.811		612.875.719	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	15,00	17,50		18,00		18,50		19,00		19,50		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**24.492.229.078**		**24.834.895.095**		**25.179.027.895**		**25.379.796.406**		**25.670.815.345**	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.353.360.702		21.652.111.421		21.952.140.944		22.127.179.420		22.380.902.034	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama OPD	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.427.005.096		2.460.960.853		2.495.061.957		2.514.956.683		2.543.794.583	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya pertumbuhan industri baru sektor pengolahan	Persentase Pertumbuhan Industri Baru Sektor Pengolahan	2,50	3,00		3,50		4,00		4,50		5,00		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				411.863.280		417.625.579		423.412.544		426.788.683		431.682.481	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	50	55		60		65		70		80		Dinas Perindustrian, Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				300.000.000		304.197.242		308.412.450		310.871.620		314.436.247	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri Nasional	Persentase perusahaan yang terdata di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5	5		5		5		5		5		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**860.843.460**		**872.887.354**		**884.982.802**		**892.039.335**		**902.267.958**	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**860.843.460**		**872.887.354**		**884.982.802**		**892.039.335**		**902.267.958**	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				182.836.220		185.394.246		187.963.222		189.461.973		191.634.450	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang sesuai perencanaan	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun sesuai perencanaan	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				257.007.540		260.603.283		264.214.417		266.321.167		269.374.955	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	50	50		50		50		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				420.999.700		426.889.825		432.805.163		436.256.195		441.258.553	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**183.659.513.583**		**186.229.058.139**		**188.809.601.646**		**190.315.101.491**		**192.497.360.886**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**106.090.032.930**		**107.574.317.960**		**109.064.956.480**		**109.934.601.210**		**111.195.172.833**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**106.090.032.930**		**107.574.317.960**		**109.064.956.480**		**109.934.601.210**		**111.195.172.833**	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				80.898.444.761		82.030.279.177		83.166.958.417		83.830.101.827		84.791.344.660	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				20.365.436.783		20.650.365.651		20.936.514.158		21.103.454.390		21.345.438.401	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kinerja layanan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	50,00	50,89		51,91		52,95		54,01		55,09		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.826.151.386		4.893.673.132		4.961.483.905		5.001.044.993		5.058.389.772	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya tata kelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan	Tingkat kinerja pelayanan perekonomian dan pembangunan	19,00	20,00		21,40		22,90		24,50		26,20		Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**77.569.480.653**		**78.654.740.179**		**79.744.645.166**		**80.380.500.281**		**81.302.188.053**	
	SEKRETARIAT DPRD				**77.569.480.653**		**78.654.740.179**		**79.744.645.166**		**80.380.500.281**		**81.302.188.053**	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				55.083.836.421		55.854.503.669		56.628.469.764		57.080.004.812		57.734.516.071	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi Utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				22.485.644.232		22.800.236.510		23.116.175.402		23.300.495.469		23.567.671.982	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persentase dukungan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan perda yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
		persentase dukungan pelaksanaan fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**476.583.299.112**		**483.740.098.539**		**489.460.267.454**		**495.160.003.742**		**501.418.777.788**	
5.01	**PERENCANAAN**				**23.261.517.642**		**23.523.925.060**		**23.862.651.772**		**25.094.847.204**		**26.066.696.381**	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**23.261.517.642**		**23.523.925.060**		**23.862.651.772**		**25.094.847.204**		**26.066.696.381**	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.071.236.200		19.338.058.159		19.606.022.250		19.762.353.619		19.988.959.819	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama OPD	Nilai Kinerja Dukungan Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.645.024.733		1.605.000.000		1.640.000.000		2.695.000.000		3.410.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi pengendalian dan	87	90		95		97		99		100		Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		evaluasi ditindaklanjuti												dan Riset Daerah
		Tingkat efektifitas capaian program prioritas	93	93		94		95		96		97		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya kualitas penetapan target,alokasi anggaran, strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persentase kesesuaian capaian kinerja dan target RKPD dengan RPJMD	92,64	93		94		95		96		97		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.545.256.709		2.580.866.901		2.616.629.522		2.637.493.585		2.667.736.562	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya Konsistensi & Sinkronisasi Perencanaan bidang/urusan pemerintahan	persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	91,64	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya efektivitas implementasi Program dan Kegiatan	Tingkat kesesuaian target dengan realisasi kinerja program dan kegiatan	85	87		90		95		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
5.02	**KEUANGAN**				**432.522.008.654**		**438.573.340.005**		**444.650.574.117**		**448.196.057.848**		**453.335.324.518**	
	BADAN KEUANGAN ASET DAERAH				**409.261.851.556**		**414.987.754.571**		**420.738.167.348**		**424.092.982.149**		**428.955.869.472**	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				56.020.734.736		56.804.509.947		57.591.640.112		58.050.855.134		58.716.498.706	Badan Keuangan Aset Daerah
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Badan Keuangan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				349.152.432.820		354.037.356.641		358.943.190.408		361.805.274.291		365.953.935.919	Badan Keuangan Aset Daerah
	Meningkatnya perencanaan anggaran sesuai ketentuan	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20		20		20		20		20		Badan Keuangan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Indeks dimensi penyerapan anggaran	13,33	14		15		16		17		18		Badan Keuangan Aset Daerah
	meningkatnya implementasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis akrual dan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	Tingkat kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.088.684.000		4.145.887.983		4.203.336.828		4.236.852.724		4.285.434.847	Badan Keuangan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	meningkatnya tata Kelola asset daerah	Persentase penambahan nilai asset tetap	13,07	13,52		13,82		14,22		14,67		15,17		Badan Keuangan Aset Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				**23.260.157.098**		**23.585.585.434**		**23.912.406.769**		**24.103.075.699**		**24.379.455.046**	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.378.004.106		20.663.108.800		20.949.433.887		21.116.477.137		21.358.610.474	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.882.152.992		2.922.476.634		2.962.972.882		2.986.598.562		3.020.844.572	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya potensi pajak	tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	0,80	0,92		1,50		2,50		3,70		5,00		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya sumber penerimaan baru (ekstensifikasi pajak baru)	persentase peningkatan objek pajak baru	14,00	14,32		14,40		14,45		14,50		14,60		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dari objek pajak	persentase peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dari objek pajak	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Badan Pendapatan Daerah
	meningkatnya upaya intensifikasi pajak daerah	Persentase realisasi piutang pajak yang dibayarkan	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**14.591.630.116**		**14.795.778.777**		**15.000.801.297**		**15.120.412.291**		**15.293.791.394**	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**14.591.630.116**		**14.795.778.777**		**15.000.801.297**		**15.120.412.291**		**15.293.791.394**	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.315.486.756		10.459.808.726		10.604.748.467		10.689.306.917		10.811.876.488	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.276.143.360		4.335.970.051		4.396.052.830		4.431.105.374		4.481.914.906	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya konsistensi perencanaan kebutuhan administrasi pegawai sesuai dengan formasi	Rata-rata tingkat pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi Jabatan	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berdasarkan jenis Jabatan												
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase ASN yang pernah mendapatkan hukuman disiplin	1,10	1,00		0,90		0,80		0,70		0,60		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	92	60		65		70		75		80		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kualitas kinerja ASN	Persentase pegawai berkinerja baik	97,45	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**3.002.466.500**		**3.044.473.425**		**3.086.660.161**		**3.111.272.079**		**3.146.947.665**	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.002.466.500		3.044.473.425		3.086.660.161		3.111.272.079		3.146.947.665	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional ASN	Persentase ASN yang Naik Jenjang		75,00		75,00		78,00		80,00		80,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi Jabatan		52,00		55,00		57,00		60,00		60,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**3.205.676.200**		**3.802.581.272**		**2.859.580.107**		**3.637.414.320**		**3.576.017.830**	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**3.205.676.200**		**3.802.581.272**		**2.859.580.107**		**3.637.414.320**		**3.576.017.830**	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.705.676.200		3.295.585.869		2.345.559.358		3.119.294.954		3.051.957.418	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pemecahan Permasalahan Pembangunan Daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	50	70		75		80		85		90		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				500.000.000		506.995.403		514.020.749		518.119.366		524.060.412	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan riset potensi unggulan daerah	Persentase Rekomendasi	10	15		25		30		35		40		Badan Perencanaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dalam perencanaan pembangunan daerah	Kebijakan Pembangunan Daerah (dari kajian/ riset/ penelitian produk unggulan daerah) yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah												Pembangunan dan Riset Daerah
	Meningkatnya inisiasi dan implementasi inovasi dan Invensi	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	75	78		80		85		90		95		Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**28.924.951.060**		**29.329.634.428**		**29.736.050.046**		**29.973.154.613**		**30.316.843.566**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**28.924.951.060**		**29.329.634.428**		**29.736.050.046**		**29.973.154.613**		**30.316.843.566**	
	INSPEKTORAT KABUPATEN				**28.924.951.060**		**29.329.634.428**		**29.736.050.046**		**29.973.154.613**		**30.316.843.566**	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.791.557.151		25.138.411.008		25.486.749.576		25.689.971.749		25.984.547.333	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Inspektorat Kabupaten
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.545.972.323		2.581.592.527		2.617.365.203		2.638.235.132		2.668.486.611	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Tindaklajut hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Pemerintah dan Desa yang Ditindak Lanjuti	50	50		55		60		65		70		Inspektorat Kabupaten
		Persentase Rekomendasi Pengawasan Kinerja yang Ditindak Lanjuti	70	70		75		80		85		90		Inspektorat Kabupaten
		Persentase Rekomendasi Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang ditindakanjuti	70	70		75		80		85		90		Inspektorat Kabupaten
		Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan PDTT yang ditindaklanjuti	70	90		92		94		96		98		Inspektorat Kabupaten
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.587.421.586		1.609.630.893		1.631.935.267		1.644.947.732		1.663.809.622	Inspektorat Kabupaten

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya peran aktif perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian interen	Persentase perangkat daerah yang melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi sesuai ketentuan	90	100		100		100		100		100		Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian korupsi	Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK	90,35	90,5		90,75		91,00		91,25		91,50		Inspektorat Kabupaten
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Zona Integritas	25	25		50		75		80		85		Inspektorat Kabupaten
	Meningktanya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan	Rata-rata Nilai Sakip perangkat daerah	68,95	69,00		72,00		75,00		78,00		81,00		Inspektorat Kabupaten
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**98.133.085.971**		**99.506.046.904**		**100.884.884.799**		**101.689.304.585**		**102.855.331.024**	
7.01	**KECAMATAN**				**98.133.085.971**		**99.506.046.904**		**100.884.884.799**		**101.689.304.585**		**102.855.331.024**	
	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT				**14.338.660.406**		**14.539.269.818**		**14.740.737.938**		**14.858.275.279**		**15.028.648.574**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.966.497.478		10.105.936.807		10.245.973.007		10.327.670.710		10.446.093.558	Kantor Camat Tanah Grogot
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Tanah Grogot
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.256.251.232		1.273.827.199		1.291.478.400		1.301.776.184		1.316.703.078	Kantor Camat Tanah Grogot
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Tanah Grogot
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.196.662.678		2.227.395.759		2.258.260.392		2.276.266.948		2.302.367.898	Kantor Camat Tanah Grogot
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Tanah Grogot
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				381.930.000		387.273.508		392.639.890		395.770.659		400.308.787	Kantor Camat Tanah Grogot
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Tanah Grogot
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				154.731.300		156.896.117		159.070.198		160.338.566		162.177.098	Kantor Camat Tanah Grogot
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Tanah Grogot

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		potensi konflik di Kecamatan												
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				382.587.718		387.940.428		393.316.051		396.452.212		400.998.155	Kantor Camat Tanah Grogot
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	N/A	100		100		100		100		100		Kantor Camat Tanah Grogot
	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG				**9.040.704.090**		**9.167.190.825**		**9.294.218.984**		**9.368.327.745**		**9.475.750.229**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.169.446.658		7.269.752.993		7.370.488.689		7.429.258.315		7.514.446.346	Kantor Camat Pasir Belengkong
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Pasir Belengkong
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				560.750.750		568.596.105		576.475.042		581.071.646		587.734.539	Kantor Camat Pasir Belengkong
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Pasir Belengkong
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				653.321.410		662.461.903		671.641.522		676.996.950		684.759.775	Kantor Camat Pasir Belengkong
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Pasir Belengkong
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				375.122.500		380.370.766		385.641.496		388.716.464		393.173.704	Kantor Camat Pasir Belengkong
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Pasir Belengkong
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				209.824.272		212.759.883		215.708.059		217.428.038		219.921.189	Kantor Camat Pasir Belengkong
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Pasir Belengkong
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				72.238.500		73.249.175		74.264.176		74.856.332		75.714.676	Kantor Camat Pasir Belengkong
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Pasir Belengkong

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pemerintahan desa tepat waktu												
	KANTOR CAMAT KUARO				**11.883.679.951**		**12.049.942.208**		**12.216.916.150**		**12.314.329.445**		**12.455.532.433**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.862.972.526		8.986.972.652		9.111.503.561		9.184.155.413		9.289.466.075	Kantor Camat Kuaro
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Kuaro
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				569.978.556		577.953.015		585.961.609		590.633.856		597.406.394	Kantor Camat Kuaro
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Kuaro
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.147.786.745		1.163.845.206		1.179.972.406		1.189.381.081		1.203.019.190	Kantor Camat Kuaro
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Kuaro
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				707.934.774		717.839.352		727.786.326		733.589.433		742.001.179	Kantor Camat Kuaro
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Kuaro
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				411.925.000		417.688.163		423.475.994		426.852.640		431.747.171	Kantor Camat Kuaro
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Kuaro
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				183.082.350		185.643.820		188.216.254		189.717.022		191.892.424	Kantor Camat Kuaro
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Kuaro
	KANTOR CAMAT LONG IKIS				**10.193.985.439**		**10.336.607.508**		**10.479.840.070**		**10.563.402.545**		**10.684.528.427**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.953.648.423		8.064.926.372		8.176.680.647		8.241.878.557		8.336.384.546	Kantor Camat Long Ikis

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Long Ikis
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				353.614.452		358.561.803		363.530.331		366.428.991		370.630.671	Kantor Camat Long Ikis
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Long Ikis
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.170.292.805		1.186.666.144		1.203.109.569		1.212.702.732		1.226.608.260	Kantor Camat Long Ikis
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Long Ikis
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				468.130.000		474.679.516		481.257.067		485.094.438		490.656.802	Kantor Camat Long Ikis
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Long Ikis
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				132.122.260		133.970.757		135.827.166		136.910.203		138.480.092	Kantor Camat Long Ikis
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Long Ikis
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				116.177.499		117.802.916		119.435.290		120.387.624		121.768.056	Kantor Camat Long Ikis
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Long Ikis
	KANTOR CAMAT LONG KALI				**12.536.285.800**		**12.711.678.539**		**12.887.822.046**		**12.990.584.903**		**13.139.542.214**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.105.977.414		9.233.377.374		9.361.322.670		9.435.966.490		9.544.164.559	Kantor Camat Long Kali
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Long Kali
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.171.284.594		1.187.671.809		1.204.129.170		1.213.730.463		1.227.647.775	Kantor Camat Long Kali

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Long Kali
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.285.048.274		1.303.027.135		1.321.082.954		1.331.616.794		1.346.885.857	Kantor Camat Long Kali
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Long Kali
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				487.113.750		493.928.864		500.773.150		504.766.135		510.554.065	Kantor Camat Long Kali
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Long Kali
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				274.070.042		277.904.503		281.755.377		284.001.993		287.258.519	Kantor Camat Long Kali
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Long Kali
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				212.791.726		215.768.854		218.758.725		220.503.028		223.031.439	Kantor Camat Long Kali
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Long Kali
	KANTOR CAMAT BATU SOPANG				**7.507.899.623**		**7.612.941.186**		**7.718.432.382**		**7.779.976.386**		**7.869.185.947**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.625.806.068		5.704.515.627		5.783.562.103		5.829.678.147		5.896.524.497	Kantor Camat Batu Sopang
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Batu Sopang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				786.236.058		797.236.134		808.283.296		814.728.256		824.070.386	Kantor Camat Batu Sopang
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Batu Sopang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				253.164.000		256.705.968		260.263.098		262.338.342		265.346.461	Kantor Camat Batu Sopang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Batu Sopang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				419.717.797		425.589.987		431.487.313		434.927.838		439.914.964	Kantor Camat Batu Sopang
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Batu Sopang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				263.621.300		267.309.574		271.013.636		273.174.602		276.306.974	Kantor Camat Batu Sopang
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Batu Sopang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				159.354.400		161.583.896		163.822.936		165.129.201		167.022.665	Kantor Camat Batu Sopang
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Batu Sopang
	KANTOR CAMAT MUARA KOMAM				**9.965.902.323**		**10.105.333.326**		**10.245.361.163**		**10.327.053.988**		**10.445.469.765**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.263.338.694		7.364.958.654		7.467.013.599		7.526.552.879		7.612.856.544	Kantor Camat Muara Komam
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Muara Komam
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				764.700.247		775.399.020		786.143.588		792.412.014		801.498.254	Kantor Camat Muara Komam
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Muara Komam
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				852.235.350		864.158.809		876.133.307		883.119.279		893.245.618	Kantor Camat Muara Komam
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Muara Komam
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				744.002.100		754.411.289		764.865.034		770.963.793		779.804.095	Kantor Camat Muara Komam

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Muara Komam
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				199.211.800		201.998.934		204.797.997		206.430.983		208.798.036	Kantor Camat Muara Komam
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Muara Komam
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				142.414.132		144.406.620		146.407.638		147.575.040		149.267.218	Kantor Camat Muara Komam
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Muara Komam
	KANTOR CAMAT BATU ENGAU				**9.201.779.119**		**9.330.519.420**		**9.459.810.797**		**9.535.239.928**		**9.644.576.321**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.604.283.964		7.710.674.020		7.817.519.482		7.879.853.574		7.970.208.382	Kantor Camat Batu Engau
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Batu Engau
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				280.650.000		284.576.520		288.519.847		290.820.400		294.155.110	Kantor Camat Batu Engau
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Batu Engau
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				44.460.400		45.082.437		45.707.136		46.071.589		46.599.871	Kantor Camat Batu Engau
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Batu Engau
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				418.700.000		424.557.950		430.440.976		433.873.157		438.848.189	Kantor Camat Batu Engau
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Batu Engau
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN				399.942.655		405.538.175		411.157.647		414.436.070		419.188.225	Kantor Camat Batu Engau

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Batu Engau
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				453.742.100		460.090.318		466.465.709		470.185.138		475.576.544	Kantor Camat Batu Engau
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Batu Engau
	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN				**7.723.824.924**		**7.831.887.457**		**7.940.412.553**		**8.003.726.546**		**8.095.501.752**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.542.642.774		4.606.198.006		4.670.025.287		4.707.262.388		4.761.238.492	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	N/A	76		80		84		87		90		Kantor Camat Tanjung Harapan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.228.709.750		2.259.891.195		2.291.206.112		2.309.475.366		2.335.957.102	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Tanjung Harapan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				297.660.000		301.824.503		306.006.833		308.446.821		311.983.645	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	N/A	90		92		94		95		96		Kantor Camat Tanjung Harapan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				367.260.000		372.398.263		377.558.521		380.569.037		384.932.854	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Tanjung Harapan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				154.196.400		156.353.732		158.520.298		159.784.282		161.616.458	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Tanjung Harapan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				133.356.000		135.221.758		137.095.502		138.188.652		139.773.201	Kantor Camat Tanjung Harapan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Tanjung Harapan
	KANTOR CAMAT MUARA SAMU				**5.740.364.296**		**5.820.676.617**		**5.901.332.716**		**5.948.387.820**		**6.016.595.362**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.327.392.607		4.387.936.316		4.448.739.182		4.484.211.828		4.535.630.309	Kantor Camat Muara Samu
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Kantor Camat Muara Samu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				489.039.675		495.881.734		502.753.081		506.761.853		512.572.668	Kantor Camat Muara Samu
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan	Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		Kantor Camat Muara Samu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				257.763.424		261.369.742		264.991.497		267.104.444		270.167.213	Kantor Camat Muara Samu
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif	90	90		92		94		95		96		Kantor Camat Muara Samu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				309.357.388		313.685.547		318.032.233		320.568.108		324.243.921	Kantor Camat Muara Samu
	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	7	8		9		10		11		12		Kantor Camat Muara Samu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				112.625.276		114.200.994		115.783.458		116.706.673		118.044.897	Kantor Camat Muara Samu
	Menurunnya konflik sosial di Kecamatan	Persentase penanganan potensi konflik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Muara Samu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				244.185.926		247.602.284		251.033.265		253.034.914		255.936.354	Kantor Camat Muara Samu
	Meningkatnya desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	Persentase desa yang menyampaikan laporan pemerintahan desa tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Kantor Camat Muara Samu
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**15.589.387.613**		**15.807.495.705**		**16.026.537.411**		**36.154.327.253**		**16.568.892.990**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**15.589.387.613**		**15.807.495.705**		**16.026.537.411**		**36.154.327.253**		**16.568.892.990**	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**15.589.387.613**		**15.807.495.705**		**16.026.537.411**		**36.154.327.253**		**16.568.892.990**	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.505.905.555		7.610.919.221		7.716.382.398		7.777.910.055		7.867.095.922	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	74	76		80		84		87		90		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.084.753.229		2.113.920.606		2.143.212.835		2.160.302.043		2.185.073.274	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.355.851.490		2.388.811.750		2.421.913.097		22.441.224.561		2.698.548.193	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan politik pada masyarakat dan kader Partai Politik	1.50	1.60		1.70		1.80		1.90		2.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				356.961.800		361.955.983		366.971.544		369.897.643		374.139.096	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	13	15		16		17		18		19		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1.289.817.770		1.307.863.360		1.325.986.194		1.336.559.130		1.351.884.865	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.996.097.769		2.024.024.785		2.052.071.343		2.068.433.821		2.092.151.640	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			TOTAL:	**4.195.770.000.000**		**4.296.466.232.830**		**4.347.999.549.162**		**4.402.692.112.105**		**4.438.247.442.972**		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja yang disajikan merupakan indikator kinerja makro yang menjadi mandatory, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang ditetapkan dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta indikator sasaran Pembangunan yang ditetapkan oleh Nasional. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penetapan target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Paser tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.2.
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Data Awal 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia**	Poin	75,13	75,66	76,48	76,99	77,5	78,01	78,22
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	%	3,77	3,78-3,80	3,75-5,00	3,92-5,35	4,09-5,65	4,25-5,75	4,80-5,90
3	PDRB Per Kapita**	Juta Rp.	193,14	214,63	231,08 - 250,59	245,20-280,35	260,00-310,45	330,42-423,42	350,00-450,0
4	Penurunan Intensitas Emisi GRK**	%	35,29	38,09	43,87	49,65	55,42	61,2	65,6
5	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	4,53	4,16-4,31	3,50-4,20	3,40-4,10	3,35-4,00	3,30-3,90	3,20-3,50
6	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi*	%	6,46	7,01	7,11	7,21	7,31	7,41	7,53
7	Tingkat Kemiskinan**	%	8,63	8,00–8,38	7,90-8,30	7,03-7,88	6,39-6,63	6,21-6,39	5,80-6,20
8	Gini Ratio**	Indeks	0,271	0,270–0,271	0,265-0,270	0,263-0,270	0,262-0,270	0,261-0,270	0,255–0,264
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Nilai	72,38	79,8	79,97	80,14	80,31	80,48	80,65

Keterangan:
***Indikator Utama Pembangunan (IUP)**
**** Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045**

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi dan misi daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangan oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Paser.

Tabel IV.3.
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	79,69	81,72	83,87	84,11	86,01	90,62	91,72
2	Indeks Pembangunan Manusia**	Poin	75,13	75,66	76,48	76,99	77,5	78,01	78,22
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	%	3,77	3,78-3,80	3,75-5,00	3,92-5,35	4,09-5,65	4,25-5,75	4,80-5,90
4	Tingkat Kemiskinan**	%	8,63	8,00–8,38	7,90-8,30	7,03-7,88	6,39-6,63	6,21-6,39	5,80-6,20
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	65,46	66,31	67,05	67,8	68,56	69,33	70,11
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)	%	61,38	62,56	63,68	65,95	68,23	70,50	72,78
7	Indeks Integritas Pemerintah*	Poin	74,00	76,49	78,98	80,47	83,96	85,31	86,45
8	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,60	1,65	1,70	1,80	1,90	2,05	2,20
9	Indeks Pelayanan Publik*	Poin	4,03	4,11	4,27	4,43	4,59	4,75	4,86
10	Indeks Pendidikan	Indeks	66,84*	70,39	71,17	72,28	73,39	74,14	75,22
11	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi)	Nilai	76,59	77,74	78,89	80,04	81,19	82,34	83,98
12	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	Nilai	55,24	57,99	60,74	63,48	66,24	68,99	71,74

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Indeks Kesehatan	Indeks	81,80	82,10	82,40	82,80	83,10	83,40	83,80
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	%	23,40	22,30	19,70	17,10	15,50	14,20	13,20
15	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	4,53	4,16-4,31	3,50-4,20	3,40-4,10	3,35-4,00	3,30-3,90	3,20-3,50
16	PDRB Per Kapita**	Juta Rp.	193,14	214,63	231,08 - 250,59	245,20-280,35	260,00-310,45	330,42-423,42	350,00-450,0
17	Indeks Ketimpangan Gender*	Indeks	0,527	0,48	0,472	0,465	0,449	0,445	0,439
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan*	Indeks	N/A	55,88	56,51	57,15	57,78	58,43	59,07
19	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	62,20	70,10	75,20	78,60	80,80	82,20	83,20
20	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan**	%	16,41	16,50	16,57	17,49	18,4	19,32	20,23
21	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2,870	3,370	3,870	4,370	4,870	5,620	6,370
22	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi**	%	6,46	7,01	7,11	7,21	7,31	7,41	7,53
23	Indeks Daya Saing Daerah**	Indeks	3,31	3,54	3,79	4,05	4,34	4,64	4,97
24	Disparitas Harga*	%	11,97	11,55	11,13	10,71	10,29	9,87	9,45
25	Gini Ratio**	Indeks	0,271	0,270–0,271	0,265-0,270	0,263-0,270	0,262-0,270	0,261-0,270	0,255–0,264
26	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Poin	65,79	66,64	67,38	68,13	68,89	69,66	70,44
27	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Poin	55,35	56,20	56,94	57,69	58,45	59,22	60,00
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Poin	70,01	70,86	71,60	72,35	73,11	73,88	74,66
29	Penurunan Intensitas Emisi GRK**	%	32,59	38,09	43,87	49,65	55,42	61,20	65,60

Keterangan:

***Indikator Utama Pembangunan (IUP)**

**** Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045**

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Indikator aspek geografi dan demografi menggambarkan Indikator pada aspek kewilayahan dan kependudukan. Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Selaras dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai fokus utama dalam sistem pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah yang paling strategis dan memiliki daya ungkit tertinggi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (Indikator Kinerja Kunci (IKK)) bertujuan untuk:

1. **Mempertajam Fokus:** Mengarahkan perhatian dan sumber daya pada aspek-aspek pembangunan yang paling krusial dan memiliki dampak signifikan;
2. **Meningkatkan Akuntabilitas:** Memberikan tolok ukur yang jelas dan mudah dipahami bagi daerah, perangkat daerah, maupun publik mengenai keberhasilan kinerja;
3. **Mendorong Sinergi:** Menjadi simpul koordinasi antar-perangkat daerah, memastikan setiap sektor berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) bersama.

Pemilihan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan kriteria Relevansi Strategis, dimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) harus secara langsung merepresentasikan sasaran utama RPJMD dan memiliki kontribusi signifikan terhadap visi pembangunan daerah dan Dampak Jangka Menengah dan Panjang, mengukur hasil (outcome) atau dampak akhir (ultimate outcome), bukan sekadar keluaran aktivitas. Di samping itu pemilihan IKK juga didasarkan atas Keterukuran dan Ketersediaan Data sehingga valid, reliabel, dan tersedia secara periodik serta mempengaruhi Perangkat Daerah dalam menterjemahkan secara logis melalui kebijakan dan programnya. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dipilih sebagai cerminan dari kinerja keseluruhan suatu fungsi atau sektor pembangunan. Sehingga pada akhirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah, memastikan adanya **benang merah yang kuat antara kinerja tingkat perangkat daerah dengan kinerja pembangunan daerah secara makro**. Ini merupakan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan yang

ambisius dan berkelanjutan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel IV.4.

Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan*	%	64	68	72	75	78	80
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah*	%	65	75	80	85	90	95
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan*	%	8,57	8,25	7,93	7,62	7,30	6,98
5	Kapasitas Air Baku*	m3/detik	8,24	8,68	9,12	9,56	10	10,44
6	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	poin	179,98	171,98	163,98	155,98	147,98	139,98
7	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif*	%	13,88	14,09	15,65	17,4	18,98	20,75
8	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan*	%	13,60	18,99	27,1	34,63	42,46	48,21
9	Cakupan layanan air minum layak Perpipaan*	%	87,17	88,17	88,67	89,17	89,67	90,17
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak*	%	93,61	94,89	96,17	97,45	98,72	100
11	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	%	93,52	93,78	94,04	94,3	94,56	94,82
12	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
14	Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Ketersediaan	Poin	98,25	99,08	99,31	99,54	99,77	100
15	Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Konsumsi	Poin	89,00	91,70	93,80	95,90	97,90	100
16	Persentase penanganan desa rawan pangan	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat	%	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100
18	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	12,12	27,27	45,45	63,64	81,82	100
19	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	6	25	44	63	81	100
20	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100	100	100	100
21	Persentase penurunan kasus pengaduan isu lingkungan	%	25,5	25	24	23	22	21
22	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	%	62,58	63,58	65,22	66,86	68,5	70
23	Persentase instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan	%	39,02	39,02	41,46	43,90	46,43	48,78
24	Persentase data kependudukan yang akurat dan termutakhirkan secara berkala	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
26	Rasio Konektivitas Darat	rasio	0,83	0,83	0,83	0,93	0,93	1,00
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Usia Harapan Hidup (UHH)*	Tahun	74,30	74,50	74,70	74,90	75,10	75,30
2	Jumlah Kematian Ibu*	Jiwa	6	5	5	5	4	4
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita*	%	20,00	18,50	17,00	15,50	14,00	12,50
4	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)*	%	65	66	67	68	70	70
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)*	%	85,67	86,00	86,34	86,67	87,00	87,33
6	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional*	%	94	95,50	97	98,5	100	100
7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :							
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat*	%	74,98	78,69	82,42	86,13	89,84	93,55
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat*	%	74,98	78,69	82,42	86,13	89,84	93,55
	c. Numerasi SD/Sederajat*	%	68,53	73,46	78,54	83,47	88,39	93,32
	d. Numerasi SMP/Sederajat*	%	68,53	73,46	78,54	83,47	88,39	93,32
8	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun*	Tahun	9,35	9,50	9,75	10	10,16	10,4
9	Harapan Lama Sekolah*	Tahun	14,12	14,22	14,32	14,41	14,50	14,60
10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi*	%	9,00	9,06	9,13	9,19	9,25	9,31
11	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi*	%	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50
12	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*	%	92,23	92,34	92,46	92,57	92,68	92,79
13	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)*		65,00	66,20	67,30	68,40	69,40	70,40
14	Indeks Perlindungan Anak	Poin	64,62	66,13	67,63	69,14	70,64	72,15
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	76,55	79,59	82,63	85,6	88,56	91,53

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	27,26	31,36	35,46	39,56	43,66	47,76
17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,95	99,97	99,97	99,98	99,99	99,99
18	APtS SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	97,39	98,16	98,55	98,94	99,33	99,61
20	APtS SMP/MTs	%	0,28	0,28	0,25	0,2	0,15	0,15
21	Indeks distribusi guru		70	72	74	76	78	80
22	Persentase merokok penduduk 10 - 21 tahun	%	N/A	9	5	4	3	2
23	persentase kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	%	9,68	9,33	9,15	8,98	8,81	8,65
24	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	60,90	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00
25	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	84	86	86,34	86,67	87	87,33
26	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	57,10	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00
27	Persentase Usia Lanjut yang Mandiri	%	91,37	92,7	93,4	94,1	94,8	95,5
28	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	2,20	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00
29	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0	40	50	60	65	70
30	Prevalensi wasting	%	12,40	10,60	9,70	8,90	8,20	7,70
31	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal lengkap K6	%	81,77	100	100	100	100	100
32	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	%	28	25	24	23	21,5	20
33	Persentase Faskes telah menerapkan sistem rujukan terpadu	%	28,57	38,09	52,38	61,9	71,43	77,27
34	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat kesehatan diatas 70 persen	%	23,80	33,30	38,10	47,60	57,10	66,70
35	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan perbekalan kesehatan (obat dan BMHP) sesuai standar	%	90	90	100	100	100	100
36	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Komunitas adat terpencil	%	48	70	75	80	85	90
37	Pengeluaran Perkapita Perempuan(ribu rupiah/tahun)	ribu rupiah/tahun	3386	3533	3649	3765	3882	4000
38	Rasio KDRT	Kasus per 1000 penduduk usia 15-64 tahun	6,02	5,50	5,10	4,92	4,64	4,36
39	Nilai Evaluasi kabupaten layak anak	Poin	600	600	650	650	700	700

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
40	Rata-rata Persentase pertumbuhan PADes yang bersumber dari kerjasama Desa	%	2.94	4.41	5.88	7.35	8.82	10.29
41	Persentase Bumdes berstatus maju	%	N/A	2,88	4,32	7,19	10,79	14,39
42	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	81,20	81,70	82,30	82,80	83,30	83,80
43	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	11,40	10,80	10,20	9,70	9,20	8,80
44	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	20,10	25,50	27,90	29,10	29,60	29,80
45	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja		88,30	88,90	89,50	90,00	90,50	91,00
46	Indeks Lansia Berdaya		57,80	58,70	59,50	60,30	61,10	61,90
47	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	60	60	62	64	66	68
48	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	20	20	21	22	23	24
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,4	16,56	20,73	24,89	29,05	33,21
2	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		4,84	4,87	4,89	4,91	4,94	4,95
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81	82,52	83,55	84,59	85,64	86,7
4	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB*	%	6,92	7,15	7,37	7,6	8,01	8,35
5	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB*	%	0,32	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara*	Orang	30	33	37	41	46	52
7	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif *	Unit	109	115	121	126	132	138
8	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas*	%	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
9	Rasio Kewirausahaan Daerah*	%	6,62	6,93	7,24	7,55	7,86	8,17
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	%	1,33	1,72	2,10	2,49	2,87	3,26
11	Return on Asset (ROA) BUMD*	%	1,24	1,52	1,81	2,09	2,37	2,65
12	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal*	%	49,31	51,79	54,27	56,75	59,23	61,71
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	%	46,75	47,29	47,83	48,38	48,93	49,5
14	Indeks Inovasi Daerah*	Poin	59,2	61,9	64,6	67,3	70	72,7
15	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir*	%	79	80	81	82	83	84

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB*	%	22,69	22,79	22,9	23	23,11	23,21
17	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB*	%	64,15	64,25	64,35	64,45	64,55	64,65
18	Persentase Desa Mandiri*	%	45,32	52,52	59,71	66,91	74,10	81,29
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*	%	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18
20	Indeks Perkembangan Harga*	%	3,47-4,17	3,35-4,13	3,22-4,10	3,10-4,06	2,37-4,02	2,85-3,98
21	Rasio wirausaha pemuda	%	11,22	11,23	11,24	11,25	11,26	11,27
22	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,62	0,65	0,68	0,70	0,72	0,75
23	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,03	1,05	1,08	1,10	1,12	1,13
24	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	2,00	2,50	2,70	2,90	3,15	3,30
25	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	1,08	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38
26	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,80	2,50	3,20	3,90	4,60	5,30
27	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	5	6	8	10	11	12
28	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	5,16	5,63	6,10	6,52	6,92	7,35
29	Persentase Peningkatan Produk Ekspor Daerah	%	3	5	6	7	8	10
30	Persentase Pertumbuhan Industri Baru Sektor Pengolahan	%	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Pembangunan Hukum*	Poin	97,42	97,92	98,42	98,92	99,42	100
2	Jumlah kejadian tindak kriminal*	Kasus	301	296	291	285	280	275
3	Jumlah Kejadian Konflik SARA*	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB*	%	9,02	10,15	11,27	12,4	13,52	14,65
5	Total Kredit/PDRB*	%	6,31	8,26	10,21	12,16	14,11	16,06
6	Indeks Penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (IPM satlinmas)	%	80	85	90	95	100	100
7	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survey)	%	N/A	60	65	70	75	80
8	Tingkat Kematangan pembangunan/ pengembangan aplikasi	Nilai	1,5	2	2,5	3	3,5	4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Tingkat Kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah	Nilai	2	2,5	3	3,5	4	4,5
10	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD		20	20	20	20	20	20
11	Indeks dimensi penyerapan anggaran		13,33	14	15	16	17	18
12	Rata-rata tingkat pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi Jabatan Berdasarkan jenis Jabatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Nilai	26	29	31	33	35	37
14	Nilai Sub Aspek Penyusutan Arsip	Nilai	11	14	16	18	20	22
15	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	%	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS PAUD)	%	76,55	79,59	82,63	85,6	88,56	91,53
	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,24	99,4	99,56	99,72	99,88	100
	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS SD/MI)	%	99,86	99,97	99,97	99,98	99,99	99,99
	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS SMP/MTs)	%	97,78	98,16	98,55	98,94	99,33	99,61
	Persentase usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS Kesetaraan)	%	27,26	31,36	35,46	39,56	43,66	47,76
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,71	66,71	69,21	71,71	74,21	76,71
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	55,73	58,63	61,53	64,43	67,33	70,23
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	71,23	73,43	74,53	74,53	75,63	77,83
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,20	64,70	66,20	67,70	69,20	70,70

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60,55	71,52	86,14	100	100	100
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	%	76,29	77,19	28,09	78,99	79,89	80,79
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	%	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91	80,41
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	%	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91	80,41
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	%	71,56	72,56	73,56	74,56	75,56	76,56
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	%	60,77	63,27	65,77	68,28	70,77	73,27
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	%	60,07	62,47	64,87	67,27	69,67	72,07
	Indeks Pembangunan Kebudayaan							
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah kematian balita	%	56,00	51,00	46,00	41,00	36,00	31,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	3,15	5,03	6,29	9,44	12,58	15,10
	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,26	1,29	3,87	5,16	6,45	7,74
	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	32,71	33,71	34,22	35,22	38,24	40,25
	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota terkelola denagn baik	%	73,00	76,00	78,00	81,00	85,00	88,00
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	87,67	88,17	88,67	89,17	89,67	90,17
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	%	1,00	2,00	3,50	5,00	7,00	10,00
	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	46,43	51,15	55,86	60,57	61,46	64,51
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	28,00	35,00	42,00	48,00	55,00	62,00
	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	80,00
	Jumlah hari layanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	20	20	20	20	20	20
	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00	100,00
	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	70,00	75,00	80,00	90,00	95,00	100,00
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	58,19	60,21	62,57	64,94	67,3	69,66
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	65,58	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
	Persentase Pelanggaran Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	19,94	27,95	35,97	43,98	51,99	60,00
	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	8,65	16,92	25,19	33,46	41,74	50,00
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	3,50	4,01	4,23	4,45	4,67	4,89
	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	55,99	58,79	61,59	64,40	67,20	70,00
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	73,00	73,00	74,00	74,00	74,50	75,00
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	11,63	12,88	13,5	14,75	15,1	15,75
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah (dalam miliar)	113,434	115,658	117,882	120,106	122,331	124,555
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	2,75	2,75	2,80	2,85	3,10	3,12
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	27,00	30,00	30,00	32,00	33,00	35,00
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	74,56	75,27	75,97	76,67	77,37	78,07
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	41,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
	Persentase ARG Daerah	%	14,18	14,89	15,63	16,41	17,23	18,09
	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	50	55	60	65	70	75
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	57,58	57,6	57,63	57,67	57,72	57,78
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5,55	5,55	4,86	3,47	2,08	0

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100
	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	38,81	40,45	42,09	43,18	44,81	46,45
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	6	25	44	63	81	100
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	79,8	79,97	80,14	80,31	80,48	80,65
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	91,67	93,75	93,75	96,88	96,88	100
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Poin	2,20	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60,00	63,00	65	66	68	70
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,50	13,00	12,8	12	11	10
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	21,20	19,00	17,60	16,70	16,10	15,70

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan	%	98,00	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
	Konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	0,86	0,86	0,86	0,93	0,93	0,95
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	76,17	81,61	86,69	91,42	96,05	100
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	0	0	50	50	0	0
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	79,57	82,00	83,00	84,00	84,50	85,00
	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	13,59	14,03	14,50	14,98	15,48	16
	Pertumbuhan Wirausaha	%	1,30	1,36	1,43	1,51	1,60	1,7
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1,00	1,50	1,70	1,85	2,00	2,10
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	80	90	91	92	93	94
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,0082	0,0089	0,0104	0,0106	0,0110	0,0115
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							
	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,00	2,25	2,35	2,50	2,75	3,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	N/A	7,59	12,05	16,52	20,98	25,45
	Persentase jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	N/A	14,75	27,25	39,75	52,25	64,75
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	60,00	60,50	61,00	61,25	61,50	61,75
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	77,00	77,50	78,00	78,25	78.50	78,75
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	40,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
	Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100	100	100	100
	Produksi Perikanan Budi Daya	%	100	100	100	100	100	100
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	7,14	10,00	12,12	13,51	14,63	15,22
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	**%**	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,08	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,80	2,50	3,20	3,90	4,60	5,30
	Persentase Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	5,16	5,63	6,10	6,52	6,92	7,35
	Persentase Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	5	6	8	10	11	12
25	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
25.1	**SEKRETARIAT DAERAH**							
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	85,88	86,97	88,06	89,15	90,24	91,33
25.2	**SEKRETARIAT DPRD**							
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100
25.3	**PERENCANAAN**							
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100
25.4	**KEUANGAN**							
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,65	9,16	9,67	10,17	10,81	11,23
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	13,22	13,52	13,82	14,22	14,67	15,17
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	15,76	14,53	13,3	12,07	10,84	9,61
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	14,54	17,93	21,08	24,38	27,58	30,85
25.5	**KEPEGAWAIAN**							
	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	70,01	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
25.6	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	10,00	15,00	25,00	30,00	35,00	40,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	75,00	78,00	80,00	85,00	90,00	95,00
25.7	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Skor	3,315	3,320	3,323	3,330	3,340	3,355
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	3000	3010	3015	3020	3025	3030
	Manajemen Risiko Indeks	Poin	3,55	3,62	3,65	3,68	3,70	3,72
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	91,75	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00

Keterangan:

***Indikator Utama Pembangunan (IUP)**

****** **Sasaran visi RPJPD Kab. Paser 2025-2045**

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

BAB V
PENUTUP

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
2025-2029

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Paser lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Paser serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Paser serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029, serta pencapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Selanjutnya, keberhasilan pencapaian visi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 juga sangat dipengaruhi oleh keterpaduan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur maupun RPJMD Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur.
2. Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser wajib diturunkan ke dalam indikator tujuan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah. Adapun target kinerja pada setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan pemutakhiran melalui RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan dinamika pembangunan terkini, namun tetap mempertahankan target akhir tahun 2030 sebagai target minimal.

3. Pemerintah Kabupaten Paser melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, meliputi antara lain :
   a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program, dan program prioritas melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJMD secara periodik;
   b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
4. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.
5. Melaksanakan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
6. Peraturan Daerah tentang RPJMD disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau nonelektronik.
7. Pemerintah Kabupaten Paser, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
8. Lembaga vertikal maupun lembaga-lembaga lokal non-pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Paser, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan partisipasinya terhadap RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.
9. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan dalam upaya pencapaian visi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.
10. Pada saat Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 ditetapkan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan dan peran serta para pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Paser dalam kerangka "Olo Manin Aso Buen si Olondo", dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Paser yang semakin sejahtera.

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680816 199803 1 007